KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DJPb
Indonesian Treasury

InTress

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Kanwil DJPb Prov. Kepri

TAHUNAN 2023

Korespondensi
Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II
Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau
Jalan Sultan Muhammad Syah Dompak
Kota Tanjungpinang, Prov. Kep. Riau, 29124
djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/
djpbkepri djpbkepri Kanwil DJPb Kepulauan Riau

Batik Gonggong

Gonggong merupakan hewan laut yang diolah menjadi makanan khas di Provinsi Kepulauan Riau

Memasak gonggong wahai anak dara
Senang hati sebab harum aromanya
Kami sajikan KFR Tahunan 2023
S'moga bermanfaat bagi para pembaca

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Indra Soeparjanto
(Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepulauan Riau)

Ketua
Anisah Alfada
(Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II)

Penyunting
Rolly Indra
(Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II A)

Penulis
Muhadi
(Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B)

Maretika Pujilestari
(Kasi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II C)

Lorensia Kristina Br Siregar
(Pelaksana Seksi PPA II A)

Erika Krissanta
(Pelaksana Seksi PPA II B)

M. Rizky Firdaus
(Pelaksana Seksi PPA II C)

Desain
Lorensia Kristina Br Siregar
(Pelaksana Seksi PPA II A)

Aset Visual
Foto
Dinas Pariwisata Prov. Kepri
Kanwil DJPb Prov. Kepri
Ilustrasi/Grafis
Canva
Kanwil DJPb Prov. Kepri

Indra Soeparjanto

Kepala Kanwil DJPb
Prov. Kepulauan Riau

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga **Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2023** dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. KFR merupakan aktivitas telaah makro pelaksanaan anggaran yang menjadi salah satu *output* pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) untuk mengkaji keterkaitan antara implementasi kebijakan fiskal dengan pencapaian *output* dan *outcome* yang terwujud dalam capaian indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

KFR diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk pembangunan perekonomian daerah dan menjadi referensi yang kredibel atas implementasi kebijakan fiskal di daerah untuk peningkatan kualitas tata kelola fiskal pusat dan daerah.

Penyusunan kajian ini juga akan meningkatkan sinergi antar *stakeholders* untuk bersama-sama berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. KFR Tahunan 2023 mencakup informasi perkembangan fiskal regional (APBN, APBD dan konsolidasian) dengan analisis tematik Sinergi Pusat-Daerah Dalam Upaya Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berdaya Saing.

Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung penyusunan KFR ini, terutama kepada Gubernur Kepulauan Riau, Kanwil DJP Provinsi Kepulauan Riau, Kanwil DJBC Khusus Provinsi Kepulauan Riau, KPU BC Batam, KPKNL Batam, BPS Provinsi Kepulauan Riau, Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau, OJK Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Suyono Saputro selaku *Local Expert* dan akademisi dari Universitas Internasional Batam, dan seluruh jajaran pemerintah daerah lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Kami berharap kedepannya sinergi yang telah terbangun dengan baik ini dapat semakin ditingkatkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan maupun pelaporan KFR masih terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif untuk peningkatan kualitas kajian kedepannya. Besar harapan kami bahwa KFR yang disusun dapat memberikan manfaat untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Februari 2024

Selayang Pandang

KEPULAUAN RIAU

Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah Utara; Malaysia dan provinsi Kalimantan Barat di sebelah Timur; provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di Selatan; negara Singapura, Malaysia dan provinsi Riau di sebelah Barat.

Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten, dan 2 kota, 52 kecamatan serta 299 kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 pulau besar, dan kecil yang 30% belum bernama, dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 8.201,72 km^2, sekitar 96% merupakan lautan, dan hanya sekitar 4% daratan.

Daftar Isi

TIM PENYUSUN iv

KATA PENGANTAR v

SELAYANG PANDANG KEPULAUAN RIAU vi

DAFTAR ISI vii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GRAFIK xii

DASHBOARD xv

RINGKASAN EKSEKUTIF xviii

BAB I PENDAHULUAN 2

1.1 Pendahuluan 2

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 2

1.3 Keselarasan PRJMN dengan RPJMD 5

1.4 Tantangan Sasaran Pembangunan 8

1.4.1 Tantangan Ekonomi Daerah 8

1.4.2 Tantangan Sosial Kependudukan 9

1.4.3 Tantangan Geografis Wilayah 10

1.4.4 Tantangan sebagai Daerah Berstatus *Free Trade Zone* 11

Kajian I 13

BAB II ANALISIS EKONOMI REGIONAL 15

2.1 Analisis Indikator Makro Ekonomi 15

2.1.1 Produk Domestik Regional 15

2.1.2 Inflasi 20

2.2 Analisis Indikator Kesejahteraan 22

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia 22

2.2.2 Tingkat Kemiskinan 25

2.2.3 Gini Ratio 27

2.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran 28

2.2.5 Nilai Tukar Petani (NTP) 30

2.2.6 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 31

2.3 Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional 32

Daftar Isi

Kajian II 35

BAB III ANALISIS FISKAL REGIONAL **37**

3.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi 37

3.1.1 Pendapatan Negara dan Hibah 38

3.1.2 Belanja Negara 45

3.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) 48

3.1.4 Surplus/Defisit APBN 51

3.1.5 Pengelolaan BLU Pusat 51

3.1.6 Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat 56

3.1.7 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah 58

3.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi 59

3.2.1 Pendapatan Daerah 60

3.2.2 Belanja Daerah 69

3.2.3 Surplus/Defisit *APBD* 71

3.2.4 Pembiayaan Daerah 71

3.2.5 Perkembangan BLU Daerah 72

3.2.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBD 74

3.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian 75

3.3.1 Pendapatan Konsolidasian 76

3.3.2 Belanja Konsolidasian 76

3.3.3 Surplus/Defisit 77

3.3.4 Pembiayaan Konsolidasi 78

Kajian III 79

BAB IV PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK DI TINGKAT WILAYAH **81**

4.1 Pendahuluan 81

4.2 Gambaran Umum Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Tingkat Wilayah 82

4.2.1 Alokasi Belanja K/L Mendukung DAK Fisik 82

4.3 Kendala dan Tantangan 90

4.3.1 Keseluruhan Bidang 90

Daftar Isi

4.3.2 Bidang jalan 91
4.3.3 Bidang Kesehatan dan KB 91
4.3.4 Bidang Pendidikan 92
4.3.5 Bidang Pertanian 93
4.4 Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda 93
4.4.1 Bidang Jalan 93
4.4.2 Pendidikan 94
4.4.3 Kesehatan 94
4.4.4 Bidang Pertanian 95
Kajian IV 96
BAB V ANALISIS TEMATIK 98
5.1 Pendahuluan 98
5.2 Analisis Tematik 100
5.2.1 Peningkatan Kualitas SDM/Tenaga Kerja 100
5.2.2 Upaya Peningkatan Investasi 109
5.2.3 Pengaruh Kualitas SDM dan Tingkat Investasi terhadap Tingkat Pengangguran 111
Kajian V 115
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 117
5.1 Kesimpulan 117
5.2 Rekomendasi 126
DAFTAR PUSTAKA 133
DAFTAR ISTILAH 135

Daftar Tabel

Tabel 1. 1 - Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kepulauan Riau....3
Tabel 1. 2 - Sasaran Indikator Kinerja Pembangunan Daerah....4
Tabel 1. 3 - Perbandingan Target Indikator Kinerja Pembangunan pada Tahun 2023 antara RKP dan RKPD Kepulauan Riau....4
Tabel 1.4 - Keselarasan Misi RPJMD 2021–2026 dan RPJMN 2020-2024....5
Tabel 1.5 - Penyelarasan Tujuan RPMJD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024....7
Tabel 1. 6 - Tantangan Ekonomi Kepulauan Riau....8
Tabel 1. 7 - Tantangan Sosial Kependudukan Kepulauan Riau....9
Tabel 2.1 - Perkembangan IPM Per Kab/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2020-2023....22
Tabel 2.2 – Hasil Reviu Ekfetifitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan Provinsi Kepri Tahun 2023....33
Tabel 3.1 – Pagu dan Realisasi I-Account APBN di Kepri, 2021 s.d. 2023 (Rp Miliar)....37
Tabel 3.2 – Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri, 2021 s.d. 2023 (Rp Miliar)....39
Tabel 3.3 – Perkembangan Perpajakan di Kepri, 2023....40
Tabel 3.4 – Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan di Kepri, 2023....41
Tabel 3.5 – Perkembangan Bea dan Cukai di Kepri, 2023 (Rp miliar)....42
Tabel 3.6 – Perkembangan PNBP di Kepri, 2023 (Rp miliar)....44
Tabel 3.7 – Perbandingan Proporsi Pagu dan Realisasi Belanja Seluruh 40 K/L dan 15 K/L Terbesar, 2021 s.d. 2023....46
Tabel 3.8 - Realisasi Belanja Lima Belas K/L Pagu Terbesar, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)....46
Tabel 3.9 - Realisasi Belanja Menurut Fungsi, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)....47
Tabel 3.10 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja TKD di Kepri, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)....48
Tabel 3.11 - Perkembangan Realisasi Belanja dan PNBP BLU lingkup Kepri, 2023 (Rp miliar) 54
Tabel 3.12 – Neraca BP Batam, 2020 s.d. 2022 (Rp miliar)....55
Tabel 3.13 - Nilai Aspek Maturitas BP Batam, 2021 s.d. 2022....55
Tabel 3.14 - Rincian Nama Satker Berpotensi Menjadi BLU lingkup Kepri....55
Tabel 3.15 – Perkembangan Penyaluran UMi, 2022 - 2023....58
Tabel 3.16 – Perkembangan I-Account APBD di Kepri, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)....59
Tabel 3.17 – Klaster Kondisi Kemandirian Fiskal....64
Tabel 3.18 – Realisasi Pendapatan Transfer, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)....68
Tabel 3.19 – Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)....68
Tabel 3.20 – Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)....70
Tabel 3.21 – Profil Keuangan dan Layanan BLUD di Provinsi Kepri....72
Tabel 3.22 – Perkembangan Realisasi Konsolidsi, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)....75
Tabel 3.23 – Rasio Belanja Konsolidasi per Kapita, 2021 s.d. 2023....77
Tabel 4.1 - Pagu Total dan Pagu Mendukung DAK Fisik di K/L Lingkup Kepri....82
Tabel 4.2 - Alokasi Belanja K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik....83

Daftar Tabel

Tabel 4.3 - Rincian Alokasi Belanja K/L per RO - Bidang Jalan (Miliar Rupiah) 84
Tabel 4.4 - Rincian Alokasi Belanja K/L per RO - Bidang Kesehatan dan KB (Miliar Rupiah) ... 85
Tabel 4.5 - Rincian Alokasi Belanja K/L per RO - Bidang Pendidikan (Miliar Rupiah) 88
Tabel 4.6 - Rincian Alokasi Belanja K/L per RO - Bidang Pertanian 88
Tabel 5.1 - Analisis Statistik Deskriptif Atas Indikator Kualitas SDM 100
Tabel 5.2 - Analisis Statistik Deskriptif Profil Ketenagakerjaan 102
Tabel 5.3 - Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Wilayah Kepri 105
Tabel 5.4 - Path Coefficients Hasil Pemodelan Smart PLS 112

Daftar Grafik

Grafik 2.1 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2019-2023 (% yoy) 15
Grafik 2.2 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2019-2023 (% qtq 15
Grafik 2.3 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2019-2023 (% ctc) 15
Grafik 2.4 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan IV 2023 (% ctc, % yoy, dan % qtq) 16
Grafik 2.5 – Perkembangan Nominal PDRB Triwulanan Provinsi Kepri Tahun 2021-2023 (Rp Triliun) 16
Grafik 2.6 - Growth and Share PDRB Berdasarkan Pengeluaran 17
Grafik 2.7 – Growth and Share PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha 19
Grafik 2.8 - Perkembangan Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2021-2023 (% yoy) 20
Grafik 2.9 - Perkembangan Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2021-2023 (% mtm) 20
Grafik 2.10 - Perkembangan Inflasi Regional Sumatera, 2023 (% mtm, % yoy, % ytd) 21
Grafik 2. 11 - Perkembangan IPM Provinsi Kepri, Nasional, dan Target Tahun 2020-2023 22
Grafik 2.12 - Indeks Pembangunan Manusia Regional Sumatera Tahun 2020-2023 23
Grafik 2.13 – Tren IPM Per Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023 23
Grafik 2.14 - Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kepri Tahun 2020-2023 24
Grafik 2.15 - Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepri Tahun 2019-2023 (ribu jiwa dan %) 25
Grafik 2.16 - Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepri Berdasarkan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2019-2023 (ribu jiwa dan %) 25
Grafik 2.17 - Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Regional Sumatera Tahun 2019-2023 (%) 26
Grafik 2.18 - Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri, 2020-2023 27
Grafik 2.19 - Perkembangan Gini Ratio Regional Sumatera, 2020-2023 27
Grafik 2.20 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2023 28
Grafik 2.21 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Regional Sumatera per Agustus 2023 28
Grafik 2.22 - Perkembangan Persentase Pekerja Penuh Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2019-2023 (%) 29
Grafik 2.23 - Perkembangan Persentase Pekerja Paruh Waktu Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2019-2023 (%) 29
Grafik 2.24 - Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2021-2023 30
Grafik 2.25 - Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2021-2023 31
Grafik 3.1 - Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara, 2021 s.d. 2023 38
Grafik 3.2 - Porsi Realisasi Pendapatan Negara, 2023 38
Grafik 3.3 – Perkembangan Penerimaan Perpajakan di Kepri (Rp miliar) 39
Grafik 3.4 - Porsi Realisasi Penerimaan Perpajakan 2023 39
Grafik 3.5 – Penerimaan per Sektor Dominan Tiap Triwulan, 2023 (Rp miliar) 42

Daftar Grafik

Grafik 3.6 - Porsi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023 43
Grafik 3.7 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, 2021 s.d. 2023 45
Grafik 3.8 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, 2021 s.d. 2023 45
Grafik 3.9 – Proporsi Realisasi Dana Transfer Umum, 2023 48
Grafik 3.10 – Pagu dan Realisasi Dana Alokasi Umum, 2021 s.d. 2023 49
Grafik 3.11 – Pagu dan Realisasi Dana Bagi Hasil, 2021 s.d. 2023 49
Grafik 3.12 – Proporsi Realisasi Dana Transfer Khusus, 2023 49
Grafik 3.13 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Fisik, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar) 50
Grafik 3.14 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar) ... 50
Grafik 3.15 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Insentif Fiskal, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar) 50
Grafik 3.16 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Desa, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar) 51
Grafik 3.17 – Perkembangan Debitur KUR di Prov Kepri (Orang) 56
Grafik 3.16 – Perkembangan Penyaluran KUR di Prov. Kepri (Rp miliar) 56
Grafik 3.18 – Pagu dan Realisasi PAD, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar) 61
Grafik 3.19 – Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar) 62
Grafik 3.20 – Indeks Kemandirian Fiskal I, 2023 65
Grafik 3.21 – Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) I, 2023 65
Grafik 3.22 – Indeks Kemandirian Fiskal II, 2017 s.d. 2023 66
Grafik 3.23 – Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) II, 2023 66
Grafik 3.24 – Pagu dan Realisasi PAD, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar) 69
Grafik 3.25 –Realisasi Belanja Menurut Fungsi, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar) 71
Grafik 3.26 –Realisasi Pendapatan Konsolidasian, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar) 76
Grafik 3.27 –Realisasi Belanja Konsolidasian, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar) 76
Grafik 3.28 –Realisasi Defisit Konsolidasian, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar) 77
Grafik 3.29 –Realisasi Pembiayaan Konsolidasian, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar) 78
Grafik 4.1 - Kendala dan Tantangan 90
Grafik 4.2 - Kendalaa dan Tantangan – Bidang Jalan 91
Grafik 4.3 - Kendala dan Tantangan – Bidang Kesehatan dan KB 91
Grafik 4.4 - Kendala dan Tantangan Bidang Pendidikan 92
Grafik 4.5 - Kendala dan Tantangan Bidang Pertanian 93
Grafik 5.1 - Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Pemda Kepri 101
Grafik 5.2 - Perkembangan RLS Kepulauan Riau 101
Grafik 5.3 - Perkembangan HLS Kepulauan Riau 102
Grafik 5.4 - TPT Kepri 2019 - 2023 102
Grafik 5.5 - TPAK Kepri 2019 - 2023 103
Grafik 5.6 - TKK Kepri 2019 - 2023 104
Grafik 5.8 - DAK Non Fisik Pendidikan (Rp Miliar) Tahun 2023 105

Daftar Grafik

Grafik 5.7 - DAK Fisik Pendidikan (Rp Miliar) Tahun 2023 105
Grafik 5.9 - Belanja K/L KRO SDM (Rp Miliar) Tahun 2023 106
Grafik 5.10 - Analisis Scatter Plot Terhadap IPM 106
Grafik 5.11 - Analisis Scatter Plot Terhadap RLS 107
Grafik 5.12 - Analisis Scatter Plot Terhadap HLS 107
Grafik 5.13- Kondisi Infrastruktur Kemantapan Jalan 2018 -2022 109
Grafik 5.14 - Kondisi Upah Minimum Tenaga Kerja 2018 - 2022 110
Grafik 5.15 - Indeks Kemahalan Konstruksi 2018 - 2022 110

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

Andil Inflasi

Beras 0,40%

Rokok Kretek 0,29%

Cabai Merah 0,23%

Emas Perhiasan 0,19%

Sewa Rumah 0,10%

Pertumbuhan Ekonomi

Triwulan IV (yoy) 4,45%

Triwulan IV (ctc) 5,20%

Inflasi

Desember (yoy) 2,76%

Desember (mtm) 0,44%

Pertumbuhan ekonomi Kepri tumbuh membaik ditandai dengan realisasi PDRB, pertumbuhan ekonomi dan Net Ekspor yang positif. PDRB dari sisi pengeluaran **didominasi oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 9,16 persen (yoy) dengan kontribusi 44,32 persen dari total PDRB Kepri.** Hal ini sejalan dengan peningkatan investasi yang tumbuh 288,89 persen (yoy).

PDRB Menurut Pengeluaran

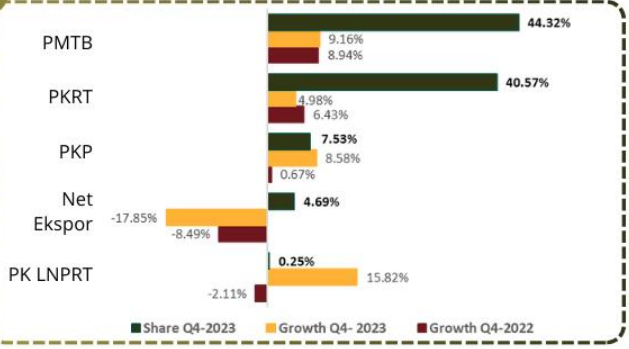

Pertumbuhan Ekonomi Regional

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Regional Sumatera, IPM Provinsi Kepri berada pada **peringkat tertinggi selama empat tahun berturut-turut**. Selanjutnya disusul oleh Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Aceh, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung

Perkembangan Indikator Kesejahteraan Provinsi Kepulauan Riau

sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

IPM

79,08 (2023)

78,48 (2022)

Rasio Gini

0,340 (Mar. 2023)

0,325 (Sept. 2022)

Indeks Pembangunan Manusia Tiap Provinsi di Regional Sumatera

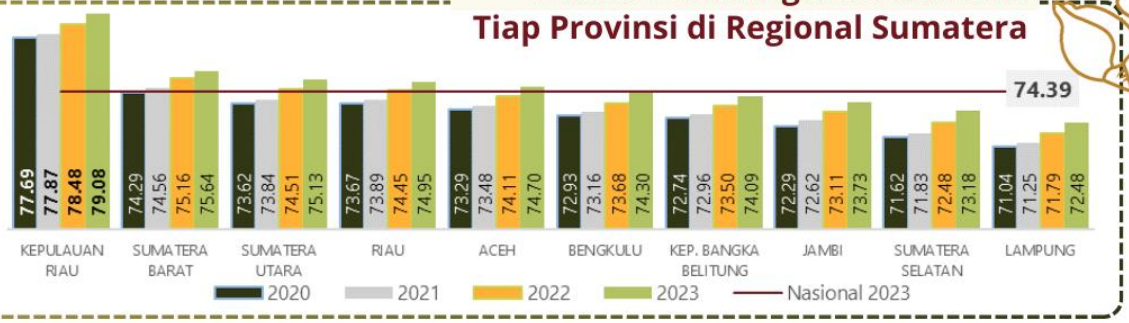

Tingkat Pengangguran Terbuka

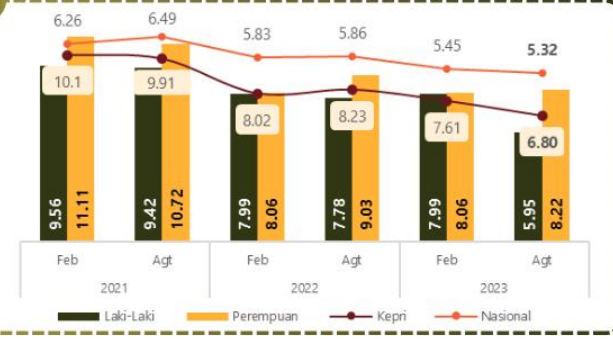

Nilai Tukar Petani

104,16 (Des. 2023)

103,53 (Des. 2022)

Nilai Tukar Nelayan

103,73 (Des. 2023)

110,33 (Des 2022)

Kondisi kesejahteraan Kepri membaik ditandai dengan menurunnya Jumlah dan Persentase Penduduk miskin, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, dan peningkatan Nilai Tukar Petani.

Kemiskinan Penduduk

Secara umum, **capaian indikator ekonomi makro dan kesejahteraaan masyarakat di Kepri sudah sesuai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD**. Namun demikian, masih terdapat satu indikator yang belum sesuai target , yaitu **Gini Ratio yang ditetapkan sebesar 0,329 hanya mampu tercapai di angka 0,340** sehingga hal ini perlu menjadi fokus pemerintah dalam pengambilan kebijakan kesejahteraan di tahun 2024.

Sumber grafis: Canva

Sumber: BPS Kepri,2024 (diolah)

Perkembangan Indikator Fiskal Provinsi Kepulauan Riau

sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023

APBN

Pendapatan Negara

% Realisasi **108,45%**

Growth *(yoy)* **-2,59%**

12.482,75 Realisasi (Rp M)

11.510,13 Target (Rp M)

terdiri atas

Pajak (Rp M) **9.833,16**	106,77%	-2,92% *(yoy)*
PNBP (Rp M) **2.649,57**	115,16%	-1,33% *(yoy)*

Belanja Negara

% Realisasi **95,79%**

Growth *(yoy)* **20,02%**

18.384,64 Realisasi (Rp M)

19.193,24 Pagu (Rp M)

terdiri atas

Pempus (Rp M) **9.184,64**	92,79%	38,27% *(yoy)*
TKDD (Rp M) **9.200,00**	98,98%	6,05% *(yoy)*

Realisasi **Pendapatan Negara tumbuh minus 2,59 persen** sebagai dampak adanya kebijakan insidentil di tahun 2022 menyebabkan realisasi Pendapatan melonjak di tahun tersebut, dan kembali turun di tahun 2023. Realisasi **Belanja Negara tumbuh 20,02 persen** menandakan perbaikan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran .

APBD

Pendapatan Daerah

% Realisasi **101,12%**

Growth *(yoy)* **13,42%**

13.909,60 Realisasi (Rp M)

13.755,70 Target (Rp M)

terdiri atas

PAD (Rp M) **4.656,20**	108,72%	22,26%
Transfer (Rp M) **9.222,42**	97,68%	9,89%
Lain-lain (Rp M) **30,98**	98,38%	-50,58%

Belanja Daerah

% Realisasi **96,98%**

Growth *(yoy)* **13,11%**

13.996,19 Realisasi (Rp M)

14.432,58 Pagu (Rp M)

terdiri atas

Operasi (Rp M) **10.500,19**	98,14%	7,84%
Modal (Rp M) **2.170,54**	89,36%	3,43%
T. Terduga (Rp M) **9,27**	9,96%	52,90%
Trasfer (Rp M) **1.316,19**	108,63%	146,77%

Realisasi **Pendapatan Daerah tumbuh 13,42 persen** menandakan peningkatan kualitas pemda dalam optimalisasi pemanfaatan sumber pendapatan daerah. Realisasi **Belanja Daerah tumbuh 13,11 persen** menandakan perbaikan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di daerah.

Sumber grafis: Canva

Sumber: OM SPAN dan SIKRI, 2024 (diolah)

Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik

Perbandingan Pagu Mendukung DAK Fisik Terhadap Pagu Total

Kode BA	K/L	Pagu Total	Pagu Mendukung DAK Fisik	%	Jumlah satker	Jumlah RO
18	Kementerian Pertanian	47.543.102.000	1.936.814.000	4,07%	9	18
23	Kemendikbud Ristek	413.934.428.000	29.472.775.000	7,12%	3	7
24	Kemeterian Kesehatan	186.295.876.000	4.948.660.000	2,66%	1	13
33	Kementerian PUPR	1.651.438.082.000	1.045.188.779.000	63,29%	3	21
57	Perpusnas RI	282.834.000	282.834.000	100,00%	1	1
68	BKKBN	25.304.282.000	6.773.372.000	26,77%	1	16
	Total	**2.324.798.604.000**	**1.088.603.234.000**	**46,83%**	**18**	**76**

Pagu Belanja yang mendukung DAK Fisik terbesar pada Kementerian PUPR memiliki alokasi belanja RO Harmonis sebesar Rp1.045,19 miliar (63,29 persen dari Total Pagu Kementerian PUPR), pada Kemendikbud Ristek dengan alokasi sebesar Rp29,47 miliar dari total Rp413,93 miliar (7,12 persen dari Pagu Kemendikbud Ristek), dan BKKBN dengan Pagu Belanja terkait RO Harmonis sebesar Rp6,77 miliar dari total Rp25,30 miliar (26,77 persen dari total Pagu BKKBN di Kepri).

Kendala yang paling banyak dialami, yaitu pada aspek panganggaran dengan ditemukan sebanyak 18 kendala yang dialami satuan kerja terkait pada RO Harmonis. Kemudian diikuti aspek eksekusi kegiatan yang ditemukan sebanyak 17 kendala, sumber daya manusia sebanyak 15 kendala, PBJ sebanyak 11 kendala, dan regulasi sebanyak 4 kendala.

Upaya harmonisasi terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama Kementerian Negara/Lembaga terkait dalam peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertanian diwilayah Kepri, diantaranya melalui dialog bersama, serta pendampingan teknis.

Dampak Belanja Pemerintah terhadap Indikator Kualitas SDM

Analisis Scatter Plot

Hubungan antara DAK Fisik, DAK Non Fisik Pendidikan, dan Belanja PP KRO SDM terhadap IPM, RLS, dan HLS menunjukkan hubungan positif, artinya kenaikan delta DAK Fisik, DAK Non Fisik dan KRO SDM akan meningkatkan poin IPM, RLS, dan HLS.

Infrastruktur Kemantapan Jalan, 2018 - 2022

Upah Minimun Tenaga Kerja, 2018 - 2022

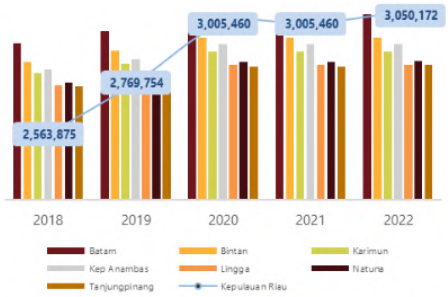

Indeks Kemahalan Konstruksi, 2018 - 2022

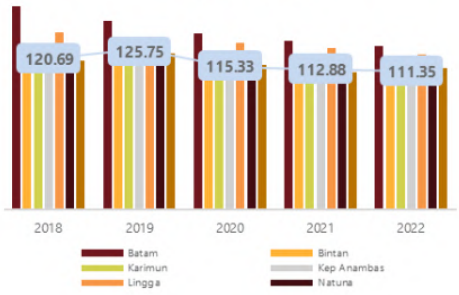

Structural Equation Modeling (SEM)- Pengaruh Belanja Pemerintah, Indikator SDM dan Investasi Terhadap Pengangguran

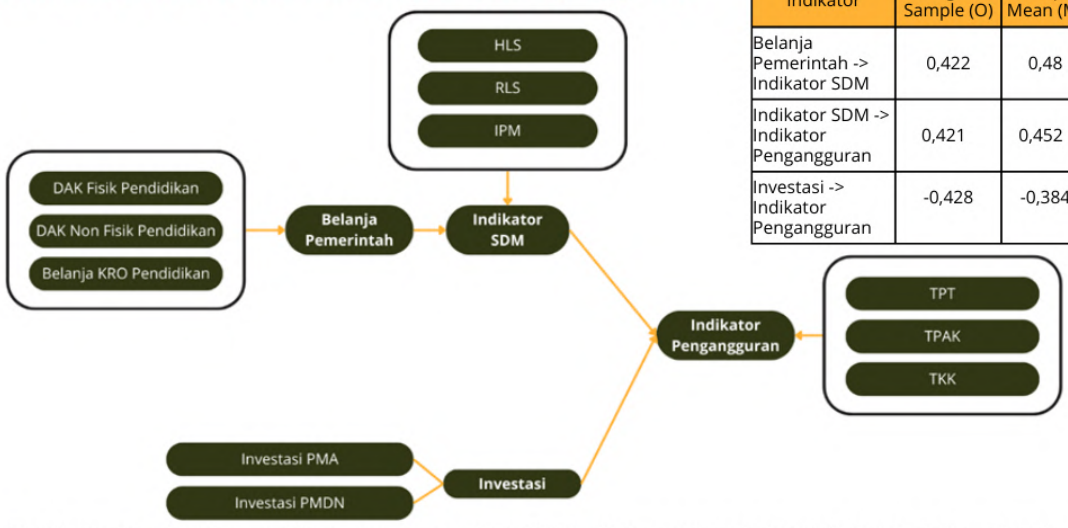

Indikator	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	St Dev	T-Statistics (|O/STDEV|)	P-values
Belanja Pemerintah -> Indikator SDM	0,422	0,48	0,159	2,655	0,008
Indikator SDM -> Indikator Pengangguran	0,421	0,452	0,171	2,456	0,014
Investasi -> Indikator Pengangguran	-0,428	-0,384	0,213	2,012	0,044

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan SEM disimpulkan bahwa Belanja Pemerintah pada sektor pendidikan, seperti DAK Non Fisik dan Belanja KRO Pendidikan pada K/L berdampak signifikan positif terhadap peningkatan kualitas SDM, yang ditunjukkan dengan peningkatan IPM dan RLS. Selanjutnya Indikator Kualitas SDM tersebut berdampak signifikan positif pada peningkatan TPT dan TPAK di wilayah Kepri.

Sumber grafis: Canva

Sumber: Dit. PA, OM SPAN, BPS dan Kementerian PUPR , 2024 (diolah)

Ringkasan Eksekutif

Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

Terdapat 7 tujuan pembangunan daerah Kepulauan Riau (Kepri) yaitu Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan; Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi; Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif; Penguatan Jaringan Pengamanan Sosial; Pembangunan Manusia yang unggul dan Berkarakter; Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat; dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau.

Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut, terdapat beberapa tantangan pembangunan diberbagai aspek. Tantangan dari aspek ekonomi antara lain adalah sebaran investasi tidak merata dan masih terpusat di Kota Batam dan PDRB yang tidak merata antar kabupaten/kota. Tantangan pada aspek sosial kependudukan antara lain adalah penyebaran penduduk masih terkonsentrasi di Kota Batam dan ketimpangan IPM antar kabupaten/kota yang cukup tinggi. Kondisi geografis Kepri yang berbentuk kepulauan memberikan tantangan tersendiri dalam pembangunan konektivitas antar daerah. Ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk. Tantangan lainnya adalah sebagai daerah berstatus *Free Trade Zone* yaitu adanya master list dinilai tidak fleksibel dan membuat proses impor menjadi lebih lama dan rumit, kesiapan SDM BP kawasan dinilai belum memadai. Dalam hal perizinan impor terdapat masalah komersialisasi pengurusan izin Nomor Induk Kepabeanan (NIK). Dalam hal perpajakan, terdapat pajak berganda dan tarif pajak yang terlalu tinggi ditambah tidak ada fasilitas perpajakan seperti tax holiday. Selain itu perbedaan tarif pajak (penghasilan *corporate*) antara Indonesia dan Singapura menjadi disisentif bagi investor. Kendala lain yang dihadapi adalah masalah lahan dan hambatan sosial.

Indikator Makro Ekonomi

Kinerja ekonomi Kepulauan Riau triwulan IV 2023 tumbuh positif sebesar 4,45 persen (yoy) dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di regional Sumatera. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB menyentuh angka Rp89,97 triliun dan ADHK Rp52,72 triliun. Pada bulan Desember 2023 inflasi Kepri sebesar 2,76 persen (yoy) dan 0,44 persen (mtm).

Dari sisi ingkat Kesejahteraan Rakyat, tingkat IPM dengan metode perhitungan baru tertinggi ke-tiga Nasional, yaitu 79,08 tumbuh sebesar 0,76 persen (yoy). Selanjutnya, per bulan Maret 2023, Angka Kemiskinan sebesar 142,50 ribu jiwa atau 5,69 persen dari total penduduk Kepri. Gini Ratio Kepri per Maret 2023 sebesar 0,34, meningkat 0,015 persen dibandingkan September 2022 sebesar 0,325, artinya ketimpangan pengeluaran meningkat pada periode Maret 2023.

Pada indikator ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6,80 persen; angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 68,68 persen, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 93,20 persen, dengan Tingkat Persentase Usia Muda 15-24 Tahun yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (*Not in Education, Employment or Training* – NEET) 18,10 persen. NTP Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2023 adalah sebesar 104,16 dan menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,61 persen (yoy) tumbuh 0,64 persen (mtm). NTN pada Desember 2023 sebesar 103,73 mengalami penurunan sebesar 6,65 persen (yoy) dan 0,42 persen (mtm).

Analisis Fiskal Regional

APBN Provinsi Kepri mengalami penurunan target Pendapatan dan peningkatan pagu Belanja yang menyebabkan peningkatan Defisit dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan defisit anggaran ditempuh pemerintah agar perekonomian tetap tumbuh dengan mempertahankan nominal Belanja Negara yang akan memberikan stimulus bagi perekonomian Kepri.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp12.482,73 miliar (108,45 persen dari Target), tumbuh minus 2,59 persen (yoy). Penerimaan Pajak mencapai Rp9.833,16 miliar (106,77 persen dari Target) dan PNBP Rp2.649,57 miliar (115,16 persen dari Target). Belanja Negara Rp18.384,64 miliar (95,79 persen terhadap Pagu), terekspansi 20,02 persen, Belanja Pemerintah Pusat Rp9.184,64 miliar (92,79 persen terhadap Pagu) dan Belanja TKD Rp9.200,00 miliar (98,98 persen terhadap Pagu). Sehingga, APBN Kepri s.d. triwulan IV 2023 Defisit sebesar Rp7.683,11 miliar.

KUR dapat disalurkan Rp1.747,16 miliar kepada 26.673 debitur. Kinerja penyaluran mengalami penurunan sebesar minus 24,77 persen (yoy) dengan debitur minus 24,60 persen (yoy). Penyaluran KUR didominasi oleh skema Kecil 48,38 persen, skema Mikro 48,15, dan Super Mikro 3,47 persen. Pembiayaan UMi telah menjangkau 9.744 debitur dengan total penyaluran Rp47,63 miliar. Penyaluran UMi meningkat 58,58 persen (yoy) dan jumlah debitur UMi meningkat sebesar 43,72 persen (yoy).

Isu strategis pelaksanaan APBN di daerah antara lain adalah terkait izin prasyarat penyiapan pelaksanaan proyek dan penyiapan kondisi pra pengadaan barang dan jasa lain dan kondisi cuaca dan geografis Prov. Kepri yang menyulitkan mobilisasi orang dan barang untuk proyek fisik yang berlokasi di pulau terluar. Kemudian, terdapat permasalahan pada blokir pagu *automatic adjusment* (blokir AA) yang masih menjadi kendala terbesar. Tambahan pagu pada triwulan II juga menyebabkan kendala dalam penyerapan anggaran. Selain itu, barang/jasa spesifik tidak selalu tersedia pada e-catalog sebagaimana terbatasnya barang yang memenuhi unsur TKDN turut menjadi kendala pelaksanaan APBN. Permasalahan dan tantangan dalam upaya akselerasi belanja APBN antra lain kualitas SDM satker yang kurang memahami ketentuan terkait batas waktu penyelesaian tagihan dan pentingnya kontrak pra DIPA sebagai bagian dari upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.

APBD Provinsi Kepri s.d. triwulan IV 2023 defisit Rp86,58 miliar, terkontraksi 21,71 persen, seiring dengan peningkatan Pendapatan Daerah kinerja Pendapatan Daerah Rp13.909,60 miliar (101,12 peresen dari Pagu), tumbuh 13,42 persen (yoy). Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan dari Dana Transfer sebesar Rp9.222,42 miliar (persen dari Target). PAD mencapai Rp4.656,20 miliar (108,72 persen dari Target). Belanja Daerah Rp13.996,19 miliar (96,98 persen dari Pagu), tumbuh 13,11 persen (yoy). Realisasi Pembiayaan sebesar Rp894,27 miliar (132,12 persen dari Pagu).

Provinsi Kepri memiliki 25 entitas yang telah ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Dari 25 BLUD yang ada, terdapat 17 BLUD yang bergerak di Bidang Kesehatan, 5 BLUD di Bidang Pendidikan, 1 BLUD Bidang Pengelola Dana, dan 3 BLUD di bidang Layanan Lainnya. Permasalahan yang dialami oleh BLUD lingkup Prov. Kepri adalah pengelola keuangan BLUD yang belum memahami pengelolaan keuangan BLUD dan aplikasi e-BLUD, pergantian pengelola keuangan, kekurangan SDM.

Dari sisi capaian output program strategis pemda, beberapa tantangan adalah OPD penanggungjawab kegiatan lambat dalam menyampaikan laporan realisasi dan mengajukan reviu kepada APIP, kurangnya koordinasi antara OPD dengan BPKAD dan Inspektorat Provinsi, terdapat status lahan yang belum *clear* sehingga DAK Fisik untuk bidang/subbidang Pendidikan tidak dapat terserap optimal. Kemudian, tantangan pada tata kelola antara lain sistem yang digunakan dalam proses menjalankan APBD belum sepenuhnya digital dan kurangnya jumlah SDM yang memahami tata kelola penganggaran, belanja, dan pertanggungjawaban APBD. Permasalahan dan tantangan dalam upaya akselerasi belanja APBD tahapan penyiapan APBD hingga realisasi APBD memakan waktu yang cukup lama hingga bulan Maret tahun anggaran tersebut, salah satunya terkendala sistem yang belum sepenuhnya digital seperti APBN, OPD masih lambat dalam menyampaikan dokumen realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik periode sebelumnya sehingga DAK Fisik tahap selanjutnya tidak dapat segera disalurkan.

Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Tingkat Wilayah

Dalam melaksanakan kinerja belanja APBN, terkhusus pada Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Tingkat Wilayah, terdapat beberapa dinamika yang muncul disepanjang tahun 2023. Dinamika tersebut antara lain:

a. DIPA yang baru terbit pada semester II, sehingga kegiatan baru dapat dilaksanakan di bulan November atau yang baru dapat diselesaikan tahun 2024, karena memerlukan penyesuaian jadwal kegiatan, blokir anggaran, revisi anggaran, dan tidak tercapainya target.
b. Kendala yang dialami pada aspek eksekusi kegiatan yaitu lokasi pelaksanaan kegiatan di daerah terluar dan sulit mobilisasi orang dan barang, cuaca ekstrem.
c. Kendala dari aspek regulasi yaitu turunnya Inpres di tengah tahun, terdapatnya perubahan regulasi baru, yang mengharuskan terjadinya perubahan dalam eksekusi kegiatan, atau regulasi yang terlambat terbit.
d. Sinkronisasi dari pemda dan satker di bidang jalan, kesehatan, pertanian dilakukan melalui pembagian lokasi dan fokus pembangunan antara belanja K/L dan DAK Fisik di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui dialog dan pertemuan rutin antara pemerintah daerah dan Kementerian terkait.

Analisis Tematik

Di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat gap kesejahteraan yang cukup lebar antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Sebagai contoh, Kota Batam dengan nilai IPM tertinggi 81,67 dan Kab. Lingga dengan nilai IPM terendah 64,06. Rata-rata harapan lama sekolah masyarakat Prov. Kepri di atas rata-rata nasional yaitu 13,10 tahun (setara Diploma 1). Rata-rata lama sekolah masyarakat Prov. Kepri 8,83 tahun atau lebih lama 0,4 tahun dari nasional menunjukkan rata-rata masyarakat Prov. Kepri tamat sekolah sampai dengan SD dan tidak sampai tamat SMP.

Kanwil DJPb Kepri melakukan analisis regresi korelasi (panel data) dengan *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model* untuk menganalisis hubungan Indikator SDM serta Investasi terhadap tingkat pengangguran. Hasilnya menunjukkan bawha 1) Pengaruh Belanja DAK Fisik, Belanja DAK Non Fisik berupa BOS dan BOP, Belanja PP KRO SDM menunjukkan hasil positif dan signifikan secara statistik terhadap IPM. Belanja DAK Fisik dan Belanja DAK Non Fisik menunjukkan pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap RLS sedangkan Belanja PP KRO SDM menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap RLS; Belanja DAK Fisik dan belanja PP KRO SDM menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap HLS, sedangkan Belanja DAK Non Fisik menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap HLS.

Kemudian, uKanwil DJPb melakukan analisis terhadap upaya penurunan tingkat pengangguran di Kepri menggunakan *Struktural Equation Model* (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah pada sektor pendidikan, seperti DAK Non Fisik dan Belanja KRO Pendidikan pada K/L berdampak signifikan positif terhadap peningkatan kualitas SDM, yang ditunjukkan dengan peningkatan IPM dan RLS. Selanjutnya Indikator Kualitas SDM tersebut berdampak signifikan positif pada peningkatan TPT dan TPAK di wilayah Kepri. Setiap peningkatan kualitas SDM, berdampak pada peningkatan TPT dan TPAK, kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh karakteristik pengangguran di wilayah Batam yang di dominasi oleh lulusan SMA, namun belum memiliki kualifikasi skill yang sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, pada wilayah dengan tingkat IPM dan pendidikan yang sudah tinggi, tingkat pendidikan tidak menjadi satu-satunya faktor pendukung dalam memperoleh pekerjaan. Pencari kerja perlu untuk memiliki skill khusus untuk dapat bersaing dengan pencari kerja lain dengan tingkat pendidikan yang sama.

Investasi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Indikator Pengangguran, maka peningkatan investasi berdampak pada penurunan Indikator Pengangguran di Kepri. Kondisi ini sesuai dengan teori bahwa peningkatan Investasi akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang berdampak pada penurunan TPT di wilayah Kepri. Oleh karena itu, peningkatan investasi terutama yang bersumber dari PMDN perlu di tingkatkan secara terus menerus untuk meningkatkan pertumbuhan industri di Kota Batam yang didukung dengan keberadaan 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kepri.

Rekomendasi

Berdasarkan Kajian Fiskal Regional Tahunan 2023 Provinsi Kepulauan Riau, diberikan Rekomendasi berdasarkan aspek-aspek tertentu kepada berbagai pihak sebagai berikut:

- ***Kepada Pemerintah Pusat***

1. Pemerintah Pusat melakukan pemetaan, koordinasi dan dialog rutin untuk melakukan harmonisasi belanja dan RO satker sehingga tidak terjadi duplikasi antara belanja K/L dan pemda.
2. Selain pembinaan terhadap BLU baru, Kanwil DJPb juga dapat mengawal proses dan mendorong percepatan perubahan status satker PNBP yang berpotensi untuk menjadi BLU. Dengan perubahan status menjadi BLU dengan fleksibiltasnya, diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
3. Pemerintah Pusat dapat mendorong promosi potensi investasi, termasuk paket kebijakan fasilitas fiskal yang dapat dinikmati oleh investor di Kepri, sehingga mendorong investor-investor baru. Setiap investasi yang masuk ke wilayah Kepri dapat digunakan untuk memperkecil *Human Capital Gap* dan *Infrastructure Gap* yang ada di pada Kota Batam dengan wilayah lain yang terdapat di Kepri. Dampak dari investasi ini akan menjadi katalisator transformasi ekonomi khususnya di Kepri.

4. Seluruh K/L terkait agar lebih matang dalam menyusun rencana penyerapan Belanja Modal termasuk menyusun strategi agar dapat mengantisipasi gagal kontrak dan keterlambatan penyelesaian pembangunan yang berdampak pada rendahnya realisasi Belanja Modal di tahun anggaran yang akan datang
5. Terhadap RO harmonis satker agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan timeline pekerjaan. Satker juga perlu mempersiapkan mitigasi permasalahan dengan memperhitungkan musim di wilayah kepulauan, melalui koordinasi bersama pihak Stasiun Meteorologi terdekat. Terkait dengan banyaknya pihak yang terlibat dan penolakan, satker dapat bekerjasama dengan pemda dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membantu menjalin komunikasi dan koordinasi.
6. Pemerintah pusat perlu memerhatikan akurasi pemberian dana transfer pada tiap-tiap daerah, melalui analisis kebutuhan daerah. Sebab, terdapat daerah yang membutuhkan dana transfer pada program tertentu namun tidak mendapatkan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
7. Pemerintah Pusat dapat berkoordinasi dengan PT SMI dan pihak lainnya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pemda terkait alternatif skema *creative financing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan karakteristik daerah.
8. Pemerintah Pusat (dalam hal ini salah satunya adalah Kemnterian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan) dapat menjadi fasilitator bagi pemda untuk dapat menerapkan pola pembiayaan KPBU sebagai alternatif *creative financing* untuk mendanai proyek infrastruktur dengan PT SMI dengan pemda terlebih dahulu melakukan *benchmarking* ke provinsi yang telah berhasil melakukannya seperti Provinsi Jawa Barat.

- ***Kepada Pemerintah Daerah***

1. Pemerintah Daerah melakukan pemetaan, koordinasi dan dialog rutin untuk melakukan harmonisasi belanja dan RO satker sehingga tidak terjadi duplikasi antara belanja K/L dan pemda.
2. Dalam rangka menyelaraskan RPJMN dan RPJMD serta meningkatkan kualitas *mandatory spending* pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas SDM daerah,
3. Pemda melakukan pemetaan dengan pelaku usaha/industri terkait dengan kebutuhan *skill* tenaga kerja agar diperoleh data dan informasi *skill* yang dibutuhkan sehingga tidak lagi terjadi *skill mismatch*.
4. Dalam menurunkan TPT di Kepri, Pemda perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk membangun SMK dan Politeknik dengan jurusan/bidang yang sesuai dengan kebutuhan dan industri di Kepri, karena saat ini belum ada sekolah/politeknik yang dapat memenuhi kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh industri di Kepri. Pemda juga dapat memetakan kebutuhan SDM pada industri unggulan Kepri dan bekerja sama dengan melaksanakan Balai Latihan Kerja (BLK), serta berkoordinasi dengan universitas/politeknik di daerah untuk menyediakan kurikulum dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan SDM di lingkup Kepri.
5. Penurunan Harga CPO di pasar global menurunkan penerimaan Bea Keluar. Pemerintah perlu mendorong komoditas lain yang dapat meningkatkan ekspor yang akhirnya meningkatkan bea keluar. Misalnya dengan terus mendukung dan memfasilitasi agar pengusaha ayam yang melakukan ekspor perdana di Bulan Mei 2023 dapat melakukan ekspor secara rutin bulanan. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan potensi komoditas ekspor lainnya, seperti hasil budidaya perikanan (ikan bawal bintang) karena karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan.
6. Kebijakan untuk menyesuaikan tarif pajak reklame terbukti efektif untuk meningkatkan PAD dari pajak reklame. Pemerintah daerah agar mengevaluasi tarif pajak reklame daerah masing-masing. Pemda dapat melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif pajak yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan terkini. Kebijakan untuk mengevaluasi tarif pajak reklame tersebut dapat juga diterapkan pada pajak lain yang perlu penyesuaian tarif.
7. Kebijakan untuk menertibkan reklame ilegal yang dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang juga dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Penertiban tersebut juga dapat dilakukan terhadap sumber

PAD lainnya, tidak terbatas pada penertiban reklame ilegal. Misalnya penertiban izin Perizinan Bangunan Gedung.

8. Pemda dapat mendorong promosi potensi investasi, termasuk paket kebijakan fasilitas fiskal yang dapat dinikmati oleh investor di Kepri, sehingga mendorong investor-investor baru. Setiap investasi yang masuk ke wilayah Kepri dapat digunakan untuk memperkecil *Human Capital Gap* dan *Infrastructure Gap* yang ada di pada Kota Batam dengan wilayah lain yang terdapat di Kepri. Dampak dari investasi ini akan menjadi katalisator transformasi ekonomi khususnya di Kepri.
9. Pemda perlu mengidentifikasi sektor-sektor potensial daerah dan wilayah yang dapat dikembangkan. Contohnya, di Kabupaten Kepulauan Anambas, Lingga dan Natuna terdapat potensi pariwisata, maka pemerintah daerah dapat mengembangkan *master plan* untuk pembiayaan infrastruktur di sekitar wilayah potensi pariwisata untuk dapat dibiayai dengan sinergi beberapa alternatif pendanaan, misalnya pembiayaan proyek tersebut dibagi pembiayaannya oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Belanja Kementerian/Lembaga serta kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta. Pemda dapat berupaya juga untuk meningkatkan potensi investasi di daerah.
10. Untuk menekan biaya logistik, Pemerintah Pusat dan Daerah dapat bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan/atau perusahaan penyedia jasa pengiriman laut/*shipping* yang memiliki armada kapal berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar untuk mempermudah pergerakan barang-barang logistik oleh pelaku usaha dan meningkatkan konektivitas antar pulau. Selain itu, hal ini akan sangat membantu proses pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh satuan kerja pemerintah pemerintah daerah yang berada di Kepri.
11. Pemda dapat mulai melakukan opsi pembiayaan seperti pinjaman daerah, serta penerbitan sukuk dan obligasi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal serta memastikan kemampuan daerah untuk membayar pokok pinjaman beserta bunga dan kemampuan untuk membayar investor bagi sukuk dan obligasi daerah.

- ***Kepada Kanwil DJPb Prov Kepri***

1. Pada tahun 2023, terdapat tiga BLU baru di Kepri. Kanwil DJPb sebagai Pembina BLU di daerah agar dapat segera melakukan pembinaan untuk melakukan percepatan peningkatan penerimaan BLU dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan BLU. Selain pembinaan terhadap BLU baru, Kanwil DJPb juga dapat mengawal proses dan mendorong percepatan perubahan status satker PNBP yang berpotensi untuk menjadi BLU. Dengan perubahan status menjadi BLU dengan fleksibiltasnya, diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.
2. Kantor Wilayah DJPb Kepri hendaknya tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres penyaluran Dana Transfer ke Daerah, progres kontrak atau proyek yang dibiayai dengan Dana Transfer, capaian output atas penggunaan Dana Transfer serta mempercepat penyerapan Dana Transfer ke Daerah.

KFR Tahunan 2023

BAB I

SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

Seaplane DHC-400
Kabupaten Kepulauan Anambas

Seaplane (Pesawat Amphibi) jenis Viking Twin Otter-400 dengan kode pesawat DHC-400 beroperasi membawa wisatawan ke Pulau Bawah Resort dari Bandara Hang Nadim, Batam sebagai sebuah **terobosan aksesibilitas udara bagi kelancaran konektivitas wisata kepulauan**.

BAB I
SASARAN PEMBANGUNAN DAN TANTANGAN DAERAH

1.1 Pendahuluan

Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintah pusat dan daerah menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Pemerintah Daerah menyinergikan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal Daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan Presiden, dan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung tujuan tersebut, perumusan sasaran pembangunan daerah harus diharmonisasikan dengan sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah, melalui RPJMD, telah menetapkan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun mendatang. Sasaran pembangunan ini dijabarkan secara tahunan dalam RKPD.

Dalam rangka merumuskan sasaran pembangunan daerah yang efektif dan efisien, pemerintah daerah perlu memetakan tantangan-tantangan yang dihadapi baik dari sisi ekonomi, sosial-kependudukan dan geografis wilayah. Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan setelah tiga tahun lebih pandemi Covid-19 melanda seluruh negara termasuk Indonesia. Dengan demikian, intervensi kebijakan fiskal melalui program prioritas dapat secara langsung menjawab tantangan daerah yang dihadapi.

1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Pemerintah provinsi Kepulauan Riau mengusung visi "Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya" pada tahun 2021-2026. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai Kepri (*desired future*) selama lima tahun mendatang.

Dalam rangka mendukung visi tersebut, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah 2021-2026, yiatu:

a. Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis maritim, berwawasan lingkungan dan keunggulan wilayah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat.
b. Melaksanakan tata kelola pemerintah yang bersih, terbuka, dan berorientasipelayanan.
c. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, sehat, dan berdayasaing dengan berbasis iman dan taqwa
d. Mengembangkan dan melestarikan budaya melayu dan nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
e. Mempercepat konektivitas antar pulau dan pembangunan infrastruktur kawasan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pembangunan Provinsi Kepulauan Riau berorientasi pada tujuh tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1. 1 - Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kepulauan Riau

No.	Tujuan	Sasaran
1.	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan	Optimalisasi Sektor Perikanan, Peningkatan Sektor Pariwisata, Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup, dan Optimalisasi Pemanfaatan Hutan Lestari
2.	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan PDRB pada Sektor Kontruksi, Industri Pengolahan, dan Sektor Perdagangan. Peningkatan PAD, dan Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan).
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi yang Terbuka dan Terintegrasi, Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan, Manajemen ASN yang Profesional, Pemerintahan Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam Menghadapi Bencana. Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
4.	Penguatan Jaringan Pengamanan Sosial	Menurunkan Angka Kemiskinan, dan Masyarakat Desa yang Tangguh dan Partisipatif
5.	Pembangunan Manusia yang unggul dan Berkarakter	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, Mutu, Akses Layanan Pendidikan, Kualitas hidup Perempuan dan Anak. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemuda
6.	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu, dan Harmonisasi antar Umat Beragama

7.	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau	Percepatan Pembangunan Infrastruktur dasar, dan Pembangunan antar Pulau dan Pesisir.

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026

Untuk mengukur kinerja pencapaian pembangunan Kepri secara kuantitatif, pemerintah daerah menetapkan sasaran indikator makroekonomi dan indikator kesejahteraan sebagaimana terlihat pada tabel 1.2.

Tabel 1. 2 - Sasaran Indikator Kinerja Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Makro Kesra	Tahun ke-1 (2021)	Tahun ke-2 (2022)	Tahun ke-3 (2023)	Tahun ke-4 (2024)	Tahun ke-5 (2025)
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,5 - 3,5	4,8-5,6	4,9-5,8	5,0-5,9	5,1-6,1
2.	Inflasi (%)	3,09+1	3,14+1	3.13+1	3.03+1	2.94+1
3.	IPM (indeks)	76.26	76.7	77.14	77.58	78.03
4.	Kemiskinan (%)	6.07	6.01	5.74	5.69	5.63
5.	Pengangguran (%)	10,22	10,10	9,50	8,70	8,10
6.	Rasio Gini (indeks)	0,336	0,332	0,329	0,325	0,321
7.	NTP (indeks)	99,84	99,88	99,91	99,95	99,98
8.	NTN (indeks)	110,57	115,00	115,50	116,00	116,10

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026

Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai RPJMD diterjemahkan dan dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan daerah melalui RKPD. Mengusung tema "Pemulihan Ekonomi dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional", RKPD menetapkan indikator kinerja pembangunan Provinsi Kepri tahun 2023 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1. 3 - Perbandingan Target Indikator Kinerja Pembangunan pada Tahun 2023 antara RKP dan RKPD Kepulauan Riau

No	Indikator Kinerja Pembangunan	RKP	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3–5,5	4,9-5,8
2	Inflasi (%)	2,0 - 4,0	3,13±1
3	IPM (indeks)	73,31–73,49	77,14
4	Kemiskinan (%)	7,5 –8,5	5,74
5	Pengangguran (%)	5,3-6,0	9,50
6	Rasio Gini (indeks)	0,375–0,378	0,329

Sumber: RKP Tahun 2023 dan RKPD Prov Kepri Tahun 2023

1.3 Keselarasan PRJMN dengan RPJMD

Sasaran pembangunan harus sejalan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD harus selaras dengan RPJMN. Misi, tujuan, dan sasaran yang disusun oleh pemerintah daerah melalui dokumen RPJMD harus mengacu dan selaras dengan misi, tujuan dan sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN untu mencapai tujuan pembangunan nasional. Keselarasan Misi, tujuan, sasaran pembangunan daerah dan nasional ditunjukkan lebih lanjut pada Tabel 1.4 dan Tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.4 - Keselarasan Misi RPJMD 2021–2026 dan RPJMN 2020-2024

Misi RPJMN 2020 - 2024	Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Pembahasan Kesimpulan Riau 2021 - 2026	Pembahasan	Kesimpulan
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	Misi 1 RPJMD sesuai dengan Misi 2 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan, pemerataan dan penguatan di Bidang Ekonomi	Semua Misi dalam RPJMD telah sesuai dengan Misi dalam RPJMN
Struktur Ekonomi yang Produktif Mandiri, dan Berdaya Saing	. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	Misi 2 RPJMD sesuai dengan Misi 8 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan	
Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa	Misi 3 RPJMD sesuai dengan Misi 1 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	
Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam	Misi 4 RPJMD sesuai dengan Misi 5 RPJMN adapun kata kunci yang	

	Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam pengembangan dan pelestarian budaya dalam pembangunan	
Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan	Misi 5 RPJMD sesuai dengan Misi 3 RPJMN adapun kata kunci yang menjadi dasar kesesuaian ini ialah kesamaan upaya dalam peningkatan pembangunan infrastruktur	
Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya			
Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga			
Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya			
Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan			

Tabel 1.5 - Penyelarasan Tujuan RPMJD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau				RPJMN
Misi RPJMD	**Tujuan**	**Indikator Tujuan**	**Indikator Sasaran**	**Sasaran RPJMN**
Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat	Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan.	PDRB Sektor Perikanan	Berbagai indikator sektor perikanan	Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan
	Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran Ekonomi Makro
		Indeks Gini	Rasio Gini	Sasaran Ekonomi Makro
		PDRB per Kapita ADHK	PDB Rill per Kapita	Sasaran Ekonomi Makro
Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat dan Berdaya Saing Dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa	Penguatan Jaring Pengaman Sosial dan Kesehatan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Sasaran Ekonomi Makro
	Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Sasaran Ekonomi Makro
Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan	Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan

Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan	Percepatan Pembangunan Infrastruktur & Pengintegrasian Antar Pulau	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio-rasio Konektivitas	Meningkatnya konektivitas wilayah

1.4 Tantangan Sasaran Pembangunan

Secara umum, terdapat beberapa tantangan daerah utama yang dapat menjadi faktor pendukung dan penghambat pembangunan daerah yang dapat digolongkan dalam empat aspek, yaitu: ekonomi daerah, sosial kependudukan, geografis wilayah dandampak pandemi *Covid-19*.

1.4.1 Tantangan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian regional yang bervariasi menjadi tantangan sendiri bagi pembangunan Kepri. Tantangan ekonomi ini terkait dengan investasi dan pelayanan perizinan, infrastruktur, sumber daya alam, dan ketenagakerjaan. Tabel 1.4 menjelaskan secara rinci tantangan pembangunan Kepri dari sisi ekonomi.

Tabel 1. 6 - Tantangan Ekonomi Kepulauan Riau

No	Bidang	Permasalahan/Tantangan
1	Investasi dan pelayanan perizinan	Sebaran investasi tidak merata dan masih terpusat di Kota Batam
		Optimalisasi digital promotion potensi dan peluang investasi
		Optimalisasi kemudahan perizinan Investasi menggunakan *Online Single Submission* (OSS)
		Terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi
2	Infrastruktur	Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Belum Memadai
		Konektivitas Antarpulau dan Antarkabupaten/Kota
		Pengembangan Wilayah Perbatasan Belum Optimal
3	Sumber Daya Alam	Penurunan jumlah produksi perikanan budidaya
		Penyediaan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya hasil laut
4	Ketenagakerjaan	Peningkatan penduduk usia kerja di Kepulauan Riau dari 1.767.979 orang (2021) menjadi 1.827.295 orang (2022)
5	PDRB	PDRB yang tidak merata antarkabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau

Porsi PDRB Kota Batam yang mencapai rata-rata 60% menunjukkan ketidakmerataan perekonomian Kepri. Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan terobosan kebijakan atau program strategis yang dapat menarik investor untuk dapat menanamkan investasinya pada kabupaten/kota lain. Investasi yang dibutuhkan terutama sehubungandengan infrastruktur guna menunjang konektivitas antar kabupaten/kota di Kepri. Terciptanya konektivitas akan mengurangi biaya logistik dan membuka ruang-ruang baru untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Konektivitas tersebut pada akhirnya akan menekan angka ketimpangan yang cukup tinggi di Kepri yang berimplikasi terhadap pemerataanperekonomian per Kabupaten/Kota.

1.4.2 Tantangan Sosial Kependudukan

Dalam satu dekade terakhir, pembangunan manusia di Kepulauan Riau terus mengalami kemajuan. IPM Kepulauan Riau meningkat dari 72,36 pada tahun 2012 menjadi 76,46 pada tahun 2022. Selama periode tersebut, status IPM Kepulauan Riau selalu berada pada status IPM "tinggi" dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,55 persen per tahun. Namun demikian, disparitas antarkabupaten/kota di provinsi Kepulauan Riau masih terjadi. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Lingga (66,57), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Batam (81,67) yang sekaligus menjadikan Kota Batam sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Kepulauan Riau dengan status pembangunan manusia yang "sangat tinggi" (IPM ≥ 80).

Tabel 1. 7 - Tantangan Sosial Kependudukan Kepulauan Riau

Bidang	Permasalahan/Tantangan
Kondisi Demografi	Penyebaran penduduk masih terkonsentrasi di Kota Batam (pada tahun 2020 sebanyak 1.196.396 jiwa), sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 47.402 jiwa.
Struktur dan Jumlah Penduduk	UHH di Provinsi Kepulauan Riau terus meningkat dalam satu dekade terakhir pada tahun 2022 mencapai 70,50 tahun, namun harapan lama sekolah (HLS) yaitu 12,99 tahun masih di bawah nasional yaitu 13,10 tahun.
Budaya Masyarakat	Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif
	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat rasa persaudaraan di dalam pelaksanaan pembangunan daerah
	Meningkatkan promosi budaya antar suku/etnis dan diplomasi budaya antar negara
IPM	Kabupaten/kota dengan nilai indeks pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kota Batam (81,67%) dan Kabupaten Lingga (66,57) tercatat paling lambat di Kepulauan Riau.

	Belum dapat mengakses layanan pendidikan formal maupun nonformal karena tantangan geografis dan keterpencilan daerah tempat tinggal mereka, atau karena tidak tersedianya satuan pendidikan atau layanan pendidikan dan pelatihan
Pendidikan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan menengah, Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 96,02%, Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 77,2%, Angka Putus Sekolah sebesar 0,4%. Sementara itu capaian Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMA/MA/SMK/MAK sebesar 95,61%. Sementara itu capaian Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik telah mencapai 95,43%.
	Rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota tertinggi di Provinsi kepulauan Riau berada di Kota Batam sebesar 11,17 tahun, sedangkan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 7,12 tahun
	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan belum mencapai target sebesar 100%, yakni hanya 96,01% untuk Pendidikan menengah dan 82,48% pada Pendidikan khusus.
Kesehatan	Angka kematian ibu sebesar 925 per 100.000 KH, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 11 per 1.000 KH, dan persentase kekurangan gizi (*underweight)* pada anak balita pada tahun 2020 mencapai sebesar 6,4%
	Masih tingginya kasus kematian ibu dan bayi serta kekurangan gizi pada balita yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan sulitnya menjangkau akses pelayanan kesehatan
Sosial	Masih rendahnya keluarga miskin yang mendapatkan bantuan, baik melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP) maupun bantuan kesejahteraan sosial lainnya. Penerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya bersifat fluktuatif, yakni dari 5,59% di tahun 2015 meningkat menjadi 51,53% di tahun 2017, lalu turun lagi menjadi 38,09% pada tahun 2019 dan di tahun 2020 meningkat sebesar 53,97%

1.4.3 Tantangan Geografis Wilayah

Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi yang strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia dikarenakan langsung bersinggungan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 2.408 pulau yang tersebar luas, dimana hanya sebanyak 394 pulau yang berpenghuni, sisanya pulau tidak berpenghuni. Luas wilayah laut sebesar 96% dari luas keseluruhan provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 luas daratan Kepri 8.201,72 km^2 dan berdasarkan hitungan teknis Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007, luas lautan Provinsi Kepulauan Riau 417.012,97 km^2.

Kondisi geografis Kepri yang berbentuk kepulauan memberikan tantangan tersendiri dalam pembangunan konektivitas antar daerah serta mata pencaharian masyarakatnya di mana perikanan dan pariwisata menjadi mata pencaharian utama. Potensi bencana alam dan perubahan iklim sangat berdampak pada nelayan dan masyarakat pesisir. Ketimpangan

pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk.

1.4.4 Tantangan sebagai Daerah Berstatus *Free Trade Zone*

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 sebagaimana ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Cukai.

1.4.4.1 Kelebihan Kawasan Free Trade Zone (FTZ)

Pemberlakukan *Free Trade Zone* (FTZ) di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun (BBK) akan berdampak positif bagi para investor yang ada. Ada beberapa keuntungan yang bisa dinikmati oleh para investor dalam skema FTZ di Batam. Dalam kawasan FTZ, para investor ataupun pengusaha akan mendapatkan pembebasan bea ekspor dan impor, pembebasan PPN, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selain itu, ada pula pemberlakuan insentif yang diberikan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha maupun investor yang ada di FTZ.

Dari berbagai referensi, terdapat beberapa karakteristik FTZ sebagai daerah dengan penyediaan nilai tambah sebagai berikut:

a. Insentif bisnis dalam bentuk insentif fiskal, keuangan dan infrastruktur yang diatas rata-rata dibandingkan daerah lainnya;
b. Regulasi bisnis yang lebih fleksibel. Di sini, prosedur kepabeanan yang minimum dan sistem perijinan satu atap (ijin dan aplikasi) menjadi syarat perlu. Ketentuan terkait tenaga kerja juga hendaknya lebih fleksibel;
c. Area produksi dengan basis biaya produksi rendah yang dapat menjadi salah satu keuntungan komparatif bisnis;
d. Produksi berorientasi ekspor;
e. Paket insentif yang menarik dalam bentuk: pembebasan bea masuk terhadap pemasukan barang impor dan pembebasan pajak penjualan atau PPN terhadap perolehan barang yang dijual di dalam FZ untuk keperluan produksi;
f. Pembebasan atau potongan pajak (*tax holiday or tax rebates*) terhadap industri berdasarkan penilaian tertentu dari kinerja ekspor mereka.

1.4.4.2 Kendala Implementasi FTZ di Kepri

Penelitian Agus Syarif Hidayat dan Darwin Syamsulbahri tentang implementasi FTZ di Kepulauan Riau menyatakan bahwa terdapat beberapa kendala administartif yang dihadapi oleh investor antara lain tentang *master list*, perizinan impor, dan masalah perpajakan. Adanya

master list dinilai tidak fleksibel dan membuat proses impor menjadi lebih lama dan rumit, dan menyarankan sebaiknya cukup negatife list saja yang diberlakukan. Disamping itu kesiapan SDM BP kawasan dinilai belum memadai. Dalam hal perizinan impor adanya masalah komersialisasi pengurusan izin Nomor Induk Kepabeanan (NIK). Dalam hal perpajakan, masalah yang dikemukakan investor adalah pajak berganda dan tarif pajak yang terlalu tinggi ditambah tidak ada fasilitas perpajakan seperti *tax holiday*. Selain itu perbedaan tarif pajak (penghasilan *corporate*) antara Indonesia dan Singapura menjadi disisentif bagi investor. Kendala lain yang dihadapi adalah masalah lahan dan hambatan sosial

1.4.4.3 Implementasi China dalam Penerapan FTZ

Menilik pada apa yang dilakukan oleh China dalam mempersiapkan kawasan ekonomi khususnya, setidaknya ada empat karakteristik KEK di China sebagai berikut, pertama, Ketersediaan berbagai macam fasilitas dasar, seperti pasokan air dan listrik dengan baik dipersiapkan dan upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif bagi investasi asing. Kedua, Perlakuan yang khusus dalam kaitannya dengan pajak dan penggunaan lahan yang diberikan kepada perusahaanperusahaan dalam rangka menarik investasi dari mereka. Ketiga, menghasilkan produk-produk manufaktur yang ditujukan untuk ekspor. Keempat, KEK dioperasikan dengan cara yang sama dengan ekonomi pasar bebas.

1.4.4.4 Langkah Optimalisasi FTZ

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Wahyuni dan Esther Sri Astuti, tentang *What Investors Think about Our FTZ Areas?* (Fakultas Ekonomi UI, 2009) mengkaji daya saing Indonesia khususnya di BBK. Pemberlakuan BBK sebagai zona ekonomi khusus, merupakan praktik yang diadopsi dari konsep "*free trade zones*" dan "*export processing zones*" dari negara-negara lain. Selain itu, BBK juga dikategorikan sebagai daerah yang pertama yang ditetapkan sebagai daerah FTZ yang paling berkontribusi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BBK karena kedekatannya dengan Singapura, masih menjadi tempat yang menarik bagi investor.

Konsep FTZ dengan keunggulannya sejatinya akan memberikan manfaat yang besar bagi Prov. Kepri. Namun demikian, implementasi FTZ di Prov. Kepri belum berjalan optimal karena masih terdapat beberapa kendala. Pemerintah dan pengelola kawasan diharapkan dapat mengoptimalkan keunggulan FTZ dengan mengatasi kendala-kendala yang ada serta dapat mereplikasi implementasi faktor-faktor pendukung keberhasilan implementasi FTZ di Cina.

Kajian I
Batam sebagai FTZ (*Free Trade Zone*)
Studi Komparasi dengan Pendekatan *Spatial Economic*

I. Latar Belakang

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu yang berkontribusi secara signifikan sebagai keuntungan Batam dengan ditetapkan sebagai *Free Trade Zone* dengan komparasi FTZ negara lainnya yaitu Shenzhen FTZ China dan Subic Bay FTZ Filipina. *Shenzhen* memiliki **total area** terbesar yaitu 2021 km2; diikuti Batam (715 km2) dan Subic (600 km2). Lokasi ketiganya di tepi pantai sehingga akses penumpang dan barang sangat baik. Shenzhen dan Subic berlokasi di pulau besar sehingga akses darat sangat mudah, sementara Batam adalah pulau tersendiri sehingga akses darat terbatas.

Jarak ke sentral ekonomi menjadi faktor penting. Batam berdekatan dengan Singapura dengan pelabuhan barang dan penumpang dan bandara internasional paling sibuk. Hal ini juga dimiliki oleh Shenzehen, sementara Subic berlokasi di tengah *South East Asia* dan sangat bergantung oleh kepadatan perdagangan. FTZ sebagai otoritas khusus yang **dipimpin oleh suatu institusi otoritas khusus** menjadi penting. Shenzhen dan Subic dipimpin oleh pemda, Batam dipimpin oleh BP Batam dan Pemkot Batam.

Ketiga FTZ memiliki mekanisme **prosedur investasi** yang berbeda. Semua prosedur dikendalikan oleh BP Batam, investasi mengacu ke BKPM dan Kemenkeu, sehingga waktu untuk mengurus izin investasi di Batam paling lama dibanding Shenzhen dan Subic. Kelebihan Batam adalah peraturan kependudukan yang lebih longgar yang mewajibkan *working permit* untuk memasuki FTZ.

Selain lokasi, **SDM** menjadi faktor penting pendirian FTZ. Tingginya angkatan kerja di usia produktif menjadi keunggulan FTZ. Batam adalah FTZ dengan rasio jumlah populasi umur produktif tertinggi (767/1000 orang) diikuti dengan Shenzhen (710/1000) dan Subic (602/1000) orang. Dari sisi **ketersediaan tenaga kerja terampil,** Shenzhen memiliki jumlah pekerja terampil tertinggi dengan latar belakang diploma sebanyak (166/1000) orang, diikuti Subic (106/1000) dan Batam (40/1000) orang.

Dari **transportasi**, Shenzhen yang terbaik dengan 17 pelabuhan yang menampung 10 kapal vessels bersamaan. Di darat, sepanjang 145 km jalan raya dari Guangzhou dan kereta api memberikan akses cepat ke seluruh kota di China dan Hongkong. Di Batam terdapat 6 pelabuhan dan Subic hanya memiliki 1 pelabuhan. **Kapasitas kargo bandara** menjadi ukuran bagi pergerakan perdagangan dan ekspor. Shenzhen memiliki satu bandara internasional dengan kapasitas kargo 338.000 ton diikuti dengan Batam dengan 16.230 ton dan Subic dengan 30.000 ton.

Terkait dengan **listrik**, Subic memiliki kapasitas listrik terbaik yaitu US$ 0.03/KwH dengan total power 130 MW dan **suplai air** seharga US$ 0.6/KwH dengan debit air 382 liter per detik. Shenzhen memiliki kapasitas listrik 3000 MV (US$ 0.06/KwH) dan suplai air 4.768 liter/detik dengan biaya US$ 0.18/m3. Yang paling mahal adalah Batam dengan total listrik 377 MV (US$ 0,5 KwH) dan suplai air 1760 liter/detik (US$ 0.78/m3)

Kinerja **investasi** di FTZ juga dapat dijadikan indikator pentingnya FTZ baik domestik maupun asing. Shenzen memiliki total nilai investasi tertinggi sebesar US$ 21.600 juta dan 10.000 investor, diikuti oleh Batam dengan US$3.620 juta dengan 611 investor dan Subic dengan US$ 1046 juta dengan 618 investor.

Ukuran lain adalah **rasio investasi Pemerintah-swasta**, semakin tinggi rasionya semakin efektif investasi Pemerintah untuk menarik perusahaan berinvestasi. Shenzhen mendapatkan 3,2 kali nilai dibanding modal investasinya, diikuti dengan Batam (1,7 kali) dan Subic (1,5 kali). **Pertumbuhan investasi** di FTZ yaitu Shenzhen bertumbuh sangat cepat hampir 29% per tahun, diikuti dengan Subic 12 % per tahun dan Batam 9% per tahun.

Ukuran **ekspor** masing-masing FTZ adalah Shenzhen memiliki ekspor tertinggi dengan nilai US$ 46.557 juta, diikuti Batam US$ 5.000 juta dan Subic US$ 1.310 juta. Batam dengan nilai ekspor 8% dari total ekspor nasional, berada di bawah Shenzhen dengan 14,3% dari total ekspor nasional dan Subic hanya berkontribusi 4% dari total ekspor Filipina.

Pendapatan pajak menjadi pendapatan utama di area FTZ. Pendapatan pajak tertinggi di Shenzhen dengan US$ 2303 juta, diikuti Batam US$ 94 juta dan Subic US$ 79,6 juta. Bila diukur dengan **pertumbuhan pendapatan pajak**, Subic memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 23,5% per tahun sedangkan Batam bertumbuh 26,9% dan Shenzhen juga 23,5%. Shenzen berkontribusi 2,2% dari total pajak nasional, sementara Batam dan Subic hanya 0,9%.

Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa *free trade zone* memang lebih industri dibanding tingkat nasional. Subic memiliki pertumbuhan industri tertinggi dengan 2,18 dibandingkan Batam (1,81) dan Shenzhen (1,01). Di sektor jasa, Shenzhen memiliki indeks tertinggi dengan 1,37 dan diikuti dengan Subic (0,63) dan Batam terendah (0,47). Shenzhen telah mampu berkontribusi dari sektor industri dan jasa.

II. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan adalah studi komparasi, *location quotient dan Pearson correlation*.

III. Hasil Pembahasan

a. Semakin luas area maka semakin besar kemungkinan untuk FTZ bertumbuh, sedangkan bentuk kepulauan akan membatasi pengembangan FTZ.
b. SDM berasosiasi positif sebagai faktor penentu FTZ kecuali budaya dan jumlah populasi. Jumlah populasi berelasi positif dengan tingkat pengangguran.

Kebijakan Lokal Ternyata Tidak Memiliki Korelasi Signifikan

1. Infrastruktur menunjukkan semua faktor infrastruktur sangat penting dalam pengembangan FTZ.
2. Biaya izin investasi juga signifikan dan penting.
3. Upah minimun regional (UMR) juga menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap FTZ

IV. Kesimpulan

a. Lokasi yang strategis menjadi kunci pendirian FTZ
b. Infrastruktur. transportasi seperti bandara, pelabuhan, jalan raya dan kereta api menjadi faktor pendukung infrastruktur untuk keberhasilan dan berkembangnya FTZ
c. Kebijakan lokal dan biaya investasi. Kemudahan berinvestasi dan kepastian peraturan yang mudah.
d. Ketersediaan *high-skilled worker* untuk mendukung operasional perusahaan.

V. Rekomendasi

1. Pemkot dan BP Batam agar melakukan pembangunan infrastruktur dan transportasi untuk keberhasilan dan berkembangnya Batam sebagai FTZ.
2. BP Batam berserta dengan BKPM dan Pemkot Batam memberikan kemudahan/insentif untuk menarik investor ke Batam, misalnya dengan mempersingkat waktu pengurusan izin investasi.
3. Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam memberikan pelatihan kepada tenaga kerja di Batam sehingga tersedia tenaga kerja terampil dengan jumlah yang mencukupi.

BAB II

ANALISIS EKONOMI REGIONAL

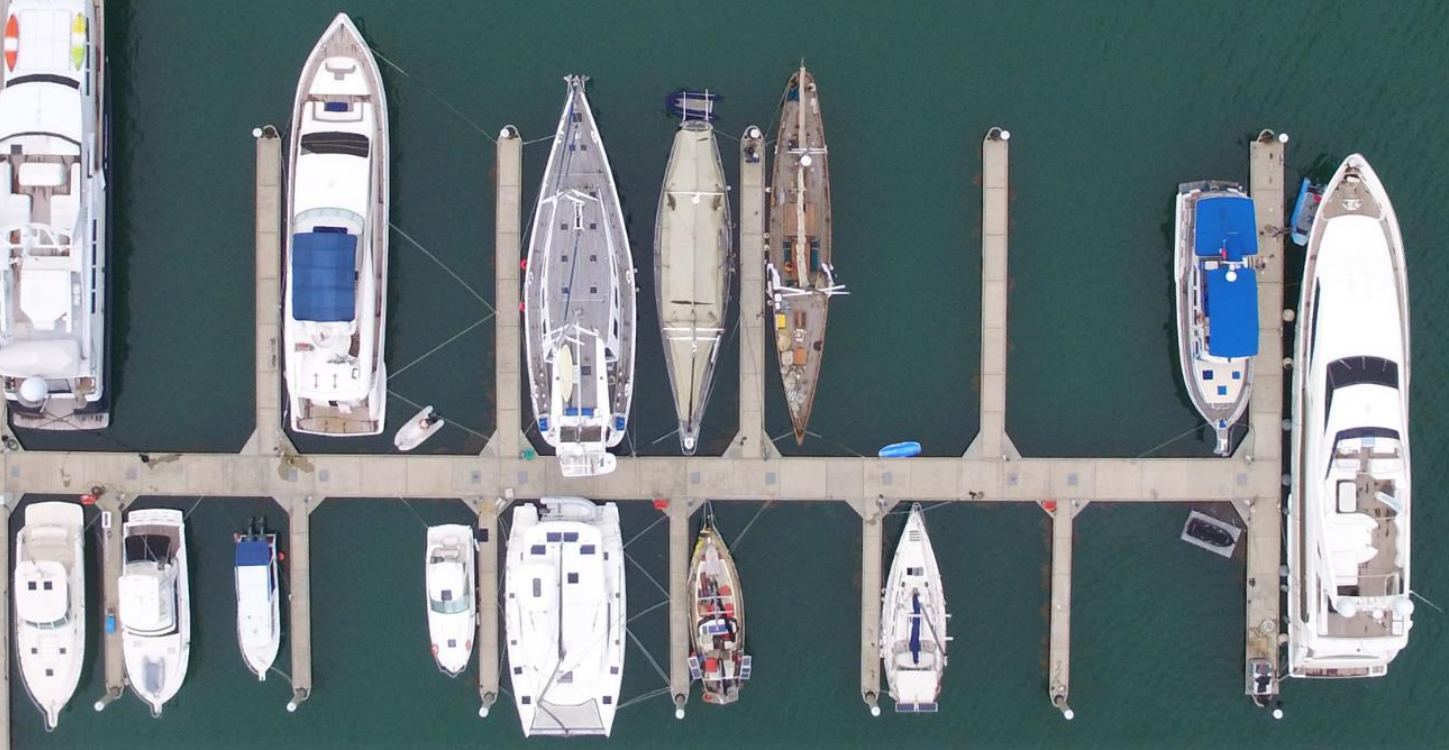

Pelabuhan Nongsa
Kota Batam

Pelabuhan Nongsa merupakan pelabuhan internasional yang berada di bagian timur laut pulau Batam. Pelabuhan ini menghubungkan kota Batam dengan Singapura pada jarak yang terdekat dan tempat bersandarnya kapal dari luar negeri.

BAB II
ANALISIS EKONOMI REGIONAL

2.1 Analisis Indikator Makro Ekonomi

2.1.1 Produk Domestik Regional

2.1.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

- Pertumbuhan Perekonomian Kepri Triwulan IV 2023 Tumbuh Positif **4,45 persen *(yoy)*.**
- Pertumbuhan Perekonomian Kepri Triwulan IV 2023 Tumbuh Positif **6,80 persen *(qtq)*.**
- Pertumbuhan Perekonomian Kepri Tahun 2023 Tumbuh Positif **5,20 persen *(ctc)*** dan menjadi provinsi dengan angka pertumbuhan ekonomi **tertinggi nomor 2 di regional Sumatera.**

Grafik 2.1 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2019-2023 (% yoy)

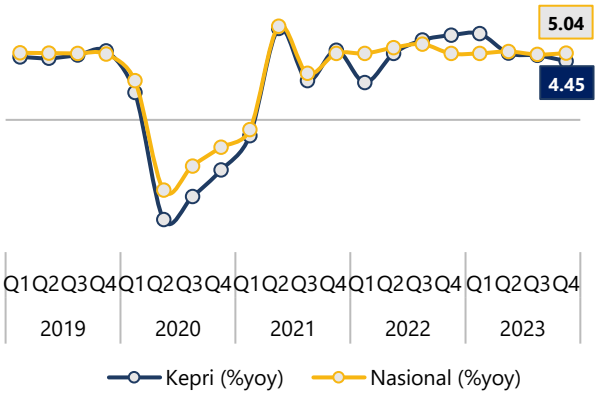

Grafik 2.2 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2019-2023 (% qtq)

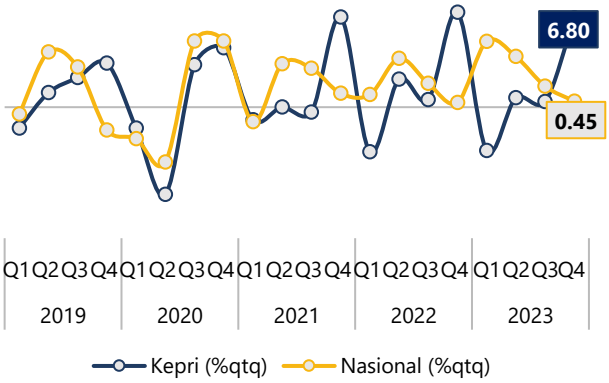

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Sejalan dengan perekonomian nasional yang tumbuh sebesar 5,04 persen (*yoy*), perekonomian Kepri juga tumbuh sebesar 4,45 persen (*yoy*) menggunakan data triwulan IV tahun 2023. Perlambatan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh beberapa fenomena di antaranya akibat adanya cuaca ekstrem sebagai dampak dari EI Nino yang terjadi di Indonesia pada awal semester II 2023 hingga Desember 2023. Kondisi angin yang kuat di wilayah sekitar pulau-pulau juga menjadi penyebab perlambatan ekonomi di triwulan IV 2023.

Grafik 2.3 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepri Tahun 2019-2023 (% ctc)

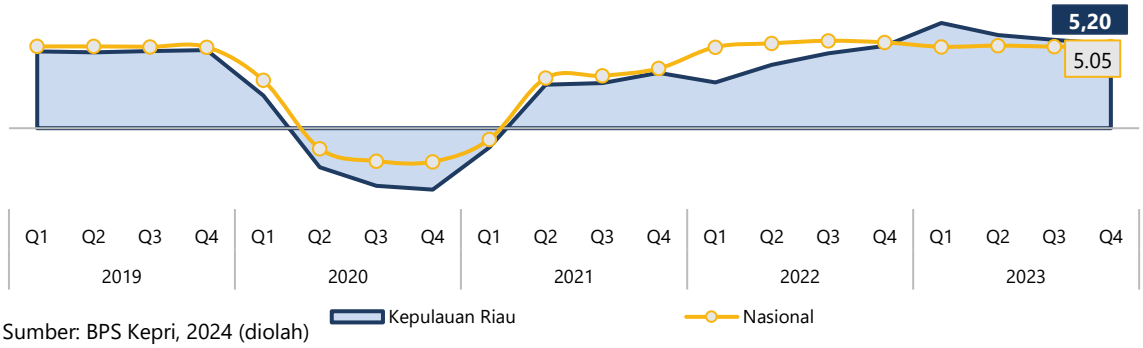

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kepri pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang optimal dengan angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri menjadi yang tertinggi di Sumatera 5,20 persen (*ctc*). Hal tersebut didukung dengan fenomena peningkatan jumlah penumpang angkutan laut dan jumlah wisatawan mancanegara di triwulan IV 2023 karena adanya libur Natal dan Tahun Baru.

Grafik 2.4 - Laju Pertumbuhan Ekonomi Regional Sumatera Triwulan IV 2023 (% ctc, % yoy, dan % qtq)

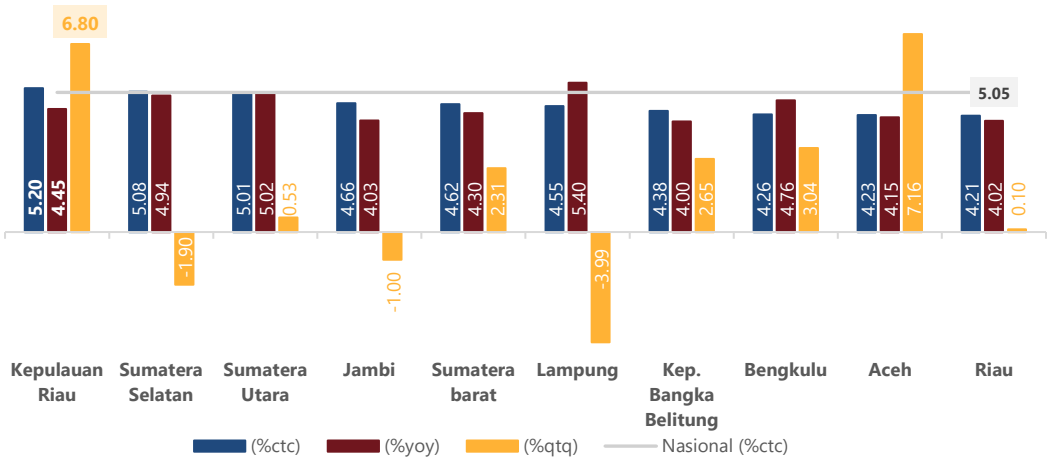

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

2.1.1.2 Pertumbuhan PDRB

Kinerja ekonomi makro Kepulauan Riau (Kepri) triwulan IV 2023 yang dinilai berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) menyentuh angka Rp89,97 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp52,72 triliun.

Grafik 2.5 – Perkembangan Nominal PDRB Triwulanan Provinsi Kepri Tahun 2021-2023 (Rp Triliun)

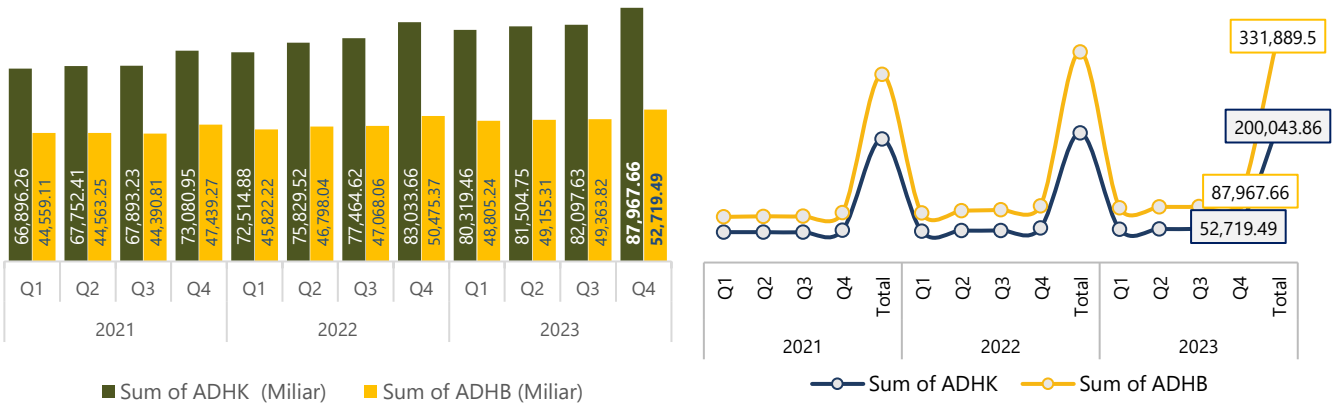

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

- ***PDRB Berdasarkan Pengeluaran***

Grafik 2.6 - Growth and Share PDRB Berdasarkan Pengeluaran

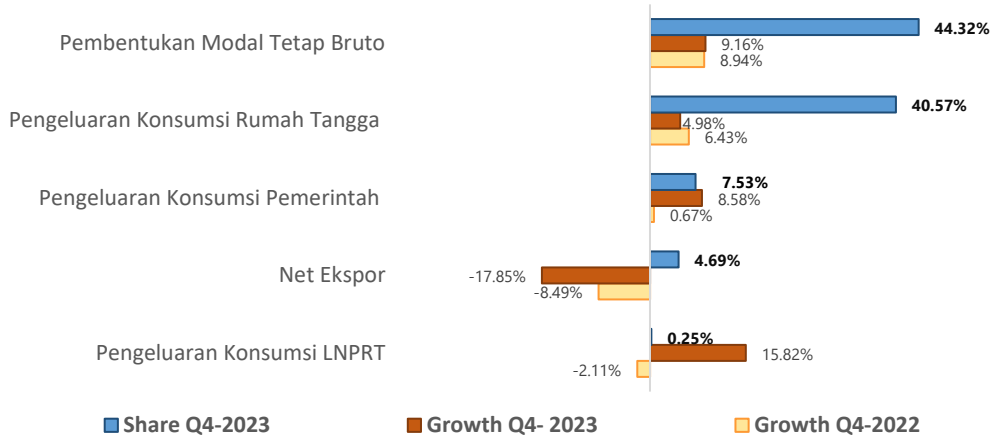

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kepri bila dilihat dari sisi pengeluaran, didominasi oleh komponen **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** atau investasi dengan kontribusi sebesar 44,32 persen (*yoy*), pertumbuhan pada komponen PMTB tersebut tumbuh 9,16 persen (*yoy*) lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,94 persen (*yoy*). Hal ini sejalan dengan peningkatan investasi di Kepri secara (*yoy*). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kepri berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terealisasi sebesar Rp3.308,65 miliar atau tumbuh 288,89 persen dibandingkan tahun 2022 (*yoy*).

Peningkatan Komponen PMTB di triwulan IV 2024 juga didukung dengan dibangunnya 22 proyek pembangunan infrastruktur jalan yang terdiri dari 5 (lima) kegiatan prioritas nasional dan 15 (tujuh belas) kegiatan prioritas BP Batam. Proyek tersebut antara lain adalah pembangunan jalan koridor utama dari simpang Laluan Madani hingga ke Simpang Bundaran Punggur. Selanjutnya, disepanjang tahun 2023 juga telah dibangun lima pelabuhan senilai Rp38 miliar di Tarempa dan Kuala Maras di Letung (Kabupaten Anambas), pelabuhan Pantai Indah Kijang (Kabupaten Bintan), Pelabuhan Penagi Ranai (Kabupaten Natuna), dan Pelabuhan Selat Belia Kundur (Kabupaten Karimun) yang dibangun dalam rangka memperkuat konektivitas wilayah antar pulau.

Adapun akselerasi PMTB di tahun 2023 juga didorong oleh peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari sebelumnya terkontrak sebesar 25,68 persen (*yoy*) menjadi tumbuh sebesar 288,89 persen (*yoy*).

Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT)

Pertumbuhan komponen PK-RT tumbuh sebesar 4,98 persen (*yoy*), tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan triwulan sebelumnya 2,77 persen (*yoy*). Peningkatan konsumsi rumah tangga ini sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) triwulan IV 2023 sebesar 123,8 yang meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 121,7. Indeks tersebut berada di atas 100 yang berarti bahwa persepsi konsumen cukup positif dan optimis terkait kondisi ekonomi saat ini dan ke depan. Hal ini sangat diperlukan bagi Pemerintah agar program pembangunan mendapat dukungan dari masyarakat.

Konsumsi Pemerintah

Komponen Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 8,58 persen (*yoy*), tumbuh lebih tinggi dibanding periode sebelumnya 1,18 persen (*yoy*). Peningkatan yang cukup tajam pada periode triwulan IV 2023 didorong oleh akselerasi belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menumpuk akhir tahun anggaran. Secara spasial, keseluruhan kabupaten/kota mengalami peningkatan konsumsi pemerintah.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga

Selanjutnya, bila dilihat dari pertumbuhan antar komponen pembentuk PDRB dari sisi pengeluaran, komponen PK-LNRPT tumbuh dengan pesat di triwulan IV 2023 dengan pertumbuhan 15,82 persen (*yoy*). Hal tersebut didorong oleh tingginya aktivitas kegiatan dari partai politik di tengah tahun politik yang turut memberi dampak pada kemajuan perekonomian, khsususnya dari tingginya aktivitas pencetakan baliho dan kegiatan pertemuan menjelang pemilu yang meningkatkan konsumsi listrik terjual kategori sosial yang naik 18,47 persen (*yoy*).

Komponen Net Ekspor

Net ekspor merupakah salah satu komponen pengeluaran PDRB yang mengalami perlambatan pertumbuhan di triwulan IV 2023. Net ekspor pada periode ini tumbuh negatif 17,85 persen (*yoy*). Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah impor yang terjadi akibat meningkatnya impor barang konsumsi dan bahan baku.

- ***PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha***

Grafik 2.7 – Growth and Share PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

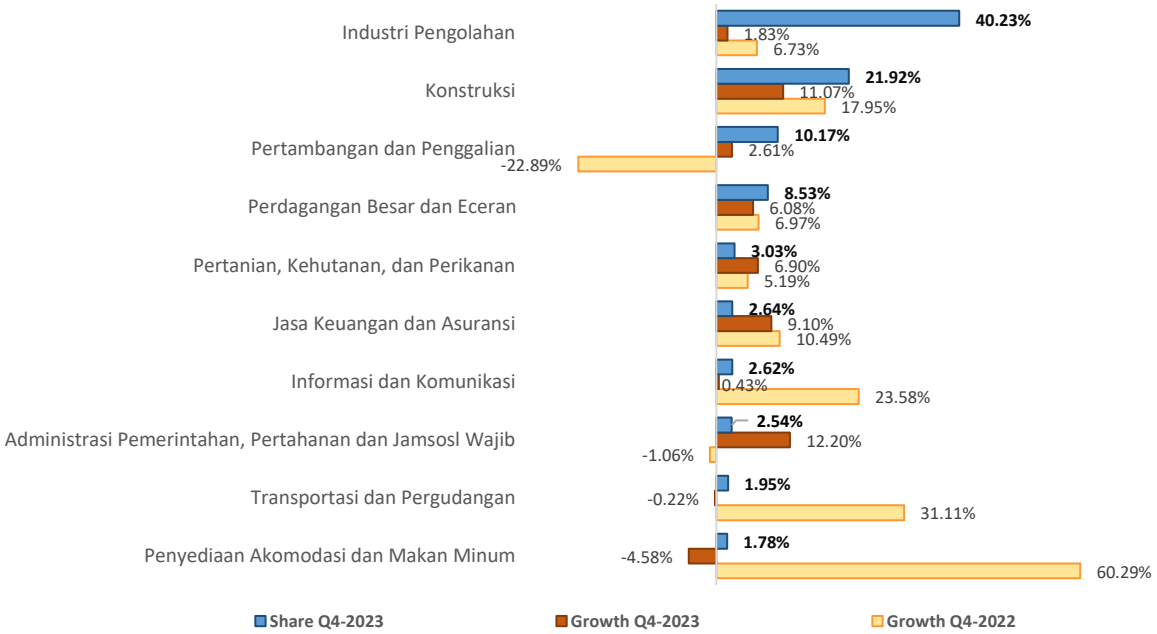

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient (LQ)*, analisis *Shift-Share (SS),* dan Analisis Tipologi *Klassen*, **Industri Pengolahan dan Konstruksi** merupakan **Sektor Unggulan** yang ada di Provinsi Kepri. Hal tersebut selaras dengan kontribusi Lapangan usaha Industri Pengolahan dan Konstruksi yang menjadi penyumbang PDRB tertinggi di Provinsi Kepri per tahun 2023. Selanjutnya, **Sektor Potensial** di Provinsi Kepri ada di sektor **Pengadaan Listrik dan Gas,** yang kemudian disusul oleh Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial secara berturut-turut.

Kinerja Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Peningkatan kinerja lapangan usaha juga didorong oleh **Industri Pengolahan** dengan kontribusi terhadap PDRB triwulan IV yaitu 40,23 persen (*yoy*). Industri pengolahan yang menjadi kelompok lapangan usaha unggulan di Kepri didominasi oleh produksi barang logam, elektronik, optik, dan peralatan listrik.

Kinerja Lapangan Usaha Konstruksi

Dari sisi lapangan usaha, percepatan pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan IV 2023 didorong oleh kinerja **Lapangan Usaha Konstruksi** yang tumbuh 11,07 persen (*yoy*) dan menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di triwulan IV 2023 dengan pembangunan infrastruktur yang masif di Provinsi Kepri.

Kinerja Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian

Kinerja lapangan usaha **Pertambangan dan Penggalian** terus tumbuh membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan pengoperasian sumur produksi baru migas di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas. Kedua Kabupaten ini memiliki kapasitas migas yang cukup besar. Selain itu, kinerja Pertambangan dan Penggalian juga didorong oleh harga minyak yang terus mengalami peningkatan. Harga minyak dunia berlanjut meningkat dari sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar 32,12 persen (*yoy*) menjadi terkontraksi sebesar 9,29 persen (*yoy*).

2.1.2 Inflasi

Inflasi merupakan pertumbuhan umum dan berkelanjutan dari harga barang dan jasa dalam periode tertentu. Analisis inflasi dibutuhkan untuk melihat kestabilan ekonomi yang secara khusus memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat.

Grafik 2.8 - Perkembangan Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2021-2023 (% yoy)

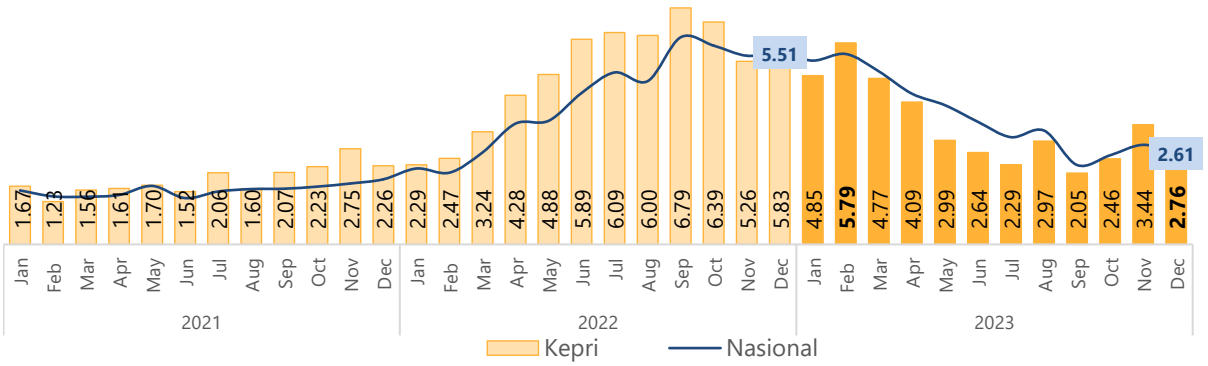

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Tekanan inflasi pada 2 kota gabungan (kota Batam dan kota Tanjung Pinang) di Kepri pada bulan Desember 2023 sebesar 2,76 persen (*yoy*) dan 0,44 persen (*mtm*). Tekanan inflasi tersebut lebih stabil dan menurun bila dibandingkan dengan Desember 2023 (*yoy*) maupun dibandingkan dengan November 2023 (*mtm*). Penyumbang inflasi di bulan Desember 2023 didominasi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Grafik 2.9 - Perkembangan Inflasi Provinsi Kepri Tahun 2021-2023 (% mtm)

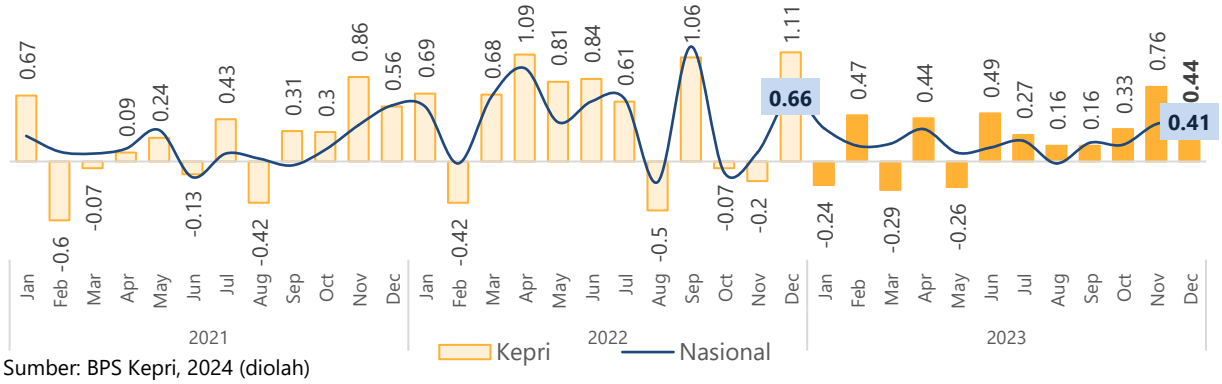

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Grafik 2.10 - Perkembangan Inflasi Regional Sumatera, 2023 (% mtm, % yoy, % ytd)

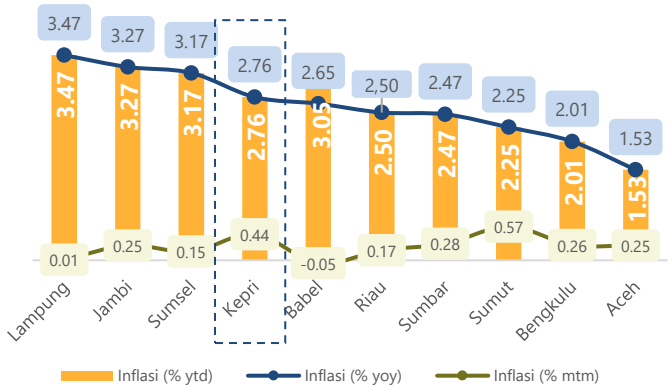

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Pada periode Desember 2023, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menduduki peringkat ke-9 dan ke-18 dari 24 kota yang mengalami inflasi di Sumatera (*yoy*). Jika berdasarkan inflasi month to month, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menduduki peringkat ke-3 dan ke-14 dari 19 kota yang mengalami inflasi di Sumatera.

Kenaikan harga di Provinsi Kepri juga dapat dilihat dari naiknya harga komoditas bahan pangan seiring dengan adanya beberapa gagal panen yang diakibatkan oleh cuaca ekstrem sebagai dampak dari El Nino dan suplai beras atau bahan pokok lain yang diborong untuk beberapa kepentingan parpol di masa pemilu.

Komoditas yang mempunyai andil Inflasi besar dari gabungan 2 kota IHK Kepri pada bulan Desember 2023 (yoy) adalah Beras 0,40 persen, Rokok Kretek Filter 0,29 persen, Cabai Merah 0,23 persen, Emas Perhiasan 0,19 persen, dan Biaya Sewa Rumah sebesar 0,10 persen. Kemudian, komoditas yang mempunyai andil Deflasi terbesar pada bulan Desember 2023 (yoy) adalah Bensin (-0,06 persen), Ikan Mujair (-0,05 persen), Kangkung (-0,04 persen), Daging Ayam Ras (-0,04 persen), dan Telur Ayam Ras (-0,03 persen).

Special Issue:

Pada tahun 2024, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kepri Tahun akan menginisiasi Kab. Karimun sebagai daerah tambahan yang diperhitungkan/diukur tingkat inflasinya, selain Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di wilayah Kepri telah berupaya untuk mengendalikan inflasi melalui kegiatan pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran bahan bersubsidi, Mobil Pasar Keliling yang bekerja sama dengan asosiasi distributor untuk menjual dengam harga distributor yang menjangkau wilayah kecamatan/kelurahan di Kota Batam, serta peningkatan produksi pangan lokal dengan optimalisasi program tanam pekarangan, program pemberdayaan narapidana untuk penanaman produk pangan dan peningkatan produksi ikan hasil budidaya air tawar dan air laut.

2.2 Analisis Indikator Kesejahteraan

2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan atas capaian hasil pembangunan suatu wilayah/daerah dalam aspek pembangunan manusia. Tidak hanya mengukur capaian ekonomi semata, IPM juga memiliki esensi dasar sebagai indikator atas kebahagiaan manusia dalam aspek kehidupan.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kepri secara perlahan terus meningkat sejalan dengan pencapaian ekonomi nasional dan daerah. Kenaikan IPM Kepri dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Angka dari IPM bukan hanya mengukur tingkat kesejahteraan manusia namun juga mengukur tingkat pendidikan, kesehatan, dan juga kesempatan dalam mendapatkan pengetahuan. Angka IPM terdiri dari 3 dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pendidikan (*knowledge*), serta standar hidup layak (*decent standard of living*) diukur dari pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan dengan daya beli (*Purchasing Power Parity*/PPP) di wilayah yang bersangkutan.

Sejak tahun 2023, terdapat perubahan metode perhitungan IPM, yang sebelumnya menggunakan UHH dengan tahun dasar 2010, saat ini telah menggunaan UHH dengan tahun dasar 2020. Hal tersebut akhirnya menyebabkan adanya perubahan IPM yang berbeda sejak tahun 2020 hingga tahun 2023.

Grafik 2. 11 - Perkembangan IPM Provinsi Kepri, Nasional, dan Target Tahun 2020-2023

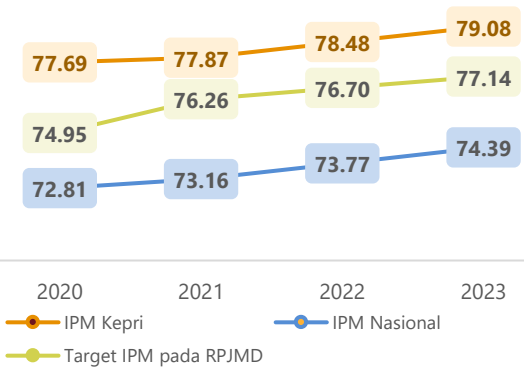

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Tabel 2.1 - Perkembangan IPM Per Kab/Kota di Provinsi Kepri Tahun 2020-2023

Provinsi/Kab/Kota	2020	2021	2022	2023
Provinsi Kepri	**77,69**	**77,87**	**78,48**	**79,08**
Kota Batam	81,81	81,82	82,25	**82,64**
Kota Tanjung Pinang	79,96	79,98	80,58	81,14
Kab. Natuna	77,03	77,33	77,59	78,23
Kab. Bintan	76,04	76,48	76,80	77,50
Kab. Karimun	72,85	73,11	73,96	74,70
Kab. Kep. Anambas	71,50	71,86	72,15	72,80
Kab. Lingga	70,38	70,82	71,48	**72,23**

Pembangunan manusia di Kepri terus mengalami kemajuan. Sejak 2010, status pembangunan manusia di Kepri sudah berada di level "tinggi". Berdasarkan data IPM dengan metode perhitungan baru, angka IPM Kepri pada tahun 2023 dengan tingkat IPM tertinggi ke-tiga Nasional sebesar 79,08 dan tumbuh sebesar 0,76 persen (*yoy*). Bila dilihat per kab/kota di Provinsi

Kepri, disepanjang tahun 2023 angka IPM tertinggi berada di Kota Batam sebesar 82,64 dan IPM terendah ada di Kabupaten Lingga pada angka 72,23.

Grafik 2.12 - Indeks Pembangunan Manusia Regional Sumatera Tahun 2020-2023

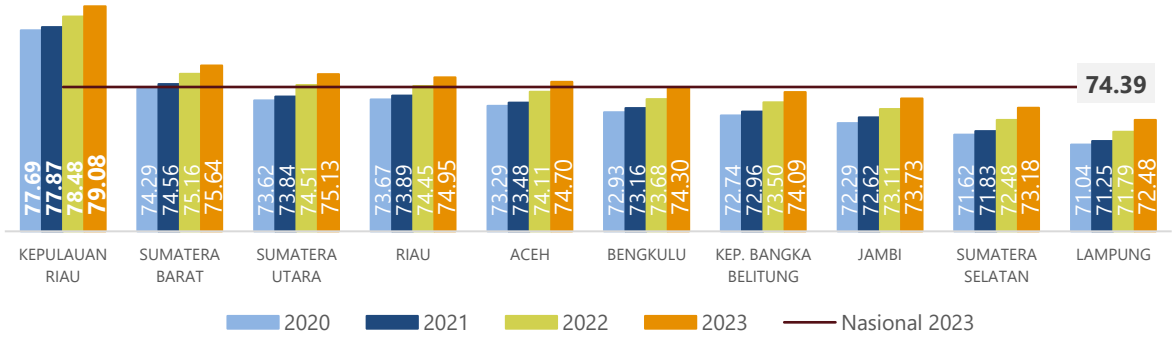

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Capaian tersebut merupakan prestasi bagi Kepri yang berhasil menjadi provinsi dan menjadi IPM tertinggi pada Regional Sumatera selama lima tahun berturut-turut. Kemudian, IPM Kepri di tahun 2023 juga telah melampaui angka IPM yang ditargetkan dalam RPJMD Kepri 2021-2026 yaitu 77,14.

Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Regional Sumatera, IPM Provinsi Kepri berada pada peringkat tertinggi selama empat tahun berturut-turut. Selanjutnya disusul oleh Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Aceh, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung secara berturut-turut.

IPM dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, IPM < 60 (rendah), 60 ≤ IPM < 70 (sedang), 70 ≤ IPM < 80 (tinggi), IPM ≥ 80 (sangat tinggi). Bila dilihat berdasarkan Kab/Kota, IPM dengan kategori tertinggi ada di Kota Batam dan Tanjungpinang dengan nilai IPM masing-masing sebesar 82,64 dan 81,14.

Grafik 2.13 – Tren IPM Per Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2023

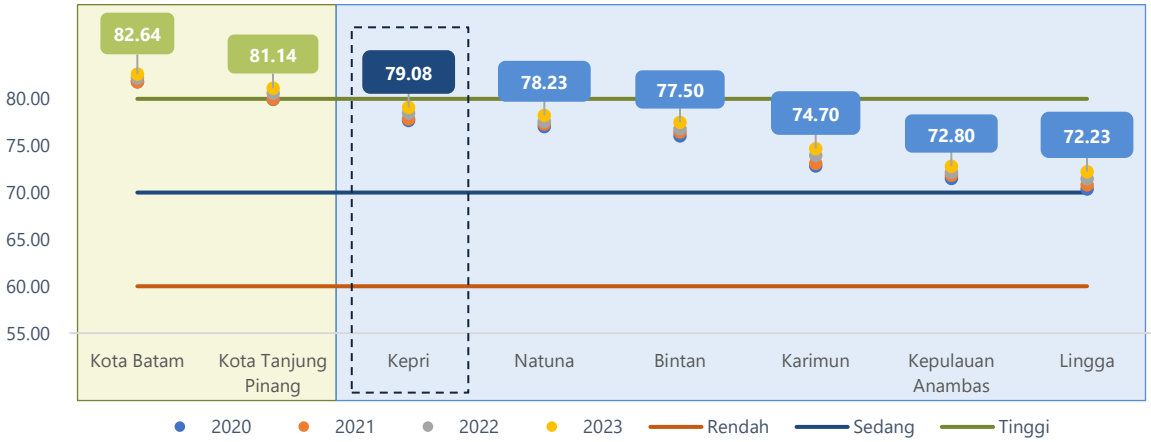

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Selanjutnya, berdasarkan kategori IPM yang terdapat pada Grafik 2.13, dapat terlihat bahwa profil IPM disepanjang tahun 2020-2023 pada seluruh kab/kota di Provinsi Kepri terbagi atas kategori Tinggi dan Sangat Tinggi. **Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menjadi Kota dengan kategori IPM "Sangat Tinggi"** ≥ 80 dengan IPM di tahun 2023 masing-masing sebesar 82,64 dan 81,14. Kemudian, untuk Provinsi Kepri, Kab. Natuna, Kab. Bintan, Kab Karimun, Kab. Kep. Anambas, dan Lingga berada di kategori IPM "Tinggi".

Grafik 2.14 - Nilai Indikator Indeks Pembangunan Manusia di Kepri Tahun 2020-2023

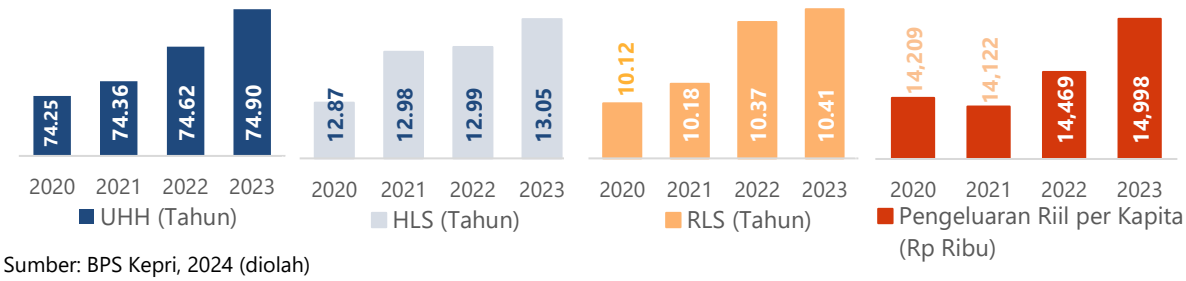

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Keberlanjutan peningkatan IPM Kepri menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan yang tercermin dari indikator pembentuk IPM, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan standar hidup layak yang diukur dari nilai pengeluaran per kapita. Pada tahun 2023, UHH penduduk Kepri mengalami peningkatan sebesar 0,38 persen (*yoy*), menjadi 74,90 dari sebelumnya 74,62. Peningkatan UHH dapat diartikan bahwa bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga usia 70,50 tahun.

Kemudian, HLS Kepri di tahun 2023 meningkat 0,46 persen menjadi 13,05 tahun dari yang sebelumnya 12,99 tahun, peningkatan tersebut memberikan arti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,05 tahun. Lebih lanjut, RLS di Kepri juga meningkat 0,39 persen menjadi 10,41 tahun dari yang sebelumnya 10,37 tahun, artinya penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 10,37 tahun. Peningkatan juga terjadi pada pengeluaran per kapita yang tumbuh sebesar 3,66 persen di tahun 2023 (*yoy*) yang menandakan adanya peningkatan pengeluaran masyarakat Kepri, baik dari sisi konsumsi maupun sisi investasi. Perbaikan kesejahteraan masyarakat Kepri yang tergambar melalui keempat indikator pembentuk IPM yang terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan adanya kualitas hidup masyarakat Kepri yang semakin baik.

Dalam upaya mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan IPM, khususnya di Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, khususnya melalui dukungan pada **Belanja Bidang Kesehatan dan Bidang Pendidikan.** Disepanjang tahun 2023, pemerintah pusat melalui APBN telah menganggarkan Belanja Fungsi Kesehatan dan Fungsi Pendidikan dengan pagu masing-masing sebesar Rp226,37 miliar dan Rp693,28 miliar.

Sampai dengan akhir tahun 2023, **Belanja Bidang Kesehatan** telah direalisasikan sebesar Rp221,59 miliar atau tercapai 97,89 persen dari Pagu tahun 2023. Belanja tersebut difokuskan pada Program Kesehatan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan dan JKN,

Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Selanjutnya, sampai dengan akhir tahun 2023, **Belanja Bidang Pendidikan** telah direalisasikan sebesar Rp677,79 miliar atau tercapai 97,77 persen dari Pagu tahun 2023. Belanja tersebut difokuskan pada peningkatan Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, Pemajuan dan Pelestarian Bahasan dan Kebudayaan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Pendidikan Tinggi, serta Program Perpustakaan dan Literasi.

Dalam meningkatkan IPM, Pemda Provinsi Kepri juga melaksanakan beberapa program diantaranya dengan **Penyediaan Rumah Singgah di Jakarta dan Batam dengan fasilitas lengkap secara gratis** dalam rangka membantu masyarakat yang akan berobat, **Penambahan Ambulance Laut** di Lingga, Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), **rehabilitasi rumah masyarakat Suku Laut, serta peningkatan layanan RS melalyu penyediaan layanan pemasangan Ring Jantung dan kerjasama dengan RS dr.Sarjito Yogyakarta pada RSUD Raja Ahmad Tabib.**

2.2.2 Tingkat Kemiskinan

Tingkat penduduk miskin di sebuah daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan tingkat kemiskinan adalah salah satu ukuran keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan kesejahteraan penduduk miskin tidak hanya tercermin pada penurunan angka kemiskinan saja namun juga terdapat perbaikan kualitas hidup penduduk miskin.

Grafik 2.15 - Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepri Tahun 2019-2023 (ribu jiwa

Grafik 2.16 - Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Kepri Berdasarkan Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2019-2023 (ribu

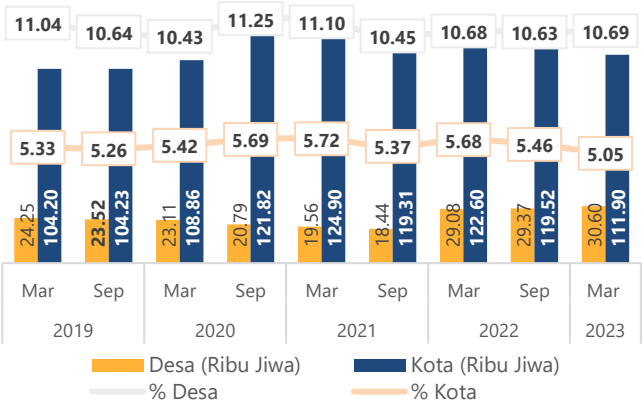

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Berdasarkan ketersediaan data Angka Kemiskinan Provinsi Kepri per bulan Maret 2023, Angka Kemiskinan di Provinsi Kepri sebesar 142,50 ribu jiwa atau 5,69 persen dari total penduduk Kepri. Angka tersebut mengalami penurunan, baik dari jumlah penduduk miskin maupun dari persentasenya. Bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri bulan Maret 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,55 persen poin atau menurun ±9,18 ribu jiwa (*yoy*) dan bila dibandingkan dengan

bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri mengalami penurunan sebesar 0,34 persen poin atau menurun ±6,4 ribu jiwa.

Angka kemiskinan terbagi atas daerah perkotaan dan pedesaan dengan garis kemiskinan yang berbeda. Garis kemiskinan di Provinsi Kepri per Maret 2023 adalah sebesar Rp747.258,- di daerah Perkotaan dan Rp708.168,- untuk di daerah Pedesaan. Sampai dengan periode Maret 2023, angka kemiskinan di Perkotaan sebear 10,69 persen dan di Pedesaans ebesar 5,05 persen.

Grafik 2.17 - Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Regional Sumatera Tahun 2019-2023 (%)

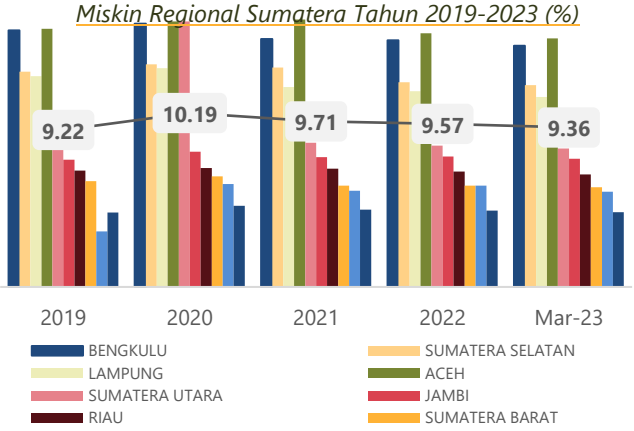

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Pada bulan Maret 2023, persentase penduduk miskin di Kepri yang sebesar 5,69 persen menjadi persentase **terendah keenam se-Indonesia**, atau **terendah kedua di Pulau Sumatera** di bawah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Angka ini juga berada di bawah angka kemiskinan Nasional yang sebesar 9,36 persen. Bila dibandingkan dengan target RPJMD Provinsi Kepri yang menargetkan persentase penduduk miskin di Tahun 2023 sebesar 5,74 persen, persentase penduduk miskin di Kepri (5,59 persen) masih berada dalam rentang yang aman dan bahkan lebih dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Beberapa upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan adalah adanya operasi pasar murah yang merupakan kegiatan (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) GNPIP bekerjasama dengan Bank Indonesia, program subsidi dengan bunga pinjaman nol persen untuk UMKM, dan percepatan belanja pemerintah.

Pemerintah juga turut mendorong daya beli masyarakat melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang s.d. Desember 2023 telah tersalurkan sebesar Rp36,59 miliar kepada 40.660 KPM di 275 desa di 5 kabupaten lingkup Kepri (Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas). Penurunan kemiskinan juga didukung dengan inflasi Provinsi Kepri yang tetap stabil dan ketersediaan bahan pokok disepanjang tahun 2023.

2.2.3 Gini Ratio

Grafik 2.18 - Perkembangan Gini Ratio Provinsi Kepri, 2020-2023

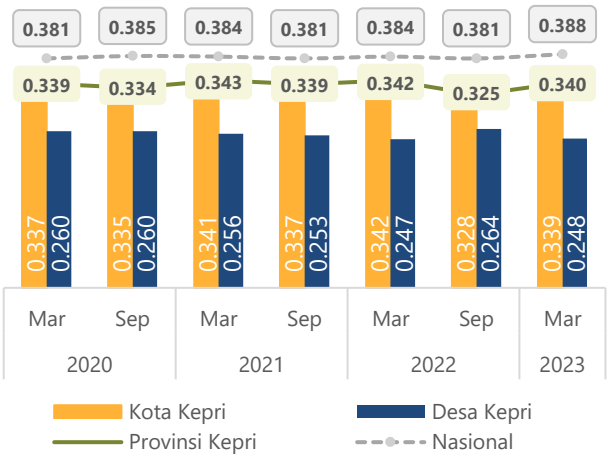

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Gini Ratio Kepri per Maret 2023 sebesar 0,34, meningkat 0,015 persen dibandingkan September 2022 sebesar 0,325, artinya ketimpangan pengeluaran meningkat pada periode Maret 2023. Namun bila dibandingkan dengan periode Maret 2022, Pemerintah dengan upaya yang dilakukan, di antaranya dengan tetap menyalurkan bantuan sosial, menciptakan lapangan kerja yang layak serta perbaikan standar pengupahan yang dibutuhkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dalam menyambut ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.

Grafik 2.19 - Perkembangan Gini Ratio Regional Sumatera, 2020-2023

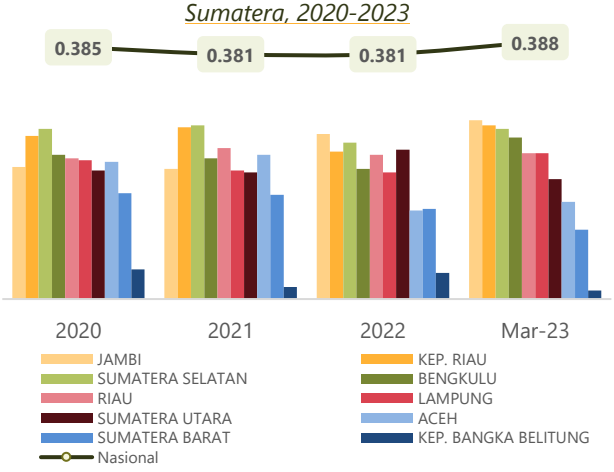

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Angka *gini ratio* Provinsi Kepri per Maret 2023 berada pada **peringkat kedua tertinggi di regional Sumatera**. Pertumbuhan ekonomi yang terus melaju nyatanya tidak serta merta mengurangi ketimpangan sosial, hal ini menunjukkan bahwa kemanfaatan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, khususnya di Kepulauan Riau yang pada periode Maret 2023 tidak dirasakan secara merata. Artinya, golongan masyarakat berpendapatan rendah mempunyai kecepatan yang lebih rendah dalam menikmati "kue" suksesnya pertumbuhan ekonomi.

Dalam memberikan peran hadirnya Pemerintah bagi masyarakat dalam mengurangi tingkat pendapatan masyarakat, terdapat beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Pemda maupun Pempus dalam menurunkan rasio gini yang ada di Provinsi Kepri.

Beberapa wujud peran pemerintah dilakukan dalam pemberian program pemberdayaan masyarakat melalui Program Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Koperasi, yang pada tahun 2023 telah direalisasikan sebesar Rp458,37 miliar di tahun 2023, program pemberdayaan UMKM juga diberikan dalam pemberian subsidi pembiayaan usaha UMKM baik melalui KUR/UMi/dan Program Pembiayaan Bunga 0% dari Pemprov Kepri. Kemudian, sebagai bantalan sosial, APBN juga telah memberikan BLT kepada para KPM baik

melalui TKD ataupun belanja K/L. Selain itu, program pendidikan dan pelatihan juga terus diberikan baik oleh Pempus maupun Pemda, salah satunya adalah melalui Balai Latihan kerja dalam rangka meningkatkan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja lokal.

2.2.4 Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran

Grafik 2.20 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2023

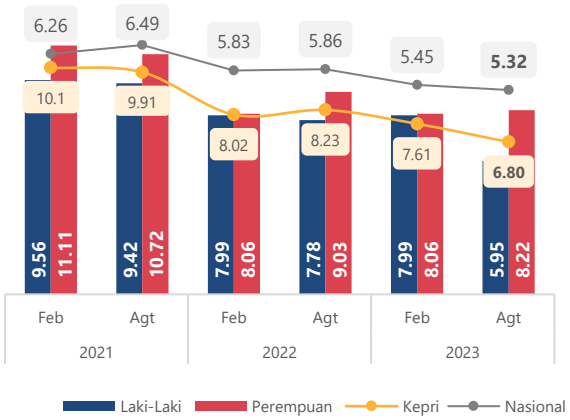

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Angka kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Maret 2023 adalah sebesar 142,50 ribu jiwa atau 5,69% dari total penduduk Kepri. Bila dibandingkan dengan bulan Maret 2022 jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri bulan Maret 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,55% poin atau menurun ±9,18 ribu jiwa (*yoy*) dan bila dibandingkan dengan bulan September 2022, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepri mengalami penurunan sebesar 0,34% poin atau menurun ±6,4 ribu jiwa.

Grafik 2.21 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Regional Sumatera per Agustus 2023

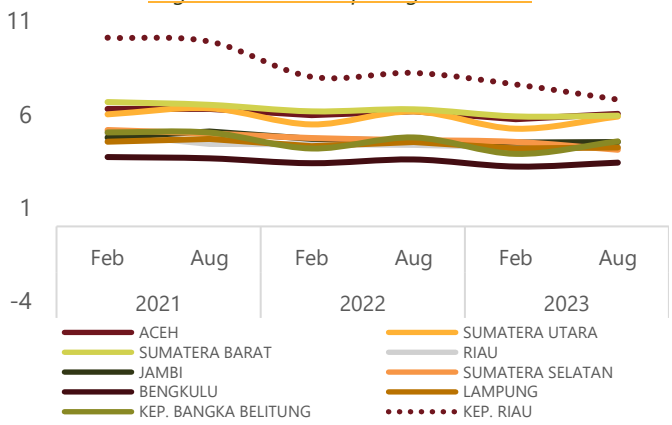

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya angka kemiskinan pada Maret 2023, diantaranya adalah turunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2023 sebesar 0,81 poin bila dibandingkan periode yang sama bulan Februari 2023. TPT pada bulan Februari 2023 sebesar 6,80 persen. Penurunan angka kemiskinan turut dipengaruhi oleh pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pemberdayaan ekonomi/masyarakat, urusan energi, urusan sanitasi dan air bersih.

Sampai dengan Agustus 2023, komposisi angkatan kerja di Kepri tercatat sebanyak 1.093.686 orang atau 68,68 persen dari total penduduk usia serja di Kepri (semua orang yang berumur 15 tahun ke atas). Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja terbanyak di Kepri adalah sektor Industri Pengolahan (25,23 persen), sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar (16,45 persen); dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar (9,01 persen).

Grafik 2.22 - Perkembangan Persentase Pekerja Penuh Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)

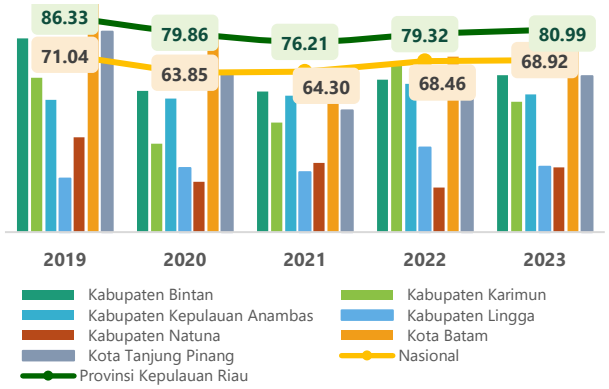

Grafik 2.23 - Perkembangan Persentase Pekerja Paruh Waktu Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2019-2023 (%)

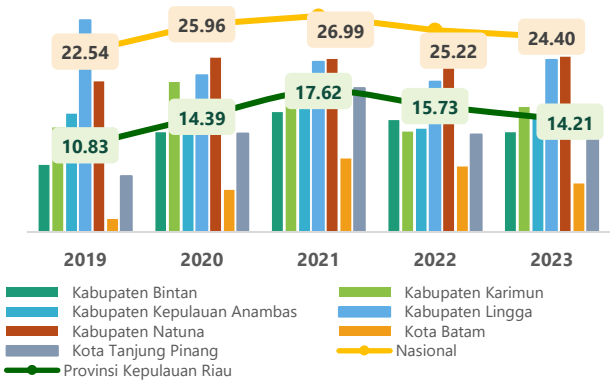

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

Di Provinsi Kepri tahun 2019-2023, rata-rata pekerja penuh yang bekerja dengan waktu kerja mencapai minimal 35 jam seminggu sebanyak 74,94% dari total penduduk angkatan kerja. Rasio ini lebih besar dibandingkan angka nasional sebesar 67,31%. Lalu diikuti oleh rata-rata rasio pekerja paruh waktu sebesar 19,69% dari total penduduk angkatan kerja dan sisanya rasio rata-rata penduduk setengah pengangguran yaitu sebesar 5,37%. Komposisi tingkat pekerja penuh lebih besar dan mendominasi tingkat pekreja paruh waktu dan setengah pengangguran menunjukkan indikator tentang tingkat kesejahteraan masyarakat Kepri yang bekerja cukup baik karena mampu memiliki penghasilan yang memadai untuk kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka menekan TPT di Provinsi Kepri, Pemda Provinsi Kepri telah mengadakan beberapa kegiatan, antara lain adalah dilaksanakannya pembentukan SDM melalui pelatihan ketenagakerjaan di Balai Latihan Kerja (BLK), pelaksanaan *Job Fair,* serta Pelaksanaan Program Pemaganan Kerja diantaranya bekerja sama dengan PT. Meitech Eka Bintan dan PT Inti Sumber Karya.

Highlight Indikator Ketenagakerjaan di Provinsi Kepri per Agustus 2023

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 6,80%
2. Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK): 68,68%
3. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK): 93,20%
4. Tingkat Persentase Pekerja Penuh: 80,99%
5. Tingkat Persentase Pekerja Paruh Waktu: 14,21%
6. Tingkat Persentase Pekerja Setengah Penganggur: 4,80%
7. Tingkat Persentase Usia Muda 15-24 Tahun yang sedang Tidak Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (*Not in Education, Employment, or Training* - NEET): 18,10%

Sumber: BPS Kepri, 2024

2.2.5 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan petani dan dampak terhadap ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. NTP diperoleh dari perbandingan harga barang yang dihasilkan petani dengan harga barang yang dibayar oleh petani atas barang konsumsi dan/atau produksi.

Grafik 2.24 - Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2021-2023

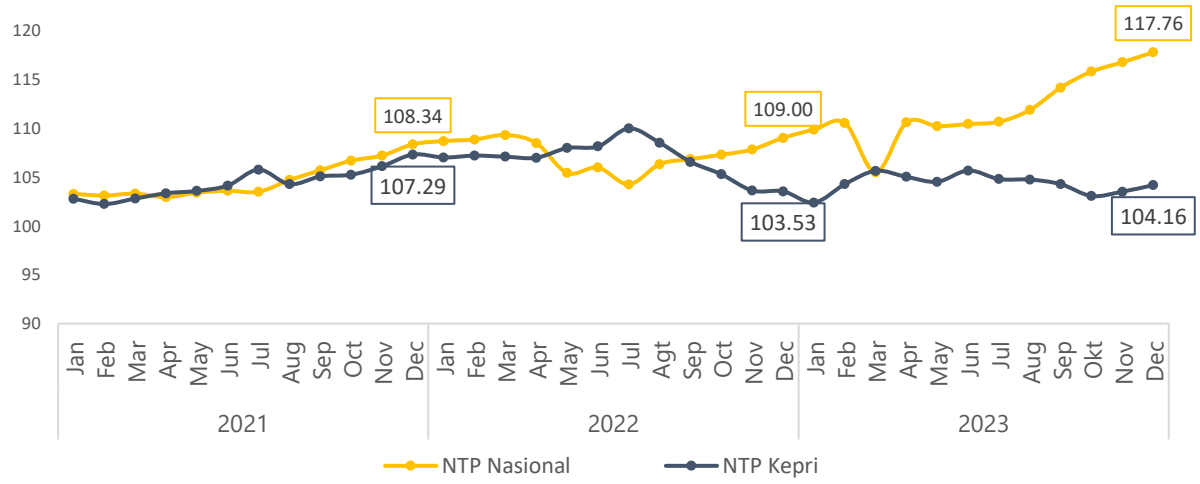

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

NTP Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2023 adalah sebesar 104,16 dan menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,61 persen (*yoy*) tumbuh 0,64 persen (*mtm*). Angka NTP Provinsi Kepri masih berada di bawah angka NTP Nasional, hal tersebut disebabkan oleh kondisi geografis Provinsi Kepri yang memang belum optimal dijadikan sebagai lahan pertanian.

Pada Desember 2023 di Provinsi Kepulauan Riau Indeks Harga yang Diterima Petani (It) mengalami kenaikan sebesar 0,86 persen dibandingkan dengan November 2023, yaitu naik dari 117,24 menjadi 118,25. Dari lima subsektor yang tercatat, Tanaman Pangan naik sebesar 0,07 persen dan subsektor Hortikultura naik sebesar 8,49 persen.

Beberapa tantangan terkait pengembangan sektor pertanian di Kepri antara lain: (1) kurangnya dukungan infrastruktur kegiatan pertanian (irigasi, jalan usaha tani, bangunan

pengolahan hasil pertanian); (2) belum optimalnya kapasitas petani dan pelaku perkebunan karena karakteristik geografis Kepri yang dikelilingi oleh bakau dan tanah bauksit sehingga perlu SDM yang cakap dalam mengelola pertanian; (3) serta perlunya pengembangan penggunaan teknologi pertanian baik dalam pengolahan maupun keberlanJutan pemasaran. Selain itu, lahan pertanian yang tidak terlalu luas juga menjadi tantangan dalam mengembangkan sektor pertanian di Kepri.

Pemerintah pusat turut mengupayakan perkembangan pertanian di Kepri yang dilaksanakan melalui beberapa program. Belanja tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung pertanian di Kepri antara lain: (1) fasilitasi dan pembinaan masyarakat/kelompok masyarakat; (2) sarana pengembangan kawasan hortikultura; (3) penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi pertanian dan peternakan; (4) peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat; (5) serta beberapa kegiatan lainnya yang membantu para petani untuk meningkatkan kualitas produksinya.

Dukungan pada sektor pertanian juga dilakukan oleh TPID Kepri. Pada tahun 2023, TPID Kepri telah membantu para petani melalui pemberian pupuk organik, pemberian bibit tanaman, dan penggunaan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi lokal.

2.2.6 Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai tukar nelayan merupakan suatu ukuran yang digunkaan untuk mengukur perbandingan antara nilai hasil tangkapan ikan atau sumber daya laut lainnya dengan biaya yang dikeluarkan oleh nelayan dalam menangkap dan memproses hasil tersebut.

Grafik 2.25 - Perkembangan Nilai Tukar Nelayan Provinsi Kepri dan Nasional Tahun 2021-2023

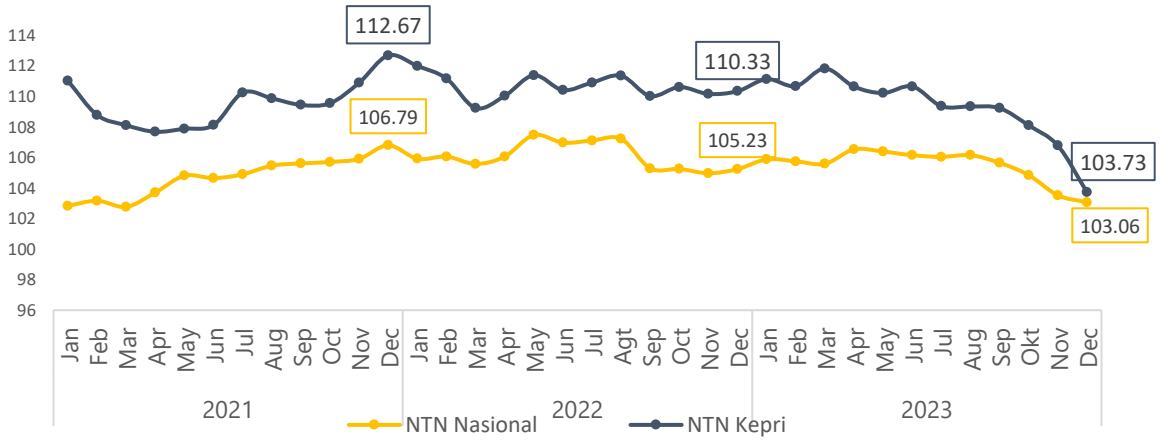

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah)

NTN pada Desember 2023 sebesar 103,73, lebih tinggi dibandingkan NTN Nasional sebesar 103,06. NTN Kepri tersebut mengalami penurunan sebesar 6,65 persen (*yoy*) dan 0,42 persen (*mtm*). Turunnya Nilai Tukar Nelayan disebabkan penurunan Indeks Harga yang Diterima Nelayan (It) sebesar 1,02 persen sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib) naik sebesar 0,20 persen.

Hal tersebut dipicu oleh kondisi geografis lautan yang sedang memasuki masa angin utara dan menyebabkan kurangnya aktivitas nelayan. Selain itu, bila dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat penurunan nilai tukar pada kelompok Perikanan Budidaya turun sebesar 0,10 persen dan kelompok Perikanan Tangkap turun sebesar 2,61 persen.

Pada Desember 2023, NTN dipengaruhi oleh penurunan Kelompok Perikanan Tangkap (lt) sebesar 2,61 persen (yoy) dan Kelompok Perikanan Budidaya sebesar 0,80 persen (yoy). Penurunan tersebut mayoritas didominasi oleh turunnya komoditas patin tawar sebesar 6,67 persen; kepiting laut sebesar 5,72 persen; kakap laut sebesar 1,49 persen; lele tawar sebesar 0,60 persen; dan kerapu laut sebesar 0,10 persen.

Terdapat beberapa tantangan dalam mengembangan sektor perikanan di Kepri, khususnya tantangan dari segi ekonomi dan industri. Beberapa tantangan tersebut antara lain: (1) masih terdapat kasus *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing di pulau terluar Kepri seperti di Natuna dan berdampak pada hilangnya hasil laut Kepri yang seharusnya menjadi bagian nelayan lokal; (2) pencemaran laut oleh pembuangan limbah (minyak hitam) dari kapal internasional di perairan Selat Malaka; (3) lemahnya permodalan dalam menunjang usaha perikanan khususnya, bagi usaha kecil dan menengah; serta (4) teknologi pengolahan perikanan yang masih terbatas dan belum terstandar berstandar ekspor.

Maka dari itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan turut mengupayakan perkembangan sektor perikanan di Kepri yang dilaksanakan melalui beberapa program. Belanja tersebut digunakan dalam upaya mendorong pengembangan sektor perikanan melalui beberapa kegiatan, antara lain: (1) fasilitasi dan pembinaan masyarakat/kelompok masyarakat; (2) operasi pengawasan sumber daya alam; (3) dukungan pembinaan UMKM; (4) fasilitasi dan pembinaan industri; (5) serta beberapa kegiatan lainnya yang membantu para nelayan untuk meningkatkan kualitas produksinya.

2.3 Reviu Capaian Kinerja Makro Kesra Regional

Evaluasi capaian Kinerja Makro dan Kesra (Kesejahteraan Rakyat) sangat diperlukan karena kepentingannya dalam mengawasi dan menilai seberapa efektif kebijakan atau program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan serta mutu kehidupan masyarakat. Dengan menghubungkan target dengan pencapaian indikator makro kesrta, kita dapat menarik kesimpulan apakah kebijakan yang mendasari penetapan target telah dijalankan dengan benar, atau apakah target tersebut hanyalah angka yang ditetapkan tanpa melalui prosedur yang tepat, atau bahkan apakah penetapan target tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Tabel 2.2 – Hasil Reviu Ekfetifitas Kebijakan Makro Ekonomi dan Kesejahteraan Provinsi Kepri Tahun 2023

No.	Sasaran Makro Kesra	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Hasil Reviu
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,9 - 5,8	5,20	• **Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kepri tahun 2023 menujukkan kinerja yang baik dan berada di rentang target RPJMD** yang ditetapkan. Hal tersebut didukung dengan meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kepri di tahun 2023. • Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepri **tahun 2024 sebesar 5,0 – 5,9**.
2.	Laju Inflasi (%)	3,13 ± 1	2,76	• **Inflasi di Kepri disepanjang tahun 2023 memberikan kinerja yang stabil dan cukup mendekati target Inflasi.** Hal tersebut didorong oleh program TPID dan bantuan pempus dan pemda dalam mengoperasikan stok kebutuhan di Kepri. • Proyeksi Laju Inflasi **tahun 2024 sebesar 3,03 ± 1.**
3.	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	77,14	79,08	• **Capaian IPM tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan**, namun demikian terdapat perbedaan (gap) antara target 2023 dan realisasi 2023 (metode baru) tidak dapat dijelaskan karena adanya perbedaan metode perhitungan antara RPJMD dengan data BPS sejak tahun 2023. • Proyeksi IPM **tahun 2024 sebesar 77,58.**
4.	Persentase Kemiskinan (%)	5,74	5,69	• **Capaian angka kemiskinan Kepri per Maret 2023 telah melebihi target RPJMD**. Hal tersebut didorong oleh pemberian BLT melalui TKD dan Belanja K/L di tahun 2023 sebagai bantalan sosial masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan program pemberdayaan kepada masyarakat. • Proyeksi angka kemiskinan **tahun 2024 sebesar 5,69 persen.**
5.	Tingkat Pengangguran (%)	9,50	6,80	• **Capaian TPT Kepri per Agustus 2023 telah melebihi target RPJMD yang ditetapkan**. Hal tersebut didorong oleh program Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat yang mendukung peningkatan kualitas SDM lokal dan kerja sama dengan pengelola industri di Kepri. • Proyeksi TPT **tahun 2024 sebesar 8,70.**
6.	Rasio Gini (Angka)	0,329	0,340	• **Capaian Gini Rasio di Kepri per Maret 2023 masih belum mencapai target yang ditetapkan.** Hal tersebut disebabkan oleh belum meratanya pembangunan antar kab/kota di Provinsi Kepri, khususnya di daerah terluar Kepri yang masih sulit dalam mengakses infrastruktur dan pelayanan umum.

No.	Sasaran Makro Kesra	Target RPJMD 2023	Realisasi 2023	Hasil Reviu
				• Proyeksi angka rasio gini **tahun 2024 sebesar 0.325.**
7.	NTP (Indeks)	99,91	104,16	• **Capaian NTP di Provinsi Kepri per Desember 2023 telah melebihi target yang telah ditetapkan.** Hal tersebut ditetapkan oleh adanya dukungan program pemerintah pusat dan daerah serta GNPIP yang mendukung para petani melalui program peningkatan produktivitas petani. • Proyeksi angka NTP **tahun 2024 sebesar 99.95.**
8.	NTN (Indeks)	115,50	103,73	• **Capaian NTN di Proivnsi Kepri per Desember 2023 masih belum mencapai target yang ditetapkan**. Hal tersebut dipengaruhi oleh cuaca ekstrim, lemahnya permodalan di sektor perikanan, dan sistem pengolahan perikanan di Kepri yang masih terbatas. • Proyeksi angka NTN **tahun 2024 sebesar 116,00.**

Sumber: RPJMD dan BPS Provinsi Kepri, 2021 dan 2023

Kajian II
Dampak Korupsi dan Desentralisasi Fiskal di Daerah
"Apakah Desentralisasi Fiskal Meningkatkan Korupsi di Pemerintah Daerah?

I. Latar Belakang

Tujuan kajian ini untuk mengukur hubungan implementasi desentralisasi fiskal terhadap korupsi di pemerintah daerah. Latar belakangnya adalah implementasi desentralisasi fiskal melalui instrumen transfer ke daerah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun beberapa kelemahan pemda dalam menggunakan dana transfer ke daerah yang tidak *prudent* dan akuntabel menyebabkan menjamurnya praktik korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dan perangkatnya. Dengan diterbitkannya UU HKPD yang membuka fleksibilitas manajamen keuangan daerah lebih luas kepada pemda sangat menarik untuk dikaji secara khusus.

II. Metodologi Penelitian

Kajian ini menggunakan studi empiris dengan menggunakan metodologi panel data *random effect model* dan GMM *estimation model* untuk melihat apakah terdapat hubungan antara tingkat desentralisasi fiskal baik penerimaan maupun pengeluarannya terhadap peningkatan kasus korupsi di Pemda. Untuk melihat hubungan antara desentralisasi fiskal dan korupsi digunakan ***System GMM***. *System GMM* sangat tepat untuk digunakan bila memiliki daya yang memiliki efek dinamis dari korupsi.

III. Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa semakin dibukanya kebebasan dan fleksibilitas penerapan desentralisasi fiskal meningkatkan jumlah kasus korupsi di pemda. Dari faktor-faktor yang dianalisis ditemukan bahwa kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM, rendahnya transparansi dan akuntabilitas serta tingkat ketergantungan yang masih tinggi terhadap transfer ke daerah meningkatkan kasus korupsi di daerah. Semakin heterogen penduduk dan stabilitas politik suatu daerah dapat mengurangi kasus korupsi di Indonesia.

Hubungan antara pertumbuhan PDRB dengan jumlah kasus korupsi terlihat bahwa Jawa Barat memiliki kasus korupsi tertinggi, diikuti dengan Jawa Timur dan DKI Jakarta (Data KPK). Dari sisi regional PDRB, Lampung memiliki tingkat pertumbuhan PDRB tertinggi di tahun 2015 diikuti Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, sementara jumlah kasus korupsinya paling rendah untuk ketiga provinsi tsb.

Tingginya tingkat kesejahteraan yang diukur dengan PDB per kapita semua negara seperti pada *scatter plot* di atas menunjukkan hubungan positif dengan CPI (*corruption perception index*) yang dikeluarkan oleh *Transparency International*. Artinya semakin tinggi PDB per kapita suatu negara maka CPI nya akan semakin tinggi artinya negara tersebut semakin bersih dari korupsi (CPI index 1-100 dengan 1 semakin korup dan 100 semakin bersih dari korupsi). Penyebab korupsi menurut Arndt and Hill (1999) ketika membuat kajian tentang Korupsi di Asia adalah kenaikan tensi politik dan kolapsnya ekonomi seperti krisis Asia 1997. Penyebab utama lainnya adalah rendahnya transparansi terutama di sistem perbankan (Mehrez and Kaufmann, 1999).

Efek negatif korupsi sudah jelas sangat merugikan terhadap kemakmuran masyarakat suatu daerah. Menurut IMF, Efek korupsi dapat menjadi ancaman bagi :

Potensi Pertumbuhan Ekonomi

a. Sumber Daya Fisik Publik dan Perseorangan;
b. SDM;
c. Total Faktor Produktifitas; dan
d. Stabilitas Makro Ekonomi. Bagaimana korupsi mempengaruhi keempat faktor tersebut:

Pada Aspek Sumber Daya Fisik Publik dan Perorangan

a. investasi publik yang tidak efisien;
b. investasi dan produksi yang sangat mahal;
c. komposisi projek dapat terganggu;
d. ketidakpastian investasi dan
e. harga asset terganggu.

Pada aspek SDM

a. pengeluaran yang tidak efisien di bidang pendidkan dan kesehatan;
b. peningkatan kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi,
c. tidak adanya insentif terhadap kepemilikan ketrampilan

Aspek Total Faktor Produktifitas

a. Investasi yang tidak efisien di bidang penelitian dan pengembangan;
b. Ketidakefisienan produksi;
c. alokasi modal terdistorsi dan
d. mismatch ketrampilan

Aspek Stabilitas Makro Ekonomi

a. Krisis perbankan;
b. Ketidakseimbangan eksternal faktor;
c. Ketidakberlangsungan fiskal, dan
d. Keuangan yang tidak merata.

IV. Diskusi dan Hasil:

1. Peningkatan atau adanya korupsi di tahun lalu akan meningkatkan tingkat korupsi di masa sekarang.
2. Semakin bertambahnya jumlah nominal TKD yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda akan meningkatkan jumlah kasus korupsi.
3. Tingkat desentralisasi aspek penerimaan pajak menunjukkan peningkatan jumlah kasus korupsi. Hasil ini sesuai dengan hasil Shon dan Cho (2019); Prudhomme (1995); Goel and Nelson (2011).
4. Kenaikan pertumbuhan PDRB suatu provinsi juga secara signifikan meningkatkan jumlah kasus korupsi. Ini dapat diartikan bahwa semakin kaya suatu provinsi maka semakin banyak pelaku korupsi yang tertangkap apabila manajemen dan akuntabilitas keuangan daerahnya tidak terjaga dan termenej dengan baik

V. Kesimpulan

Desentralisasi fiskal adalah instrumen keuangan negara yang bertujuan untuk memenuhi hak daerah setelah implementasi otonomi daerah. Manfaat yang diharapkan dari desentralisasi fiskal adalah meningkatnya kemandirian daerah secara perlahan seiring dengan kemampuan pemda untuk mencari sendiri pendapatan asli daerahnya (PAD).

Efek negatif korupsi bisa sangat destruktif karena korupsi bisa terjadi mulai dari level paling bawah sampai kepala daerah, tidak hanya dari sisi pengeluaran melainkan dari sisi pendapatan pajak, korupsi bisa masuk dari semua aspek.

Namun, desentralisasi fiskal diyakini telah berhasil sebagai solusi bagi konflik daerah dan etnik di beberapa provinsi di Indonesia seeprti Papua, Aceh dan Sulawesi. Desentralisasi fiskal juga menguntungkan karena memberikan banyak fleksibilitas bagi pimpinan daerah untuk menentukan nasib masyarakat daerahnya dan juga melaksanakan program-progam yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerahnya.

VI. Rekomendasi

1. Pemerintah agar meningkatkan fungsi pengawasan dan audit baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Pemerintah daerah agar meningkatkan kontestasi politik dan mendorong calon kepala daerah yang berasal dari luar provinsi untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah
3. Pemerintah daerah hendaknya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

BAB III

ANALISIS FISKAL REGIONAL

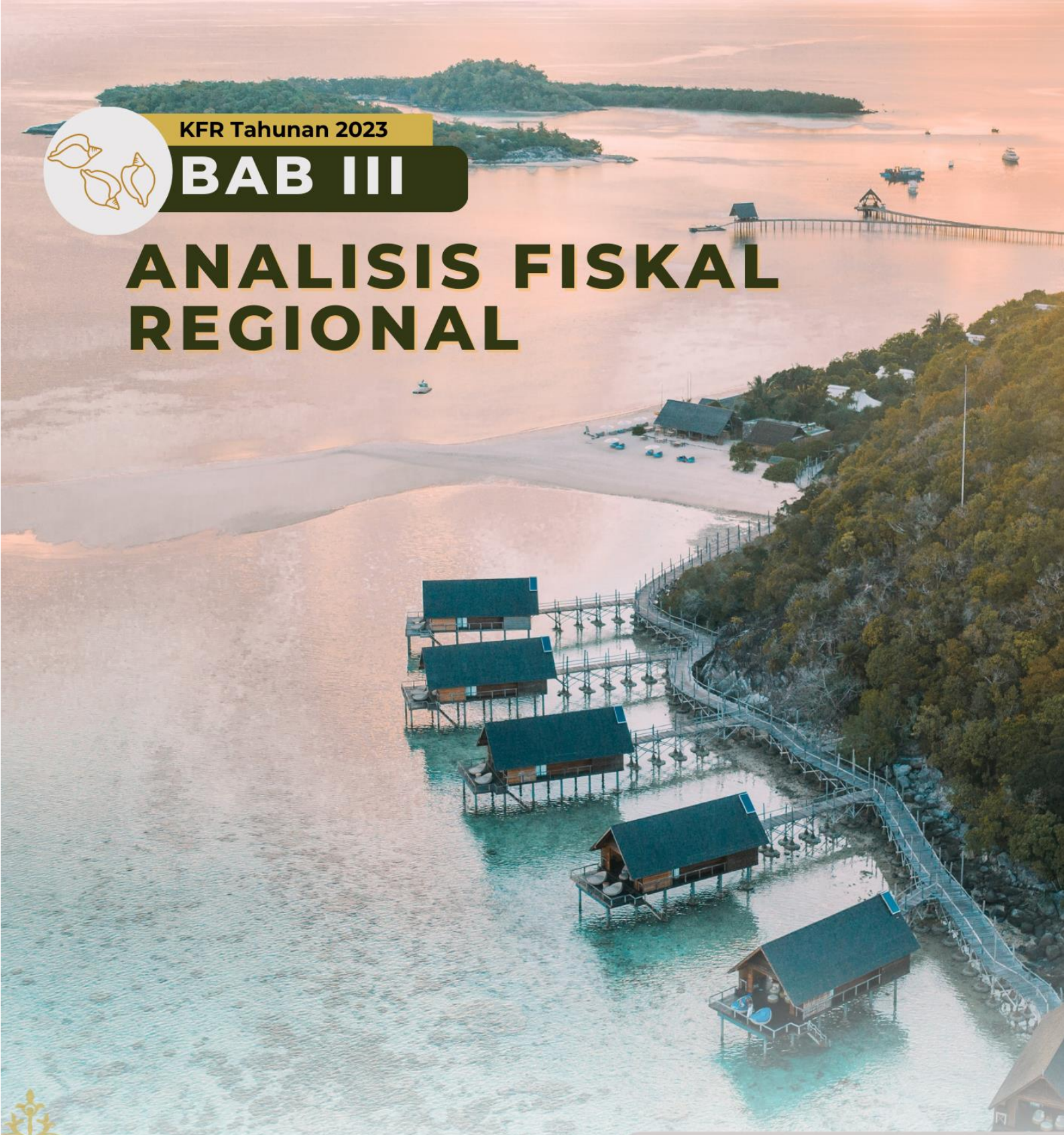

Pulau Bawah
Kabupaten Kepulauan Anambas

Pulau Bawah merupakan kepulauan terpencil yang menjadi objek wisata lokal maupun internasional. Pemerintah hadir dalam mendukung aksesibilitas melalui penyediaan Kapal Pelni, Pesawat Susi Air, maupun Seaplane.

BAB III
ANALISIS FISKAL REGIONAL

3.1 Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

Sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam mencapai tujuan bernegara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjalankan tiga fungsi yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Fungsi stabilisasi dijalankan melalui peran APBN sebagai *shock absorber* untuk menstabilkan harga. Pada fungsi alokasi, APBN berperan untuk membuat ekonomi semakin efisien dan tidak distortif. Pada fungsi distribusi, APBN berperan sebagai alat pemerataan keadilan. Ketiga fungsi tersebut tak hanya dijalankan dalam skala nasional, tetapi juga pada tingkat regional. APBN dianggarkan dan direalisasikan untuk mencapai tujuan masyarakat Kepri yang sejahtera melalui peningkatan indikator perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Adapun perkembangan APBN di Kepri tergambar pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 – Pagu dan Realisasi I-Account APBN di Kepri, 2021 s.d. 2023 (Rp Miliar)

I-Account (Miliar Rupiah)	TA 2021			TA 2022			TA 2023			Growth (2022-2023)
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
PENDAPATAN DAN HIBAH	**10,654.37**	**10,029.95**	**94.14%**	**11,818.86**	**12,814.00**	**108.42%**	**11,510.13**	**12,482.75**	**108.45%**	**-2.59%**
Penerimaan Dalam Negeri	**10,654.37**	**10,029.95**	**94.14%**	**11,818.86**	**12,814.00**	**108.42%**	**11,510.13**	**12,482.73**	**108.45%**	**-2.59%**
Penerimaan Perpajakan	8,180.12	8,148.26	99.61%	9,653.86	10,128.77	104.92%	9,209.34	9,833.16	106.77%	-2.92%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,474.25	1,881.69	76.05%	2,165.00	2,685.23	124.03%	2,300.79	2,649.57	115.16%	-1.33%
BELANJA NEGARA	15,258.70	15,418.45	101.05%	**14,793.91**	**15,317.78**	**103.54%**	**19,193.24**	**18,384.64**	**95.79%**	**20.02%**
Belanja Pemerintah Pusat	**7,777.64**	**7,201.76**	**92.60%**	**7,245.92**	**6,642.32**	**91.67%**	**9,898.59**	**9,184.64**	**92.79%**	**38.27%**
Belanja Pegawai	1,838.95	1,776.67	96.61%	1,878.10	1,850.54	98.53%	2,072.51	2,048.78	98.86%	10.71%
Belanja Barang	3,601.02	3,408.00	94.64%	3,353.35	3,190.82	95.15%	4,944.82	4,637.30	93.78%	45.33%
Belanja Modal	2,085.46	1,776.01	85.16%	1,763.28	1,357.66	77.00%	2,630.22	2,257.43	85.83%	66.27%
Bantuan Sosial	1.82	1.82	100.00%	2.55	2.55	100.00%	4.59	4.54	98.71%	77.85%
Belanja Lainnya	250.39	239.26	95.55%	248.64	240.75	96.83%	246.44	236.60	96.01%	-1.72%
Transfer Ke Daerah	**7,481.06**	**8,216.69**	**109.83%**	**7,547.99**	**8,675.46**	**114.94%**	**9,294.66**	**9,200.00**	**98.98%**	**6.05%**
Dana Bagi Hasil	734.41	1,557.17	212.03%	1,186.17	2,429.72	204.84%	2,447.33	2,446.94	99.98%	0.71%
Dana Alokasi Umum	4,275.42	4,275.42	100.00%	4,280.64	4,280.64	100.00%	4,474.84	4,464.78	99.78%	4.30%
Dana Transfer Khusus	1,886.48	1,801.11	95.47%	1,714.68	1,599.66	93.29%	1,979.78	1,895.73	95.75%	18.51%
Dana Alokasi Khusus Fisik	814.21	740.51	90.95%	592.32	553.57	93.46%	805.94	755.76	93.77%	36.52%
Dana Alokasi Khusus NonFisik	1,072.27	1,060.60	98.91%	1,122.36	1,046.09	93.20%	1,173.84	1,139.97	97.11%	8.97%
Dana Desa	276.40	274.64	99.36%	209.14	208.08	99.49%	225.94	225.78	99.93%	8.51%
Dana Insentif Fiskal	308.35	308.35	100.00%	157.36	157.36	100.00%	166.77	166.77	100.00%	5.98%
KESEIMBANGAN PRIMER	**-4,604.33**	**-5,388.50**	**117.03%**	**-2,975.05**	**-2,503.78**	**84.16%**	**-7,683.11**	**-5,901.89**	**76.82%**	**135.72%**
SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN	**-4,604.33**	**-5,388.50**	**117.03%**	**-2,975.05**	**-2,503.78**	**84.16%**	**-7,683.11**	**-5,901.89**	**76.82%**	**135.72%**

Sumber: OM-SPAN dan MEBE, 2024 (diolah)

Pendapatan dan Hibah ditargetkan sebesar Rp11.510,13 miliar dengan Pagu Belanja sebesar Rp19.193,24 miliar. Tingginya Belanja dibandingkan Pendapatan mengakibatkan APBN lingkup Kepri Defisit sebesar Rp7.683,11 miliar. Kebijakan defisit anggaran ditempuh pemerintah agar perekonomian tetap tumbuh. Pemerintah mempertahankan nominal Belanja Negara yang diharapkan akan memberikan dampak stimulus bagi perekonomian Kepri di berbagai sektor.

Target Pendapatan dan Hibah lebih rendah sebesar Rp308,73 miliar dibandingkan target tahun sebelumnya sebesar Rp11.818,86 miliar. Namun demikian, target Pendapatan dan Hibah tahun 2022 tersebut merupakan hasil perubahan melalui APBN-P yang dilakukan karena realisasi penerimaan mampu mencapai 77,55 persen pada semester I 2023 sebagai **dampak kebijakan Pengungkapan Pajak Sukarela (PPS).**

Meskipun Target Pendapatan menurun, Pagu Belanja Negara meningkat sebesar Rp4.399,33 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.793,91 miliar. Peningkatan ini terjadi di kedua jenis pagu yaitu Pagu Belanja Pemerintah Pusat dan Pagu Transfer ke Daerah. Penurunan Target Pendapatan dan peningkatan Pagu Belanja berdampak pada peningkatan Defisit Rp4.708,06 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp(2.975,05) miliar.

3.1.1 Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah hanya terdiri atas Penerimaan Dalam Negeri, dengan Realisasi tahun 2023 sebesar Rp12.482,73 miliar atau 108,45 persen dari Target dan terjadi pertumbuhan sebesar minus 2,59 persen (*yoy*).

Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Perpajakan memberikan kontribusi dominan yaitu 78,77 persen dengan realisasi Rp9.833,16 miliar dibandingkan PNBP yang memberikan kontribusi sebesar 21,23 persen dengan realisasi Rp2.649,57 miliar.

Grafik 3.1 - Perkembangan Realisasi Pendapatan Negara, 2021 s.d. 2023

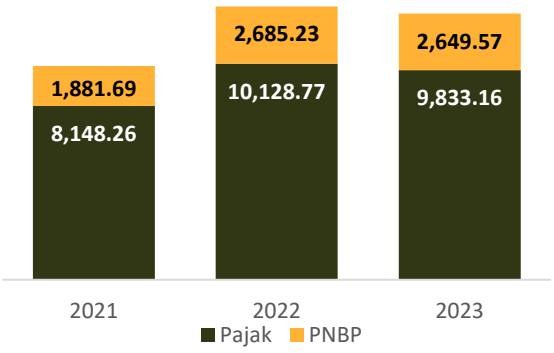

Sumber: SIKRI dan OM-SPAN 2024 (diolah)

Grafik 3.2 - Porsi Realisasi Pendapatan Negara, 2023

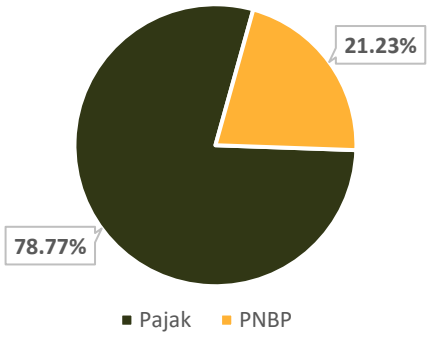

Sumber: SIKRI dan OM-SPAN 2024 (diolah)

Grafik 3.3 – Perkembangan Penerimaan Perpajakan di Kepri (Rp miliar)

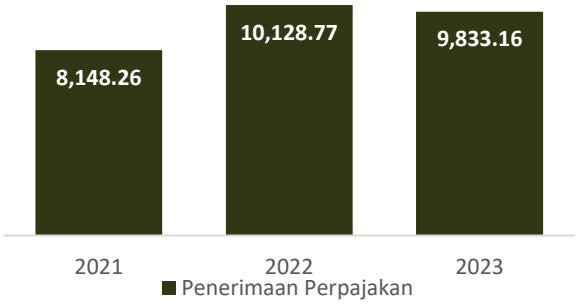

Sumber: SIKRI dan OM-SPAN 2024 (diolah)

3.1.1.1 Pendapatan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan direalisasikan sebesar Rp9.833,16 miliar atau 106,77 persen dari Pagu dengan kontribusi terhadap total Pendapatan APBN sebesar 78,77 persen. Realisasi tahun 2023 mengalami penurunan 2,92 persen (*yoy*). Adapun realisasi tahun 2022 sebesar Rp10.128,77 miliar dan pada tahun 2021 sebesar Rp8.148,26 miliar sebagaimana Grafik 3.3 berikut.

Penerimaan Perpajakan terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri memberikan kontribusi terbesar yaitu 91,55 persen dengan realisasi Rp9.011,97 miliar, sedangkan Pajak Perdagangan Internasional memberikan kontribusi sebesar 8,45 persen dengan realisasi sebesar Rp831,19 miliar sebagaimana tertera dalam Grafik 3.4 berikut.

Grafik 3.4 - Porsi Realisasi Penerimaan Perpajakan 2023

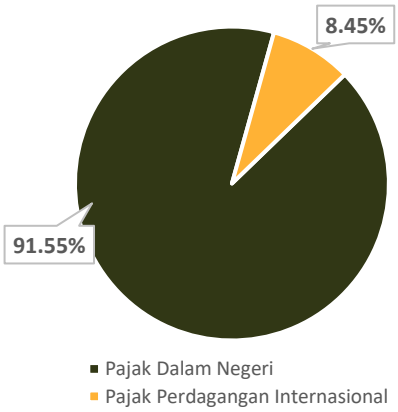

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

Pada tahun 2023, pos Penerimaan Perpajakan tumbuh minus 2,92 persen. Pertumbuhan minus ini terjadi pada Pajak Perdagangan Internasional (minus 47,68 persen) sedangkan Pajak Dalam Negeri tumbuh positif (5,41 persen) dengan rincian sebagai mana Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 – Pagu dan Realisasi Penerimaan Perpajakan di Kepri, 2021 s.d. 2023 (Rp Miliar)

I-Account (Miliar Rupiah)	2021			2022			2023			% Growth 2022-2023
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
Penerimaan Perpajakan	**8.180,12**	**8.148,26**	**99,61%**	**9.653,86**	**10.128,77**	**104,92%**	**9.209,34**	**9.833,16**	**106,77%**	**-2,92%**
Pajak Dalam Negeri	8.002,92	8.148,26	101,82%	8.264,81	8.540,02	103,33%	8.528,78	9.001,97	105,55%	5,41%
Pajak Perdagangan Internasional	177,20	0,00	0,00%	1.389,05	1.588,75	114,38%	680,56	831,19	122,13%	-47,68%

Sumber: OM-SPAN dan MEBE, 2024 (diolah)

Sampai dengan triwulan III kinerja perpajakan melambat disebabkan oleh kebijakan pajak tidak berulang Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diselenggarakan pada tahun 2022 dan moderasi komoditas minyak bumi dan gas alam yang berdampak pada PPh Migas nasional yang turut berkontraksi. Hal ini turut berlanjut hingga akhir tahun 2023 kinerja Perpajakan tumbuh minus 2,59 persen. **Meskipun Perpajakan tumbuh minus, Pajak Dalam Negeri semakin kuat dengan tumbuh 5,41 persen dan mampu menopang kinerja Pajak Perdagangan Internasional yang tumbuh minus 47,68 persen**.

- ***Pajak Dalam Negeri***

Pajak Dalam Negeri memberikan kontribusi terhadap total Pendapatan APBN sebesar 72,12 persen dengan rincian kontribusi terhadap Pendapatan APBN secara berturut-turut yaitu PPh 62,40 persen, PPN 8,61 persen, Pajak Lainnya 0,67 persen, Cukai 0,22 persen dan PBB 0,21 persen.

Realisasi Pajak Dalam Negeri sebesar Rp9.001,97 miliar didominasi berturut-turut oleh: PPh Rp7.789,41 miliar (86,53 persen); PPN Rp1.075,02 (9,94 persen), Pajak Lainnya Rp83,39 miliar (0,93 persen), Cukai Rp27,41 miliar (0,30 persen), dan PBB Rp26,74 miliar (0,30 persen).

- ***Pajak Perdagangan Internasional***

Pajak Perdagangan Internasional memberikan kontribusi terhadap total Pendapatan APBN sebesar 6,66 persen dengan rincian kontribusi terhadap Pendapatan APBN secara berturut-turut yaitu Bea Masuk 5,45 persen dan Bea Keluar 1,21 persen.

Realisasi Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp831,19 miliar berturut-turut didominasi oleh: Bea Masuk Rp680,36 miliar (81,85 persen) dan Bea Keluar sebesar Rp150,83 miliar (18,15 persen).

Analisis Kinerja Perpajakan dan Bea Cukai

Jika dilihat antara realisasi perpajakan menurut OM-SPAN dan menurut Kanwil DJP Kepri terdapat perbedaan. Hal ini disebabkan oleh adanya selisih/lag antara input data dari Kanwil DJP selaku pemungut pajak dengan Aplikasi OM-SPAN. Hal yang sama juga terjadi antara Penerimaan Bea dan Cukai menurut OM-SPAN dan menurut Kanwil DJBC Kepri dan KPUBC Batam.

- ***Kinerja Perpajakan menurut Jenisnya***

Tabel 3.2 berikut menampilkan perkembangan kinerja perpajakan lingkup Kanwil DJP Kepri.

Tabel 3.3 – Perkembangan Perpajakan di Kepri, 2023

Uraian	TA 2021			TA 2022			TA 2023			Growth (2022-2023)
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	
PPh Non Migas	6,844.91	6,200.59	90.59	7,815.94	8,567.03	109.61	8,350.89	8,554.33	102.44	-0.15%
PPN	939.48	981.14	104.43	532.00	666.80	125.34	1,067.44	1,183.10	110.84	77.43%
PPNBM	1.08	2.55	236.31	2.03	1.85	91.39	2.01	0.04	2.13%	-97.69%
PBB dan BPHTB	22.09	20.70	93.75	24.59	29.46	119.80	28.84	29.56	102.50	0.34%
PPh Migas	0.00	-0.16	∞	0.00	-0.04	∞	0.00	0.00	∞	∞
Pajak Lainnya*	159.76	78.80	49.32	80.65	36.93	45.79	91.47	83.49	91.28	126.08%

Total	**7,967.32**	**7,283.63**	**91.42**	**8,455.21**	**9,302.04**	**110.02**	**9,540.66**	**9,850.54**	**103.25**	**5,90%**

Sumber: Kanwil DJP Kepri, 2024 (diolah)

Lebih lanjut, penerimaan PPN didominasi dari penerimaan PPN Dalam Negeri dengan realisasi PPN Dalam Negeri Sebesar Rp. 1,18 triliun dan pertumbuhan sekitar 88,89%.

- ***Kinerja Perpajakan Sektoral***

Secara kumulatif pada tahun 2023, Industri Pengolahan menjadi sektor penyumbang penerimaan Perpajakan terbesar yaitu Rp4.090,30 miliar dengan kontribusi sebesar 471,52 persen, kemudian disusul berturut-turut oleh Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor yaitu Rp1.309,89 miliar (13,30 persen), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar Rp997,83 miliar (10,13 persen), Konstruksi sebesar Rp701,50 miliar (7,12 persen), serta Pengangkutan dan Pergudangan Rp699,09 miliar (7,10 persen). Sedangkan sisanya (20,83 persen) merupakan gabungan dari penerimaan Perpajakan di luar sektor dominan.

Tabel 3.4 – Realisasi Perpajakan per Sektor Dominan di Kepri, 2023

Nama Sektor	Realisasi (Rp miliar)	Kontribusi (%)
Industri Pengolahan	4,090.30	41.52%
Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1,309.89	13.30%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	997.83	10.13%
Konstruksi	701.50	7.12%
Pengangkutan dan Pergudangan	699.09	7.10%
Diluar Sektor Dominan	2,051.93	20.83%
Total	**9,850.54**	**100.00%**

Sumber: Kanwil DJP, 2024 (diolah)

Jika dilihat per triwulan, maka sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, sektor Konstruksi, sektor Pengangkutan dan Pergudangan, dan sektor non dominan menunjukkan meskipun fluktuatif namun realisasi per triwulan cenderung meningkat. Adapun rincian realisasi perpajakan per triwulan pada sektor-sektor dominan sebagaimana Grafik 3.5 berikut.

Grafik 3.5 – Penerimaan per Sektor Dominan Tiap Triwulan, 2023 (Rp miliar)

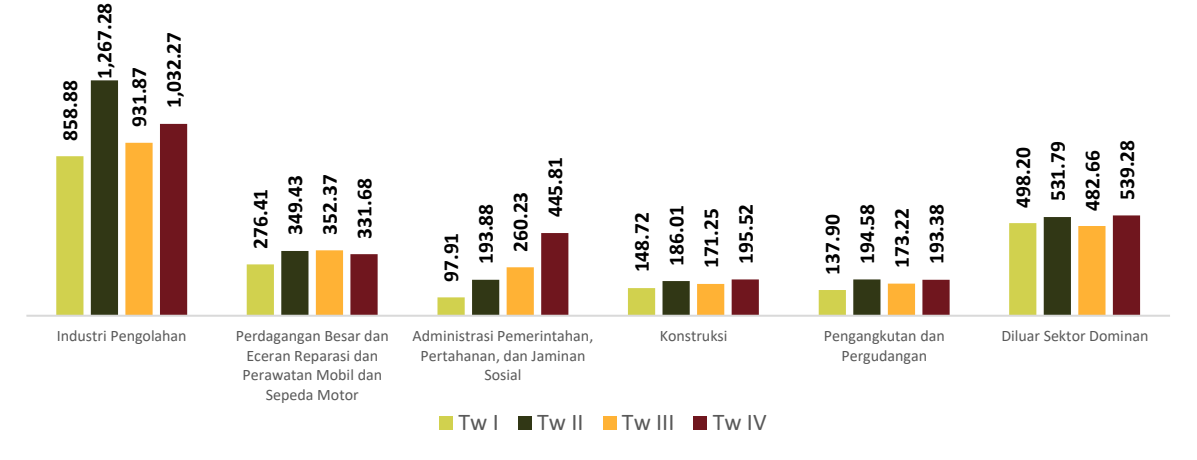

Sumber: Kanwil DJP Kepri, 2024 (diolah)

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan masing-masing pertumbuhan maupun perlambatan realisasi perpajakan per sektor, yaitu sebagai berikut.

a. Sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan dikarenakan adanya peningkatan pada Setoran PPh Non Migas yang meningkat khususnya Jenis Pajak PPh Final, PPh 21 dan PPh 26 penurunan signifikan pada sektor lainnya terjadi pada sektor Aktivitas Jasa Lainnya dan sektor Pejabat Negara dan Karyawan, Pensiunan hal ini disebabkan oleh adanya setoran PPS yang berasal dari sektor tersebut yang tidak berulang pada tahun ini.

b. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran mengalami pertumbuhan dikarenakan adanya peningkatan pada setoran PPh Non-Migas khususnya jenis pajak PPh 25/29 Badan dan PPh Pasal 21.

c. Sektor Administrasi Pemerintahan mengalami pertumbuhan yang signifikan dikarenakan adanya peningkatan pada setoran PPN yang meningkat dari tahun sebelumnya.

- ***Kinerja Bea dan Cukai***

Pada tahun 2023, total realisasi Bea dan Cukai di Kepri Rp858,61 miliar. Realisasi ini terdiri atas Bea Masuk Rp678,69 miliar (110,34 persen terhadap Pagu), Bea Keluar Rp150,83 miliar (89,66 persen terhadap Pagu), Cukai 27,29 miliar (121,37 persen terhadap Pagu), dan Penerimaan Bea dan Cukai Lainnya Rp1,79 milliar. Adapun rincian penerimaan Bea dan Cukai mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebagaimana Tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.5 – Perkembangan Bea dan Cukai di Kepri, 2023 (Rp miliar)

URAIAN	TA 2021			TA 2022			TA 2023			Growth (2022-2023)
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	
Bea Masuk	546.25	694.04	127.05%	680.01	890.39	130.94%	615.08	678.69	110.34%	-23.78%
Bea Keluar	0.00	823.37	∞	732.16	787.59	107.57%	168.23	150.83	89.66%	-80.85%
Cukai	35.59	10.52	29.56%	10.75	16.39	152.48%	22.49	27.29	121.37%	66.56%

Penerimaan BC lainnya*	0.00	0.29	∞	0.00	0.38	∞	0.00	1.79	∞	375.38%
Total	**581.84**	**1,528.22**	**262.65%**	**1,422.92**	**1,694.75**	**119.10%**	**805.80**	**858.61**	**106.55%**	**-49.34%**

Sumber: Kanwil DJPBC Kepri dan KPUBC Batam, 2024 (diolah)

Persentase realisasi Bea dan Cukai cenderung menurun dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada tahun 2021, persentase realisasi sebesar 262,65 persen kemudian pada tahun 2022 sebesar 119,10 persen dan pada tahun 2023 sebesar 106,55 persen.

Persentase realiasi tertinggi terdapat pada Cukai sebesar 121,37 persen. Pada tahun 2022, Cukai juga memiliki persentase realisasi tertinggi yaitu sebesar 152,48 persen. Sedangkan pada tahun 2021, persentase realisasi tertinggi ada pada Bea Masuk sebesar 127,05 persen.

Realisasi penerimaan Bea Masuk dan Bea Keluar mengalami *growth* negatif yaitu pada Bea Masuk sebesar minus 23,78 persen dan Bea Keluar sebesar minus 80,85 persen. Hal ini disebabkan oleh turunnya target penerimaan pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Di samping itu, tarif CPO yang turun juga menjadi penyebab turunnya realisasi penerimaan Bea Keluar. Pertumbuhan negatif realisasi Bea Keluar dikarenakan penurunan volume ekspor CPO dan turunannya.

Usaha/*extra effort* Kanwil Bea Cuka Kepulaun Riau dalam mencapai dan meningkatkan Penerimaan sampai akhir Tahun 2023 antara lain dengan: (a) mengoptimalkan pengawasan peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kanwil DJBC Khusus Kepri, (b) mengoptimalkan pemeriksaan dokumen Impor, (c) monev Penerimaan KPPBC Wilayah Kepri, (d) customs visit customer, dan (e) optimalisasi kegiatan penelitian ulang dan joint program penerimaan.

3.1.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP tahun 2023 sebesar Rp2.649,57 miliar atau 115,16 persen dari Pagu. Realisasi PNBP didominasi berturut-turut oleh: PNBP BLU Rp1.777,25 miliar (67,08 persen) dan PNBP Lainnya Rp872,33 miliar (32,92 persen) sesuai dengan Grafik 3.6 berikut. PNBP Lainnya telah melampaui target dengan realisasi 217,86 persen sedangkan realisasi Pendapatan BLU sebesar 93,52 persen.

Grafik 3.6 - Porsi Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2023

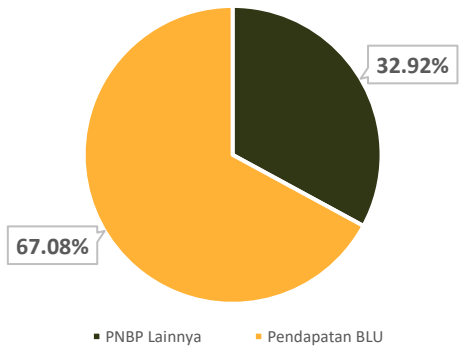

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

Dari sisi PNBP lainnya, tingginya lalu lintas keluar masuk Indonesia oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal berdampak pada pertumbuhan realisasi akun PNBP Lainnya, pertumbuhan Pendapatan BLU ditopang oleh berubahnya status tiga satker menjadi BLU di

lingkup Kepri pada tahun 2023, yaitu Poltek Negeri Batam, BLU RS Bhayangkara Batam dan BLU RSAL dr. Midiyato Tanjungpinang.

Data dari KPKNL Batam merincikan PNBP lingkup Kepri menjadi PNBP Aset, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang dengan rincian target dan realisasi sebagaimana dirinci pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.6 – Perkembangan PNBP di Kepri, 2023 (Rp miliar)

Uraian	TA 2021			TA 2022			TA 2023			Growth (2022-2023)
	Target	Real	%	Target	Real	%	Target	Real	%	
PNBP Aset	81.85	253.98	310.30%	140.00	298.76	213.40%	174.31	300.19	172.22%	0.48%
PNBP Piutang Negara	0.03	0.14	451.00%	0.02	0.29	1452.81%	0.06	0.12	200.53%	-58.59%
PNBP Lelang	30.41	8.50	27.95%	10.15	12.48	122.88%	25.17	17.02	67.63%	36.42%
Total	**112.29**	**262.62**	**233.88%**	**150.17**	**311.53**	**207.44%**	**199.54**	**317.33**	**159.03%**	1.86%

Sumber: KPKNL Batam, 2024 (diolah)

Target PNBP cenderung meningkat mulai dari tahun 2021 (Rp112,29 miliar), tahun 2022 (Rp150,17 miliar) dan tahun 2023 (Rp199,54 miliar). Sejalan dengan peningkatan target PNBP, realisasi PNBP juga turut meningkat mulai dari tahun 2021 (Rp262,62 miliar), tahun 2022 (Rp311,53 miliar), dan tahun 2023 (Rp317,33 miliar). Meskipun terjadi peningkatan Pagu dan Realisasi, persentase realisasi PNBP lingkup KPKNL Batam cenderung menurun dari tahun 2021 (233,88 persen), tahun 2022 (207,44 persen), dan tahun 2023 (159,03 persen)

3.1.2 Belanja Negara

Belanja Negara dalam hal ini merupakan realisasi Belanja Pemerintah Pusat di lingkup provinsi Kepri.

3.1.2.1 Belanja Pemerintah Pusat (BPP)

Grafik 3.7 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, 2021 s.d. 2023

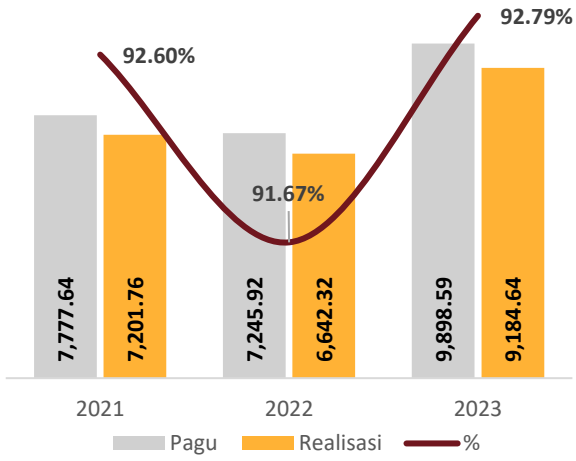

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan menjadi realisasi dengan persentase tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menandakan kualitas perencanaan dan penganggaran yang makin baik. Realisasi BPP pada tahun 2023 sebesar Rp9.184,64 miliar atau 92,79 persen terhadap Pagu. Realisasi ini mengalami pertumbuhan 38,27 persen (*yoy*)

3.1.2.2 Berdasarkan Jenis Belanja

Grafik 3.8 – Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat, 2021 s.d. 2023

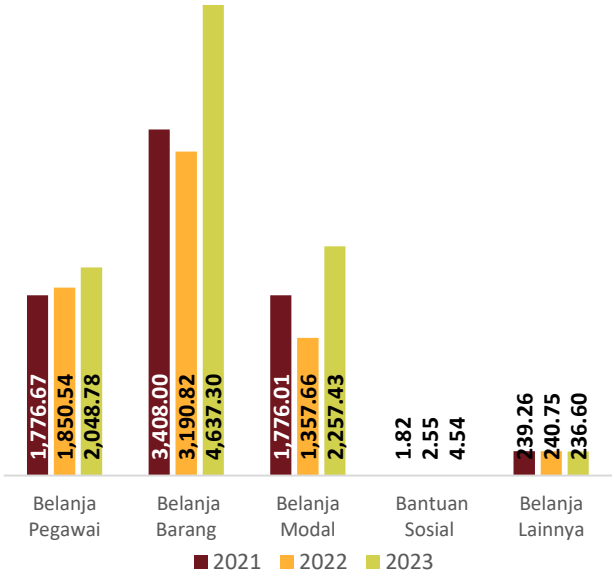

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

Berdasarkan jenisnya, BPP secara berturut-turut didominasi oleh: Belanja Barang Rp4.637,30 miliar (50,49 persen); Belanja Modal Rp2.257,43 miliar (24,58 persen); Belanja Pegawai Rp2.048,78 miliar (22,31 persen); Belanja Lainnya Rp236,60 miliar (2,58 persen); dan Bantuan Sosial Rp4,54 miliar (0,05 persen).

Dari Grafik 3.8 terlihat bahwa hampir seluruh pos BPP mengalami kenaikan realisasi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan realisasi sejalan dengan kenaikan Pagu Belanja Pemerintah Pusat. Meskipun demikian terdapat pos Belanja Lainnya yang tidak mengalami kenaikan pagu maupun realisasi sehingga terjadi pertumbuhan minus 1,72 persen.

3.1.2.3 Berdasarkan Kementerian Negara/Lembaga (K/L)

Terdapat lima belas K/L dengan pagu Belanja terbesar dengan total Pagu Rp9.153,13 miliar atau 92,27 persen dari total Pagu seluruh satuan kerja lingkup Kepri. Pada tahun 2023, realisasi lima belas K/L tersebut mencapai Rp8.457,74miliar atau sebesar 92,09 persen dari total realisasi Belanja seluruh K/L lingkup Kepri.

Tabel 3.7 – Perbandingan Proporsi Pagu dan Realisasi Belanja Seluruh 40 K/L dan 15 K/L Terbesar, 2021 s.d. 2023

Uraian	TA 2021			TA 2022			TA 2023			Growth (2022-2023)
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	
15 K/L Pagu Terbesar	7,107.73	6,569.99	92.43%	6,475.18	5,895.11	91.04%	9,153.13	8,457.74	92.40%	43.47%
Seluruh 40 K/L	7,777.64	7,201.76	92.60%	7,245.92	6,642.32	91.67%	9,898.59	9,184.64	92.79%	38.27%
Proporsi 15 K/L terhadap 40 K/L	**91.39%**	**91.23%**		**89.36%**	**88.75%**		**92.47%**	**92.09%**		

Sumber : Sintesa, 2024 (diolah).

Meskipun mengalami peningkatan pagu, dari Tabel 2.6 dapat dilihat bahwa selama tiga tahun persentase realisasi Belanja lima belas K/L pagu terbesar selalu lebih rendah dibandingkan dengan persentase Belanja seluruh K/L lingkup Kepri. Adapun rincian Belanja lima belas K/L Pagu terbesar sebagaimana pada Tabel 2.7 berikut.

Tabel 3.8 - Realisasi Belanja Lima Belas K/L Pagu Terbesar, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

K/L	TA 2021		TA 2022		TA 2023		*Growth (2022-2023)*
	Pagu	Real.	Pagu	Real.	Pagu	Real.	
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)	2,405.08	1,984.18	2,066.22	1,630.82	2,637.64	2,145.28	31.55%
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	1,113.01	1,049.85	912.16	842.00	1,651.44	1,579.49	87.59%
Kementerian Pertahanan	816.88	808.88	808.42	799.41	1,431.89	1,419.08	77.52%
Kepolisian Negara Republik Indonesia	718.48	715.64	763.24	761.50	830.35	828.25	8.76%
Kementerian Perhubungan	365.54	358.70	296.11	290.57	521.92	477.02	64.17%
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	273.10	264.59	248.01	238.58	413.93	399.76	67.56%
Kementerian Agama	348.99	353.56	280.84	278.50	342.45	338.84	21.67%
Kementerian Keuangan	370.80	360.34	299.67	287.98	299.02	285.20	-0.97%
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	212.88	205.13	250.22	246.05	246.58	242.80	-1.32%
Kementerian Kesehatan	162.92	155.63	207.86	188.97	186.30	181.31	-4.05%
Komisi Pemilihan Umum	38.82	37.12	50.37	46.58	160.32	155.04	232.84%
Mahkamah Agung	72.10	70.94	84.65	81.05	130.35	128.50	58.54%
Badan Pengawas Pemilihan Umum	31.51	29.98	38.97	36.46	116.49	96.21	163.92%
Kementerian Kelautan Dan Perikanan	110.13	108.52	91.27	90.64	98.23	97.34	7.40%

Kejaksaan Republik Indonesia	67.49	66.93	77.18	76.00	86.23	83.62	10.03%
Total	**7,107.73**	**6,569.99**	**6,475.18**	**5,895.11**	**9,153.13**	**8,457.74**	**43.47%**

Sumber : Sintesa, 2024 (diolah).

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam) merupakan satuan kerja (satker) BLU dengan Pagu Belanja terbesar yaitu Rp2.637,64 miliar dan menjadi satker dengan realisasi terbesar yaitu Rp2.145,28 miliar.

Satker dengan *growth* realisasi belanja (*yoy*) terbesar yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 232,84 persen dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sebesar 163,92 persen. Peningkatan realisasi belanja yang signifikan pada kedua satker ini dalam rangka Belanja persiapan pemilihan umum di bulan Februari 2024.

3.1.2.4 Berdasarkan Fungsi

Ditinjau dari fungsi pemerintahan, tiga fungsi dengan pagu Belanja tertinggi terdapat pada fungsi Ekonomi (Rp4.737,12 miliar), Pertahanan (Rp1.431,89 miliar), dan Ketertiban dan Keamanan (Rp1.319,98 miliar). Adapun urutan realisasi Belanja terbesar sejalan dengan Pagu yaitu fungsi Ekonomi (Rp4.122,09 miliar), Pertahanan (Rp1.419,08,79 miliar), dan Ketertiban dan Keamanan (Rp1.309,53 miliar).

Jika ditinjau dari persentase realisasi terhadap Pagu, maka fungsi Pariwisata dan Budaya menjadi peringkat persentase realisasi terbesar (99,84 persen), disusul oleh Perumahan dan Fasilitas Umum (99,69 persen), dan Lingkungan Hidup (99,40 persen). Adapun rincian Pagu dan realisasi masing-masing fungsi sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 - Realisasi Belanja Menurut Fungsi, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

Fungsi	TA 2021			TA 2022			TA 2023			Growth (2022-2023)
	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	Pagu	Real	%	
Agama	85.47	83.94	98.21	88.52	87.48	98.82	96.20	93.41	97.10	6.78%
Ekonomi	3,762.90	3,272.89	86.98	3,295.10	2,777.42	84.29	4,737.12	4,122.09	87.02	48.41%
Kesehatan	196.31	189.58	96.57	238.59	220.43	92.39	226.37	221.60	97.89	0.53%
Ketertiban Dan Keamanan	1,095.08	1,082.24	98.83	1,200.58	1,189.70	99.09	1,319.98	1,309.53	99.21	10.07%
Lingkungan Hidup	102.60	100.20	97.65	110.83	107.06	96.60	98.76	98.17	99.40	-8.30%
Pariwisata Dan Budaya	545.52	527.72	96.74	1.53	1.52	99.66	1.09	1.08	99.84	-28.96%
Pelayanan Umum	586.85	581.89	99.15	538.87	516.25	95.80	708.60	667.77	94.24	29.35%
Pendidikan	3.56	3.51	98.62	523.68	511.04	97.59	693.28	677.79	97.77	32.63%
Pertahanan	816.88	808.88	99.02	808.42	799.41	98.89	1,431.89	1,419.08	99.11	77.52%
Perumahan Dan Fasilitas Umum	326.18	318.05	97.51	176.35	176.05	99.83	323.21	322.21	99.69	83.02%

Sumber : Sintesa, 2024 (diolah).

Dari sepuluh fungsi yang ada, delapan fungsi mengalami pertumbuhan realisasi yang positif, sedangkan dua fungsi mengalami pertumbuhan realisasi yang minus. Pertumbuhan realisasi tertinggi ada pada fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum (83,02 persen) kemudian

berturut-turut yaitu: Pertahanan (77,52 persen), Ekonomi (48,41 persen), Pendidikan (32,63 persen), Pelayanan Umum (29,35 persen), Ketertiban dan Keamanan (10,07 persen), Agama (6,78 persen), dan Kesehatan (0,53 persen). Sedangkan pertumbuhan minus terjadi pada fungsi Lingkungan Hidup (minus 8,30 persen) dan Pariwisata dan Budaya (minus 28,96 persen).

3.1.3 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD)

Transfer ke Daerah (TKD) merupakan wujud dari peran APBN dalam menghadirkan pemerataan bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga tidak terjadi kesenjangan kemampuan fiskal yang jauh antardaerah baik kabupaten/kota maupun provinsi. TKD terbagi menjadi Dana Transfer Umum (DTU), Dana Tranfer Khusus (DTK), Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa.

Total realisasi TKD pada tahun 2023 sebesar Rp9.200,00 miliar atau 98,98 persen dari Pagu. Realisasi ini mengalami pertumbuhan sebesar 6,05 persen *(yoy)* sejalan dengan pertumbuhan Pagu TKD. Pertumbuhan realisasi TKD menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan administrasi hingga merealisasikan belanja TKD. Rincian Pagu dan realisasi belanja TKD dijabarkan sebagaimana Tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.10 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja TKD di Kepri, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

I-Account (Miliar Rupiah)	TA 2021			TA 2022			TA 2023			Growth (2022-2023)
	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	Pagu	Real	% Real	
Dana Transfer Umum	5,009.83	5,832.59	116.42%	5,466.81	6,710.36	122.75%	6,922.17	6,911.72	99.85%	3.00%
Dana Transfer Khusus	1,886.48	1,801.11	95.47%	1,714.68	1,599.66	93.29%	1,979.78	1,895.73	95.75%	18.51%
Dana Insentif Fiskal	308.35	308.35	100.00%	157.36	157.36	100.00%	166.77	166.77	100.00%	5.98%
Dana Desa	276.40	274.64	99.36%	209.14	208.08	99.49%	225.94	225.78	99.93%	8.51%
Total TKD	**7,481.06**	**8,216.69**	**109.83%**	**7,547.99**	**8,675.46**	**114.94%**	**9,294.66**	**9,200.00**	**98.98%**	**6.05%**

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

Dari keempat jenis TKD, pertumbuhan realisasi tertinggi ada pada Dana Transfer Khusus (DTK) sebesar 18,51 persen kemudian berturut-turut didominasi oleh Dana Desa 8,51 persen, Dana Insentif Fiskal 5,98 persen, dan Dana Transfer Umum (DTU) 3,00 persen.

3.1.3.1 Dana Transfer Umum (DTU)

Grafik 3.9 – Proporsi Realisasi Dana Transfer Umum, 2023

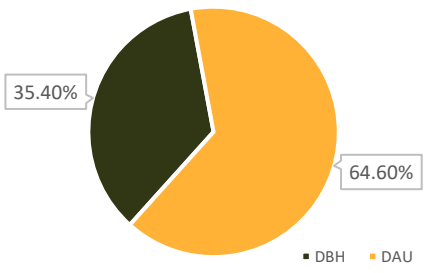

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

Realisasi DTU sebesar Rp6.911,72 miliar atau 99,85 persen dari Pagu. Realisasi ini didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp4.464,78 (64,60 persen) dibandingkan dengan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2.446,94 (35,40 persen).

Persentase DAU yang lebih besar menggambarkan fokus pemerintah dalam hal memperkecil ketimpangan fiskal dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar.

- ***Dana Alokasi Umum (DAU)***

Realisai DAU pada tahun 2023 sebesar Rp4.464,78 miliar (99,78 persen dari Pagu). Lebih lanjut, Pagu DAU terus mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dan terjadi pula peningkatan realisasi DAU pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Meski demikian, terjadi penurunan persentase realisasi DAU tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022 yang mencapai realisasi maksimal yaitu 100 persen.

Grafik 3.10 – Pagu dan Realisasi Dana Alokasi Umum, 2021 s.d. 2023

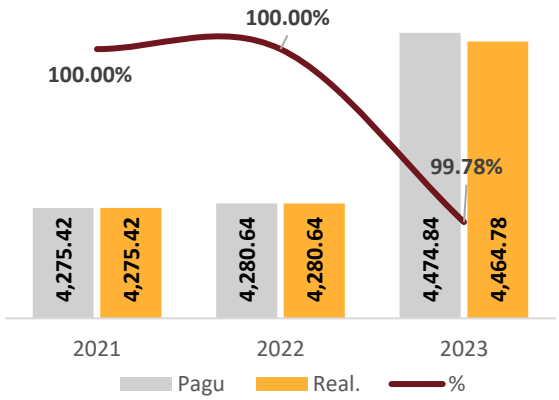

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

Grafik 3.11 – Pagu dan Realisasi Dana Bagi Hasil, 2021 s.d. 2023

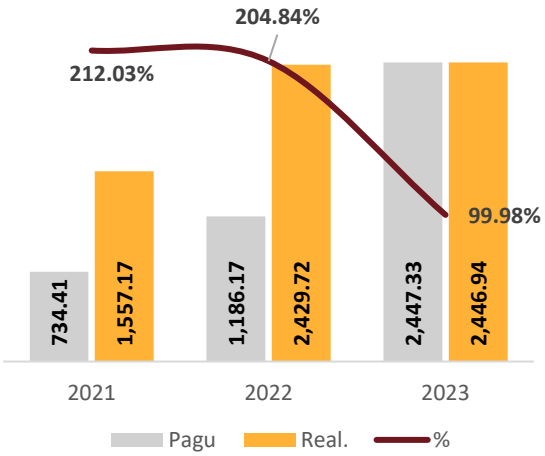

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

- ***Dana Bagi Hasil (DBH)***

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2023 sebesar Rp2.446,94 miliar (99,98 persen dari Pagu). Pagu DBH terus mengalami peningkatan sejalan dengan realisasi DBH yang sangat tinggi pada tahun 2021 (212,03 persen) dan tahun 2022 (204,84 persen). Dikarenakan kenaikan Pagu DBH pada tahun 2023, realisasi DBH pada tahun berkenaan menjadi di bawah 100 persen.

3.1.3.2 Dana Transfer Khusus (DTK)

Realisasi DTK sebesar Rp1.895,73 miliar atau 95,75 persen dari Pagu. Realisasi ini didominasi oleh DAK Non-Fisik sebesar Rp1.139,97 miliar (60,13 persen) dibandingkan dengan DAK Fisik sebesar Rp755,76 miliar (39,87 persen). Proporsi realisasi DTK sebagaimana Grafik 3.11 berikut.

Grafik 3.12 – Proporsi Realisasi Dana Transfer Khusus, 2023

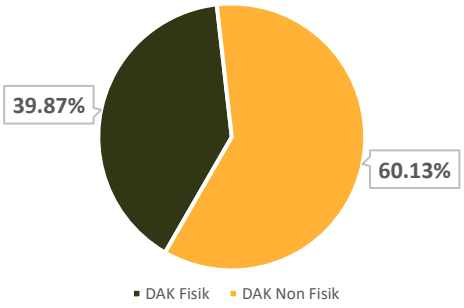

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

- ***DAK Fisik***

Realisasi DAK Fisik pada tahun 2023 sebesar Rp755,76 miliar. Realisasi ini tumbuh sebesar 36,52 persen (*yoy*). Realisasi DAK Fisik dari tahun 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan angka yang fluktuatif sejalan dengan Pagu yang juga tumbuh fluktuatif.

Dari tahun 2021 sampai dengan 2023, persentase realisasi mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2021, persentase realisasi sebesar 90,95 persen, pada tahun 2022 sebesar 93,46 persen, dan pada tahun 2023 sebesar 93,77 persen.

Grafik 3.13 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Fisik, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

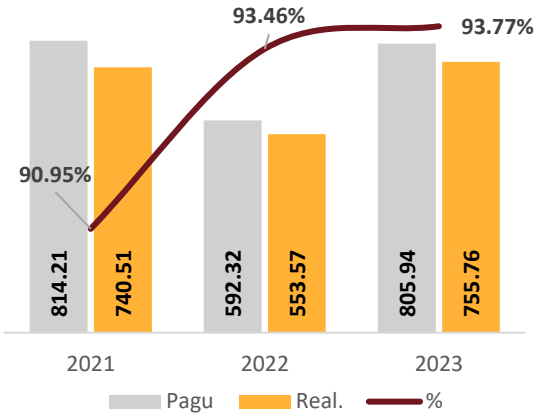

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

Grafik 3.14 – Perkembangan Pagu dan Realisasi DAK Non Fisik, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

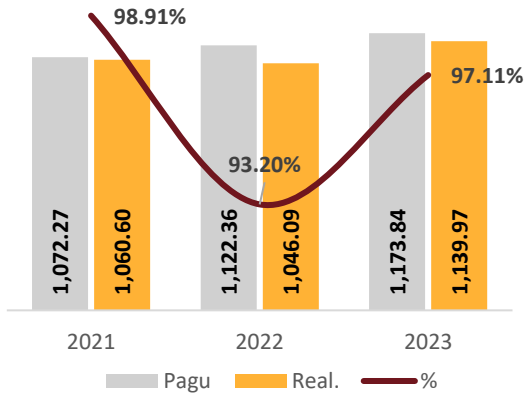

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

3.1.3.3 Dana Insentif Fiskal

Realisasi Dana Insentif Fiskal pada tahun 2023 sebesar Rp166,77 miliar atau 100 persen dari Pagu. Persentase realisasi maksimal ini sudah terjadi mulai dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Capaian yang maksimal ini disebabkan pagu yang menurun sehingga akan lebih memungkinkan untuk terealisasi secara penuh.

- ***DAK Non – Fisik***

Realisasi DAK Non Fisik tahun 2023 sebesar Rp1.139,97 miliar atau 97,11 persen dari Pagu. Realisasi ini tumbuh sebesar 8,97 persen (*yoy*). Realisasi DAK Non Fisik dari tahun 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan angka yang fluktuatif meskipun Pagu tumbuh dengan tren positif. Realisasi yang fluktuatif kemudian berdampak pada persentase realisasi yang juga tumbuh fluktuatif dengan persentase paling rendah terjadi pada tahun 2022.

Grafik 3.15 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Insentif Fiskal, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

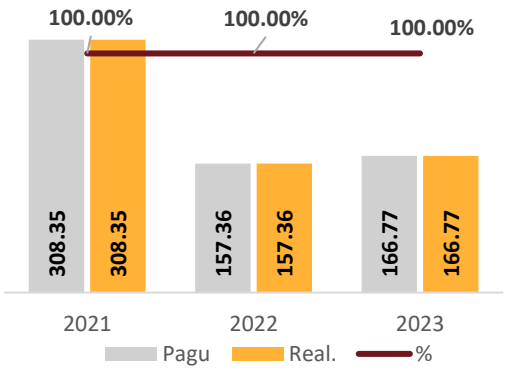

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

Grafik 3.16 – Perkembangan Pagu dan Realisasi Dana Desa, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

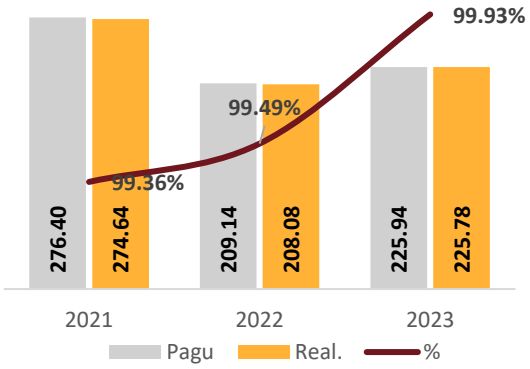

Sumber: OM-SPAN, 2024 (diolah)

3.1.3.4 Dana Desa

Dana Desa pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp225,78 miliar, tumbuh 8,51 persen (*yoy*). Persentase realisasi Dana Desa terus meningkat dari tahun 2021 (99,36 persen), tahun 2022 (99,49 persen), dan tahun 2023 (99,93 persen).

Peningkatan persentase realisasi Dana Desa menunjukkan semakin membaiknya kinerja pelaksanaan anggaran di desa serta peran OPD dalam membina pelaksanaan anggaran di desa.

3.1.4 Surplus/Defisit APBN

Pada APBN regional Kepri tahun 2023, kebijakan defisit anggaran kembali diambil dengan besaran Defisit sebanyak Rp7.683,11 miliar. Selama tahun 2023, realisasi anggaran mencatat Defisit sebanyak minus Rp5.901,89 miliar. Defisit tersebut sebesar 76,82 persen dari anggaran defisit yang ditetapkan. Realisasi Defisit yang besar disumbang oleh besarnya realisasi Belanja Negara. Beberapa hal perlu diantisipasi, khususnya kinerja penerimaan pada tahun 2024 agar mampu mencapai target dan mampu menopang Belanja sehingga Defisit dapat terjadi sesuai Pagu yang direncanakan.

3.1.5 Pengelolaan BLU Pusat

3.1.5.1. Profil BLU dan jenis layanan

- ***Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)***

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam), menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

BP Batam sebagai pengelola kawasan bertujuan untuk mengembangkan wilayah Batam, Rempang, dan Galang agar bergerak di sektor industri terpadu, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Pengembangan sektor industri diharapkan mampu menampung, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya baik dari Kawasan Batam maupun kawasan sekitarnya dengan mengikutsertakan peran masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini juga dilakukan melalui upaya pengembangan berbagai area investasi yang terkoneksi secara komprehensif dengan ketersediaan pelabuhan laut dan udara dalam rangka memanfaatkan sepenuhnya geografis Pulau Batam yang ada pada jalur perdagangan

internasional. Sebagai daerah tujuan wisata bertaraf internasional, Pulau Batam menyiapkan kawasannya untuk pariwisata kapal pesiar, *Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions* (MICE), dan resor. Dengan kenaikan jumlah kunjungan wisatawan hingga 21.248 persen pada 2022 (yoy) sebagai wujud pulihnya kondisi ekonomi pasca pandemi, Pulau Batam menargetkan jumlah kunjungan wisatawan hingga 2,5 juta orang pada tahun 2023.

Jenis Layanan

Terdapat sepuluh produk dan jasa layanan yang diberikan BP Batam kepada masyarakat yang mengacu pada visi dan misi periode 2020-2024 yaitu: layanan jasa pelabuhan laut; layanan pengalokasian lahan; layanan jasa penerbangan; layanan kesehatan masyarakat; layanan rekomendasi sambungan air bersih; layanan rumah susun, asrama haji, agribisnis, dan aset lainnya; layanan data center dan training center; layanan izin penempatan reklame dan laboratorium uji tanah; layanan perizinan lalu lintas barang; serta layanan fatwa planogi.

Penerimaan

Pada BP Batam, unit layanan yang secara konsisten menyumbang pendapatan tertinggi yaitu Direktorat Pengelolaan Pertanahan, Badan Usaha Pelabuhan, dan Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum. Ketiga unit usaha tersebut, pada tahun 2022, berkontribusi sampai Rp1.570,50 miliar atau 80 persen dari total penerimaan sebesar Rp1.963,32 miliar. Angka tersebut naik sebesar Rp542,33 miliar atau 52,75 persen (yoy). Adapun sumbangan penerimaan ketiga unit tersebut pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp1.028,17 miliar atau 72,25 persen dari total penerimaan sebesar Rp1.423,10 miliar.

- ***Politeknik Negeri Batam***

Politeknik Negeri Batam (Polibatam) menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 517/KMK.05/2022 tanggal 29 Desember 2022. Polibatam juga menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pembinaan sivitas akademika, dan pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

Jenis Layanan

Secara umum, layanan yang diberikan Polibatam terbagi menjadi lima pusat layanan sesuai dengan tridarma perguruan tinggi yaitu pusat layanan pendidikan tinggi vokasi, pusat layanan pengembangan *technopreneurship*, pusat layanan training dan kompetensi, pusat layanan assessment kompetensi, dan pusat layanan litbang terapan. Kelima pusat layanan tersebut dijabarkan menjadi delapan jenis layanan yang ditujukan kepada berbagai pasar sasaran seperti lulusan SLTA, calon pekerja, perusahaan/lembaga, serta elemen masyarakat lainnya.

Penerimaan

Penerimaan terbesar berasal dari layanan biaya pendidikan yang menyumbang penerimaan sebesar Rp67,25 miliar pada tahun 2022 (98,11 persen dari total penerimaan) dan Rp57,57 miliar pada tahun 2021 (97,53 persen dari total penerimaan). Terjadi kenaikan Rp9,68

miliar pada tahun 2022 atau 16,81 persen (*yoy*). Guna terus mengimbangi kecepatan dinamika industri, Polibatam terus bergerak maju mengembangkan strategi pertumbuhan yang masif. Saat ini, layanan Pendidikan memiliki 18 program studi dan Polibatam menargetkan hingga 35 program studi pada 2028.

- ***Rumah Sakit Bhayangkara Batam***

Rumah Sakit Bhayangkara Batam (RSB Batam) Penerapan pola pengelolaan keuangan BLU pada RSB Batam didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 170 Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023. RSB Batam merupakan rumah sakit yang dibentuk untuk memberikan layanan kesehatan tidak hanya bagi anggota Polri/PNS serta keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat umum. RSB Batam merupakan rumah sakit tingkat IV dan menjadi rumah sakit rujukan dari fasilitas kesehatan BPJS Tingkat Pertama.

Jenis Layanan

RSB Batam memiliki tiga jenis pelayanan utama yaitu pelayanan instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, dan instalasi penunjang. Instalasi rawat jalan terdiri dari dua belas klinik pelayanan yaitu klinik penyakit dalam, klinik anak, klinik bedah umum, klinik kandungan, klinik bedah plastik, klinik jiwa, klinik saraf, klinik forensi, klinik umum, klinik mata, klinik bedah mulut, dan klinik gizi. Instalasi rawat inap terdiri dari unit gawat darurat (6 tempat tidur - TT), instalasi bedah sentral (2 kamar operasi), kamar bersalin (2 TT), instalasi rawat inap non isolasi (18 TT), instalasi rawat inap isolasi (33 TT), HCU (1 TT), Perinatologi (1 TT), dan rawat tahanan (4 TT). Instalasi penunjang terdiri dari instalasi laboratorium, instalasi farmasi, instalasi radiologi, instalasi loundry, instalasi gizi, IPAL, instalasi IPPRS, dan layanan ambulance 24 jam.

Penerimaan

Untuk periode tahun 2022 dan 2021, **RSB Batam** belum mencatatkan penerimaan dari layanan kesehatan sebagai penerimaan satker sehingga penerimaan RSB Batam pada periode tersebut hanya berupa pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan. Pada tahun 2022, total pendapatan sebesar Rp1.530.954,-. Angka tersebut mengalami penurunan hingga 85,70 persen dibandingkan tahun 2021 (yoy) yang mencapai Rp10.709.670,-. Untuk tahun 2023, pencatatan penerimaan RSB dari layanan kesehatan sebagai satker BLU dilakukan melalui pengesahan BLU dan telah mencapai Rp2,56 miliar (*cut off* 15 Desember 2023) atau 57,40 persen dari target sebesar Rp4,46 miliar.

- ***Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Midiyato Suratani***

Rumkital dr. Midiyato berstatus sebagai Rumah Sakit Kelas B berdasarkan sertifikat izin operasional rumah sakit, serta Rumah Sakit Tingkat II di wilayah Indonesia Bagian Barat berdasarkan Peraturan Panglima TNI nomor Perpang/65/VII/2011 terkait persetujuan dan pengesahan peningkatan status dari Rumah Sakti Tingkat III menjadi Rumah Sakit Tingkat II. Selain tugas dalam memberikan pelayanan kesehatan, Rumkital dr. Midiyato sebagai fasilitas kesehatan TNI memiliki tugas yang tidak terpisahkan dalam mendukung Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Bentuk dukungan yang

dilakukan yaitu menyiapkan SDM kesehatan, material kesehatan dan sarana prasarana kesehatan, serta melaksanakan perawatan di wilayah operasi dan melakukan evakuasi medis melalui darat, laut, dan udara.

Jenis Layanan

Pelayanan kesehatan yang ada pada Rumkital dr. Midiyato yaitu unit gawat darurat 24 jam, unit rawat jalan (32 poliklinik), unit rawat inap (205 TT), pelayanan medik spesialistik lengkap dan 4 subspesialistik, unit trauma center/bedah, unit pelayanan *intensive care*, unit hemodialisa, unit rehabilitasi medik, unit pelayanan gigi dan mulut, unit pelayanan radiologi, unit pelayanan farmasi, unit *hyperbarik chamber*, unit *medical checkup*, unit rekam medik, unit penunjang medik, unit penunjang non medik, unit pemulasaran jenazah, unit bangdiklat, dan unit manajeman.

Penerimaan

Hampir seratus persen penerimaan pada **Rumkital dr. Midiyato** berasal dari layanan fasilitas kesehatan baik yang dihasilkan oleh satker sendiri maupun dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL). Total pendapatan kedua sumber tersebut untuk tahun 2022 mencapai Rp43,59 miliar (99,95 persen dari total pendapatan). Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3,32 miliar atau minus 7,62 persen dibandingkan tahun 2021 (*yoy*). Dari sisi unit layanan, tiga unit layanan yang memberi kontribusi pendapatan tertinggi untuk periode tahun 2022 yaitu Unit Pelayanan Bedah, Unit Rawat Inap, dan Unit Pelayanan Farmasi.

3.1.5.2 Peningkatan Aset dan Porsi Pagu PNBP

Dari empat BLU di Kanwil Prov. Kepri, BP Batam dapat merealisasikan PNBP paling besar yaitu Rp1.307,53 miliar. Namun demikian, realisasi tersebut hanya 73,36 persen dari target PNBP tahun 2023. Kemudian, Polibatam dapat merealisasikan PNBP Rp95,53 miliar atau 103,94 persen dari target Rp91,91 miliar. Rumkital dr. Midiyato dapat merealisasikan PNBP Rp52,44 miliar atau 124,86 persen dari target Rp42,00 miliar. RSB Batam dapat merealisasikan PNBP Rp3,96 miliar atau 88,79 persen dari target Rp4,46 miliar. Terdapat dua BLU yang dapat merealisasikan PNBP diatas target tahunan. Hal ini cukup mengembirakan terlebih dua BLU tersebut baru menerapkan PK BLU pada tahun 2023. Kondisi tersebut menggambarkan tingginya potensi BLU untuk semakin berkembang.

Tabel 3.11 - Perkembangan Realisasi Belanja dan PNBP BLU lingkup Kepri, 2023 (Rp miliar)

No	Nama BLU	Anggaran Belanja		Real.	% Real	Target PNBP	Real.	% Real
		RM	PNBP					
1.	BP Batam	284,52	2.353,12	1.547,34	58,66	1.782,25	1.307,53	73,36
2.	Polibatam	54,86	93,35	122,68	82,77	91,91	95,53	103,94
3.	RSB Batam	4,33	6,99	8,99	79,42	4,46	3,96	88,79
4.	Rumkital dr. Midiyanto	32,18	21,77	51,39	95,26	42,00	52,44	124,86

Sumber: Laporan BLU Kanwil DJPb Kepri, 2024

Dari sisi aset, BLU BP Batam memiliki aset sebesar Rp54.939,74 miliar pada tahun 2020. Kemudian aset tersebut menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp54.796,92 miliar. Aset BP Batam kembali naik pada tahun 2022 menjadi Rp54.908,68 miliar atau meningkat 0,20 persen.

Tabel 3.12 – Neraca BP Batam, 2020 s.d. 2022 (Rp miliar)

Tahun	Nilai Aset	Nilai Ekuitas
2020	54.939,74	51.946,78
2021	54.736,74	51.674,69
2022	54.908,68	50.890,42
Growth (2021-2022)	0,20%	-1,52%

Sumber: Laporan BLU BLU Kanwil DJPb Kepri, 2023

3.1.5.3. Analisis Tingkat Kemandirian *Maturity Rating*

Satker BLU lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau yang telah memenuhi syarat penilaian tingkat maturitas (*maturity rating*) yaitu BP Batam. Tingkat maturitas BP Batam tahun 2021 dan 2022 berturut-turut yaitu 2,80 dan 2,91 dengan perincian per masing-masing aspek sebagai berikut.

Tabel 3.13 - Nilai Aspek Maturitas BP Batam, 2021 s.d. 2022

No	Nama BLU	Tahun	Aspek Maturitas						
			Keuangan	Layanan	Kapabilitas Internal	Tata Kelola dan Kepemimpinan	Inovasi	Lingkungan	Total
			20%	25%	20%	20%	10%	5%	100%
1.	BP Batam	2021	2,69	3,81	2,50	2,80	1,75	1,50	**2,80**
		2022	3,03	4,23	2,50	2,60	1,50	1,50	**2,91**

Sumber: Laporan BLU BLU Kanwil DJPb Kepri, 2023

Aspek maturitas tertinggi ada pada aspek layanan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan badan usaha atau unit usaha pada BP Batam telah menunjukkan efisiensi waktu pelayanan, sistem pengaduan layanan yang memadai, tingkat keberhasilan pemenuhan layanan yang tinggi, dan hal tersebut semakin dikuatkan dengan indeks kepuasan masyarakat yang tinggi.

- ***Profil dan jenis layanan satker PNBP dan Potensinya menjadi BLU***

Sampai dengan tahun 2023, terdapat sembilan satker yang berpotensi menjadi satker BLU di Provinsi Kepulauan Riau. Tiga satker pada bidang Pendidikan, 4 satker yang bergerak di bidang layanan ekonomi sub-bidang transportasi sebagai mana Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.14 - Rincian Nama Satker Berpotensi Menjadi BLU lingkup Kepri

Nama Satker	Jenis Layanan Umum
Universitas Maritim Raja Ali Haji	Pendidikan
Politeknis Kesehatan Tanjung Pinang	Pendidikan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	Pendidikan
Kantor UPBU Ranai	Transportasi

Kantor UPBU Dabo	Transportasi
Kantor UPBU Raja Haji Abdullah	Transportasi
Kantor UPBU Letung	Transportasi

Sumber: Laporan BLU Kanwil DJPb Kepri, 2022

- ***Kontribusi BLU terhadap Regional Kepri***

BLU Pusat memberikan kontribusi positif bagi regional Kepri, sebagai berikut:

a. BP Batam sebagai pengelola Kawasan Batam memiliki peran sentral dalam pembangunan di Kota Batam. Kota Batam menjadi pusat dari Provinsi Kepri, baik ekonomi, pendidikan, industri dll. Melalui pengembangan industri pada Kawasan FTZ Kota Batam dapat menyerap tenaga kerja yang banyak.

b. BLU menyumbang PNBP dominan dalam PNBP lingkup Kepri.

c. BLU Poltek Batam sebagai Lembaga Pendidikan, mampu menciptakan output lulusan yang dapat langsung diserap oleh industri di Batam.

d. BLU rumah sakit, baik RSAL dan RSB mampu memberikan alternatif layanan kepada masyarakat selain RSUD di lingkup Kepri. Fasilitas dan tenaga medis yang disediakan, mampu memberikan layanan yang sangat baik bagi masyarakat.

3.1.6 Pengelolaan Manajemen Investasi Pusat

Pada tahun 2023 di Kepri terdapat dua jenis investasi pemerintah pusat yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayan Ultra Mikro (UMi).

3.1.6.1 Kredit Usaha Rakyat

- ***Perkembangan Penyaluran KUR***

Berdasarkan Aplikasi SIKP dengan *cut off* data 9 Januari 2024, tercatat penyaluran KUR sebesar Rp1.747,16 miliar kepada 26.673 debitur. **Kinerja penyaluran** mengalami penurunan sebesar minus 24,77 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.322,39 miliar. Sejalan dengan penurunan penyaluran KUR, penurunan juga terjadi dari sisi debitur yaitu sebesar minus 24,60 persen *(yoy*) dari tahun sebelumnya sebesar 35.376 debitur.

Grafik 3.16 – Perkembangan Penyaluran KUR di Prov. Kepri (Rp miliar)

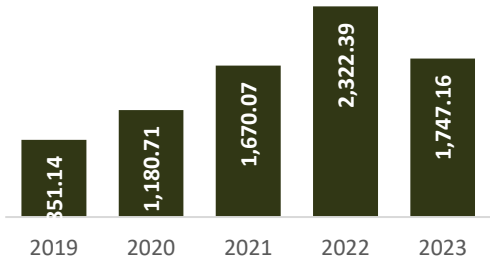

Sumber: SIKP, 2024 (diolah)

Grafik 3.17 – Perkembangan Debitur KUR di Prov Kepri (Orang)

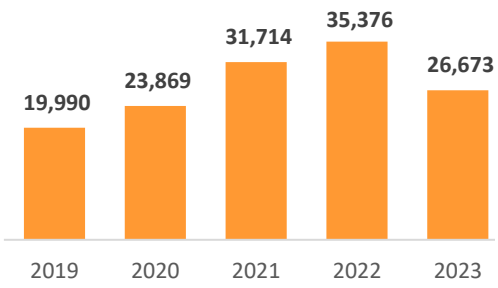

Sumber: SIKP, 2024 (diolah)

Sepanjang tahun 2023, **penyaluran KUR per skema** didominasi oleh skema Kecil sebesar Rp845,26 miliar (48,38 persen) kepada 3.194 debitur kemudian dilanjutkan dengan skema Mikro sebesar Rp841,32 miliar (48,15 persen) kepada 16.890 debitur dan terakhir Super Mikro sebesar Rp60,58 miliar (3,47 persen) kepada 6.589 debitur. Meskipun dari sisi penyaluran didominasi oleh KUR Kecil, namun dari sisi debitur didominasi KUR Mikro, yaitu sebesar 16.890 debitur (63,32 persen) kemudian diikuti oleh Supermi 6.589 debitur (24,70 persen) dan Kecil 3.194 debitur (11,97 persen).

Sebagai wilayah dengan pusat perekonomian yang dikuasai oleh sektor perdagangan dan industri, **penyaluran KUR per sektor** di Kepri juga didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp871,61 miliar dengan porsi 49,89 persen. Lebih lanjut penyaluran KUR per sektor berturut-turut, yaitu: Kemasyarakatan Sosial Budaya (Rp268,78 miliar); Akomodasi dan Makan Minum (Rp166,12 miliar); Perikanan (Rp125,22 miliar); Pertanian dan Kehutanan (Rp93,89 miliar); Industri Pengolahan (Rp88,77 miliar); Real Estate dan Persewaan (Rp85,52 miliar); Transportasi Pergudangan (Rp24,04 miliar); Konstruksi (Rp10,90 miliar); Kesehatan Sosial (Rp8,05 miliar); dan Pendidikan (Rp4,27 miliar).

- ***Dampak KUR bagi UMKM***

Kanwil DJPb Kepri melakukan survei kepada debitur KUR yang merupakan UMKM. Dari hasil survei dilakukan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* dan dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah responden memperoleh pembiayaan KUR terjadi beberapa dampak, yaitu:

a. terjadi peningkatan rata-rata omzet responden
b. terjadi peningkatan rata-rata profit responden
c. terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran rumah tangga responden

Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang tidak terdampak setelah responden memperoleh pembiayaan KUR, sebagai berikut:

a. tidak terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran pendidikan responden
b. tidak terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran kesehatan responden
c. tidak terjadi peningkatan rata-rata jumlah tenaga kerja responden

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran KUR berdampak atau telah menjadi pengungkit pada peningkatan usaha melalui peningkatan omzet dan profit dan peningkatan kesejahteraan UMKM melalui peningkatan rata-rata pengeluaran rumah tangga. Namun demikian, dampak tersebut belum terlalu besar terhadap peningkatan usaha karena belum sampai pada tahap penambahan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pengeluaran pendidikan dan pengeluaran kesehatan.

3.1.6.2 Kredit Ultra Mikro (UMi)

- ***Perkembangan Penyaluran UMi***

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan pemerintah menjadi kemandirian usaha kepada usaha mikro yang berada di lapisan terbawah yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan UMi memberikan fasilitas permodalan yang disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Berdasarkan Pasal 2 PMK No.193/PMK.05/2020, Pembiayaan UMi bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultra mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh pemerintah.

Data perkembangan UMi sebagai mana tersaji dalam Tabel 3.10 berikut.

Tabel 3.15 – Perkembangan Penyaluran UMi, 2022 - 2023

Uraian	2021	2022	2023	Growth (2022-2023)
Debitur	7.109 orang	6.780 orang	9.744 orang	43,72%
Penyaluran	Rp25,62 miliar	Rp30,03 miliar	Rp47,63 miliar	58,58%

Sumber: SIKP-UMi, 2024 (diolah)

Berdasarkan data SIKP-UMi, pada tahun 2023, pembiayaan UMi di Provinsi Kepulauan Riau (Prov. Kepri) telah menjangkau 9.744 debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp47,63 miliar. Dari sisi nominal, penyaluran UMi meningkat sebesar 58,58 persen (*yoy*) sedangkan dari sisi debitur, jumlah debitur UMi meningkat sebesar 43,72 persen (*yoy*).

Program Pembiayaan UMi telah tersebar di seluruh Kota/Kabupaten di Prov. Kepri, namun penyebarannya masih terpusat di Kota Batam dengan persentase penyaluran UMi sebesar 63,79 persen kepada 5.931 debitur. Hal ini sejalan dengan jumlah sebaran UMKM di Provinsi Kepri, yaitu 72,25 persen dari jumlah UMKM berada di kota Batam sehingga Pembiayaan UMi dapat tersalurkan dengan maksimal di Kota Batam.

- ***Dampak UMi bagi UMKM***

Kanwil DJPb Kepri melakukan survei kepada debitur KUR yang merupakan UMKM. Dari hasil survei dilakukan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* terhadap NKD *baseline* semester II 2023 dan NKD *endline* semester II 2024 atas *sample* debitur yang sama menunjukkan bahwa pembiayaan UMi memberikan dampak signifikan bagi nilai keekonomian debitur.

3.1.7 Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah

Evaluasi dan tantangan atas ketercapaian output program strategis pemerintah yang didanai oleh APBN di daerah

1. Izin mengenai prasyarat penyiapan pelaksanaan proyek, seperti perizinan pemanfaatan lahan hutan lindung/hutan mangrove, dan penyiapan kondisi pra pengadaan barang dan jasa lain yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan.

2. Permasalahan utama yang masih kerap ditemui yaitu kondisi cuaca dan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang menyulitkan mobilisasi orang dan barang terutama untuk proyek fisik yang berlokasi di pulau terluar

Permasalahan dan tantangan dalam tata Kelola dan pencapaian belanja pemerintah yang berkualitas yang didanai APBN di daerah

1. Blokir pagu *Automatic Adjusment* (blokir AA) masih menjadi kendala terbesar dalam aspek penganggaran. Blokir AA dengan persentase yang besar terhadap total pagu mengharuskan satker melakukan perombakan rencana kegiatan. Perombakan tersebut menimbulkan permasalahan baru, yaitu kemunduran penandatangan kontrak, tidak terlaksananya kegiatan seusai dengan rencana awal.
2. Proses revisi yang tumpeng tindih antara revisi terpusat/eselon I dan revisi tingkat satker.
3. Ketersediaan pagu belanja pegawai yang tidak selaras dengan jumlah pegawai
4. Tambahan pagu pada triwulan II
5. Rumitnya struktur COA pada POK BLU BP Batam yang menampung kegiatan dua puluh tiga unit kerja.
6. Barang/jasa spesifik tidak selalu tersedia pada e-catalog sebagaimana terbatasnya barang yang memenuhi unsur TKDN.
7. Kebijakan internal satker, seperti pemusatan pemilihan penyedia barang/jasa pada satker BP2JK untuk seluruh satker lingkup Kementerian PUPR
8. Panjangnya administrasi bansos pada satker lingkup Kementerian Agama

Permasalahan dan tantangan dalam upaya akselerasi belanja APBN di daerah

1. Kualitas SDM satker yang kurang memahami pentingnya kontrak pra DIPA sebagai bagian dari upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Selain itu, satker juga kurang memahami ketentuan terkait batas waktu penyelesaian tagihan.
2. Lemahnya koordinasi internal satker menyebabkan ketidakselarasan antara progres pekerjaan/capaian output dan rencana penarikan dana.
3. Keterlambatan penerbitan juknis kegiatan khususnya pada satker DK/TP.

3.2 Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

Sampai dengan 31 Desember 2023, APBD menunjukkan terdapat SILPA Rp807,69 miliar. Pendapatan Daerah dapat direalisasikan Rp13.909,60 miliar atau meningkat 13,42 persen (*yoy*). Di sisi lain, Belanja Daerah dapat direalisasikan Rp13.996,19 miliar atau meningkat 13,11 persen (*yoy*) sebagaimana tergambar pada Tabel 3.11 berikut.

Tabel 3.16 – Perkembangan I-Account APBD di Kepri, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

URAIAN	TA 2021			TA 2022			TA 2023			Growth (2022-2023)
	Pagu	Real.	%	Pagu	Real.	%	Pagu	Real.	%	
PENDAPATAN DAERAH	12,729.96	11,838.00	92.99%	12,906.38	12,263.88	95.02%	13,755.70	13,909.60	101.12%	13.42%
PAD	3,717.50	3,393.25	91.28%	3,971.51	3,808.40	95.89%	4,282.73	4,656.20	108.72%	22.26%
Pendapatan Transfer	8,784.31	8,085.20	92.04%	8,896.02	8,392.79	94.34%	9,441.48	9,222.42	97.68%	9.89%

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**228.15**	**359.56**	**157.60%**	**38.85**	**62.69**	**161.37%**	**31.49**	**30.98**	**98.38%**	**-50.58%**
BELANJA DAERAH	**13,660.55**	**11,696.93**	**85.63%**	**13,949.63**	**12,374.47**	**88.71%**	**14.432.58**	**13,996.19**	**96.98%**	**13.11%**
Belanja Operasi	**10,313.90**	**9,296.80**	**90.14%**	**10,427.37**	**9,736.43**	**93.37%**	**10,698.79**	**10,500.19**	**98.14%**	**7.84%**
Belanja Pegawai	4,385.49	4,232.06	96.50%	4,728.81	4,491.74	94.99%	5,042.39	4,872.54	96.63%	8.48%
Belanja Barang dan Jasa	5,558.23	4,366.66	78.56%	4,908.22	4,535.28	92.40%	4,936.86	4,803.25	97.29%	5.91%
Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00%	2.50	0.70	27.91%	13.14	8.62	65.62%	1135.78%
Belanja Subsidi	0.64	0.00	0.00%	2.12	1.69	79.76%	2.45	5.31	216.72%	214.02%
Belanja Hibah	346.72	681.25	196.48%	728.49	667.60	91.64%	690.36	782.96	113.41%	17.28%
Belanja Bantuan Sosial	22.83	16.82	73.69%	57.23	39.41	68.87%	13.58	27.50	202.46%	-30.22%
Belanjan Modal	**2,083.10**	**1,783.65**	**85.62%**	**2,297.38**	**2,098.62**	**91.35%**	**2,429.07**	**2,170.54**	**89.36%**	**3.43%**
Belanja Modal	2,083.10	1,783.65	85.62%	2,297.38	2,098.62	91.35%	2,429.07	2,170.54	89.36%	3.43%
Belanja Tak Terduga	**187.81**	**61.93**	**32.97%**	**26.17**	**6.06**	**23.16%**	**93.05**	**9.27**	**9.96%**	**52.90%**
Belanja Tak Terduga	187.81	61.93	32.97%	26.17	6.06	23.16%	93.05	9.27	9.96%	52.90%
Belanja Transfer	**1,075.73**	**554.55**	**51.55%**	**1,198.71**	**533.36**	**44.49%**	**1,211.66**	**1,316.19**	**108.63%**	**146.77%**
Belanja Bagi Hasil	491.95	19.68	4.00%	N/A	57.25	N/A	N/A	785.98	N/A	1272.80%
Belanja Bantuan Keuangan	583.78	534.87	91.62%	N/A	476.11	N/A	N/A	530.21	N/A	11.36%
SURPLUS/ (DEFISIT)	**(930.59)**	**141.08**	**-15.16%**	**(1,043.25)**	**(110.59)**	**10.60%**	**(676.87)**	**(86.58)**	**12.79%**	**-21.71%**
PEMBIAYAAN	**930.59**	**740.95**	**79.62%**	**1,043.23**	**718.32**	**68.86%**	**676.87**	**894.27**	**132.12%**	**24.49%**
Penerimaan Pembiayaan	936.29	743.65	79.42%	1,045.23	719.32	68.82%	761.21	963.16	126.53%	33.90%
Pengeluaran Pembiayaan	5.70	2.70	47.37%	2.00	1.00	50.00%	84.34	68.90	81.69%	6789.66%
SiLPA/SiKPA		**882.02**			**607.73**			**807.69**		**32.90%**

Sumber: SIKRI dan GFS, 2024 (diolah)

3.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp13.909,60 miliar atau 101,12 peresen dari Pagu dan mengalami peningkatan 13,42 persen (*yoy)*. Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer, yaitu sebesar Rp9,222,42 miliar (66,30 persen dari Pendapatan Pemerintah Daerah) dibandingkan PAD sebesar Rp4.656,20 miliar (33,47 persen dari Pendapatan Pemerintah Daerah). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum dapat mengandalkan PAD sebagai penopang utama keuangan daerah dan masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD dapat direalisasikan sebesar Rp4.656,20 miliar atau 108,72% dari target. Realisasi PAD tumbuh sebesar 22,26 persen. Hal ini sangat mengembirakan karena pada tahun 2021 dan 2022 realisasi PAD tidak mencapai target. Pada 2021 ralisasi PAD hanya sebesar Rp3.393,25 atau 91,28 persen dari target sedangkan tahun 2022 PAD sebesar Rp3.808,40 miliar atau 95,89 persen dari target.

Grafik 3.18 – Pagu dan Realisasi PAD, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

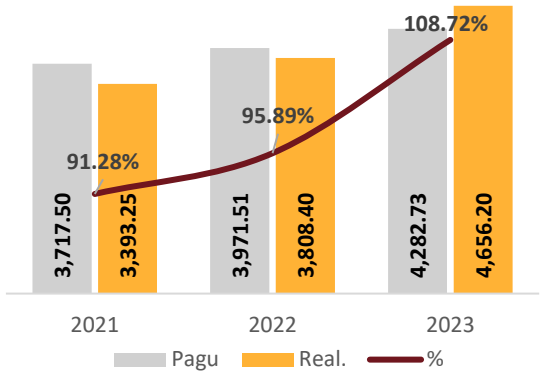

Sumber: SIKRI, 2024 (diolah)

Pertumbuhan PAD sebesar 22,26% persen (*yoy*) menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi Pajak Daerah, Retribusi, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sehingga mendorong PAD tumbuh positif. Namun demikian, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya tumbuh 0,34 persen.

Pada periode tahunan 2023, kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 31,05 persen. Hal ini menunjukkan pada tahun 2023 terdapat **peningkatan persentase kontribusi PAD terhadap total Pendapatan Daerah**. PAD terdiri dari beberapa komponen, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pajak Daerah merupakan komponen terbesar penyumbang PAD yaitu Rp3.581,67 atau 76,92 persen dari total PAD. Kemudian, komponen PAD yang memberikan kontribusi terbesar kedua adalah Lain-lain PAD yang Sah dengan kontribusi terhadap PAD sebesar 18,30 persen. Retribusi Daerah memberikan kontribusi sebesar 3,98 persen, sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi paling kecil yaitu sebesar 0,83% persen.

PAD tumbuh sebesar 22,26% persen (yoy). Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi Pajak Daerah, Retribusi, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sehingga mendorong PAD tumbuh positif. Namun demikian, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya tumbuh 0,34 persen.

- ***Pajak Daerah***

Pajak Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp3,58 triliun dan tumbuh sebesar Rp476,48 miliar atau 15,34 persen (*yoy*) Pajak Daerah dengan realisasi terbesar adalah Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Rp535,90 miliar, Namun demikian, jika melihat jenis Pajak Daerah milik Kota/Kabupaten dan mengeluarkan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak terdapat disemua Kota/Kab lingkup Kepri, maka **Pajak Daerah dengan realisasi terbesar adalah Pajak Penerangan Jalan yaitu Rp347,45 miliar**.

Grafik 3.19 – Realisasi dan Pertumbuhan Pajak Penerangan Jalan, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

Sumber: SIKRI, 2024 (diolah)

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebagai kontributor terbesar Pajak Daerah terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Rp283,75 miliar pada tahun 2021, Rp320 miliar pada tahun 2022, dan Rp347,45 miliar pada tahun 2023 sebagaimana tertera pada Grafik 3.15. Peningkatan PPJ disebabkan oleh banyaknya pengguna baru listrik dan peningkatan daya oleh pengguna serta tingginya tarif yang dikenakan sebesar 7 persen untuk rumah tangga dari tarif maksimal yang dapat ditetapkan oleh Pemda adalah 10 persen. Tarif ini bahkan lebih besar dari tarif PPJ Provinsi Riau sebesar 6 persen, Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 3 s.d 4 persen untuk rumah tangga.

Adapun peningkatan Pendapatan Pajak Daerah ditopang dari peningkatan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, dan Pajak BBNKB. Pajak Hotel meningkat sebesar Rp107,19 miliar atau 67,97 persen, Pajak Restoran meningkat sebesar Rp39,91 miliar atau 29,90 persen, Pajak Hiburan meningkat sebesar Rp12,93 miliar atau 42,43 persen, Pajak Reklame sebesar Rp11,85 miliar atau sebesar 83,38 persen, dan Pajak Air Tanah meningkat sebesar Rp62,07 juta atau 64,91 persen (*yoy*). Dengan demikian, peningkatan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan menunjukkan bahwa sektor pariwisata yang merupakan sektor andalan utama Kepri telah kembali pulih.

- ***Retribusi Daerah***

Retribusi Daerah dapat direalisasikan Rp185,16 miliar dan tumbuh Rp60,28 miliar atau 48,27persen (yoy). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi penyumbang realisasi Retribusi terbesar, yaitu Rp52,28 miliar. Kemudian diikuti oleh Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan realisasi sebesar Rp42,95 miliar. Kota Batam adalah kontributor terbesar bagi Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing karena Batam merupakan wilayah yang dikhususkan sebagai wilayah industri dan investor asing.

Pendapatan Retribusi dengan peningkatan tertinggi kedua adalah Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), yaitu meningkat sebesar Rp28,03 miliar atau 187,85 persen. Peningkatan ini menunjukkan tingginya tenaga kerja asing yang bekerja di lingkup Kepri. Kemudian peningkatan pendapatan Retribusi signifikan terdapat pada Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, yaitu sebesar Rp2,35 miliar atau 41,15 persen (*yoy*). Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan keluar masuk penumpang atau wisatawan, baik dalam maupun luar negeri. Namun demikian, terdapat beberapa pendapatan Retribusi yang mengalami pertumbuhan minus dengan angka yang signifikan,

seperti Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang turun sebesar Rp4,34 miliar atau -34,81 persen.

- ***Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan***

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dapat direalisasikan sebesar Rp37,19 miliar dan tumbuh Rp0,13 miliar atau 0,34 persen (*yoy*) Pendapatan tersebut merupakan hasil dari Bagian Laba yang dibagikan kepada pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Selain itu, juga terdapat Bagian Laba yang dibagikan kepada pemda atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta Rp124 miliar.

- ***Lain – Lain PAD yang Sah***

Lain-lain PAD yang Sah dapat direalisasikan Rp852,18 miliar dan tumbuh Rp310,92 miliar atau 57,44 persen (*yoy*). Realisasi Pendapatan terbesar dari Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah Pendapatan BLUD sebesar Rp455,733 miliar. Kemudian diikuti oleh Pendapatan Bunga Rp302,95 miliar.

- ***Analisis Rasio PAD terhadap PDRB***

Rasio PAD terhadap PDRB menunjukkan peningkatan berturut-turut dari tahun 2021 s.d 2023 yaitu 0,94 persen; 1,00 persen; 1,16 persen. Rasio tersebut meningkat karena persentase peningkatan PAD lebih besar dibandingkan persentase peningkatan PDRB. Pada tahun 2022, PAD meningkat 12,23 persen dibandingkan PDRB yang meningkat 5,09 persen (*yoy*). Pada tahun 2023, persentase peningkatan PAD lebih tinggi dibandingkan PDRB, yaitu meningkat 22,26 persen dibandingkan PDRB meningkat 5,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemda mampu meningkatkan PAD melebihi peningkatan PDRB.

Grafik 3.19 – Rasio PAD per PDRB, 2021 s.d. 2023

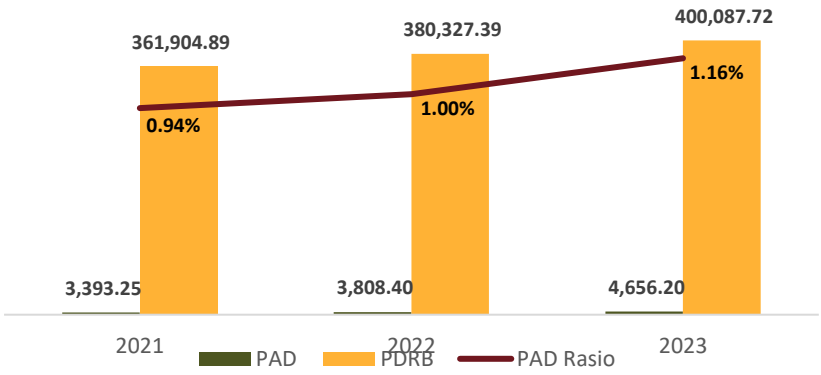

Sumber: SIKRI dan BPS Kepri, 2024 (diolah)

- ***Analisis Tingkat Kemandirian Daerah***

Otonomi daerah adalah pemberian kemandirian kepada pemerintah daerah, berupa wewenang mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat secara mandiri melalui peningkatan layanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah

memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di daerahnya sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah. Peningkatan kemampuan fiskal daerah menjadi syarat utama untuk mendukung otonomi tersebut. Oleh karena itu diberikan perluasan desentralisasi fiskal untuk memperkuat kewenangan daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun kewenangan dan perluasan desentralisasi fiskal telah diberikan kepada pemerintah daerah, mayoritas pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi pada pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan desentralisasi fiskal dalam peningkatan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai layanan publik secara mandiri belum sepenuhnya tercapai. Tak terkecuali pada Kepri, mayoritas Belanja Negara masih dibiayai oleh Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 3.17 – Klaster Kondisi Kemandirian Fiskal

IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
0,75 ≤ IKF ≤ 1,00	Sangat Mandiri
0,50 ≤ IKF < 0,75	Mandiri
0,25 ≤ IKF < 0,50	Menuju Kemandirian
0,00 ≤ IKF < 0,25	Belum Mandiri

Sumber: GFS, 2024

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat ditunjukkan melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang akan dibagi ke dalam beberapa kluster sebagai mana Tabel 3.12.

IKF dihitung dengan membandingkan antara PAD dengan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari sumber lain, seperti transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman.

[IKF I = PAD/Total Pendapatan]

Selain itu, terdapat cara lain untuk menghitung kemandirian daerah yaitu dengan memperhitungkan seluruh pendapatan yang dihasilkan dari suatu daerah, termasuk DBH.

[IKF II = (PAD+DBH)/Total Pendapatan]

Berikut tingkat kemandirian daerah tiap Kabupaten/Kota lingkup Kepri berdasarkan kedua indeks tersebut:

Indeks Kemandirian Fiskal I

Indeks Kemandirian Fiskal I (IKF I) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD dengan Total Pendapatan. Hasil perhitungan IKF I dari tahun 2017 s.d 2023 sebagaimana Grafik 3.16 menunjukkan bahwa Mayoritas Kabupaten/Kota di lingkup Kepri masih berada pada klaster "Belum Mandiri". Kota Batam dan Kabupaten Karimun berada pada klaster "Menuju Kemandirian". Walaupun Kabupaten Karimun berada pada klaster "Belum Mandiri"

pada tahun 2020 karena IKF I sebesar 0,24. Kota Tanjungpinang, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Bintan masih berada pada klaster "Belum Mandiri". Kabupaten Bintan sempat masuk kategori "Menuju Kemandirian" pada tahun 2019, namun tingkat IKF I turun drastis pada tahun 2020 hingga 2022.

Grafik 3.20 – Indeks Kemandirian Fiskal I, 2023

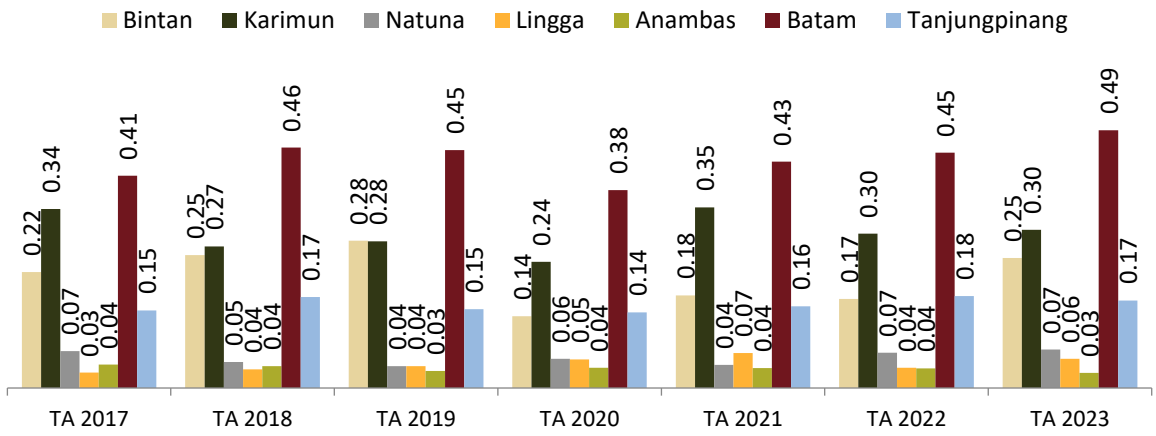

Sumber: GFS, 2024 (diolah)

Pada periode Tahun 2023 sebagai mana Grafik 3.17, IKF I Kepri berada di angka 50,42% atau pada klasifikasi "Kemandirian". Secara parsial, Kota Batam, dan Kabupaten Karimun berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian". Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada klasifikasi "Belum Mandiri". Dapat disimpulkan bahwa mayoritas kabupaten/kota (empat dari tujuh) pada Triwulan III 2023 berada pada klasifikasi "Belum Mandiri".

Grafik 3.21 – Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) I, 2023

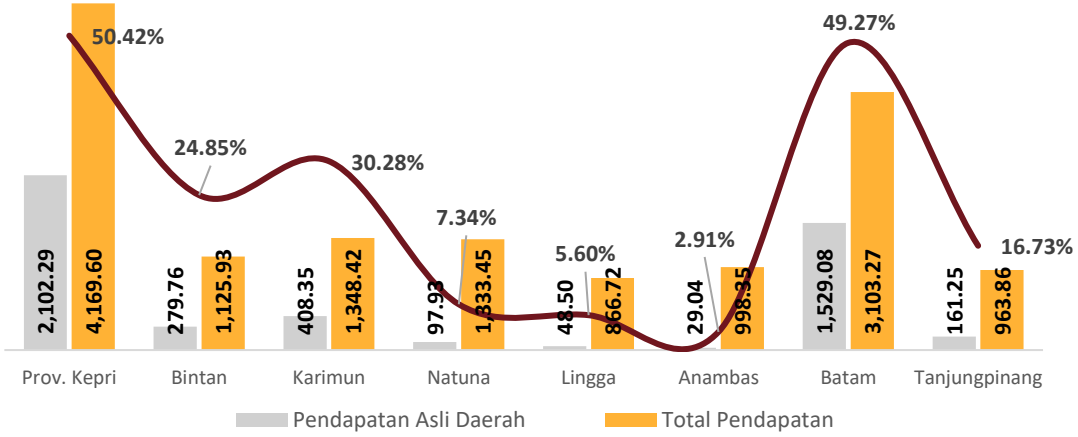

Sumber: GFS, 2024 (diolah)

Indeks Kemandirian Fiskal II

Indeks Kemandirian Fiskal II (IKF II) menghitung kemandirian dengan membandingkan PAD ditambah Dana Bagi Hasil dengan Total Pendapatan. Hasil perhitungan IKF II dari tahun

2017 s.d 2023 sebagai mana Grafik 3.17 menunjukkan bahwa Kota Batam berada pada klaster "Mandiri". Lima Kabupaten/Kota lainnya berada pada klaster menuju "Kemandirian", yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, sedangkan Kabupaten Lingga masih berada pada klaster "Belum Mandiri".

Grafik 3.22 – Indeks Kemandirian Fiskal II, 2017 s.d. 2023

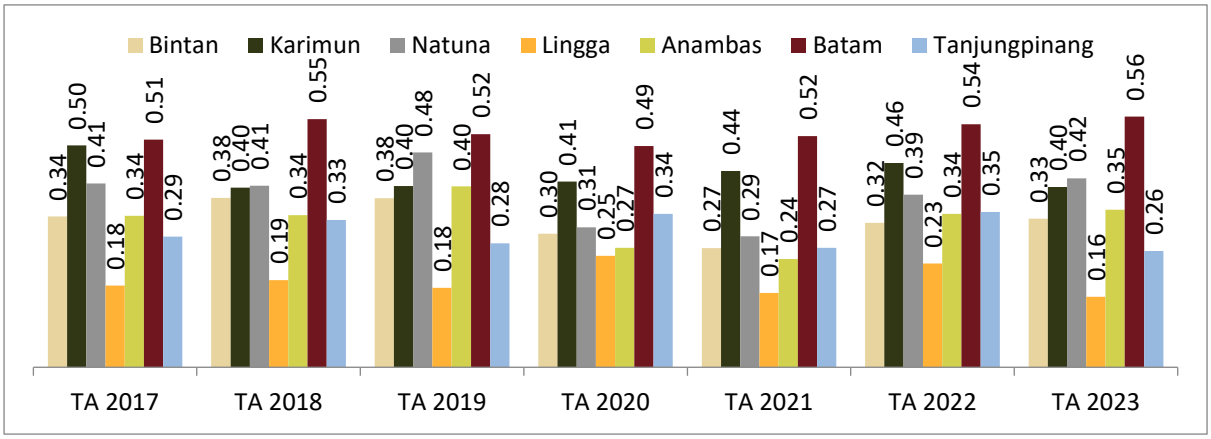

Sumber: GFS, 2024 (diolah)

Pada periode Tahun 2023 sebagai mana Grafik 3.18, IKF II Kepri berada di angka 58,63 persen atau pada klasifikasi "Mandiri". Secara parsial hanya Kota Batam yang masuk klaster "Mandiri". Lima Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjungpinang berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian". Hanya Kabupaten Lingga berada pada kategori "belum mandiri". Dari hasil IKF II periode periode Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa mayoritas kabupaten/kota (lima dari tujuh) berada pada klasifikasi "Menuju Kemandirian".

Grafik 3.23 – Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) II, 2023

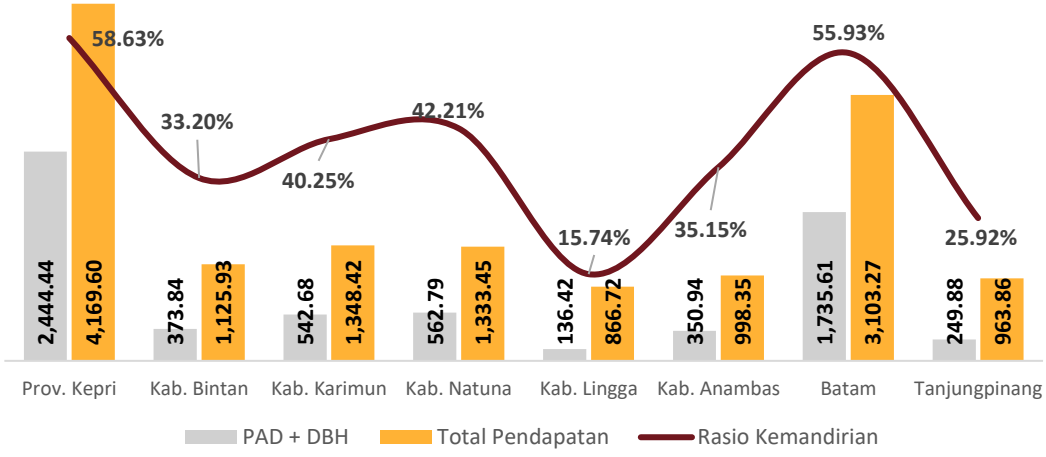

Sumber: GFS, 2024 (diolah)

- ***Upaya Daerah Dalam Meningkatkan PAD***

Disisi lain, Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tumbuh Rp259,77 juta atau 0,10 persen. Angka pertumbuhan tersebut tidak tinggi, namun demikian hal ini cukup mengembirakan karena pada tahun 2022 terdapat relaksasi pembayaran PBB untuk pajak terutang tahun-tahun sebelumnya. Adapun langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam) khususnya adalah sebagai berikut:

1. Pada Bulan Agustus hingga Oktober 2022, Pemerintah Kota Batam memberikan keringanan 10 persen untuk pokok piutang PBB dari tahun 1994 hingga 2021. Oleh karena itu pendapatan PBB menjadi meningkat. Selain itu, Pemda Kota Batam melakukan upaya penagihan aktif, menyampaikan informasi program keringanan melalui persatuan pengusaha, hingga mendatangi wajib pajak dan memberikan surat peringatan kewajiban WP. Hal ini berhasil meningkatkan penerimaan PBB pada periode Tahun 2022.
2. Pada Tahun 2023, Pemko Batam kembali memberikan diskon 10 persen bagi WP yang membayar pada Triwulan I 2023. Kemudian memberikan diskon 5 persen bagi WP yang membayar pada Triwulan II 2023. Oleh karena itu, terjadi peningkatan signifikan terhadap penerimaan PBB pada Triwulan I dan Triwulan II 2023. Hasilnya, Pemko Batam mendapatkan keuntungan dari percepatan pembayaran PBB oleh WP pada Triwulan I dan Triwulan II. Pendapatan PBB tersebut dapat langsung digunakan oleh pemerintah kota untuk membiayai belanja.
3. Pemerintah Kota Batam juga mengeluarkan program insentif atau keringanan pajak BPHTB, berupa potongan harga sebesar 50 persen bagi warga yang terdaftar dan tercatat menerima manfaat dari program pendaftaran tanah sistematis atau dalam program daerah (Proda) dengan luas maksimal 600 M2. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan BPHTB secara signifikan yaitu Rp70,97 miliar atau sebesar 17,23 persen.
4. Disisi Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan retribusi dengan peningkatan tertinggi, yaitu meningkat Rp31,61 miliar atau 152,93 persen (*yoy*). Hal ini disebabkan mulai meningkatnya pembangunan konstruksi terutama di Kota Batam. Selain itu, pemerintah daerah menertibkan izin mendirikan bangunan atau sekarang diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk bangunan-bangunan terutama bangunan bisnis seperti pasar, toko, ruko dll.

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pada tahun 2023, Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp9.222,42 miliar dan tumbuh sebesar 9,89 persen (*yoy*). Realisasi Pendapatan Transfer disumbang oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan (Rp8.064,50 miliar), Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (Rp392,55 miliar), Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah (Rp759,19 miliar), dan Bantuan Keuangan (Rp6,18 miliar). Tabel 3.13 berikut menyajikan rincian realisasi Pendapatan Transfer dari tahun 2021 sampai dengan 2023.

Tabel 3.18 – Realisasi Pendapatan Transfer, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

Uraian	TA 2021	TA 2022	Growth	TA 2023	Growth
PENDAPATAN TRANSFER	**8,085.20**	**8,392.79**	**3.80%**	**9,222.42**	**9.89%**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	**7,502.22**	**8,027.36**	**7.00%**	**8,064.50**	**0.46%**
Bagi Hasil Pajak	673.75	591.44	-12.22%	603.42	2.02%
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	807.59	1,691.37	109.43%	1,137.00	-32.78%
Dana Alokasi Umum (DAU)	4,275.42	4,265.18	-0.24%	4,462.83	4.63%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	1,745.46	1,479.36	-15.25%	1,861.25	25.81%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**582.98**	**365.44**	**-37.32%**	**392.55**	**7.42%**
Dana Insentif Daerah	308.35	157.36	-48.97%	166.77	5.98%
Dana Desa	274.64	208.08	-24.24%	225.78	8.51%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**759.19**	**∞**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0.00	0.00	0.00%	759.19	∞
Bantuan Keuangan	**0.00**	**0.00**	**0.00%**	**6.18**	**∞**
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	0.00	0.00	0.00%	6.18	∞

Sumber: GFS, 2024 (diolah)

Pada tahun 2023, pertumbuhan realisasi Pendapatan Transfer secara dominan disumbang oleh pertumbuhan DAK sebesar 25,81 persen, kemudian berturut-turut disumbang oleh Dana Desa (8,51 persen), DID (5,98 persen), DAU (4,63 persen), dan Bagi Hasil Pajak (2,02 persen). Terdapat beberapa komponen dengan pertumbuhan realisasi tak hingga dikarenakan tidak ada realisasi pada tahun 2022, yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. Sementara itu, terdapat satu komponen dengan pertumbuhan negatif yaitu Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebesar minus 32,78 persen.

3.2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPDyS)

Pada tahun 2023, realisasi LLPDyS sebesar Rp30,98 miliar, terdiri atas Pendapatan Hibah sebesar Rp3,64 miliar dan Pendapatan Lainnya sebesar Rp27,34 miliar. Tabel 3.14 menyajikan rincian realisasi LLPDyS mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.19 – Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

Uraian	TA 2021	TA 2022	Growth	TA 2023	Growth
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**359.56**	**62.69**	**-82.56%**	**30.98**	**-50.58%**
Pendapatan Hibah	**1.99**	**43.06**	**2065.16%**	**3.64**	**-91.55%**
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0.76	29.05	3742.23%	2.35	-91.91%
Pendapatan Hibah dari Badan/ Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri	1.20	13.98	1063.85%	1.29	-90.78%
Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan	0.03	0.03	-1.69%	0.00	-100.00%
Pendapatan Lainnya	**357.57**	**19.63**	**-94.51%**	**27.34**	**39.26%**

Pendapatan Lainnya	357.57	19.63	-94.51%	27.34	39.26%

Sumber: GFS, 2024 (diolah)

Pada tahun 2023, Pendapatan Hibah mengalami pertumbuhan sebesar minus 91,55 persen dengan rincian pertumbuhan minus di atas 90 persen terjadi merata di seluruh komponen yaitu baik pendapatan hibah dari pemerintah, lembaga swasta, maupun kelompok masyarakat/perorangan. Sementara itu, Pendapatan Lainnya mengalami pertumbuhan positif yaitu 39,26 persen.

Hal berbeda terjadi dengan pertumbuhan realisasi pada tahun 2022 dikarenakan justru pada Pendapatan Hibah mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 2056,16 persen dan Pendapatan Lainnya justru tumbuh minus 94,51 persen.

3.2.2 Belanja Daerah

Grafik 3.24 – Pagu dan Realisasi PAD, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

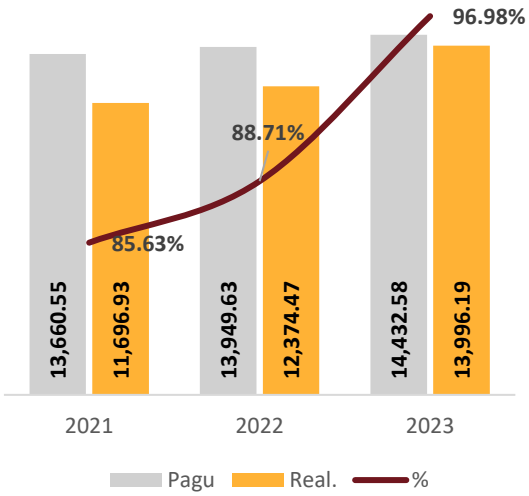

Sumber: SIKRI, 2024 (diolah)

Belanja Daerah dapat direalisasikan sebesar Rp13.996,19 miliar atau 96,98 persen dari Pagu dengan perkembangan pagu dan realisasi sebagai mana Grafik 3.13.

Belanja Daerah tumbuh 13,11 persen (*yoy*). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh tumbuhnya seluruh komponen Belanja Daerah, yaitu Belanja Operasional yang tumbuh sebesar 7,84 persen, Belanja Modal sebesar 3,43 persen, dan Belanja Tidak Terduga sebesar 52,90 persen, dan Transfer sebesar 146,77 persen. Realisasi belanja daerah juga terus tumbuh dari tahun 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran daerah yang makin baik.

3.2.2.1 Berdasarkan Jenis Belanja

- ***Belanja Operasi***

Belanja Operasi dapat direalisasikan sebesar Rp10.500,19 miliar atau 98,14 persen dari Pagu. Belanja Subsidi merupakan Belanja Operasional dengan realisasi persentase tertinggi, yaitu 216,72 persen sedangkan Belanja Pegawai merupakan belanja dengan realisasi Rupiah tertinggi yaitu sebesar Rp4.872,54 miliar.

- ***Belanja Modal***

Belanja Modal dapat direalisasikan sebesar Rp2.170,54 miliar atau 89,36 persen dari pagu dengan pertumbuhan sebesar 3,43 persen (*yoy*). Pertumbuhan tertinggi pada Belanja Modal terdapat pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan pertumbuhan sebesar Rp38,85 miliar atau 8,08 persen. Kemudian diikuti oleh pertumbuhan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp26,89 miliar atau 4,61 persen. Ditinjau dari persentase pertumbuhan,

Belanja Modal Aset Lainnya menjadi Belanja dengan persentase pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 421,443 persen atau sebesar Rp2,48 miliar. Namun demikian, terdapat pertumbuhan negatif pada beberapa Belanja Modal, yaitu Belanja Modal Tanah yang tumbuh negatif sebesar -74,40 persen

- ***Belanja Tidak Terduga***

Belanja Tidak Terduga dapat direalisasikan sebesar Rp9,27 miliar atau 9,96 persen dari pagu. Realisasi tersebut sangat rendah mengingat periode anggaran sudah di akhir tahun. Namun demikian, realisasi Belanja Tidak Terduga merupakan pos pengeluaran untuk kegiatan yang tidak direncanakan dan bersifat *force majure*, misalnya penanggulangan bencana alam dll. Di sisi lain, rendahnya realisasi Belanja ini menunjukkan hal positif, yaitu tidak terdapat bencana atau hal-hal *force majure* lainnya.

- ***Belanja Transfer***

Belanja Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp1.316,19 miliar atau 108,63 persen dari Pagu. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bagi Hasil dapat direalisasikan sebesar Rp785,98 miliar, sedangkan Belanja Bantuan Keuangan dapat direalisasikan sebesar Rp530,21 miliar.

3.2.2.2 Berdasarkan Fungsi

Belanja daerah menurut fungsinya terbagi menjadi sembilan jenis. Rincian perkembangan realisasi belanja daerah menurut fungsi dari tahun 2021 sampai dengan 2023 tersaji dalam Tabel 3.15 berikut.

Tabel 3.20 – Belanja Daerah Berdasarkan Fungsi, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

Uraian	TA 2021	TA 2022	Growth	TA 2023	Growth
Pelayanan Umum	4,220.88	3,859.02	-8.57%	4,049.56	4.94%
Ketertiban Dan Keamanan	317.19	340.21	7.26%	432.79	27.21%
Ekonomi	854.59	1,609.32	88.31%	1,347.70	-16.26%
Lingkungan Hidup	217.14	542.32	149.76%	279.64	-48.44%
Perumahan Dan Fasilitas Umum	1,476.30	814.85	-44.80%	1,422.38	74.56%
Kesehatan	1,888.86	2,167.90	14.77%	1,995.48	-7.95%
Pariwisata	125.82	97.42	-22.57%	118.97	22.12%
Pendidikan	2,975.24	3,380.32	13.61%	3,339.41	-1.21%
Perlindungan Sosial	196.07	254.92	30.02%	242.71	-4.79%

Sumber: SIKRI, 2024 (diolah)

Berdasarkan fungsinya, realisasi belanja tertinggi ada pada belanja fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp4.049,56 miliar kemudian dilanjut berturut-turut oleh Pendidikan (Rp3.339,41 miliar), Kesehatan (Rp1.995,48 miliar), Perumahan dan Fasilitas Umum (Rp1.422,28 miliar), Ekonomi (Rp1.347,70), Ketertiban dan Keamanan (Rp432,79 miliar), Lingkungan Hidup (Rp279,64 miliar), Perlindungan Sosial (Rp242,71), dan Pariwisata (Rp118,97 miliar).

Dari sisi *growth (yoy)*, pada tahun 2023 belanja menurut fungsi tertinggi ada pada Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar 74,56 persen, kemudian dilanjutkan berturut-turut oleh Ketertiban dan Keamanan (27,21 persen), Pariwisata (22,12 persen), Pelayanan Umum (4,94 persen), Pendidikan (minus 1,21 persen), Perlindungan Sosial (minus 4,79 persen), Kesehatan (minus 7,95 persen), Ekonomi (minus 16,26 persen), dan Lingkungan Hidup (minus 48,44 persen). Grafik 3.15 menyajikan perkembangan realisasi belanja menurut fungsi pada tahun 2021 sampai dengan 2023.

Grafik 3.25 –Realisasi Belanja Menurut Fungsi, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

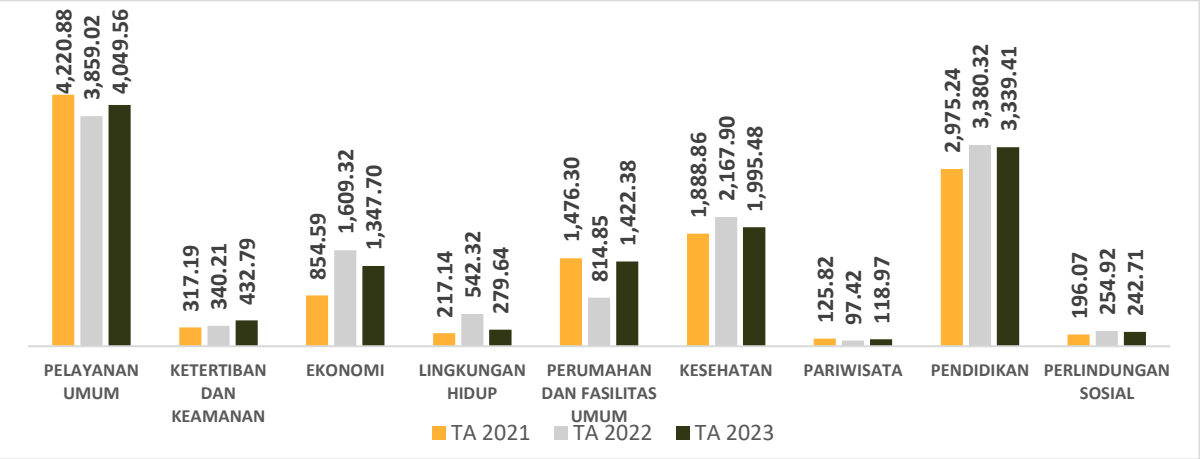

Sumber: SIKRI, 2024 (diolah)

Dari Grafik 3.15 terlihat bahwa hampir seluruh fungsi memiliki realisasi yang fluktuatif, kecuali fungsi Ketertiban dan Keamanan yang cenderung meningkat dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp317,19 miliar, realisasi pada tahun 2022 sebesar Rp340,21 miliar, dan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp432,79 miliar. Peningkatan realisasi pada fungsi ini menandakan fokus pemerintah daerah yang semakin tinggi dalam peningkatan ketertiban dan keamanan di wilayah Kepri dari tahun ke tahun.

3.2.3 Surplus/Defisit *APBD*

APBD 2023 dianggarkan defisit sebesar Rp676,87 miliar, namun demikian pada akhir periode tahun 2023 APBD mencatatkan defisit anggaran sebesar Rp86,58 miliar. Defisit yang lebih rendah dari yang dianggarkan disebabkan realisasi Pendapatan Daerah yang melebihi Target yaitu 101,12 persen dan Belanja Daerah yang tidak mencapai Pagu yaitu 96,98 persen.

Pada tahun 2022, APBD dianggarkan defisit sebesar Rp1.043,25 miliar dan direalisasikan sebesar Defisit 110,59 miliar. Pada tahun 2021. APBD dianggarkan Defisit Rp930,59 miliar namun justru terealisasi Surplus Rp141,08 miliar.

3.2.4 Pembiayaan Daerah

Pada tahun 2023, Pemerintah Daerah telah menganggarkan Pembiayaan Netto sebesar Rp676,87miliar, dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp761,21 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Rp84,34 miliar. Realisasi Pembiayaan pada tahun 2023 sebesar Rp894,27 miliar

(132,12 persen Pagu), dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp963,16 miliar (126,53 persen Pagu) dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp68,90 miliar (81,69 persen Pagu).

Pada tahun 2022, realisasi Pembiayaan sebesar Rp718,32 miliar dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp719,32 miliar dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1,00 miliar. Pada tahun 2021, realisasi Pembiayaan sebesar Rp740,95 miliar dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp743,65 miliar dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2,70 miliar.

3.2.5 Perkembangan BLU Daerah

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (UPT) di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BLUD merupakan bagian dari perangkat Pemerintah Daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari Pemerintah Daerah. Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktikpraktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Pada tahun 2023, terdapat 5 BLUD Bidang Pendidikan yang baru ditetapkan pada tahun 2023, yaitu SMK Negeri 1 Tanjungpinang, SMK Negeri 2 Tanjungpinang, SMK Negeri 1 Kota Batam, SMK Negeri 2 Kota Batam, dan SMK Negeri 6 Kota Batam. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2023, tercatat Provinsi Kepri memiliki 25 (dua puluh enam) entitas yang telah ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD). Dari 26 (dua puluh enam) BLUD yang ada, terdapat 17 BLUD yang bergerak di Bidang Kesehatan, 5 BLUD di Bidang Pendidikan, 1 BLUD Bidang Pengelola Dana, dan 3 BLUD di bidang Layanan Lainnya.

Tabel 3.21 – Profil Keuangan dan Layanan BLUD di Provinsi Kepri

No.	Nama BLU	Rumpun Layanan	Pendapatan (Rp)	Belanja (Rp)	Aset (Rp)
1	RSUD Dabo Singkep	Kesehatan	3.566.247.938	4.082.216.695	197.619.521
2	RSUD Embung Fatimah Kota Batam	Kesehatan	42.624.016.565	40.789.711.947	189.201.205.866
3	RSUD Encik Mariyam	Kesehatan	2.427.120.166	2.061.002.090	649.012
4	RSUD Kabupaten Natuna	Kesehatan	6.695.000	10.956.494.861	36.975.639.163
5	RSUD Kota Tanjungpinang	Kesehatan	24.216.864.767	22.460.012.264	97.394.220.231
6	RSUD Muhammad Sani	Kesehatan	67.819.422.357	121.181.801.846	64.312.612.466
7	RSUD Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepri	Kesehatan	39.077.788.691	41.348.528.381	550.724.293.498
8	Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat (RSJKO) Engku Haji Daud	Kesehatan	7.877.782.183	7.721.508.998	207.692.500

9	SMK Negeri 1 Kota Batam	Pendidikan	4.335.968.750	258.9451.782	68.929.200
10	SMK Negeri 1 Kota Tanjungpinang	Pendidikan	2.019.003.491	1.436.926.541	48.591.620
11	SMK Negeri 2 Kota Batam	Pendidikan	0	6.900.000	6.900.000
12	SMK Negeri 2 Kota Tanjungpinang	Pendidikan	1.240.356.280	499.718.978	103.790.100
13	SMK Negeri 6 Kota Batam	Pendidikan	2.698.069.303	2.161.077.269	150.364.000
14	UPT Pelayanan Jasa Transportasi Dinas Perhubungan Kota Batam	Barang / Jasa Lainnya	3.541.229.809	3.511.522.032	225.400.000
15	UPT Pengelolaan Air Bersih pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Barang / Jasa Lainnya	2.569.599.889	1.881.994.126	5.534.854.413
16	UPT Pengelolaan Dana Bergulir pada BPKAD Kota Batam	Pengelolaan Dana	381.261.633	434.861.245	1.158.227.207
17	UPT Puskesmas Kundur Barat Kabupaten Karimun	Kesehatan	474.061.034	467.663.613	2.604.968.055
18	UPT Puskesmas Lubuk Baja	Kesehatan	891.169.864	441.362.556	12.374.594.555
19	UPT Puskesmas Meral Kabupaten Karimun	Kesehatan	812.244.648	796.990.842	263.287.017
20	UPT Puskesmas Sekupang Kota Batam	Kesehatan	912.573.678	512.603.974	6.339.307.173
21	UPT Puskesmas Tanjung Balai Karimun	Kesehatan	1.147.770.130	1.142.750.414	14.731.992.473
22	UPT Puskesmas Tanjung Batu Kabupaten Karimun	Kesehatan	473.054.746	533.325.312	32.504 .123.317
23	UPT Puskesmas Tanjung Berlian Kabupaten Karimun	Kesehatan	349.536.730	314.107.732	3.197.150.531
24	UPT Puskesmas Tanjung Sengkuang Kota Batam	Kesehatan	967.886.064	494.557.933	11.772.796.279
25	UPT Puskesmas Tebing Kabupaten Karimun	Kesehatan	557.124.492	528.610.236	4.808.403.332

Perjalanan pengelolaaan BLUD di Provinsi Kepri sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 merupakan sebuah hal yang terus menjadi tantangan bagi para pengelola dan pembina BLUD di Kepri. Pada tahun 2023, Kanwil DJPb Provinsi Kepri melakukan survei dalam rangka profiling permasalahan dan kelengkapan regulasi kepada 16 BLUD.

Merujuk pada hasil profiling, secara umum, permasalahan yang dialami oleh BLUD lingkup Prov. Kepri adalah adanya kendala pada pengelola keuangan BLUD yang belum memahami pengelolaan keuangan BLUD dan penggunaan aplikasi e-BLUD. Selain itu, terdapat kendala terkait SDM seperti ketika terjadi pergantian pengelola keuangan tidak terjadi internalisasi sehingga pengelola keuangan yang baru perlu mempelajari dan beradaptasi terkait penganggaran dan pelaporan keuangan BLUD serta terdapat pengelola keuangan (bendahara) yang belum tersertifikasi, serta terdapat beberapa BLUD yang terkendala

kekurangan SDM atau tenaga kerja. Selanjutnya beberapa BLUD juga belum menerapkan peraturan terkait pembentukan Dewan Pengawas karena ada syarat yang belum terpenuhi, belum melakukan pembayaran insentif berbasis kinerja, dan belum mengimplementasikan investasi jangka Panjang.

Melalui berbagai perbaikan yang dijalankan oleh BLUD di Kepri, maka setiap BLUD kini telah mampu untuk memetakan permasalahan yang ada dan menggali potensi melalui SDM dan sumber dana yang ada demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terus memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi wilayah Kepulauan Riau.

3.2.6 Isu Strategis Pelaksanaan APBD

3.2.6.1 Evaluasi dan tantangan atas ketercapaian output program strategis pemda yg didanai APBD

1. OPD penanggungjawab kegiatan lambat dalam menyampaikan laporan realisasi dan mengajukan reviu kepada APIP.
2. Kurangnya koordinasi antara OPD dengan BPKAD dan Inspektorat Provinsi.
3. Terdapat status lahan yang belum *clear* sehingga DAK Fisik untuk bidang/subbidang Pendidikan tidak dapat terserap optimal.
4. Pergantian atau *reshuffle* pejabat yang diiringi dengan pergantian operator dan pelaksana kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat.
5. Letak geografis yang berbentuk kepulauan dengan jarak yang jauh dan membutuhkan waktu untuk ditempuh dengan perjalanan via kapal sehingga menyulitkan dalam mobilisasi orang dan barang terlebih untuk proyek fisik di pulau terluar
6. Cuaca ekstrem dan rentan bencana alam (longsor, angin kencang di musim penghujan dan ombak tinggi) sehingga dapat menghambat pengerjaan proyek fisik misalnya terkait proyek fisik pembangunan jalan dan transportasi perairan. Sempat terdapat kapal pengangkut sembako dan bahan material yang tenggelam sehingga pengerjaan proyek fisik di salah satu pulau sempat terhambat.

3.2.6.2 Permasalahan dan tantangan tata kelola dan pencapaian belanja daerah berkualitas yg didanai APBD

1. Sistem yang digunakan dalam proses menjalankan APBD belum sepenuhnya digital, berbeda dengan APBN
2. Kurangnya jumlah SDM yang memahami tata kelola penganggaran, belanja, dan pertanggungjawaban APBD

3.2.6.3 Permasalahan dan tantangan dalam upaya akselerasi belanja APBD

1. Tahapan penyiapan APBD mulai dari evaluasi oleh Kemendagri, rapat pembahasan dengan DPRD, penetapan APBD, input ke SIPD, pembagian DPA, penyiapan SK dan dokumen administratif, hingga realisasi APBD memakan waktu yang cukup lama hingga

bulan Maret tahun anggaran tersebut, salah satunya terkendala sistem yang belum sepenuhnya digital seperti APBN.

2. OPD masih lambat dalam menyampaikan dokumen realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik periode sebelumnya sehingga DAK Fisik tahap selanjutnya tidak dapat segera disalurkan.

3.3 Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Pada tingkat wilayah, Kanwil DJPb menyusun Laporan Kauangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) tingkat wilayah yang mengonsolidasikan LKPP tingkat wilayah dan LKPD konsolidasi di wilayah kerja Kanwil DJPb. Tabel 3.16 berikut menyajikan perkembangan realisasi anggaran konsolidasi mulai tahun 2021 sampai dengan 2023.

Tabel 3.22 – Perkembangan Realisasi Konsolidsi, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

Uraian	TA 2021	TA 2022	Growth	TA 2023	Growth
Pendapatan Konsolidasi	**13,742.01**	**16,663.81**	**21.26%**	**17,141.67**	**2.87%**
Pendapatan Perpajakan	10,718.58	13,233.96	23.47%	13,414.83	1.37%
Pendapatan PNBP	2,858.17	3,386.79	18.49%	3,723.20	9.93%
Pendapatan Hibah	165.26	43.06	-73.95%	3.64	-91.55%
Belanja dan Transfer Konsolidasi	**19,022.85**	**19,268.58**	**1.29%**	**23,108.14**	**19.93%**
Belanja Pusat dan Daerah	18,468.30	18,473.92	0.03%	21,842.61	18.23%
Transfer Pusat dan Daerah	554.55	794.66	43.30%	1,265.53	59.25%
Surplus/Defisit	**-5,280.83**	**-2,604.77**	**-50.67%**	**-5,966.47**	**129.06%**
Pembiayaan	**741.06**	**718.32**	**-3.07%**	**894.27**	**24.49%**
Penerimaan Pembiayaan	743.76	719.32	-3.28%	963.16	33.90%
Pengeluaran Pembiayaan	2.70	1.00	-62.96%	68.90	6789.66%
SiLPA/SiKPA	**-4,539.78**	**-1,886.45**	**-58.45%**	**-5,072.20**	**168.88%**

Sumber: SIKRI dan GFS, 2024 (diolah)

Pada tahun 2023 secara konsolidasi terdapat realisasi Pendapatan sebesar Rp17.141,67 miliar dengan *growth* 2,87 persen (*yoy*). Realisasi Belanja dan Transfer Konsolidasi sebesar Rp23.108,14 miliar dengan *growth* 19,93 persen (*yoy*). Atas realisasi pendapatan dan belanja ini terdapat Defisit sebesar Rp5.966,47 miliar.

Terdapat realisasi Pembiayaan sebesar Rp894,27 miliar dengan *growth* 24,49 persen (*yoy*) yang terbagi menjadi penerimaan pembiayaan dna pengeluaran pembiayaan. Sehingga pada akhirnya terdapat SiKPA sebesar minus Rp5.072,20 miliar.

3.3.1 Pendapatan Konsolidasian

Grafik 3.26 –Realisasi Pendapatan Konsolidasian, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

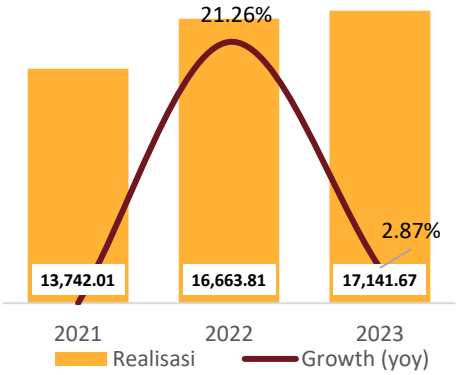

Sumber: GFS, 2024 (diolah)

Pada Grafik 3.15 terlihat realisasi Pendapatan Konsolidasi terus mengalami pertumbuhan. Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan Konsolidasi sebesar Rp17.141,67 miliar tumbuh 2,87 persen (*yoy*) dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp16.663,81 miliar. Realisasi tahun 2022 tumbuh 21,26 (*yoy*) dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp13.742,01 miliar. Kenaikan realisasi Pendapatan Konsolidasi menandakan optimalisasi pemerintah pusat maupun daerah dalam memanfaatkan potensi sumber pendapatan di daerah.

Pada tahun 2023 kontribusi Pendapatan Konsolidasi didominasi oleh Pendapatan Perpajakan sebesar Rp13.414,83 miliar (78,26 persen), kemudian diikuti oleh Pendapatan PNBP sebesar Rp3.723,20 miliar (21,72 persen), dan Pendapatan Hibah sebesar Rp3,64 miliar (0,02 persen).

Meksipun demikian, pertumbuhan (*yoy*) tertinggi terdapat pada realisasi Pendapatan PNBP yaitu 9,93 persen kemudian disusul Pendapatan Perpajakan sebesar 1,37 persen, dan Pendapatan Hibah minus 91,55 persen. Pertumbuhan minus pada Pendapatan Hibah disebabkan Target yang juga menurun.

3.3.2 Belanja Konsolidasian

Pada Grafik 3.16 terlihat realisasi Belanja Konsolidasi tahun 2023 sebesar Rp23.108,14 miliar. Terjadi pertumbuhan realisasi yang cukup tinggi 19,93 persen (*yoy*). Pada tahun 2022 terealisasi Rp19.268,58 miliar dan mengalami pertumbuhan 1,29 persen dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp19.022,85 miliar.

Pada tahun 2023, Belanja Konsolidasi didominasi oleh Belanja Pusat dan Daerah sebesar Rp21.842,61 miliar (94,52 persen total Belanja Konsolidasi) dibandingkan dengan Belanja Transfer sebesar Rp1.265,53 miliar (5,48 persen total Belanja Konsolidasi)

Grafik 3.27 –Realisasi Belanja Konsolidasian, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

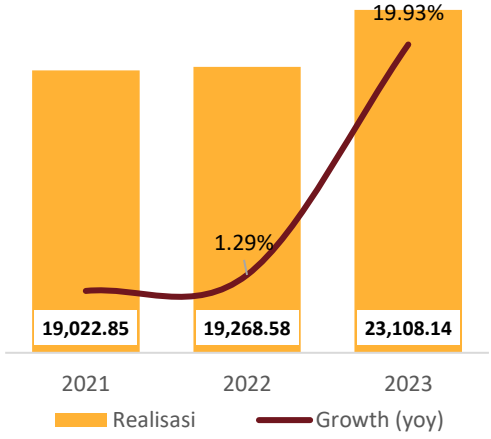

Sumber: GFS, 2024 (diolah)

- ***Analisis Belanja Konsolidasi per Kapita***

Berdasarkan realisasi belanja konsolidasi, dapat diketahui besarnya belanja konsolidasi per kapita. Melalui analisis ini dapat dilihat tingkat pemerataan belanja konsolidasi terhadap

jumlah penduduk. Adapun hasil perhitungan belanja per kapita tahun 2021 sampai dengan 2023 sebagai mana Tabel 3.17 berikut.

Tabel 3.23 – Rasio Belanja Konsolidasi per Kapita, 2021 s.d. 2023

Periode	Belanja (Rp miliar)	Growth Belanja	Jumlah Penduduk (jiwa)	Growth Jumlah penduduk	Rasio Belanja per Kapita (Rp juta/jiwa)	Growth Rasio Belanja per Kapita
(a)	(b)		(c)		(d) = (b) / (c)	
2021	19.022,85	-	2.118.239	-	8,98	-
2022	19.268,58	1,29%	2.179.820	2.91%	8,84	-1.57%
2023	23.108,14	19,93%	2.248.484	3.15%	10,28	16.26%

**proyeksi dengan laju pertumbuhan penduduk 3,15 persen*

Sumber: GFS dan BPS Kepri, 2024 (diolah)

Belanja konsolidasi pada tahun 2021 sebesar Rp19.022,85 miliar, tahun 2022 sebesar Rp19.268,58 miliar, dan tahun 2023 sebesar Rp23.108,14 miliar. Disisi lain, jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 2.118.239 jiwa, tahun 2022 sebanyak 2.179.820 jiwa, dan tahun 2023 sebanyak 2.248.484 jiwa.

Pada tahun 2021 besarnya rasio belanja per kapita sebesar Rp8,98 juta per jiwa, pada tahun 2022 sebesar Rp8,84 juta per jiwa, dan pada tahun 2023 sebesar Rp10,28 juta per jiwa. Pada tahun 2022 rasio belanja per kapita tumbuh minus 1,57 persen sedangkan pada tahun 2023 rasio belanja per kapita tumbuh 16,26 persen.

3.3.3 Surplus/Defisit

Grafik 3.28 –Realisasi Defisit Konsolidasian, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

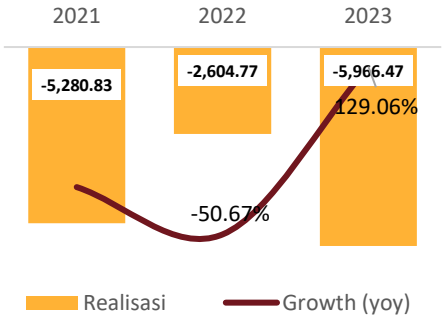

Sumber: GFS, 2024 (diolah)

Perkembangan realisasi Surplus/Defisit Konsolidasi menunjukkan nilai yang fluktuatif pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 realisasi sebesar Defisit Rp5.280,83 miliar, pada tahun 2022 terjadi penurunan Defisit menjadi Rp2.604,77 miliar, dan pada tahun 2023 terjadi kenaikan defisit menjadi Rp5.966,47 miliar.

3.3.4 Pembiayaan Konsolidasi

Grafik 3.29 –Realisasi Pembiayaan Konsolidasian, 2021 s.d. 2023 (Rp miliar)

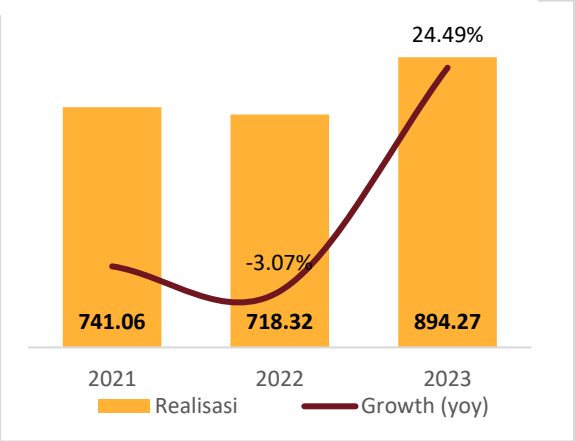

Sumber: GFS, 2024 (diolah)

Perkembangan realisasi Pembiayaan Konsolidasi menunjukkan nilai yang fluktuatif pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 realisasi sebesar Rp741,06 miliar, pada tahun 2022 sebesar Rp718,32 miliar, dan pada tahun 2023 sebesar Rp894,27 miliar.

Kajian III

Mengukur Efisiensi Belanja Daerah Pemda dan Desentralisasi Fiskal Menggunakan Metode *Malmquist Productivity Index* (MPI)

I. Latar belakang

Hasil dari desentralisasi akan terlihat perbedaan daerah yang mampu berkembang dan maju dan daerah yang masih tertinggal karena pengelolaan daerah telah sepenuhnya dijalankan oleh daerah itu sendiri, tergantung pada efisiensi suatu pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Afonso et al., 2005). Penelitian lain yang menjadi acuan yaitu Prud'homme (1995) menyampaikan bahwa implementasi desentralisasi bisa saja menjadi destruktif padahal tujuannya memberikan pelayanan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Transfer ke Daerah (TKD) menjadi salah satu instrumen keuangan untuk menjalankan desentralisasi fiskal. Salah satu langkah strategis dari sisi kajian empiris adalah mengukur efisiensi kinerja pemda di suatu periode dengan pemda lain yang lebih baik efisiensinya pada periode yang sama. Satu metode non-parametric yaitu *Malmquist Productivity Index* (MPI) adalah metode yang sangat tepat dan dapat mengukur efisiensi kinerja pemda. Walaupun demikian, Mihaiu et.al (2010) menyatakan bahwa tidaklah mudah untuk mengukur efisiensi kinerja belanja suatu pemerintahan dikarenakan karakteristik kinerja pemerintahan dipengaruhi oleh kondisi lebih dominan unsur politis dibanding birokrasi, tidak terukurnya kebutuhan sesungguhnya masyarakat, prosedur yang berbelit-belit, peraturan yang ketat, anggaran yang terbatas serta persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang cenderung buruk dan korup.

II. Data dan Metodologi

Kajian ini menggunakan data input berupa realisasi Belanja Daerah untuk 26 dari 34 provinsi di Indonesia selama 12 tahun (2004-2015). Tahun 2004 dipilih sebagai tahun awal karena penulis melihat perubahan yang cukup signifikan setelah Indonesia menerapkan mekanisme audit dan berhasil mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Audited. Dengan demikian, sistem akuntansi yang digunakan telah terstandarisasi menggunakan SAP. Data belanja diperoleh dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Data belanja daerah dibagi berdasarkan bidang yang utama yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perlindungan social. Afonso and Aubyn (2005, 2006) dan Clements (2002) telah menggunakan bidang yang sama sehingga hasil dari kajian ini juga dapat dibandingkan secara internasional.

Data yang digunakan adalah: 1) belanja daerah bidang infrastruktur; 2) belanja daerah bidang Pendidikan; 3) belanja daerah bidang Kesehatan; 4) belanja daerah bidang perlindungan sosial; variable kontrol mengunakan beberapa variable yaitu : 1) ukuran pemerintah; 2) total populasi; 3) indeks ethnografi; 4) indeks stabilitas politik; 5) Panjang jalan yang bagus; 6) suplai listrik untuk penerangan jalan; 7) suplai listrik untuk fasilitas social; 8) jumlah bangunan sekolah SMP; 9) jumlah bangunan SD; 10) tingkat enrolment SD; 11) tingkat enrolment SMP; 12) harapan hidup; 13) tingkat kematian; 14) jumlah penduduk usia tua; 15) jumlah penduduk miskin; dan 16) tingkat pengangguran.

III. Diskusi Hasil

Hasil pengukuran indeks MPI menunjukkan bahwa untuk belanja daerah bidang infrastruktur, pemda yang paling efektif adalah Sumatera Utara diikuti Jambi dan D.I Yogyakarta dalam pengelolaan keuangan bidang infrastrukturnya. Sedangkan tiga pemda yang kurang efisien pengelolaan keuangan bidang infrastrukturnya adalah Aceh, Bengkulu dan Bali.

Untuk belanja daerah bidang Pendidikan, yang memiliki pengelolaan belanja daerah yang paling efisien adalah Kalimantan Barat diikuti dengan Kalimantan Selatan dan DKI Jakarta. Adapun pemda yang pengelolaan belanja daerah nya yang kurang efisien adalah Jambi, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Hasil pengukuran indeks MPI menunjukkan bahwa untuk belanja daerah bidang Kesehatan masih dipegang oleh provinsi Sumatera Utara, diikuti dengan Jambi dan D.I Yogyakarta. Rangking ini sama dengan hasil pengelolaan belanja daerah bidang infrastruktur. Sedangkan tiga pemda yang kurang efisien pengelolaannya adalah Aceh, Bengkulu dan Bali.

Sedangkan untuk Belanja Daerah bidang Perlindungan Sosial, pemda yang memiliki kinerja yang paling efisien adalah Sumatera Barat diikuti oleh Sumatera Utara dan Jambi. Sedangkan tiga pemda dengan kinerja yang kurang efisien adalah Sulawesi Utara, Aceh dan Bali.

IV. Kesimpulan dan Policy Response

Kesimpulan:

1) Metode MPI dapat mengukur kinerja efisiensi belanja daerah per bidang untuk seluruh Pemda di Indonesia. Pemda yang masih memiliki kinerja yang kurang efisien dapat melakukan benchmarking ke pemda yang berhasil.
2) Untuk mengukur efisiensi menggunakan metode MPI, harus memperhatikan karakterisktik lainnya yang dapat mempengaruhi hasil karena dengan adanya otonomi daerah maka kinerja suatu pemda akan berbeda satu dengan lainnya.

V. Policy Response

Untuk Pemda

1) Pemda yang kondisi awalnya sudah sejahtera memungkinkan untuk lebih efisien dalam menggunakan belanja daerah per bidangnya. Namun demikian, metode ini adalah non-parametric artinya tidak memperhitungkan karakter lain yang mungkin tidak terukur misalnya korupsi.
2) Pemda yang masih terukur kurang efisien hendaknya menyusun program di bidang infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bukan sekedar membangun dan menghabiskan anggaran.
3) Pemda dengan kondisi keuangan yang terbatas harus lebih selektif dalam menyusun program dan kegiatan misalnya program padat karya.

Untuk Pemerintah Pusat

1) Pemerintah Pusat dapat memperhitungkan tingkat efisiensi suatu pemda dan memberikan perhatikan kepada Pemda yang masih belum mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Tujuan dari Tranfer ke Daerah adalah selain untuk mengurangi gap antara vertical imbalances juga horizontal imbalances yaitu kesenjangan antar daerah. Kepri sebagai provinsi yang masih berkembang diharapkan mendapat prioritas anggaran yang utama sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan berkembang seperti provinsi lainnya di pulau Sumatera.
2) Kepri sebagai provinsi yang masih berkembang diharapkan mendapat prioritas anggaran yang utama sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan berkembang seperti provinsi lainnya di pulau Sumatera.

KFR Tahunan 2023

BAB IV

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK DI TINGKAT WILAYAH

Kapal Ferry Oceana Dragon
Kabupaten Karimun

Sebagai wilayah kepulauan, Kapal Ferry merupakan transportasi utama masyarakat. Pemerintah hadir melalui penyediaan kapal dan pelabuhan yang layak bagi masyarakat.

BAB IV

PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH: HARMONISASI BELANJA K/L DAN DAK FISIK DI TINGKAT WILAYAH

4.1 Pendahuluan

Pada tahun 2023, Menteri Keuangan telah menetapkan SOP Link 70 tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah. Menteri Keuangan memberikan amanah kepada Ditjen Anggaran (DJA), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) sebagai *Unit in Charge* (UIC) dalam proses monev tersebut. DJA dan DJPK melakukan monev dari sisi perencanaan dan penganggaran pada Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD) sedangkan DJPb melakukan monev pada sisi pelaksanaan anggaran. Sinergi ketiga unit di Kementerian Keuangan ini menjadi sangat penting dalam mengawal harmonisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Secara khusus, peran DJPb dhi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia dalam mengawal pelaksanaan Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik melalui aktivitas sebagai berikut.

1. Reviu kinerja realisasi anggaran dan capaian output harmonis.
2. Analisis permasalahan harmonisasi belanja pemerintah pusat yang mendukung DAK Fisik di masing-masing wilayah.
3. Identifikasi Upaya Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah.

Tujuan utama aktivitas di atas dalam rangka memperoleh gambaran kendala/permasalahan yang terjadi di lapangan, sekaligus memotret upaya yang dilakukan oleh Pemda maupun Satker dalam sinkronisasi Belanja K/L dan DAK Fisik. Selain itu, diharapkan adanya rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja K/L yang mendukung DAK Fisik.

Ruang lingkup monev Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik yang dilakukan Kanwil DJPb berfokus pada spasial/kewilayahan. Pada masa transisi (khusus tahun 2023) fokus pada pendekatan monitoring kinerja Belanja K/L yang mendukung DAK Fisik ditambah dengan analisis kinerja pelaksanaan anggaran di masing-masing wilayah.

Monev sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dan DAK Fisik dilakukan terhadap 5 (lima) bidang yang telah dilakukan sinkronisasi pada tahap perencanaan/penganggaran, yaitu:

1. Bidang Kesehatan dan KB (Kementerian Kesehatan dan BKKBN).
2. Bidang Pertanian (Kementerian Pertanian).
3. Bidang Pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Perpustakaan Nasional).
4. Bidang Jalan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).

Pada Triwulan III Tahun 2023, Kanwil DJPb telah melakukan monev belanja K/L yang mendukung DAK Fisik yang dituangkan dalam Kajian Fiskal Regional Triwulan III. Pada Kajian Fiskal Regional Tahunan 2023, Kanwil DJPb agar menyajikan dan menjelaskan secara rinci gambaran kinerja, kendala serta upaya dalam Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Tingkat Wilayah menggunakan data RO Harmonis pada aplikasi SINTESA dengan *cut off* data 31 Desember 2023.

4.2 Gambaran Umum Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Tingkat Wilayah

RO Harmonis di tingkat wilayah Kepri tersebar pada enam K/L, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Keenam K/L ini masing-masing membidangi RO Harmonis sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya masing-masing: Kementerian PUPR memiliki belanja RO Harmonis pada bidang jalan dan pendidikan; Perpustakaan Nasional dan Kemendikbud Ristek pada bidang pendidikan; serta Kementerian Kesehatan dan BKKBN pada bidang kesehatan dan KB.

4.2.1 Alokasi Belanja K/L Mendukung DAK Fisik

4.2.1.1 Alokasi Anggaran Belanja K/L Secara Umum

Tabel 4.1 - Pagu Total dan Pagu Mendukung DAK Fisik di K/L Lingkup Kepri

Kode BA	K/L	Pagu Total	Pagu Mendukung DAK Fisik	%	Jumlah satker	Jumlah RO
18	Kementerian Pertanian	47.543.102.000	1.936.814.000	4,07%	9	18
23	Kemendikbud Ristek	413.934.428.000	29.472.775.000	7,12%	3	7
24	Kementerian Kesehatan	186.295.876.000	4.948.660.000	2,66%	1	13
33	Kementerian PUPR	1.651.438.082.000	1.045.188.779.000	63,29%	3	21
57	Perpusnas RI	282.834.000	282.834.000	100,00%	1	1
68	BKKBN	25.304.282.000	6.773.372.000	26,77%	1	16
Total		**2.324.798.604.000**	**1.088.603.234.000**	**46,83%**	**18**	**76**

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah).

Kementerian PUPR memiliki alokasi belanja RO Harmonis sebesar Rp1.045,19 miliar (63,29 persen dari total Pagu Kementerian PUPR). Pagu tersebut merupakan yang terbesar dalam RO Harmonis di Kepri. Pagu Harmonis yang terbesar kedua yaitu Kemendikbud Ristek dengan alokasi sebesar Rp29,47 miliar dari total Rp413,93 miliar (7,12 persen dari Pagu Kemendikbud Ristek di Kepri). Pagu terbesar selanjutnya berasal dari BKKBN dengan Pagu Belanja terkait RO Harmonis sebesar Rp6,77 miliar dari total Rp25,30 miliar (26,77 persen dari total Pagu BKKBN di Kepri). Kemudian diikuti oleh Kementerian Kesehatan yang memiliki Pagu Belanja terkait RO Harmonis sebesar Rp4,95 miliar dari total Rp186,30 miliar (2,66 persen dari total Pagu Kementerian Kesehatan di Kepri). Kementerian Pertanian memiliki Pagu Belanja terkait RO Harmonis sebesar Rp1,94 miliar dari total Rp47,54 miliar (4,07 persen dari Pagu Kementerian Pertanian di Kepri). Pagu Belanja terkait RO Harmonis terkecil dimiliki oleh Perpusnas RI dengan Rp282,83 miliar dari total Rp282,83 miliar (100 persen dari total Pagu Perpusnas RI di Kepri). Terlihat bahwasanya keseluruhan Belanja Perpusnas RI di Kepri terkait dengan RO Harmonis Dak Fisik pada bidang pendidikan.

4.2.1.2 Alokasi Anggaran K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

Tabel 4.2 - Alokasi Belanja K/L Berdasarkan Bidang DAK Fisik

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah).

Berdasarkan bidang pada DAK Fisik, Pagu terbesar yaitu pada bidang jalan dengan besaran Pagu Rp962,41 miliar (94,21 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis). Kemudian diikuti oleh bidang pendidikan sebesar Rp46,59 miliar (4,56 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis). Selanjutnya bidang kesehatan dan KB memiliki Pagu sebesar Rp10,85 miliar (1,06 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis). Bidang pertanian memiliki Pagu sebesar Rp1,67 miliar (0,16 persen dari total Pagu Belanja terkait RO Harmonis).

Bidang	Subbidang	K/L	Pagu	Real.	%	Pagu Bidang	Jumlah Satker	Jumlah RO
Jalan	Jalan	Kementerian PUPR	993,39	937,48	94,37%	962,41	2	19
	Jalan - Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	Kementerian PUPR	34,05	24,92	73,20%		1	1
Kesehatan dan KB	Keluarga Berencana	BKKBN	6,77	6,52	96,25%	10,85	1	16
	Pengendalian Penyakit	Kementerian Kesehatan	1,08	1,03	95,21%		1	2
	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	Kementerian Kesehatan	1,79	1,51	84,40%		1	5
	Penguatan Sistem Kesehatan	Kementerian Kesehatan	2,08	1,79	86,19%		1	6
Pendidikan	PAUD	Kemendikbud Ristek	0,69	0,66	94,46%	46,59	1	1
	Perpustakaan	Perpustakaan	0,28	0,28	99,97%		1	1
	SD dan SMP	Kementerian PUPR	17,75	17,75	99,98%		1	1
	SD, SMP, SMA, SMK	Kemendikbud Ristek	28,78	27,91	96,97%		3	6
Pertanian	Pertanian - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)	Kementerian Pertanian	1,94	1,67	86,43%	1,67	9	18

Pada bidang jalan, Pagu terbesar berada pada subbidang jalan dengan Pagu Rp993,39 miliar, telah direalisasikan Rp937,48 miliar (94,37 persen dari Pagu). Kemudian subbidang jalan – tematik penguatan destinasi pariwisata prioritas memiliki Pagu Rp34,05 miliar, direalisasikan Rp24,92 miliar (73,20 persen dari Pagu). Rendahnya realisasi pada subbidang tersebut dikarenakan pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV, sehingga terkenda cuaca ekstrem dan musim penghujan.

Pada bidang pendidikan, Pagu terbesar terdapat pada subbidang SD, SMP, SMA, SMK dengan Pagu Rp28,78 miliar, direalisasikan Rp27,91 miliar (96,97 persen dari Pagu). Subbidang SD dan SMP memiliki Pagu Rp17,75 miliar, direalisasikan Rp17,75 miliar (99,98 persen dari Pagu). Selanjutnya subbidang PAUD memiliki pagu Rp0,69 miliar, direalisasikan Rp0,66 miliar (94,46 persen dari Pagu). Kemudian subbidang perpustakaan memiliki Pagu Rp0,28 miliar, telah direalisasikan Rp0,28 miliar (99,97 persen dari Pagu).

Bidang kesehatan dan KB pagu terbesar berada pada subbidang KB, dengan Pagu Rp6,77 miliar, direalisasikan Rp6,53 miliar (96,25 persen dari Pagu). Sedangkan Pagu terendah pada subbidang pengendalian penyakit Rp1,08 miliar, telah direalisasikan Rp1,03 miliar (95,21 persen dari Pagu).

Bidang pertanian hanya terdapat satu subbidang, yaitu pertanian - tematik penguatan kawasan sentra produksi pangan (pertanian, perikanan, dan hewani) yang memiliki Pagu Rp1,94 miliar, telah direalisasikan Rp1,67 miliar (86,43 persen dari Pagu).

4.2.1.3 Alokasi Anggaran K/L per Bidang

1. Bidang Jalan

Tabel 4.3 - Rincian Alokasi Belanja K/L per RO - Bidang Jalan (Miliar Rupiah)

No	BIDANG DAK	URAIAN OUTPUT	SATUAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	VOLUME	REALISASI FISIK	% Capaian RO
1	Jalan	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	Km	532,30	532,30	100,00%	76,13	76,13	100,0%
2	Jalan	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)	km	239,83	188,17	78,46%	33,12	33,12	100,0%
3	Jalan	Pembangunan Jembatan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan	M	72,51	68,46	94,41%	302,48	302,48	100,0%
4	Jalan	Preservasi Jembatan	M	44,30	44,30	100,00%	749,80	749,8	100,0%
5	Jalan	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	km	37,66	37,66	100,00%	16,43	16,44	100,1%
6	Jalan	Jalan Kawasan Prioritas (ProPN)	km	34,05	24,92	73,20%	11,58	11,58	100,0%
7	Jalan	Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	M	20,04	20,04	100,00%	151,00	151	100,0%
8	Jalan	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	km	12,95	12,95	100,00%	0,38	0,39	102,6%
9	Jalan	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	km	11,95	11,86	99,21%	302,54	305,02	100,8%
10	Jalan	Pembangunan Jembatan	M	10,37	10,37	100,00%	162,00	162	100,0%
11	Jalan	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	km	2,37	2,37	100,00%	18,56	18,56	100,0%
12	Jalan	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	km	2,26	2,26	100,00%	0,06	0,06	94,9%

13	Jalan	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	km	2,10	2,10	100,00%	52,43	52,43	100,0%
14	Jalan	Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	M	2,06	2,06	99,96%	3.454,10	3454,1	100,0%
15	Jalan	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	km	0,78	0,78	100,00%	5,37	5,37	100,0%
16	Jalan	Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya)	M	0,73	0,73	100,00%	729,50	729,5	100,0%
17	Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	km	0,56	0,56	99,99%	27,03	27,03	100,0%
18	Jalan	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	km	0,41	0,41	100,00%	0,30	0,3	100,0%
19	Jalan	Pemeliharaan Rutin Jembatan di Jalan Baru	M	0,12	0,12	99,95%	225,60	225,6	100,0%
20	Jalan	Pembangunan Jembatan Strategis (ProPN)	M	0,10	-	0,00%	10,00	0	0,0%

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah).

Bidang jalan terbagi pada 20 Rincian Output (RO) dengan total Pagu Rp1.027,44 miliar, telah direalisasikan Rp962,40 miliar (93,67 persen dari Pagu). Realisasi ini terbilang tinggi, sebagian besar RO telah direalisasikan dan diselesaikan secara optimal. Namun masih terdapat RO yang tidak dapat tersalurkan dan tidak terselesaikan secara fisik, yaitu pada pembangunan jembatan strategis (ProPN) senilai Rp100 juta, tidak dapat direalisasikan.

Tidak tersalurkannya realisasi Belanja tersebut, dikarenakan pelaksanaan pembangunan *Long Span Bridge Development for Selected Area*: Batam - Bintan yang didanai oleh pinjaman luar negeri masih belum bisa dilaksanakan karena masih tahap persiapan teknis.

2. Bidang Kesehatan dan KB

Tabel 4.4 - Rincian Alokasi Belanja K/L per RO - Bidang Kesehatan dan KB (Miliar Rupiah)

BIDANG DAK	URAIAN OUTPUT	SATUAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	VOLUME	REAL FISIK	% Capaian RO
Kesehatan dan KB	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	Orang	2,23	2,18	97,69%	3.375	3395	100,6%
Kesehatan dan KB	Dukungan peningkatan Mutu, Akreditasi, Keselamatan pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dekonsentrasi) (LR)	Daerah (Prov/ Kab/Kota)	1,24	1,10	88,85%	1	1	100,0%
Kesehatan dan KB	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	kegiatan	0,94	0,91	96,87%	8	8	100,0%
Kesehatan dan KB	Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	Orang	0,85	0,73	86,04%	580	58	100,0%
Kesehatan dan KB	PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Kelompok Masyarakat	0,82	0,79	96,80%	258	258	100,0%
Kesehatan dan KB	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Orang	0,76	0,72	95,11%	150	150	100,0%

Kesehatan dan KB	Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir	Orang	0,70	0,54	77,50%	53	53	100,0%
Kesehatan dan KB	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)	Lembaga	0,39	0,39	97,83%	283	283	100,0%
Kesehatan dan KB	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	layanan	0,38	0,37	98,13%	3	3	100,0%
Kesehatan dan KB	Tenaga Kesehatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Tatalaksana Program Kesehatan Jiwa (LP)	Orang	0,34	0,34	99,65%	30	30	100,0%
Kesehatan dan KB	Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Orang	0,33	0,31	95,44%	86	86	100,0%
Kesehatan dan KB	Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0,28	0,28	98,34%	7	7	100,0%
Kesehatan dan KB	Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	Kelompok Masyarakat	0,23	0,23	97,26%	41	41	100,0%
Kesehatan dan KB	Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0,21	0,19	87,87%	7	7	100,0%
Kesehatan dan KB	Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	Lembaga	0,21	0,19	90,11%	283	283	100,0%
Kesehatan dan KB	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE, serta penyediaan data dan informasi keluarga	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0,21	0,19	94,27%	1	1	100,0%
Kesehatan dan KB	Faskes yang mendapatkan Intensifikasi pelayanan KB dalam percepatan penurunan stunting dan mendukung penurunan AKI	Lembaga	0,20	0,20	96,29%	283	283	100,0%
Kesehatan dan KB	Kelompok UPPKA di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Kelompok Masyarakat	0,19	0,18	96,41%	7	7	100,0%
Kesehatan dan KB	Fasilitasi dan Pembinaan Teknis Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di Daerah (PK)	Provinsi	0,18	0,06	35,60%	1	1	100,0%
Kesehatan dan KB	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0,17	0,13	79,12%	3	3	100,0%

Kesehatan dan KB	Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (Dekonsentrasi) (LP)	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0,16	0,14	85,96%	1	1	100,0%
Kesehatan dan KB	Pelatihan Imunisasi	Orang	0,16	0,15	97,37%	37	37	100,0%
Kesehatan dan KB	Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga	Daerah (Prov/Kab/Kota)	0,15	0,15	99,97%	7	7	100,0%
Kesehatan dan KB	Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK	Keluarga	0,14	0,14	100,00%	35.396	35396	100,0%
Kesehatan dan KB	Tenaga Kesehatan yang diorientasi terkait Integrasi Layanan Primer (LP)	Orang	0,08	0,08	95,44%	28	28	100,0%
Kesehatan dan KB	Pelatihan Surveilans dan Respon KLB/ Wabah	Orang	0,08	0,07	89,40%	50	50	100,0%
Kesehatan dan KB	Tenaga Kesehatan/ non-kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya Terkait Upaya Perbaikan Status Gizi dan Pemberian TTD Bagi Remaja (LP)	Orang	0,08	0,08	99,83%	152	152	100,0%
Kesehatan dan KB	SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota	Orang	0,04	0,02	63,88%	107	108	100,9%
Kesehatan dan KB	Tenaga Kesehatan/ non kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Surveilans gizi dan KIA (LP)	Orang	0,01	0,01	100,00%	36	36	100,0%

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah).

Bidang Kesehatan dan KB terbagi dalam 29 RO, dengan total Pagu Rp11,72 miliar, dan telah direalisasikan Rp10,85 miliar (92,56 persen dari Pagu). Sebagian besar RO telah direalisasikan secara optimal lebih dari 90,00 persen, dan realisasi fisik telah mencapai 100 persen secara keseluruhan. Terdapat RO fasilitasi dan pembinaan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan di daerah (PK) yang memiliki Pagu Rp175.21 juta, direalisasikan Rp62.38 juta (35,60 persen dari Pagu), namun secara target fisik telah direalisasikan sesuai target sebanyak 1 pemda.

3. Bidang Pendidikan

Tabel 4.5 - Rincian Alokasi Belanja K/L per RO - Bidang Pendidikan (Miliar Rupiah)

No	BIDANG DAK	URAIAN OUTPUT	SATUAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	VOLUME	REAL FISIK	% Capaian RO
1.	Pendidikan	Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah Dasar dan Menengah	Unit	17,75	17,75	99,98%	8,00	8	100,0%
2.	Pendidikan	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	Orang	15,60	15,60	100,00%	527,00	1228	233,0%
3.	Pendidikan	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	6,84	5,98	87,49%	1.560,00	1813	116,2%
4.	Pendidikan	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	Orang	4,97	4,97	100,00%	608,00	643	105,8%
5.	Pendidikan	Satuan PAUD dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	0,69	0,66	94,46%	1.280,00	1370	107,0%
6.	Pendidikan	Penutur bahasa terbina	Orang	0,67	0,66	97,59%	287,00	382	133,1%
7.	Pendidikan	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	Orang	0,54	0,54	100,00%	180,00	867	481,7%
8.	Pendidikan	Perpustakaan yang dibina dan dikembangkan melalui dekonsentrasi	Lembaga	0,28	0,28	99,97%	1,00	1	100,0%
9.	Pendidikan	Penutur bahasa teruji	Orang	0,16	0,16	99,91%	124,00	278	224,2%

Bidang jalan terdiri atas 9 RO dengan total Pagu Rp47,50 miliar, telah direalisasikan Rp46,59 miliar (98,08 persen dari Pagu). Realisasi ini terbilang tinggi, seluruh realisasi fisik RO telah diselesaikan secara optimal. Pada salah satu RO, realisasi masih 87,49 persen dari Pagu, namun realisasi fisik telah terselesaikan dengan optimal. Beberapa kendala dalam RO tersebut, yaitu terdapat blokir anggaran Rp1.35 miliar, tidak kooperatifnya pihak ketiga, belum terbitnya petunjuk teknis kegiatan, dan mutasi pegawai PPK lama.

4. Bidang Pertanian

Tabel 4.6 - Rincian Alokasi Belanja K/L per RO - Bidang Pertanian

No.	BIDANG DAK	URAIAN OUTPUT	SATUAN	PAGU	REALISASI	% REALISASI	VOLUME	REAL FISIK	% Capaian RO
1.	Pertanian	Pelayanan Kesehatan Hewan	Layanan	0,70	0,52	74,11%	41.710	8280	19,9%
2.	Pertanian	Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Hektar	0,29	0,25	85,60%	15	14	93,3%
3.	Pertanian	Sertifikat Benih padi	Produk	0,25	0,24	95,26%	50	2550	5100,0%
4.	Pertanian	Area pengendalian OPT Hortikultura	Unit	0,18	0,18	99,24%	45	45	100,0%
5.	Pertanian	Benih Sumber Batang Hortikultura	Unit	0,07	0,07	97,99%	5.000	5000	100,0%
6.	Pertanian	Sertifikat Benih Hortikultura	Produk	0,06	0,06	99,79%	50	50	100,0%
7.	Pertanian	Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup Irigasi Pertanian	Kegiatan	0,05	0,05	99,96%	1	1	100,0%

8.	Pertanian	Perangkat Perlindungan Perkebunan	Unit	0,05	0,05	99,58%	1	1	100,0%
9.	Pertanian	Lembaga yang teredukasi akses pembiayaan, investasi, jaringan pemasaran dan ekspor	Lembaga	0,05	0,04	99,61%	1	1	100,0%
10.	Pertanian	Area penyaluran benih padi	Hektar	0,04	0,04	85,71%	66	66	100,0%
11.	Pertanian	Informasi Pasar Komoditas Hortikultura	Layanan	0,04	0,04	99,95%	3	3	100,0%
12.	Pertanian	Benih sumber jagung yang dihasilkan	Unit	0,04	0,04	100,00%	2.000	2050	102,5%
13.	Pertanian	Sarana Pemasaran Hortikultura	Unit	0,04	0,03	99,20%	1	1	100,0%
14.	Pertanian	Informasi Pasar Komoditas Tanaman Pangan	Layanan	0,03	0,01	45,67%	2	2	100,0%
15.	Pertanian	Areal Pengendalian OPT Tanaman Pangan	Hektar	0,03	0,03	100,00%	0	0	0,0%
16.	Pertanian	Benih sumber padi yang dihasilkan	Unit	0,03	0,03	90,00%	2.500	2550	102,0%
17.	Pertanian	Sertifikat Benih serealia lainnya	Produk	0,01	0,01	95,90%	50	50	100,0%
18.	Pertanian	Sarana Laboratorium Standardisasi	Unit	-	-	0,00%	1	0	0,0%

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah).

Bidang Pertanian terbagi dalam 18 RO, dengan total Pagu Rp1,94 miliar, dan telah direalisasikan Rp1,67 miliar (86,43 persen dari Pagu). Sebagian besar RO telah direalisasikan secara optimal lebih dari 90 persen, dan realisasi fisik telah mencapai 100 persen. Terdapat RO pelayanan kesehatan hewan yang memiliki Pagu Rp697,25 juta, direalisasikan Rp516.72 juta (74,11 persen dari Pagu), sedangkan capaian realisasi fisik masih sebesar 19,9 persen dari target.

Satker hanya mampu menargetkan pemberian vaksin kepada hewan ternak sebanyak 6.580 vaksin dari target sebesar 39.910 vaksin berdasarkan beberapa faktor, diantaranya terdapat penolakan pemberian vaksin kepada hewan ternak dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena hewan yang dipelihara oleh warga dilepasliarkan atau tidak dikandangkan. Selain itu kondisi geografis daerah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang dihuni oleh warga, menyulitkan mobilitas petugas vaksin. Sementara itu, alokasi anggaran untuk menyewa perahu tidak disediakan pada output kegiatan layanan pengendalian dan penanggulangan penyakit PMK.

4.3 Kendala dan Tantangan

4.3.1 Keseluruhan Bidang

Grafik 4.1 - Kendala dan Tantangan

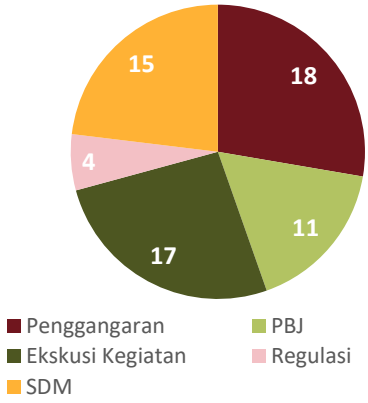

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah).

Dari kelima bidang pada RO Harmonis, kendala yang paling banyak dialami, yaitu pada aspek penganggaran dengan ditemukan sebanyak 18 kendala yang dialami satuan kerja terkait pada RO Harmonis. Kemudian diikuti aspek eksekusi kegiatan yang ditemukan sebanyak 17 kendala, sumber daya manusia sebanyak 15 kendala, PBJ sebanyak 11 kendala, dan regulasi sebanyak 4 kendala.

Berdasarkan data yang tersaji, kendala yang paling banyak dialami oleh satuan kerja adalah pada aspek penganggaran. Beberapa kendala yang dialami, yaitu DIPA yang baru terbit pada semester II, waktu penyelesaian yang baru bisa dilakukan pada tahun 2024, kegiatan yang baru dapat dilaksanakan di bulan November, penyesuaian jadwal kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, terdapat blokir anggaran pada beberapa kegiatan, revisi anggaran, dan tidak dapat tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya kendala yang dialami pada aspek eksekusi kegiatan yaitu berupa lokasi pelaksanaan kegiatan yang berada di daerah terluar dan sulit diakses, kondisi ekstrem di musim penghujan, kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup panjang, banyaknya *stakeholder* yang terlibat dalam kegiatan, penolakan dari target kegiatan, dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena berada pada kawasan tertentu.

Kendala yang dialami pada aspek sumber daya manusia (SDM), diantaranya yaitu keterbatasan SDM yang dimiliki oleh satuan kerja, dan mutasi pegawai PPK yang membutuhkan waktu untuk pergantian.

Dalam aspek pengadaan barang dan jasa (PBJ) beberapa kendala yang ditemui, diantaranya yaitu penyedia barang dan jasa yang terbatas, kontrak kegiatan baru ditandatangani bulan Oktober, serta permasalahan administratif dan kurang kooperatifnya jasa konsultan dalam mengikuti alur proses pembayaran atas tagihan APBN.

Aspek regulasi, yaitu terdapatnya perubahan regulasi baru, yang mengharuskan terjadinya perubahan dalam eksekusi kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat, belum terbitnya regulasi pelaksanaan kegiatan, dan terlambat terbitnya regulasi sehingga kegiatan mundur dari jadwal pelaksanaan.

4.3.2 Bidang jalan

Grafik 4.2 - Kendalaa dan Tantangan – Bidang Jalan

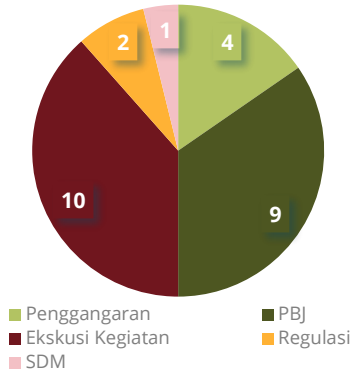

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah).

Dalam bidang jalan, kendala yang paling banyak dialami yaitu dalam aspek eksekusi kegiatan sebanyak 10 kendala. Kemudian diikuti oleh aspek PBJ sebanyak 9 kendala, penganggaran 4 kendala, regulasi 2 kendala, dan SDM sebanyak 1 kendala.

Dalam bidang jalan ini, kendala dalam aspek eksekusi kegiatan diantaranya yaitu pelaksanaan yang dilakukan di daerah terluar Kepri seperti daerah-daerah di Kabupaten Natuna sehingga mengalami keterbatasan alat, kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun sehingga mengalami kendala cuaca ekstrem dan masuk musim penghujan, serta sulitnya mobilitas orang dan barang di lokasi terpencil.

Kendala yang terjadi pada aspek PBJ diantaranya yaitu terbatasnya penyedia barang dan jasa terutama pada daerah terluar seperti Kabupaten Natuna, proses PBJ yang memerlukan waktu relatif lama, kesulitan dalam pemilihan penyedia barang dan jasa dan tidak tersedianya material yang dibutuhkan.

Dalam aspek penganggaran kendala yang terjadi, yaitu DIPA yang baru terbit pada semester II dan akhir triwulan III 2023, sehingga baru pelaksanaan kegiatan menjadi semakin sempit, dan terdapat 5 paket pekerjaan yang baru dapat diluncurkan pada tahun 2024.

Kendala pada regulasi diantaranya, yaitu turunnya Inpres pada tengah tahun sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terlambat, dan regulasi untuk pembangunan jembatan Batam Bintan belum selesai, sehingga kegiatan belum dapat dilaksanakan.

Pada aspek SDM, terkait dengan DIPA yang terbit pada akhir triwulan III 2023, sehingga dengan waktu kegiatan yang semakin sempit, diperlukan penatausahaan SDM yang lebih baik pada satuan kerja.

4.3.3 Bidang Kesehatan dan KB

Grafik 4.3 - Kendala dan Tantangan – Bidang Kesehatan dan KB

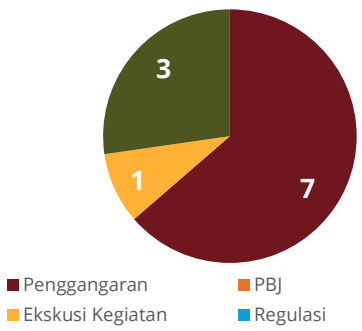

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah).

Kendala yang dijumpai pada bidang kesehatan dan KB, yaitu terkait dengan aspek penganggaran sebanyak 7 kendala, SDM 3 kendala dan eksekusi kegiatan 1 kendala. Dalam aspek penganggaran kendala yang dijumpai, diantaranya yaitu *timeline* kegiatan yang baru akan dilaksanakan pada minggu keempat bulan November, dan perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan akibat diperlukannya revisi POK dalam penyesuaian alokasi anggaran, dan kegiatan yang telah dilaksanakan

namun pertanggungjawaban belum selesai dilaksanakan.

Dalam aspek SDM kendala yang dialami yaitu terkait dengan terbatasnya jumlah mentor dan fasilitator yang tersedia, serta waktu pelatihan yang panjang, sementara mentor juga merupakan tenaga yang bekerja dibagian pelayanan, dan adanya kesalahan input capaian output oleh petugas satker. Kendala pada aspek eksekusi kegiatan, yaitu keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena juknis pedoman dan pelaksanaan kegiatan di tingkat pusat lambat diterbitkan.

4.3.4 Bidang Pendidikan

Pada bidang pendidikan kendala yang dialami paling banyak pada aspek SDM sebanyak 7 kendala, diikuti oleh aspek penganggaran 4 kendala, eksekusi kegiatan sebanyak 3 kendala, dan PBJ sebanyak 1 kendala.

Pada aspek SDM terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu adanya pergantian bendahara dikarenakan daya serap yang sangat rendah, mutasi dan promosi pejabat PPK sehingga perlu waktu untuk pergantian, serta terbatasnya jumlah SDM pada satuan kerja dengan banyaknya pekerjaan.

Grafik 4.4 - Kendala dan Tantangan Bidang Pendidikan

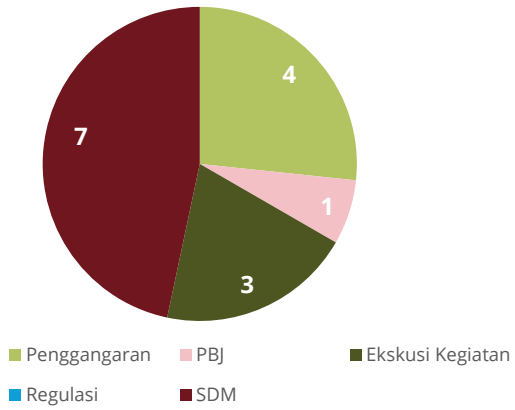

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah).

Kendala yang ditemui pada aspek penganggaran, diantaranya yaitu terdapat blokir anggaran pada beberapa program, pengesahan DIPA pada bulan Oktober, dan terdapat revisi anggaran.

Kemudian kendala pada eksekusi kegiatan, diantaranya yaitu lokasi kegiatan yang ekstrim sehingga perlu menyesuaikan jadwal kapal sebagai transportasi peserta, pelaksanaan yang terbagi menjadi beberapa tahap dan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena diperlukan petunjuk teknis lebih lanjut, serta kegiatan yang melibatkan banyak *stakeholder* sehingga perlu menunggu petunjuk teknis yang mengatur.

Dalam aspek PBJ, kendala yang ditemui pada bidang pendidikan yaitu permasalahan administratif dan kurang kooperatifnya jasa konsultan dalam mengikuti alur proses pembayaran atas tagihan APBN.

4.3.5 Bidang Pertanian

Grafik 4.5 - Kendala dan Tantangan Bidang Pertanian

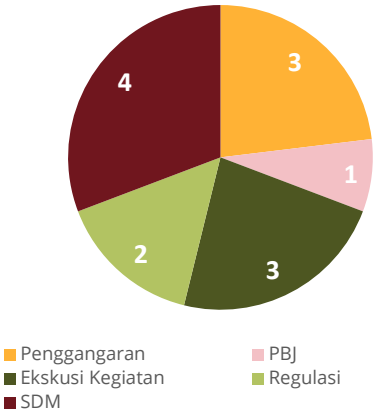

Sumber: Sintesa, 2024 (diolah).

Kendala yang paling banyak ditemui pada bidang pertanian, yaitu dalam aspek SDM sebanyak 4 kendala. Kemudian diikuti oleh aspek eksekusi kegiatan 3 kendala, penganggaran 3 kendala, regulasi 2 kendala, dan PBJ 1 kendala.

Pada aspek SDM, kendala yang dialami yaitu terkait dengan keterbatasan jumlah SDM yang dimiliki oleh satuan kerja untuk melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi, sehingga terdapat keterlambatan atas proses pertanggungjawaban anggaran belanja.

Aspek eksekusi kegiatan mengalami beberapa kendala, diantaranya yaitu penolakan dari target kegiatan, kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena berada pada kawasan tertentu, mobilitas yang sulit pada daerah-daerah dengan pulau kecil dan anggaran mobilitas tidak tersedia, proses kegiatan yang memiliki alur cukup panjang dan sulit dilaksanakannya kegiatan karena terbatasnya penyedia.

Pada aspek regulasi kendala yang ditemui yaitu disebabkan oleh adanya pengaturan/regulasi dari Unit Eselon I Kementerian Pertanian yang mewajibkan bahwa bantuan pestisida kepada petani harus bersifat nabati atau hayati (tidak mengandung banyak bahan kimia) Kemudian berdampak pada kendala PBJ yaitu proses pengadaan di Kepri masih terkendala karena belum terdapat banyak pilihan penyedia barang jasa yang memproduksi pestisida nabati/hayati.

Sedangkan pada aspek penganggaran kendala yang terjadi, yaitu tidak dapat terlaksananya kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dimana, Berdasarkan informasi dari satuan kerja, penetapan target sebesar 39.910 dosis vaksin hewan dihitung berdasarkan populasi hewan ternak di Kepri. Namun, berdasarkan kondisi di lapangan, satuan kerja hanya sanggup menargetkan realisasi vaksin hewan sebanyak 6.580 dosis sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

4.4 Upaya Sinkronisasi di Daerah oleh Satker dan Pemda

4.4.1 Bidang Jalan

Pada bidang jalan telah dilakukan beberapa upaya strategis dari pemerintah daerah dan Kementerian PUPR, diantaranya yaitu melalui pembagian lokasi dan fokus pembangunan antara belanja K/L dan DAK Fisik di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui dialog antara pemerintah daerah dan Kementerian PUPR. Pada tanggal 17 Oktober 2023, telah dilaksanakan pertemuan antara Gubernur Provinsi Kepulauan Riau bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Gedung Kementerian PUPR. Selain itu juga upaya harmonisasi rutin dilaksanakan oleh direktorat teknis Kementerian PUPR bersama Kepala Daerah dan OPD terkait, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan jalan di Kepri.

Pada tahun 2023 terdapat pembangunan jalan diberbagai lokasi Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian PUPR membangun jalan pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan. Terdapat 10 (delapan) proyek berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu 4 (empat) proyek telah selesai dilaksanakan dan 6 (empat) proyek masih dalam status *on progress*. Proyek yang sudah selesai yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, KEK Nongsa, KEK Batam Aero Technic, dan Bendungan Sei Gong. Sedangkan proyek yang masih on progres yaitu Kawasan Industri Pulau Ladi, Kawasan Industri Tanjung Sauh, PLTS skala besar, dan Jalan Tol Batu Ampar-Muka Kuning-Bandara Hang Nadim (25 km), Pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah, dan Pembangembangan Kawasan Rempang Eco-City.

Pada capaian DAK Fisik, terdapat pembangunan, penangan, perbaikan, dan peningkatan kapasitas jalan yang tersebar pada 5 Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kepulauan Riau. Belanja ini terharmonisasi sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan percepatan pembangunan pada Kawasan 3T, percepatan pembangunan insfrastruktur antar pulau guna pengintegrasian dan percepatan pembangunan kawasan pesisir, serta pengembangan kawasan pariwisata unggul Batam-Bintan.

4.4.2 Pendidikan

Upaya harmonisasi terus dilaksanakan oleh pemerintah daerah bersama Kemendikbud Ristek dalam peningkatan layanan pendidikan diwilayah Kepri, diantaranya melalui dialog, serta pendampingan dari BPMP Provinsi Kepri, bersama Dinas Pendidikan Provinsi Kepri dalam pengajuan usulan dan pelaksanaan DAK Fisik.

Dalam pelaksanaannya, belanja Kemendikbud Ristek di bidang Pendidikan memiliki beberapa output yang sebagian besar untuk Pendidikan Tinggi pada beberapa universitas yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, seperti UMRAH, Poltek Batam, Poltekes Kemenkes. Utamanya belanja digunakan untuk pelayanan pendidikan, termasuk dengan rumah susun dan asrama mahasiswa.

Belanja DAK Fisik pendidikan sebagian besar digunakan untuk pengadaan, pengembangan, dan revitalisasi bangunan pada tingkat pendidikan dasar hingga menengah, mulai dari PAUD, SD, SMP, SKB, SLB, SMK, SMA, dan perpustakaan sekolah di seluruh wilayah Kepulauan Riau.

4.4.3 Kesehatan

Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kepri senantiasa melaksanakan dialog dalam peningkatan layanan kesehatan di wilayah Kepri. Harmonisasi belanja pemerintah pusat dan DAK Fisik bidang kesehatan, dilaksanakan melalui pembagian fokus peningkatan layanan.

Pada alokasi Belanja Pemerintah Pusat di bidang Kesehatan, terdapat belanja yang berharmonisasi dengan DAK Fisik, yaitu belanja peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan, percepatan penurunan stunting, pembinaan keluarga baduta dan 1000 HPK, pencegahan dan

deteksi penyakit-penyakit prioritas, dan pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan kasus stunting.

Untuk belanja DAK Fisik,, belanja difokuskan kepada sarana dan prasarana puskesmas dan rumah sakit, alat-alat kesehatan, penyediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP), dan menu penunjang kesehatan lainnya.

4.4.4 Bidang Pertanian

Upaya harmonisasi antara belanja Kementerian Pertaniaan dan DAK Fisik bidang pertanian di wilayah Kepri dilakukan melalui pembagiaan fokus pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kapasitas pertanian di wilayah Kepri. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pertemuan dan diskusi bersama antara Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di Wilayah Kepri.

Belanja Kementerian Pertanian yang terkait pada bidang pertanian di Kepri dilaksanakan melalui kegiatan pemberian layanan kesehatan hewan, sertifikasi produk karantina pertanian, selanjutnya terdapat juga sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan pertanian, didalamnya juga termasuk program daya tambah dan daya saing industri.

Pada belanja DAK Fisik, belanja digunakan untuk pembangunan/renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan sarana pendukung pertanian lainnya. Selain itu, terdapat juga pembangunan/renovasi Puskeswan dan sarana pendukungnya.

Kajian IV

Masih Tingginya Tingkat Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau

I. Kondisi Pengangguran Provinsi Kepulauan Riau

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan isu utama yang menjadi tantangan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Kepri masih terbilang tinggi sebesar 6,8 persen dengan TPT rata-rata nasional sebesar 5,32 persen. TPT di Kepri di tahun 2023 sebesar 6,8 persen telah mengalami perbaikan setelah terdampak pandemi Covid-19 di tahun 2020 dan 2021 lalu. Pada tahun 2020, tingkat pengangguran di Kepri melonjak sebesar 10,34 persen dari tahun 2019 sebesar 7,5 persen, kemudian mengalami perbaikan pada tahun 2021, 2022, hingga 2023.

Banyak perusahaan yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Tercatat sebanyak 332 perusahaan dan 15.618 pekerja terdampak oleh pandemi Covid-19, mulai dari pemotongan gaji, penundaan upah, penurunan jam kerja, hingga pemberhentian hubungan kerja (PHK). Peningkatan pengangguran pada masa pandemi Covid-19 ini juga dipengaruhi banyaknya pencari kerja yang datang dari luar Kepri mencari kerja ke Kota Batam, namun belum mendapatkan pekerjaan.

Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Batam, Rudi Sakyakirti, banyak pengangguran di Kota Batam yang tidak dibekali oleh kemampuan serta kompetensi khusus (Maulana, 2021, 15 September). Lulusan sarjana memiliki keterbatasan karena kebutuhan perusahaan berada pada level operator, sedangkan lulusan SMA/SMK harus dibekali oleh sertifikasi, sehingga memiliki daya tawar lebih.

b. *Sektor Pekerjaan Utama*

Industri pengolahan merupakan lapangan pekerjaan utama di Kepri, sebanyak 27,42 persen masyarakat Kepri bekerja pada sektor ini. Kemudiaan diikuti perdagangan besar dan eceran sebesar 17,24 persen dan administrasi pemerintahan 13,92 persen. Industri pengolahan memiliki tren peningkatan yang signifikan sejak 2020 lalu, dengan peningkatan lebih dari 10 persen. Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam, sektor manufaktur elektronik menjadi penyerap tenaga kerja terbanyak di Kota Batam (Antara, 2023, 26 Oktober). Sebanyak lebih dari 60 persen tenaga kerja terserap melalui sektor manufaktur elektronik tersebut. Peningkatan investasi dan industri di Kepri senantiasa didorong oleh pemerintah, termasuk bekerja sama dengan pihak swasta salah satunya melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus

Pertumbuhan sektor industri di Kepri secara keseluruhan terus meningkat, meskipun disertai penurunan dalam beberapa kuartal. Sejak tahun 2019, industri pengolahan memiliki andil sebesar Rp16.624,62 miliar, kemudian lanjut bertumbuh hingga berada pada puncaknya di kuartal empat tahun 2022 sebesar Rp19.766,51 miliar. Meskipun mengalami kontraksi pada kuartal dua tahun 2023, namun kondisi tersebut masih terbilang tinggi dibandingkan kuartal dua tahun 2022. Tingginya andil sektor industri pengolahan ini tidak terlepas dari besarnya pertumbuhan Industri di Kepri, khususnya Kota Batam. Investasi dalam sektor industri ini tidak hanya berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), namun juga berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA).

Beberapa sektor industri unggulan di Kepri yang berasal dari PMDN, yaitu jasa transportasi dengan 184 perusahaan, jasa industri konstruksi 106 perusahaan, industri logan dan mesin sebanyak 85 perusahaan, jasa industri 85 perusahaan, dan industri perkapalan dengan 72 perusahaan. Sedangkan yang berasal dari PMA, sentor unggulannya, yaitu logam dan mesin sebanyak 109 perusahaan, kulit, karet, plastic dan kemasan 85 perusahaan, elektronik dan elektrika 77 perusahaan, perkapalan dan penunjang 66 perusahaan, dan migas dan penunjang sebanyak 39 perusahaan.

Investasi PMA di triwulan III di Kota Batam di dominasi oleh sektor industri dan makanan yang tumbuh sekitar 97 persen (yoy) dengan nilai US$40.58 juta atau setara Rp600,66 miliar dari 55 proyek yang ada. Sektor lainnya yang mengalami pertumbuhan signifikan, yaitu sektor industri karet dan plastik yang mendapatkan penanaman modal sebesar US$19,28 juta atau sebesar Rp285,40 miliar dari 55 proyek. Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran menjadi sektor dengan pertumbuhan terbesar ketiga, dengan pertumbuhan 21 (yoy) dengan nilai US$15,02 juta atau setara dengan Rp222,30 miliar dari 32 proyek yang ada.

Tingginya antusiasme investasi di Kepri, khususnya Kota Batam ini tidak terlepas dari kemudahan investasi yang diberikan pemerintah dengan ditetapkannya Dengan kemudahan iklim investasi tersebut, telah dibentuk 3 (tiga) KEK di Kepri yang telah beroperasi, yaitu KEK Galang Batang, KEK Nongsa, dan KEK Batam Aero Technic. Selain ketiga KEK yang telah beroperasi tersebut, terdapat 2 (dua) KEK yang baru ditetapkan di Kepri, yaitu KEK Tanjung Sauh dan KEK Nipa.

KEK Galang Batang

KEK Galang Batang berfokus pada industri smelter untuk pengolahan bauksit yang dilakukan oleh PT BAI, dengan target dapat mengekspor produk SGA yang merupakan hasil dari pengolahan bauksit. Daerah di Kepri seperti Pulau Bintan, Lingga, dan Karimun merupakan penghasil bauksit hingga 40 juta ton, dengan melakukan pengolahan lanjutan maka akan meningkatkan nilai jualnya hingga 5-13 kali jika diolah menjadi aluminium. Dengan adanya KEK Galang Batang, diharapkan proses hilirisasi yang diharapkan Presiden telah berjalan.

Investasi yang diterima KEK Galang Batang hingga akhir 2021 mencapai Rp15,71 triliun, kemudian di tahun 2022, bertambah lagi 1,3 triliun. Nilai investasi ini dimanfaatkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), refinery alumina berkapasitas 2 (dua) ton, coal gas plant, power plant dan pembangunan kawasan.

KEK Nongsa

KEK Nongsa memiliki peran sebagai IT Hub Digital Bridge dengan luar negeri, diharapkan dapat menjadi pusat data center, ekonomi digital, dan industri perfilman tingkat internasional. KEK Nongsa telah menjadi markas bagi banyak perusahaan teknologi lainnya. Berdasarkan Laporan Perkembangan KEK 2022, ada sekitar 80 perusahaan startup dan perusahaan teknologi multinasional yang sudah tergabung dalam ekosistem NDP.

Sepanjang tahun 2022, tercatat tambahan realisasi investasi sebesar Rp67,70 miliar dari 13 pelaku usaha yang berada di KEK Nongsa. Dengan tambahan investasi tersebut, total investasi yang telah masuk di KEK Nongsa sudah mencapai Rp2,61 triliun.

KEK Batam Aero Technic (BAT)

KEK Batam Aero Technic bergerak dalam industri penyedia jasa perawatan dan perbaikan pesawat, khususnya pesawat dari Lion Air Group. Melalui industri tersebut KEK Batam Aero Technic memberikan potensi yang besar dalam memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia, diharapkan dapat menghemat devisa hingga 70 persen dari kebutuhan maintenance, repair, dan, overhoul (MRO) maskapai penerbangan Indonesia yang bernilai Rp26 triliun per tahun.

Sepanjang tahun 2022, jumlah investasi yang terealisasi di KEK BAT mencapai Rp272 miliar, dengan total inveastasi hingga akhir tahun 2022, yaitu mencapai Rp567 miliar dan total penyerapan tenaga kerja sebesar 1.404 orang. Dana investasi ini telah direalisasikan pada 3 tahap, pada tahap 1 dan 2 telah terbangun 4 maintenance hanggar berkapasitas 13 pesawat, 1 painting hanggar, dan 1 cleaning hanggar. Untuk tahap 3 juga telah dibangun 1 maintenance hanggar yang berkapasitas 6 pesawat dan telah terbangun apron seluas 1,7Ha pada tahap 1 dan seluas 6 Ha pada tahap 3.

KFR Tahunan 2023

BAB V

ANALISIS TEMATIK:
SINERGI PUSAT-DAERAH DALAM UPAYA PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA YANG BERDAYA SAING

Tugu Kapal Pinisi
Kota Tanjung Pinang

Tugu Kapal Pinisi menjadi lokasi wisata baru yang diminati warga lokal maupun turis. Dengan adanya tugu ini berdampak kepada peningkatan kunjungan yang muaranya dapat **mendongkrak perekonomian masyarakat**.

BAB V

ANALISIS TEMATIK: SINERGI PUSAT-DAERAH DALAM UPAYA PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA YANG BERDAYA SAING

5.1 Pendahuluan

Keberhasilan pembangunan suatu negara dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan negara yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari adanya interaksi dan partisipasi SDM (Sumber Daya Manusia) yang merupakan input pembangunan, tenaga kerja, dan juga sebagai konsumen dari hasil pembangunan. Namun, meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya pasokan tenaga kerja yang ada tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja. Rendahnya penyerapan tenaga kerja tersebut kemudian menyebabkan tingginya tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia.

Mulyadi (2016) menyebutkan bahwa keterbatasan akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan merupakan penyebab utama pengangguran. Keterbatasan lapangan pekerjaan menyebabkan *supply* (penawaran) tenaga kerja di pasar tenaga kerja melebihi *demand* (permintaan) tenaga kerja untuk mengisi kesempatan kerja yang tercipta. Akibatnya timbul kelompok angkatan kerja yang tidak diberdayakan dalam kegiatan perekonomian. Kelompok angkatan kerja yang berpendidikan dan sesuai dengan tawaran lapangan pekerjaan akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan.

Saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu proporsi angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Ukuran ini dapat digunakan untuk mengindikasikan seberapa besar penawaran kerja yang tidak dapat terserap dalam pasar kerja di sebuah negara atau wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam rilis Berita Resmi Statistik menerangkan bahwa TPT di Indonesia pada Agustus 2023 mencapai 5,32 persen, turun sebesar 0,54 persen dibanding Agustus 2022.

Seiring dengan hal tersebut, pengurangan tingkat pengangguran merupakan salah satu tujuan 8 *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua. Target-targetnya antara lain meliputi penciptaan lapangan kerja layak (Tujuan 8.5), serta mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; tidak menempuh pendidikan; atau pelatihan (NEET) (Tujuan 8.6).

Pengurangan tingkat pengangguran juga menjadi salah satu target pembangunan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Pemerintah menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 3,6–4,3 persen pada tahun 2024.

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan dan perhatian khusus Pemerintah agar tidak menimbulkan dampak ekonomi dan sosial (kemiskinan dan kerawanan sosial) yang terjadi di kemudian hari. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa tingkat pendidikan, akses pendidikan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran suatu daerah atau negara. Oleh karena itu, intervensi pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang kemudian diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi.

Dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran tersebut, diperlukan dukungan APBN dan APBD dalam berbagai program pemerintah, salah satunya pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM. Dukungan APBN dilakukan melalui pengalokasian belanja pemerintah, baik melalui Kementerian Negara/Lembaga terkait maupun penyaluran belanja ke daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah, salah satunya adalah belanja DAK, baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik pada bidang Pendidikan. Selain APBN, Pemerintah Daerah melalui APBD juga berperan dalam menurunkan tingkat pengangguran sesuai arah dan kebijakan program pembangunan daerah dalam RPJMD.

Gambar 5.1. Keterkaitan Sumber Daya Manusia dengan Pertumbuhan Ekonomi

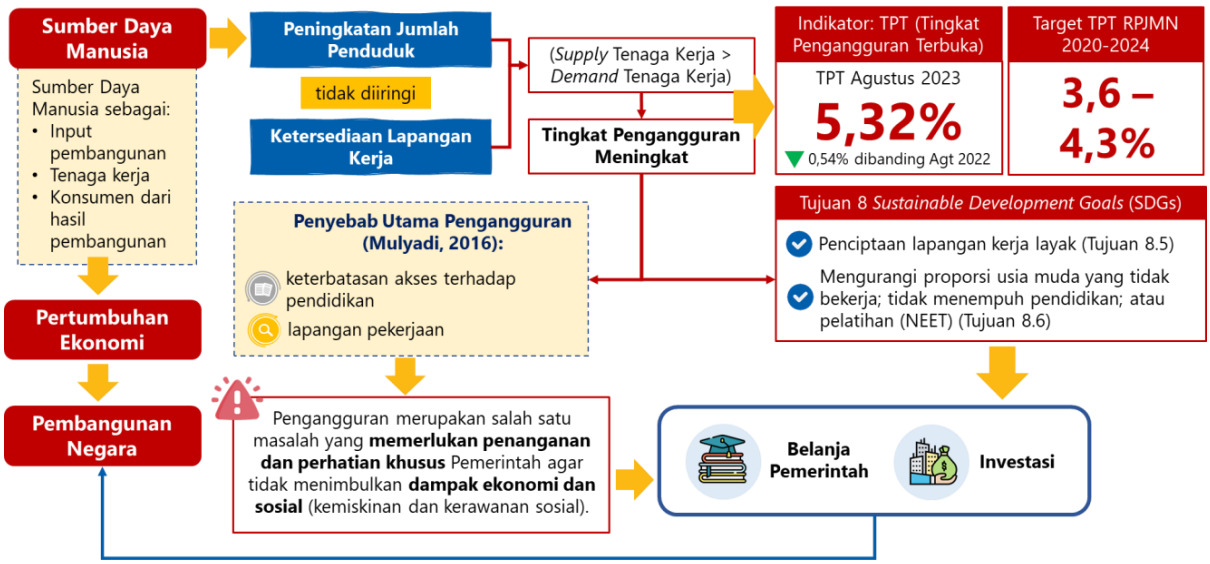

Sumber: Dit PA, 2024.

Selain dukungan Belanja Pemerintah, investasi yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri merupakan salah satu cara yang diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran serta menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu daerah

atau negara. Paramita dan Christianingrum (2017) menyebutkan bahwa investasi memegang peran penting dalam menggerakkan perekonomian. Hal ini karena investasi akan berdampak pada peningkatan kapasitas faktor produksi yang nantinya akan mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan per kapita yang kemudian akan meningkatkan pendapatan nasional.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden RI juga mengatakan bahwa investasi merupakan pintu masuk dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mensejahterakan masyarakat, dan memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan produktivitas Indonesia. Oleh karena itu, kemudahan berinvestasi, kemudahan izin usaha, serta iklim investasi merupakan hal penting dalam mendorong masuknya investor ke suatu daerah dan negara.

5.2 Analisis Tematik

5.2.1 Peningkatan Kualitas SDM/Tenaga Kerja

5.2.1.1 Analisis Deskriptif atas Indikator Kualitas SDM di Provinsi Kepri

Tabel 5.1 - Analisis Statistik Deskriptif Atas Indikator Kualitas SDM

Formula	IPM		RLS		HLS	
	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
Mean	73,52	72,09	8,83	8,444	13,10	13,00
Minimum	64,06	71,39	6,27	8,17	12,16	12,91
Maximum	81,67	72,91	11,17	8,69	14,14	13,10
Range	17,61	1,52	4,9	0,52	1,98	0,19
Median	73,44	71,94	8,7	8,54	12,95	12,98
Sample Variance	24,19	0,31	2,22	3,88	0,36	0,01
Kurtosis	-0,78	0,84	-1,14	4,92	-0,93	-2,50
Skewness	-0,098	0,49	0,031	2,21	0,52	0,24

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah).

- ***Indeks Pembangunan Manusia (IPM)***

Grafik 5.1 - Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Pemda Kepri

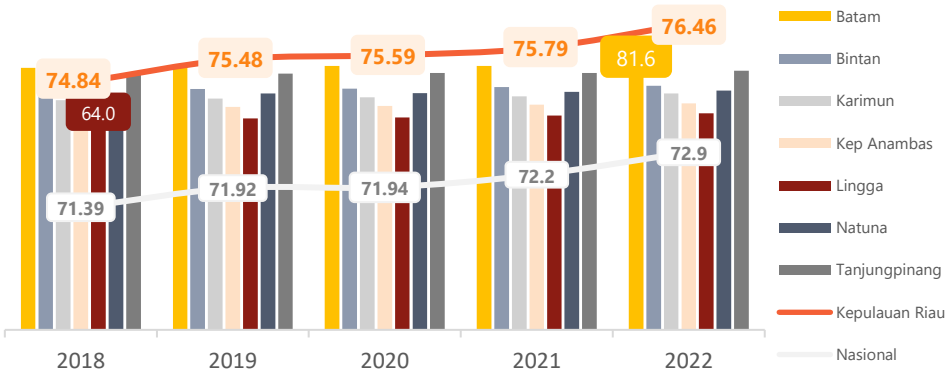

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, dari hasil analisis deskriptif, nilai rata-rata (*mean*) IPM Provinsi Kepri dari tahun 2018-2022 adalah 73,52, diatas nilai rata-rata IPM Nasional sebesar 71,94 dengan selisih 1,58 poin indeks. Hal ini menunjukkan masyarakat Provinsi Kepri telah dapat mengakses hasil pembangunan khususnya akses memperoleh pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak.

Lebih lanjut, *range* antara nilai minimum dan maksimum indeks IPM Prov. Kepri sebesar 17,61 menunjukkan *gap* yang cukup lebar antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya di antara Prov. Kepri. Dari grafik tren menunjukkan Kota Batam memiliki IPM tertinggi yaitu 81,67 dan Kab. Lingga dengan IPM terendah yaitu 64,06. Ketimpangan IPM ini haruslah mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Lingga untuk memberikan *extra effort* dalam meningkatkan akses kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak kepada masyarakat Kab. Lingga.

- ***Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)***

Grafik 5.2 - Perkembangan RLS Kepulauan Riau

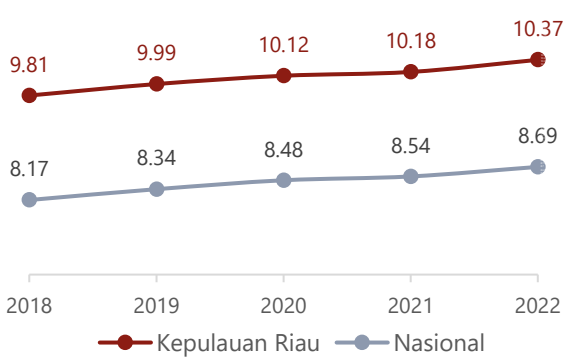

Adapun, nilai mean rata-rata lama sekolah masyarakat Prov. Kepri adalah 8,83 tahun atau lebih lama 0,4 tahun dibanding nilai mean Nasional yaitu 8,44 tahun. Hal ini berarti rata-rata masyarakat Prov. Kepri tamat sekolah sampai dengan Sekolah Dasar dan tidak sampai tamat Sekolah Menengah Pertama.

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah).

- ***Harapan Lama Sekolah (HLS)***

Rata-rata HLS masyarakat prov. Kepri menunjukkan angka 13,10 tahun atau sedikit diatas rata-rata angka nasional yaitu 13 tahun. Hal ini menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu di prov. Kepri selama 13,10 tahun atau setara Diploma 1.

Grafik 5.3 - Perkembangan HLS Kepulauan Riau

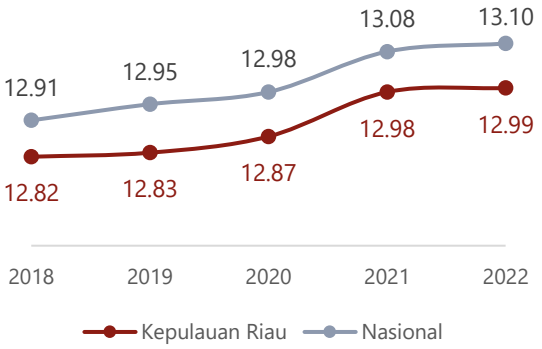

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah).

5.2.1.2 Analisis Deskriptif Profil Ketenagakerjaan di Provinsi Kepri

Tabel 5.2 - Analisis Statistik Deskriptif Profil Ketenagakerjaan

Formula	TPAK		TKK		TPT	
	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
Mean	66,15	68,24	93,74	94,01	6,26	5,99
Minimum	57,74	67,53	88,21	92,93	1,27	5,23
Maximum	72,43	69,48	98,73	94,77	11,79	7,07
Median	66,37	67,80	93,84	94,14	6,16	5,86
Range	14,69	1,95	10,52	1,84	10,52	1,84
Standard Deviation	3,81	0,81	2,65	0,78	2,65	0,78

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah).

- ***Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)***

Grafik 5.4 - TPT Kepri 2019 - 2023

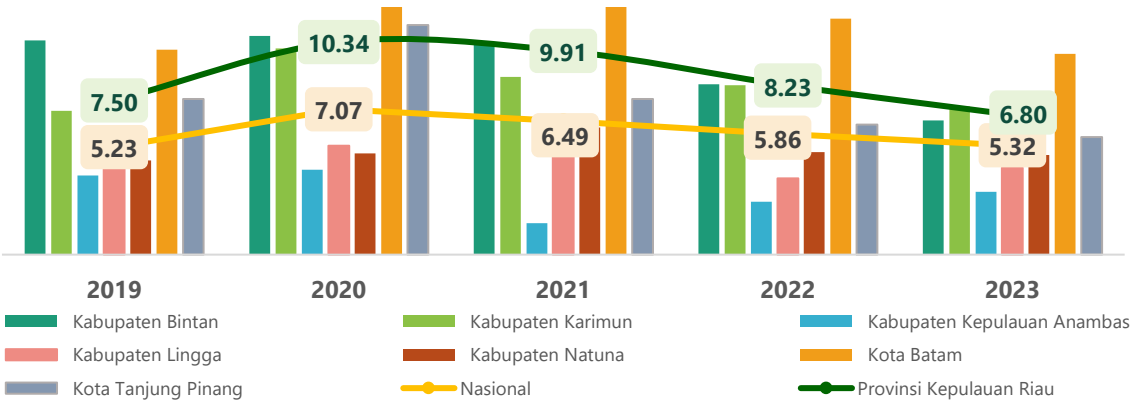

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah).

Rata-rata tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada provinsi Kepri periode 2019-2023 sebesar 6,26% artinya jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan sebesar 6,26%.

Figur TPT ini lebih kecil dibanding tingkat rata-rata Nasional sebesar 94,01%. Target pemerintah untuk menekan TPT di angka 5,3% di tahun 2023 masih harus terus diperjuangkan oleh pemerintah prov. Kepri. Konsisten dengan angka TKK, Kab. Kepulauan Anambas memiliki nilai TPT terendah yaitu 1, 27% di tahun 2022 sementara tingkat pengangguran tertinggi di Kota Batam pada tahun 2020 sebesar 12.79%. Masa Pandemi COVID-19 menjadi penyebab tutupnya perusahaan dan PHK masal dari industri industri di Kota Batam.

- ***Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)***

Grafik 5.5 - TPAK Kepri 2019 - 2023

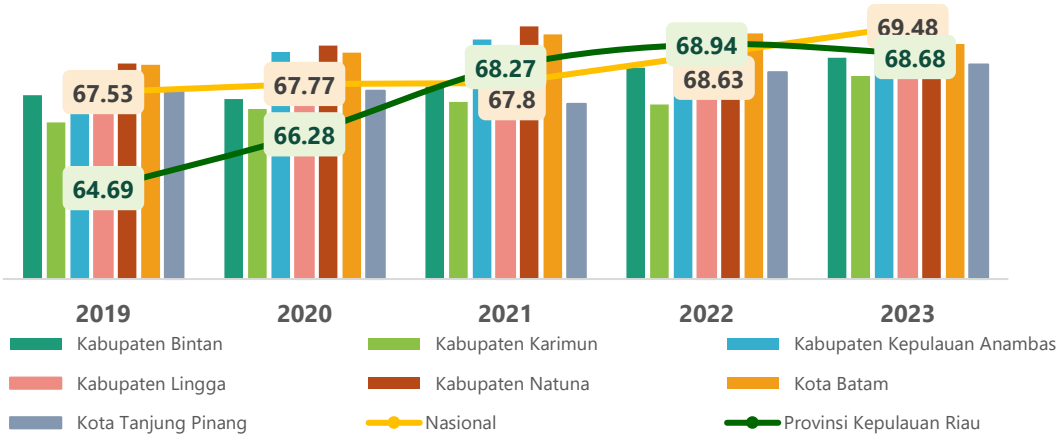

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah).

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa di Prov. Kepri rata-rata jumlah penduduk usia kerja periode 2018-2022 sebanyak 244.111 orang. Jumlah tersebut hanya memberikan kontribusi 0,12% dari rata-rata jumlah penduduk usia kerja nasional sebanyak 203.882.542 orang. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki jumlah terkecil di tahun 2018 yaitu 30.042 orang dan Kota Batam yang tertinggi dengan 1.191.281 orang di tahun 2022.

Berdasarkan data statistik, rata-rata jumlah tenaga kerja pada tiga lapangan usaha terbesar di Prov. Kepri adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran dan pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 35.999; 26.463; dan 12.217 orang.

Komposisi tersebut sangat sesuai dengan data PDRB berdasarkan lapangan usaha pada Prov. Kepri juga menunjukkan komposisi yang sama. Adapun rata-rata tenaga kerja di level nasional paling besar menduduki lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; dan industri pengolahan yaitu sebesar kurang lebih 32 juta; 24 juta dan 18 juta orang.

- ***TKK (Tingkat Kesempatan Kerja)***

Grafik 5.6 - TKK Kepri 2019 - 2023

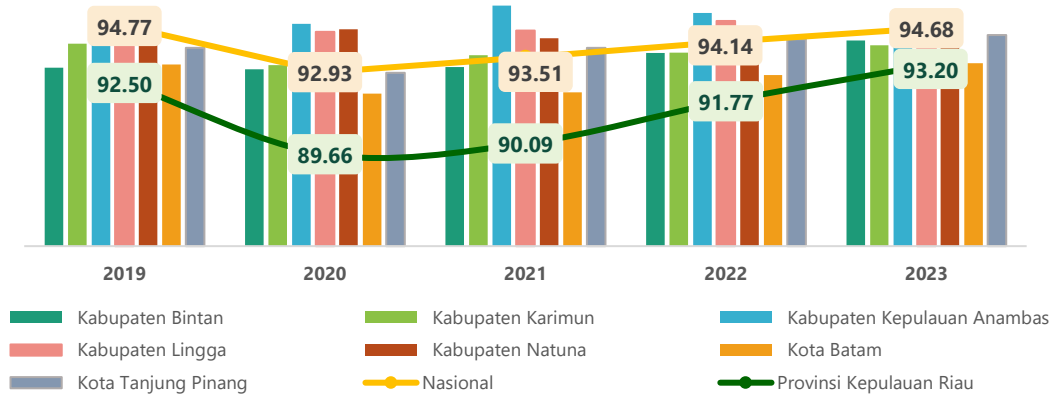

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah).

Bila melihat tingkat kesempatan kerja (TKK) pada periode 2019-2023 di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa rata-rata sebesar 93,74% ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Dibandingkan rata-rata TKK tingkat nasional sebesar 94,01%, rata-rata TKK Provinsi Kepri lebih rendah sebesar 0,27%.

Nilai TKK paling rendah sebesar 88,21% di tahun 2020 terjadi di kota Batam, sedangkan nilai TKK tertinggi sebesar 98,73% ada di Kab. Kepulauan Anambas pada tahun 2021. Dari nilai range sebesar 10,52% menunjukkan gap TKK antara Kabupaten/Kota di Kepri cukup dalam. Walaupun Kota Batam dikelola oleh otorita khusus yaitu BP Batam dan memiliki konsep *Free Trade Zone* (FTZ) dengan tujuan untuk menarik investor, namun angka TKK dari tahun ke tahun bukanlah yang paling tinggi. Dapat dikatakan bahwa kesempatan kerja yang ada di Kota Batam selalu meningkat dengan pembangunan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh Pemerintah Pusat sebagai prioritas nasional, diikuti dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang berdatangan dari luar kota Batam.

Hal ini berbanding terbalik dengan fenomena di Kab Kepulauan Anambas yang memiliki rata-rata TKK cukup tinggi yaitu 97,47% artinya penduduk usia 15 s.d 64 tahun yang bekerja sebesar 97,47% dibandingkan total penduduk usia angkatan kerjanya dimana jenis pekerjaan sebagai nelayan mendominasi mata pencaharianmayoritas penduduk kep. Anambas. Bila melihat standar deviasi TKK sebesar 2,65% lebih kecil dibanding rata-rata sebesar 93,74% mengindikasikan variasi data sangat kecil antar Kabupaten/Kota.

- ***Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan***

Tabel 5.3 - Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan Wilayah Kepri

Formula	Belum Tamat SD		SD		SLTP		SMA		SMK		Diploma I/II/III		Universitas	
	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
Mean	10.817	17.858.211	19.185	33.076.621	18.088	23.246.831	44.073	24.336.216	30.131	15.330.091	6.845	3.442.300	19.057	12.677.504
Minimum	3.684	15.216.762	4.210	31.594.947	1.822	22.784.829	3.310	22.686.018	560	13.915.771	405	3.312.508	1.791	11.841.368
Maximum	34.122	19.734.690	74.810	34.742.771	86.694	23.724.640	258.486	26.422.045	201.274	16.858.755	41.020	3.500.739	100.095	13.359.079
Range	30.438	4.517.928	70.600	3.147.824	84.872	939.811	255.176	3.736.027	200.714	2.942.984	40.615	188.231	98.304	1.517.711
Median	8.614	18.152.041	12.530	32.884.043	10.359	23.276.159	19.244	24.340.021	8.150	15.046.419	2.492	3.463.379	6.554	12.481.269
Kurtosis	5	- 2	3	- 3	3	- 1	3	1	3	- 0	3	4	3	- 2
Skewness	2	- 0	2	0	2	0	2	1	2	0	2	- 2	2	0

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah).

Kemudian, bila dilihat dari tingkat Pendidikan, angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan periode 2018-2022 pada Prov. Kepri dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah tenaga kerja yang menamatkan pendidikan tinggi di level Diploma dan Universitas sebanyak 2.037.640 orang, berkontribusi sebesar 12 persen dari rata-rata jumlah tenaga kerja level nasional yaitu 16.119.805 orang; yang menamatkan SMA dan SMK sebanyak 5.023.217 orang atau sebesar 12,6 persen dari jumlah tenaga kerja level nasional yaitu 39.666.307 orang; dan dibawah tingkat SMA sebanyak 7.091.975 orang atau porsi sebesar 9 persen dari rata-rata tenaga kerja level nasional yaitu 74.181.664 orang.

5.2.1.3 Analisis Dampak Belanja Pemerintah terhadap Indikator Kualitas SDM

Grafik 5.7 - DAK Fisik Pendidikan (Rp Miliar) Tahun 2023

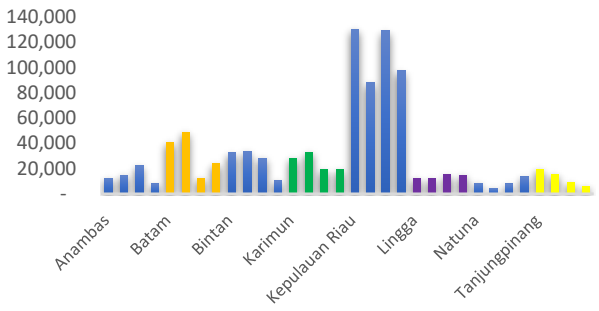

Sumber: Omspan TKD, 2024 (diolah).

Grafik 5.8 - DAK Non Fisik Pendidikan (Rp Miliar) Tahun 2023

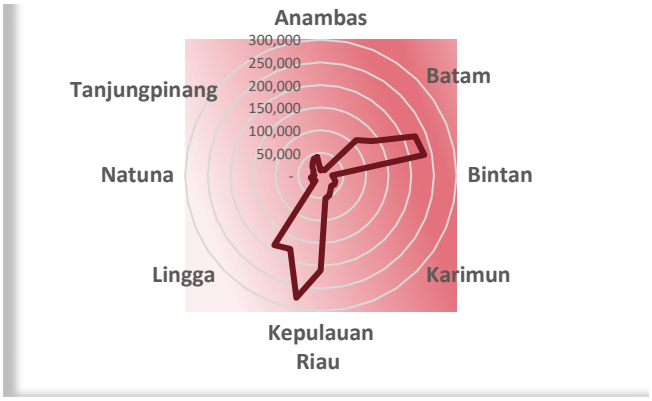

Sumber: Omspan TKD, 2024 (diolah).

Grafik 5.9 - Belanja K/L KRO SDM (Rp Miliar) Tahun 2023

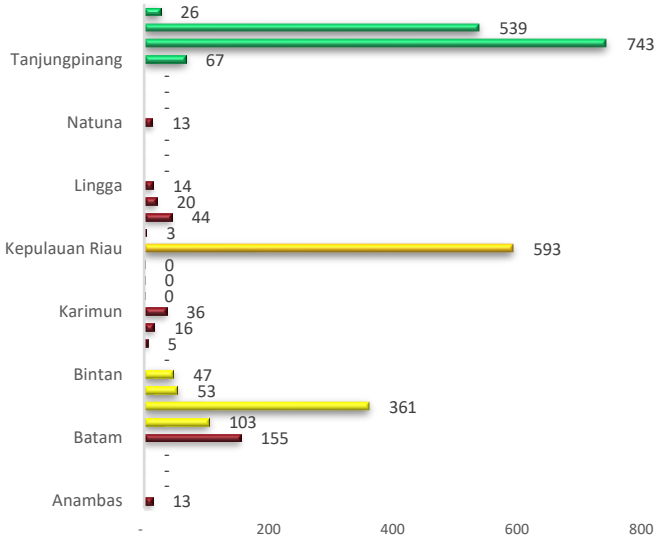

Sumber: Dit PA, 2024 (diolah).

- ***Analisis Scatter Plot***

DAK Fisik Bidang Pendidikan, DAK Non Fisik Bidang Pendidikan, dan Belanja K/L KRO SDM Tahun 2023 terhadap IPM, RLS, dan HLS di Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 5.10 - Analisis Scatter Plot Terhadap IPM

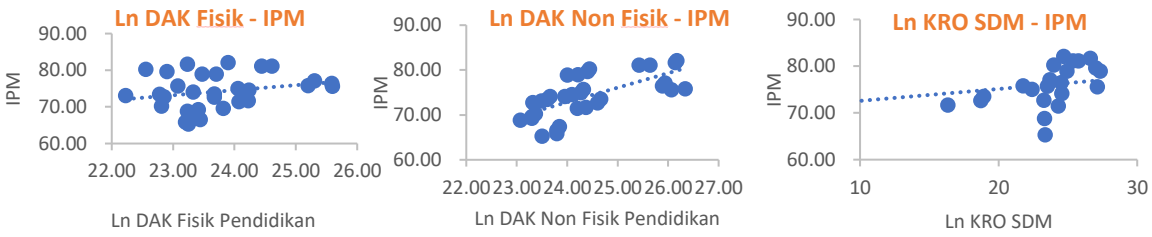

Sumber: Omspan TKD, Dit PA, dan BPS Kepri, 2024 (diolah).

Dari *scatter plot* diatas, **hubungan antara DAK Fisik, DAK Non Fisik Pendidikan dan Belanja PP KRO SDM terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hubungan positif,** artinya kenaikan delta DAK Fisik, DAK Non Fisik dan KRO SDM akan meningkatkan poin IPM.

Catatan:

Delta digunakan untuk mengukur perubahan elastisitas suatu variabel terhadap variabel lainnya. Hal ini dikarenakan data dibentuk menggunakan log natural (ln) sehingga interpretasi dijelaskan dengan

Grafik 5.11 - Analisis Scatter Plot Terhadap RLS

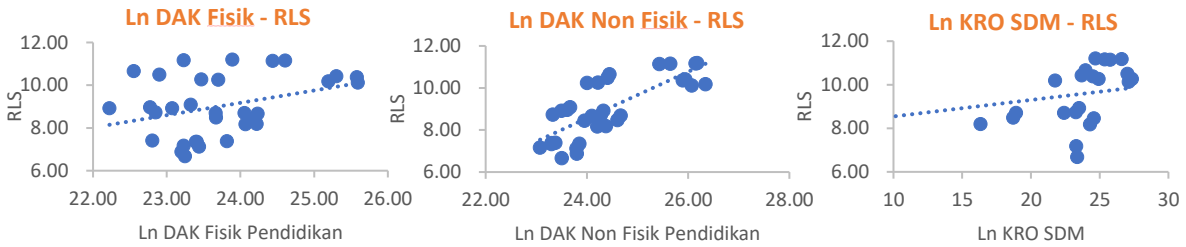

Sumber: Omspan TKD, Dit. PA, dan BPS Kepri, 2024 (diolah).

Hubungan antara DAK Fisik, DAK Non Fisik Pendidikan dan Belanja PP KRO SDM terhadap **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)** menunjukkan hubungan **positif**, artinya kenaikan delta DAK Fisik, DAK Non Fisik dan KRO SDM akan meningkatkan poin RLS.

Grafik 5.12 - Analisis Scatter Plot Terhadap HLS

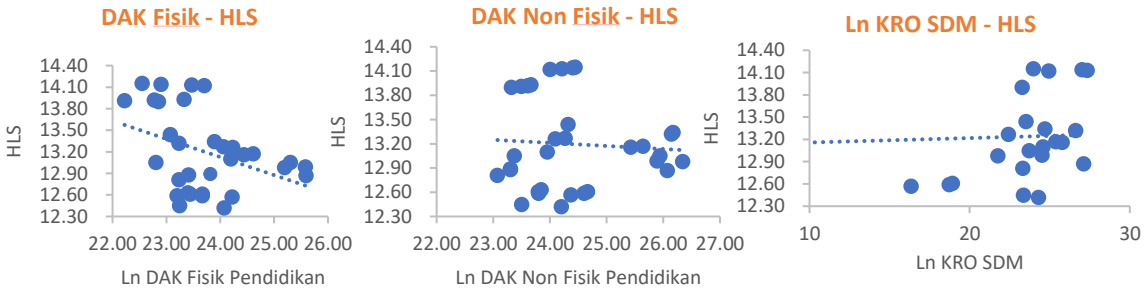

Sumber: Omspan TKD, Dit. PA, dan BPS Kepri, 2024 (diolah).

Dari ketiga *scatter plot* diatas, **hubungan antara DAK Fisik, DAK Non Fisik Pendidikan dan Belanja PP KRO SDM terhadap Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan hubungan positif,** artinya kenaikan delta DAK Fisik, DAK Non Fisik dan KRO SDM akan meningkatkan poin HLS.

- ***Analisis Regresi Korelasi (Panel Data): Random Effect Model dan Fixed Effect Model***

Atas hubungan DAK Fisik Bidang Pendidikan, DAK Non Fisik Bidang Pendidikan, dan Belanja K/L KRO SDM Tahun 2023 terhadap IPM, RLS, dan HLS di Provinsi Kepulauan Riau.

Metode: *Panel Data Fixed Effect – Random Effect Model*

Periode: 4 tahun, 2020-2023

Observasi: 32 (7 Kabupaten/Kota dan 1 Provinsi Kepulauan Riau)

Analisis *fixed effect* memperlakukan faktor-faktor yang tidak diamati sebagai variabel tetap, sementara analisis *random effect* memperlakukan faktor-faktor tersebut sebagai variabel acak. Bagaimana cara memilihnya? Tergantung karakteristik data, tujuan penelitian dan hasil dari *Hausman test*.

Dampak Belanja Pemerintah (TKD dan Belanja K/L) terhadap IPM

$$IPM_{it} = \alpha + \beta_1 DAK\ Fisik_{it} + \beta_2 DAK\ Non\ Fisik_{it} + \beta_3 Belanja\ KRO\ SDM_{it} + e_i$$

Method: Fixed Effect Tests

Dependent Variable: IPM

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-stat	P-value
ln DAK Fisik	0,2311	0,0905	2,5499	0,0165
ln DAK Non Fisik	0,3739	0,0873	4,2835	0,0002
ln KRO SDM	0,0134	0,0059	2,2677	0,0313
constant	3,5499	1,7968	1,9756	0,0581

R-squared	0,6185
Adjusted R-square	0,5776
F-statistic	15,1337
Prob (F-statistic)	0,000005

Total panel (balanced) observations: 32
Periods included : 4
Sample : 2020-2023

Pengaruh Transfer ke Daerah (TKD) berupa belanja DAK Fisik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) positif dan signifikan secara statistik. Besaran pengaruh kenaikan delta sebesar Rp1 DAK Fisik akan meningkatkan 0,2 poin IPM.

Pengaruh belanja DAK Non Fisik berupa BOS dan BOP terhadap IPM menunjukkan hasil positif dan signifikan secara statistik, artinya kenaikan delta belanja DAK Non Fisik akan meningkatkan 0,3 poin IPM

Pengaruh belanja PP KRO SDM juga positif dan signifikan <5% terhadap IPM, artinya kenaikan delta belanja PP KRO SDM sebesar Rp1 akan meningkatkan 0,01 poin IPM.

Dampak Belanja Pemerintah (TKD dan Belanja K/L) terhadap RLS

$$RLS_{it} = \alpha + \beta_1 DAK\ Fisik_{it} + \beta_2 DAK\ Non\ Fisik_{it} + \beta_3 Belanja\ KRO\ SDM_{it} + e_{it}$$

Method: Fixed Effect Tests

Dependent Variable: Rata-Rata Lama Sekolah

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-stat	P-value
ln DAK Fisik	0,0824	0,0954	0,8645	0,3971
ln DAK Non Fisik	0,2851	0,2063	1,3817	0,1816
ln KRO SDM	0,0081	0,0043	1,8496	0,0785
constant	4,1461	6,7502	0,6142	0,5457

R-squared	0,9921
Adjusted R-squared	0,9884
F-statistic	265,42
Prob (F-statistic)	0,000001

Total panel (balanced) observations: 32
Periods included : 4
Sample : 2020-2023

Pengaruh Belanja DAK Fisik terhadap rata-rata lama sekolah (RLS) positif tapi tidak signifikan secara statistik yang ditunjukkan dengan *P-value* > 5%

Pengaruh DAK Non Fisik terhadap RLS juga positif namun tidak signifikan secara statistik.

Berbeda dengan kedua jenis TKD, Belanja PP KRO SDM menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik di level signifikan 10%. Kenaikan delta Rp1 belanja KRO SDM akan meningkatkan 0,0081 tahun RLS di Kab/Kota lingkup Prov. Kepri.

Dampak Belanja Pemerintah (TKD dan Belanja K/L) terhadap HLS

$$HLS_{it} = \alpha + \beta_1 DAK\ Fisik_{it} + \beta_2 DAK\ Non\ Fisik_{it}$$

Method: Random Effect Tests

Dependent Variable: Harapan Lama Sekolah

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-stat	P-value
ln DAK Fisik	0,0853	0,0356	2,3987	0,0234
ln DAK Non Fisik	0,1217	0,0736	1,6527	0,1096
ln KRO SDM	0,0032	0,0016	1,9116	0,0662
constant	12,3007	2,4059	5,1126	0,0000

R-squared	0,5779
Adjusted R-squared	0,5219
F-statistic	8,5437
Prob (F-statistic)	0,000347
Total panel (balanced) observations: 32	
Periods included : 4	
Sample : 2020-2023	

Pengaruh Belanja TKD jenis DAK Fisik terhadap harapan lama sekolah (HLS) positif dan signifikan secara statistic (P value<5%), artinya kenaikan DAK Fisik sebesar Rp1 akan meningkatkan 0,08 tahun harapan lama sekolah penduduk kab/kota di Kepri.

Pengaruh DAK Non fisik positif terhadap HLS namun tidak signifikan secara statistik.

Konsisten dengan hasil dampak belanja PP KRO SDM terhadap RLS, belanja PP KRO SDM terhadap HLS juga positif dan signifikan secara statistik walaupun ukurannya sangat kecil yaitu 0,0032 poin.

5.2.2 Upaya Peningkatan Investasi

Kondisi Infrastruktur Kemantapan Jalan

Grafik 5.13- Kondisi Infrastruktur Kemantapan Jalan 2018 - 2022

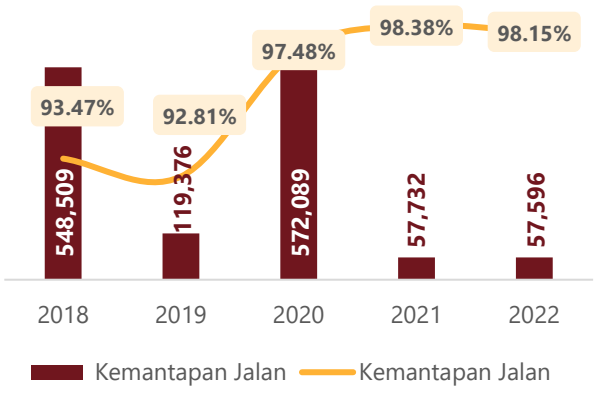

Sumber: Kementerian PUPR, 2024 (diolah).

Pengukuran kemantapan jalan bertujuan untuk mengukur jalan mantap provinsi (data kabupaten tidak disediakan Kementerian PUPR) dan nasional yaitu panjang jalan yang dalam kondisi baik dan sedang.

Secara rata-rata selama periode 2018-2022, sepanjang 271.060 km jalan mantap provinsi di Prov. Kepri, jumlah ini sangatlah kecil bila dibandingkan dengan jalan mantap nasional sepanjang 2.801.926 km. Bila ditelusuri nilai minimum jalan mantap provinsi sepanjang 57.596 km merupakan penambahan pembangunan jalan di tahun 2021 pada Prov. Kepri dan terpanjang yaitu 572.089 km di tahun 2020. Di lain sisi, rata-rata persentase jalan mantap Provinsi Kepri adalah 96,06 persen, di atas persentase rata-rata jalan mantap nasional yaitu 93,14 persen. Range antara panjang jalan minimum dan maksimum baik jalan mantap provinsi maupun nasional menunjukkan angka 5,57 persen dan 6,3 persen. Hal ini mengindikasikan kualitas jalan yang masih baik selama periode 5 tahun pengukuran yang terlihat dari kecilnya persentase *range* jalan mantap baik provinsi maupun nasional.

Kondisi Upah Minimum Tenaga Kerja

Grafik 5.14 - Kondisi Upah Minimum Tenaga Kerja 2018 - 2022

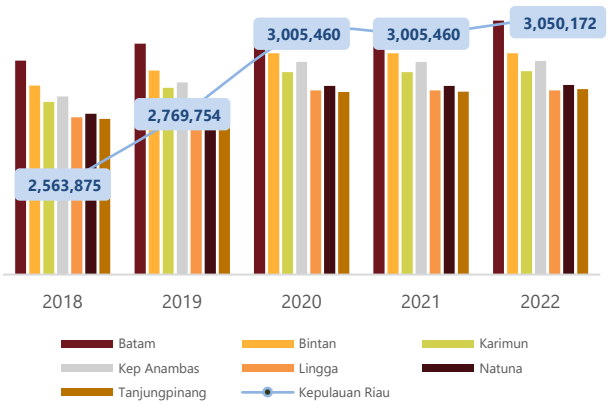

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik selama tahun 2018-2022 rata-rata (*mean*) upah minimum tenaga kerja prov. Kepri sebesar Rp3.198.409,- dengan *range* terendah sebesar Rp2.563.875 (UPM Prov.Kepri) dan tertinggi sebesar Rp4.186.359 (UPM Kota Batam). *Gap* upah minimum tenaga kerja diantara 8 kabupaten/kota lingkup Prov. Kepri cukup lebar yaitu sebesar Rp1.622.484. Hal ini menunjukkan tingkat kemakmuran tenaga kerja yang cukup jauh antara kota Batam dan kabupaten lainnya di Prov. Kepri. Keberadaan industri, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pemberian kekhususan pada kota Batam menjadi alasan perbedaan yang cukup dalam antara UPM Kota Batam dengan kabupaten/kota lainnya di Prov. Kepri.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

Grafik 5.15 - Indeks Kemahalan Konstruksi 2018 - 2022

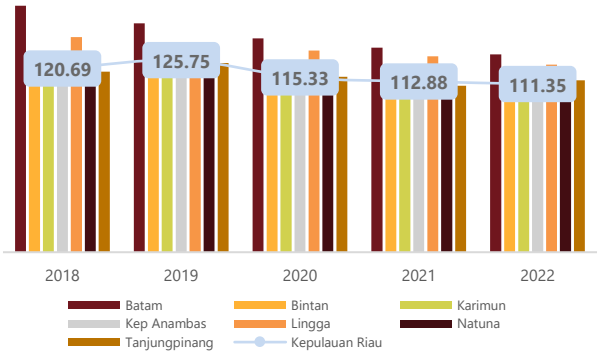

Sumber: BPS Kepri, 2024 (diolah).

IKK pada Prov. Kepri rata-rata sebesar 122 poin indeks dengan nilai minimum adalah 107 poin (Kab Natuna) dan maksimum sebesar 159 poin (Kota Batam) sehingga menimbulkan *range* yang cukup dalam sebesar 52 poin indeks. Indeks ini bertujuan "untuk mengukur tingkat kemahalan bangunan konstruksi suatu daerah, semakin tinggi angka IKK di suatu daerah maka semakin tinggi biaya yang diperlukan untuk mendirikan sebuah bangunan di daerah tersebut". Secara rata-rata IKK Kabupaten/kota di Prov. Kepri menunjukkan nilai cukup rendah yaitu 122 poin dibandingkan beberapa kabupaten/kota di pulau Papua dan IKK Kepri adalah yang paling tinggi dibandingkan IKK kabupaten/kota di provinsi lingkup Pulau Sumatera lainnya.

5.2.3 Pengaruh Kualitas SDM dan Tingkat Investasi terhadap Tingkat Pengangguran

5.2.3.1 *Structural Equation Modeling* (SEM)- Pengaruh Belanja Pemerintah, Indikator SDM dan Investasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau

Dalam analisis untuk menilai pengaruh indikator kualitas SDM dan investasi terhadap indikator pengangguran di Provinsi Kepri, digunakan metodologi *Structural Equation Modeling* (SEM). Analisis SEM digunakan untuk membangun dan menguji model statistik dalam bentuk model-model sebab-akibat. Analisis SEM memadukan analisis regresi, faktor, dan jalur untuk secara bersama-sama mengevaluasi hubungan antara variabel laten, menilai bobot dari indikator-indikator variabel laten, dan menyusun model jalur yang menggambarkan hubungan di antara variabel laten tersebut.

Metode SEM dipilih karena memiliki kemampuan analisis dan prediksi yang lebih baik dibandingkan analisis jalur dan regresi berganda karena analisis SEM dapat menganalisis lebih dalam terhadap variabel atau konstruk yang diteliti (Haryono, 2012). Metode SEM sangat cocok digunakan dalam penelitian variabel multivariat, dimana banyak variabel yang diukur secara bersamaan pada suatu individu (Kline, 2015). SEM merupakan penyempurnaan dalam menjawab kelemahan dan kebuntuan yang dihadapi metode multivariat generasi sebelumnya, yaitu analisis jalur dan regresi berganda (Haryono, 2012).

- ***Pemilihan Variabel***

Dalam pembentukan model ini akan dibentuk 4 variabel utama, yaitu 1) Belanja Pemerintah, 2) Indikator SDM, 3) Investasi dan 4) Indikator tingkat pengangguran.

Gambar 5.2. Variabel Pembentukan Model SEM

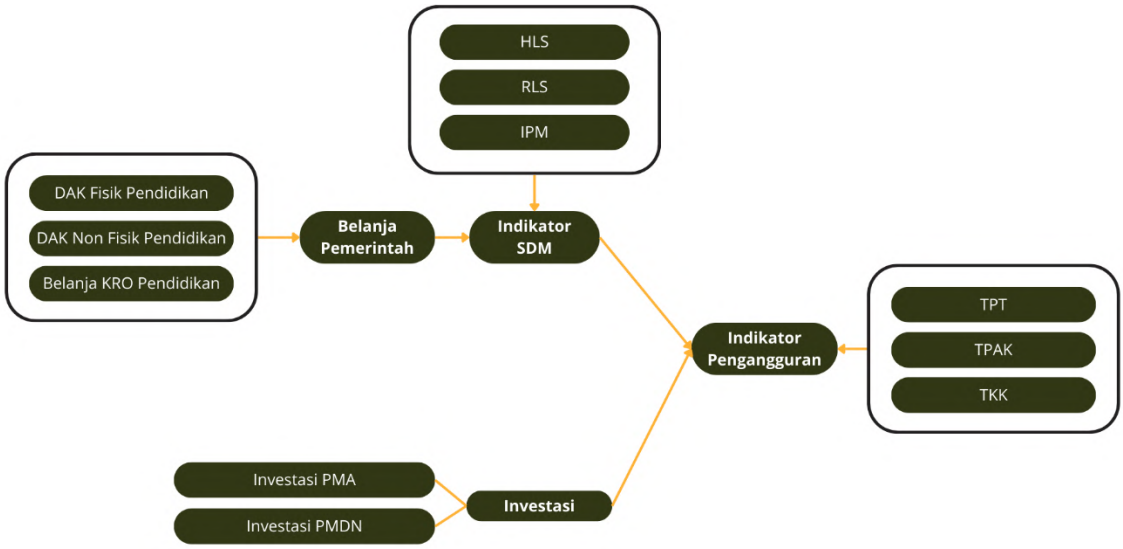

Sumber: Dit. PA, Omspan TKD, dan BPS Kepri, 2024 (diolah).

- ***Uji Validitas***

Berdasarkan hasil uji validitas *convergent validity*, terdapat beberapa variabel yang dilakukan eliminasi, karena memiliki nilai *loading factor* < 0,50, yaitu Belanja DAK Fisik, HLS dan Investasi PMA. Sehingga variabel akhir yang digunakan yaitu, Belanja DAK Non Fisik dan Belanja KRO Pendidikan pada variabel Belanja Pemerintah; RLS, dan IPM pada Indikator SDM; Investasi PMDN pada Investasi; dan TPAK, dan TPT pada Indikator Pengangguran.

- ***Inner Model Evaluation***

Gambar 5.3. Pemodelan SEM Menggunakan Smart PLS

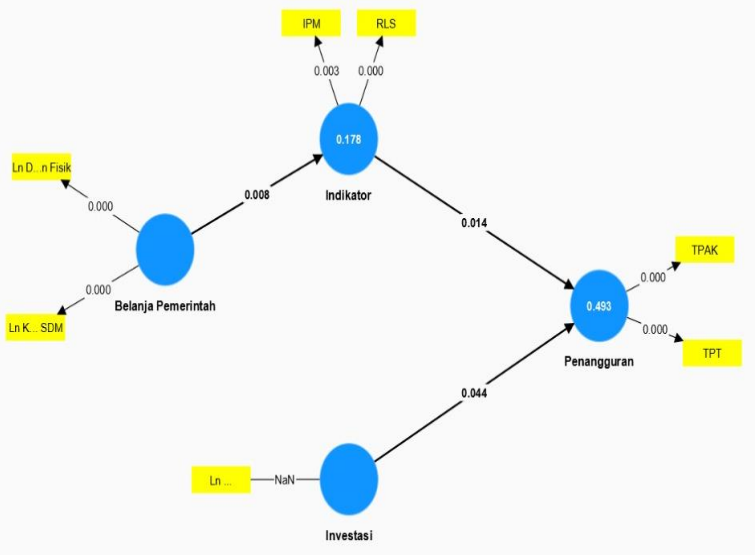

Sumber: Dit. PA, Omspan TKD, dan BPS Kepri, 2024 (diolah).

Berdasarkan hasil pembentukan model SEM menggunakan variabel-variabel sebagaimana dimaksud. Dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Variabel Belanja Pemerintah terhadap Indikator Kualitas SDM memiliki *p-value* sebesar 0,008. Karena nilai *p-value* < 0,05 maka hipotesis diterima, bahwa Belanja Pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap Indikator Kualitas SDM.

2. Indikator Kualitas SDM terhadap Indikator Pengangguran memiliki *p-value* sebesar 0,014. Karena nilai *p-value* < 0,05 maka hipotesis diterima, bahwa Indikator Kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap Indikator Pengangguran.

3. Investasi terhadap Indikator Pengangguran memiliki *p-value* sebesar 0,044. Karena nilai p-value < 0,05 maka hipotesis diterima, bahwa Investasi berpengaruh signifikan terhadap Indikator Pengangguran.

Nilai evaluasi *inner model* secara detail melalui tabel *path coefficients*, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5.4 - Path Coefficients Hasil Pemodelan Smart PLS

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T-Statistics (|O/STDEV|)	P-values
Belanja Pemerintah -> Indikator SDM	0,422	0,48	0,159	2,655	0,008
Indikator SDM -> Indikator Pengangguran	0,421	0,452	0,171	2,456	0,014
Investasi -> Indikator Pengangguran	-0,428	-0,384	0,213	2,012	0,044

Sumber: Smart PLS, 2024.

Berdasarkan tabel *path coefficients,* Belanja Pemerintah terhadap Indikator Kualitas SDM memiliki nilai p-value 0,008 dan t-statistics 2,655. Karena nilai p-value < 0,05 dan t-statistics > 1,99, maka hipotesis diterima, bahwa Belanja Pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap indikator kualitas SDM, dengan arah positif sesuai nilai *original sample* sebesar 0,422. Hal ini berarti, setiap peningkatan Belanja Pemerintah, berdampak positif pada peningkatan Indikator Kualitas SDM. Dalam hal ini, Belanja DAK Non Fisik dan Belanja KRO Pendidikan berdampak pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) masyarakat di wilayah Kepri.

Selanjutnya Indikator Kualitas SDM terhadap Indikator Pengangguran memiliki nilai p-value 0,014 dan t-statistics 2,456. Karena nilai *p-value* < 0,05 dan *t-statistics* > 1,99, maka hipotesis diterima, bahwa Indikator Kualitas SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap Indikator Pengangguran, dengan arah positif sesuai nilai original sampel sebesar 0,421. Hal ini berarti, setiap peningkatan Indikator Kualitas SDM, berdampak positif pada peningkatan Indikator Tingkat Pengangguran, berdampak pada peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masyarakat di wilayah Kepri. Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya Cahyo (2016), dan Ramiayu (2016), bahwa RLS berpengaruh signifikan positif terhadap pengangguran terbuka. Kondisi ini disebabkan karena karakteristik pengangguran di wilayah Kepri yang didominasi oleh lulusan SMP dan SMA.

Banyak pendatang dari berbagai wilayah yang merupakan lulusan SMA mencari pekerjaan di Kota Batam, tidak hanya itu pencari kerja tersebut kemudian mendaftarkan diri sebagai warga Kota Batam untuk mempermudah pencarian pekerjaan. Sehingga meningkatkan jumlah angkatan kerja di Kota Batam, yang merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di wilayah Kepri. Meningkatnya angkatan kerja ini akan berdampak juga pada peningkatan TPAK di Kepri. Banyaknya angkatan kerja yang tersedia, belum diimbangi oleh *skill* yang dibutuhkan oleh perusahaan di Kota Batam, sehingga terjadi *mismatch*.

Investasi terhadap Indikator Pengangguran memiliki nilai p-value 0,044 dan t-statistics 2,012. Karena nilai *p-value* < 0,05 dan *t-statistics* > 1,99, maka hipotesis diterima, bahwa Investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap Indikator Pengangguran, dengan arah negatif sesuai nilai *original sample* sebesar -0,428. Hal ini berarti, setiap peningkatan Investasi, berdampak pada penurunan Indikator Pengangguran. Dalam hal ini, berdampak pada penurunan TPT dan TPAK di wilayah Kepri.

- ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan *Structural Equation Model* di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Pemerintah pada sektor pendidikan, seperti DAK Non Fisik dan Belanja KRO Pendidikan pada K/L berdampak signifikan positif terhadap peningkatan kualitas SDM, yang ditunjukkan dengan peningkatan IPM dan RLS.

Selanjutnya Indikator Kualitas SDM tersebut berdampak signifikan positif pada peningkatan TPT dan TPAK di wilayah Kepri. Sehingga setiap peningkatan kualitas SDM,

berdampak pada peningkatan TPT dan TPAK, kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh karakteristik pengangguran di wilayah Batam yang didominasi oleh lulusan SMA, namun belum memiliki kualifikasi *skill* yang sesuai dengan kebutuhan industri. Oleh karena itu, pada wilayah dengan tingkat IPM dan pendidikan yang sudah tinggi, tingkat pendidikan tidak menjadi satu-satunya faktor pendukung dalam memperoleh pekerjaan. Pencari kerja perlu untuk memiliki *skill* khusus untuk dapat bersaing dengan pencari kerja lain dengan tingkat pendidikan yang sama.

Selain itu, banyaknya pencari kerja dari luar daerah yang mendaftarkan diri menjadi warga Kota Batam untuk mencari pekerjaan juga menjadi faktor tingginya angkatan kerja di Kota Batam. Sehingga, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah preemtif untuk menanggulangi peningkatan angkatan kerja secara terus menerus yang terjadi di Kota Batam, melalui *screening* pengajuan pindah domisili yang diajukan oleh pencari kerja.

Investasi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Indikator Pengangguran, maka peningkatan investasi berdampak pada penurunan Indikator Pengangguran di Kepri. Kondisi ini sesuai dengan teori bahwa peningkatan Investasi akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang berdampak pada penurunan TPT di wilayah Kepri. Oleh karena itu, peningkatan investasi terutama yang bersumber dari PMDN perlu ditingkatkan secara terus menerus untuk meningkatkan pertumbuhan industri di Kota Batam yang didukung dengan keberadaan 4 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kepri. Investasi PMA juga perlu senantiasa dilakukan peningkatan, namun perlu diperhatikan bahwa investasi PMA terkadang diikuti dengan klausul bahwa sebagian pekerja berasal dari negara asing.

Kajian V

Problem Tree Analysis Penyaluran KUR

Penyaluran KUR yang terkontraksi merupakan gejala (*symptom*) dari masalah utama sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan alat analisis untuk mengidentifikasi permasalahan utama dari gejala yang ditunjukkan serta penyebab timbulnya gejala penyaluran KUR terkontraksi. Vasely (2008) menyatakan bahwa problem tree analysis terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian "batang" yang menunjukkan masalah utama. Kemudian terdapat bagian "akar" yang menunjukkan penyebab terjadinya masalah utama, dan terakhir bagian "cabang" yang menunjukkan efek atau konsekuensi yang terjadi akibat permasalahan tersebut. Selain dapat mengidentifikasi penyebab timbulnya permasalahan, *problem tree analysis* sekaligus mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Oleh karena itu, *problem tree analysis* merupakan alat analisis yang paling tepat untuk mengidentifikasi permasalahan, akar penyebab timbulnya permasalahan, dan dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan tersebut.

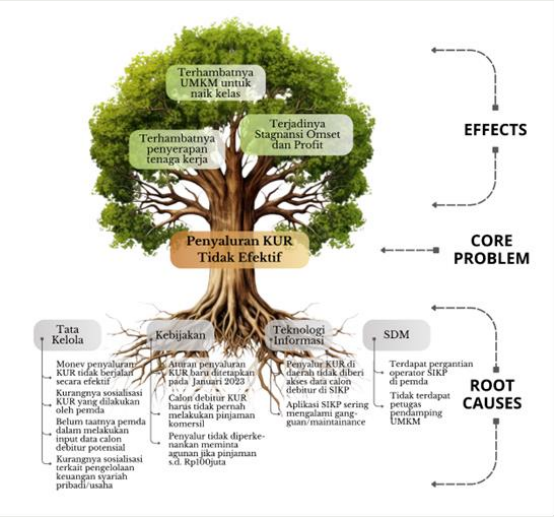

Permasalahan utama yaitu penyaluran KUR tidak efektif. Penyaluran KUR terkontraksi merupakan symptom dari permasalahan ini. Menurut Peraturan Menko Perekonoimian Nomor 1 Tahun 2022, tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR dinilai dari indikator jumlah plafon KUR yang disalurkan, tingkat kredit/pembiayaan bermasalah (*non-performing loan* atau *non-performing financing*), jumlah debitur yang menerima KUR, dan jumlah debitur yang berhasil mengalami graduasi.

Symptom penyaluran KUR tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat kontraksi penurunan jumlah plafon KUR yang disalurkan dan penurunan jumlah debitur yang menerima KUR, atau terdapat penurunan pada dua dari empat indikator untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan KUR tidak maksimal bahkan menunjukkan bahwa 50 persen indikator tudak tercapai. Selanjutnya, penyebab terjadinya masalah utama tersebut akan dianalisis lebih lanjut melalui identifikasi faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan penyaluran KUR belum efektif.

Penyebab Penyaluran KUR Tidak Efektif

Berdasarkan hasil monev, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab hingga akar permasalahan yang mengakibatkan timbulnya permasalahan utama penyaluran KUR tidak efektif. Faktor-faktor tersebut adalah tata kelola, kebijakan, teknologi informasi, dan sumber daya manusia yang dirinci sebagai berikut:

a. Monev Penyaluran KUR tidak berjalan efektif. Beberapa pemda tidak aktif melakukan monev KUR dengan pihak-pihak terkait seperti penyalur, sehingga permasalahan penyaluran tidak teridentifikasi. Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan monev KUR
b. Kurangnya sosialisasi terkait KUR kepada pelaku UMKM yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyalur KUR berdampak pada stigma negatif masyarakat terkait utang. Dari hasil monev kuisioner kepada pelaku UMKM didapat informasi bahwa sebagian besar debitur KUR mendapatkan informasi dari perbankan (55 persen) yang sebagian besar didapat saat debitur mengajukan kredit atau didatangi langsung oleh perbankan.
c. Pelaku UMKM masih merasa tidak aman dan nyaman jika memiliki utang/pembiayaan. Walaupun telah mempunyai rencana pengembangan usaha, pelaku UMKM tidak ingin mengajukan pembiayaan karena merasa tidak aman dan takut terhadap risiko tidak dapat membayar angsuran. Pelaku usaha tidak dapat mengembangkan usahanya. Belum taatnya seluruh pemda dalam melakukan input data calon debitur potensial ke aplikasi SIKP dan pemda tidak mempunyai data pelaku UMKM di wilayahnya.
d. Rendahnya literasi dan inkluasi keuangan masyarakat karena kurangnya sosialisasi terkait pengelolaan keuangan pribadi/usaha. Masyarakat masih awam terhadap inklusi keuangan, sehingga belum banyak mengetahui dan menggunakan fasilitas keuangan yang dapat mengembangkan usahanya. Penyalur KUR tidak dapat melaksanakan penyaluran pada awal tahun. Penyaluran baru dapat dilaksanakan pada akhir Februari hingga awal Maret. Kemenko Perekonomian menetapkan ketentuan perubahan terkait penyaluran KUR yang baru ditetapkan pada tanggal 27 Januari 2023 dan baru diadakan sosialisasi ketentuan tersebut pada Februari 2023.
e. Penyalur KUR kesulitan untuk mendapatkan debitur karena karakteristik pelaku UMKM yang dapat menerima fasilitas KUR semakin sempit. Terdapat ketentuan bahwa calon debitur KUR belum pernah menerima kredit modal atau investasi komersil, pelaku UMKM pada sektor perdagangan hanya dapat menerima fasilitas KUR maksimal sebanyak dua kali, dan penyalur tidak diperkenankan meminta agunan tambahan, selain agunan pokok yang berupa usaha pelaku UMKM untuk skema penyaluran KUR mikro dan supermikro.
f. Penyalur KUR di daerah tidak dapat mengakses langsung SIKP yang dikembangkan oleh DJPb sehingga tidak dapat mengakses data debitur potensial yang diinput oleh pemda. Hal ini mengakibatkan penyalur KUR tidak mendapatkan data yang lengkap terkait pelaku UMKM dengan berbagai karakteristik. Penyalur KUR mendapatkan debitur dengan mendatangi secara langsung ke pasar, pertokoan, tempat usaha pelaku UMKM. Padahal terdapat pelaku UMKM yang menjalankan usaha rumahan, tidak mempunyai toko fisik. Produk dijual secara online atau dengan menitipkan produk ke toko/pasar. Data penyalur KUR dengan karakteristik tersebut dapat disediakan oleh pemda karena pemda dapat mendata seluruh pekerjaan masyarakat di wilayahnya masing-masing.
g. Aplikasi SIKP KUR beberapa kali mengalami gangguan sehingga tidak dapat digunakan. Hal ini menghambat pemda untuk melakukan input data pelaku UMKM potensial. Terdapat pergantian SDM sebagai operator pada pemda. Operator baru belum mempunyai keahlian terkait penggunaan aplikasi SIKP sehingga tidak dapat melakukan input data pelaku UMKM potensial pada aplikasi SIKP. Tidak terdapat petugas pendamping UMKM yang bertugas menyediakan data calon debitur potensial UMKM untuk diinput ke aplikasi SIKP. Petugas pendamping UMKM dibentuk dengan SK Gubernur.

KFR Tahunan 2023

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Masjid Raya Sultan Riau
Kota Tanjung Pinang

Masjid Raya Sultan Riau yang berada di Pulau Penyengat merupakan tempat ibadah sekaligus peninggalan kebudayaan melayu di Kepulauan Riau terus dijaga dan dilestarikan oleh pemerintah maupun masyarakat.

BAB VI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Kajian Fiskal Regional Provinsi Kepulauan Riau periode triwulan IV 2023 sebagai berikut:

Sasaran Pembangunan dan Tantangan Daerah

a. Terdapat 7 tujuan pembangunan daerah Kepulauan Riau (Kepri) yaitu Optimalisasi Potensi Kemaritiman, Keunggulan Wilayah, dan Keberlanjutan Lingkungan; Percepatan Pemulihan dan Peningktan Pertumbuhan Ekonomi; Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif; Penguatan Jaringan Pengamanan Sosial; Pembangunan Manusia yang unggul dan Berkarakter; Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat; dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau.

b. Tantangan pembangunan Kepri dari sisi ekonomi yaitu: sebaran investasi tidak merata dan masih terpusat di Kota Batam; optimalisasi *digital promotion* potensi dan peluang investasi; optimalisasi kemudahan perizinan Investasi menggunakan *Online Single Submission* (OSS); terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi; kuantitas dan kualitas infrastruktur belum memadai; konektivitas antarpulau dan antar kabupaten/kota; pengembangan wilayah perbatasan belum optimal; penurunan jumlah produksi perikanan budidaya; penyediaan sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya hasil laut; peningkatan penduduk usia kerja di Kepulauan Riau; dan PDRB yang tidak merata antar kabupaten/kota.

c. Tantangan sosial kependudukan yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah antara lain: penyebaran penduduk masih terkonsentrasi di Kota Batam; UHH meningkat namun HLS masih di bawah nasional; meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif; meningkatkan pemahaman pentingnya nilai-nilai kearifan lokal; ketimpangan IPM antar kabupaten/kota yang cukup tinggi; kurangnya akses pendidikan formal dan nonformal karena tantangan geografis; belum optimalnya partisipasi masyarakat untuk menempuh pendidikan menengah; gap rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota yang cukup tinggi; SPM bidang pendidikan belum mencapai target; tingginya kasus kematian ibu dan bayi serta kekurangan gizi pada balita; dan sulitnya menjangkau akses pelayanan kesehatan; serta masih rendahnya keluarga miskin yang mendapatkan bantuan.

d. Kondisi geografis Kepri yang berbentuk kepulauan memberikan tantangan tersendiri dalam pembangunan konektivitas antar daerah serta mata pencaharian masyarakatnya di mana perikanan dan pariwisata menjadi mata pencaharian utama. Potensi bencana alam dan perubahan iklim sangat berdampak pada nelayan dan masyarakat pesisir. Ketimpangan pembangunan antar pulau, transportasi yang terbatas serta infrastruktur dasar yang minim menyebabkan pergerakan ekonomi yang lambat serta kualitas ekonomi yang buruk.

e. Tantangan sebagai daerah berstatus *Free Trade Zone* yaitu adanya *master list* dinilai tidak fleksibel dan membuat proses impor menjadi lebih lama dan rumit, kesiapan SDM BP kawasan dinilai belum memadai. Dalam hal perizinan impor terdapat masalah komersialisasi pengurusan izin Nomor Induk Kepabeanan (NIK). Dalam hal perpajakan, terdapat pajak berganda dan tarif pajak yang terlalu tinggi ditambah tidak ada fasilitas perpajakan seperti tax *holiday*. Selain itu perbedaan tarif pajak (penghasilan *corporate*) antara Indonesia dan Singapura menjadi disisentif bagi investor. Kendala lain yang dihadapi adalah masalah lahan dan hambatan sosial

Analisis Ekonomi Regional

Kinerja ekonomi Kepulauan Riau tumbuh positif dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di regional Sumatera. Indikator kesejahteraan rata-rata mengalami peningkatan. Capaian masing-masing indikator sebagai berikut:

a. Pertumbuhan ekonomi Kepri triwulan IV 2023 tumbuh positif sebesar 4,45 persen (*yoy*) dan menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di regional Sumatera.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) triwulan IV 2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menyentuh angka Rp89,97 triliun dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp52,72 triliun.

c. Akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kepri didominasi oleh komponen **Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** atau investasi dengan kontribusi sebesar 44,32 persen (*yoy*) dan pertumbuhan sebesar 9,16 persen (*yoy*).

d. Pertumbuhan komponen PK-RT tumbuh sebesar 4,98 persen (*yoy*), tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan triwulan sebelumnya 2,77 persen (*yoy*).

e. Komponen Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 8,58 persen (*yoy*), tumbuh lebih tinggi dibanding periode sebelumnya 1,18 persen (*yoy*).

f. Komponen PK-LNRPT tumbuh dengan pesat di triwulan IV 2023 dengan pertumbuhan 15,82 persen (*yoy*).

g. Net ekspor pada periode triwulan IV 2023 tumbuh negatif 17,85 persen (*yoy*).

h. Kinerja **Lapangan Usaha Konstruksi** tumbuh 11,07 persen (*yoy*) dan menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi.

i. Peningkatan kinerja lapangan usaha juga didorong oleh **Industri Pengolahan** dengan kontribusi terhadap PDRB triwulan IV yaitu 40,23 persen (*yoy*).

j. Kinerja lapangan usaha **Pertambangan dan Penggalian** terus tumbuh membaik sejalan dengan pengoperasian sumur produksi baru migas di Kab. Natuna dan Kepulauan Anambas.

k. Tekanan inflasi pada 2 kota gabungan (kota Batam dan kota Tanjung Pinang) di Kepri pada bulan Desember 2023 sebesar 2,76 persen (*yoy*) dan 0,44 persen (*mtm*).

l. Berdasarkan data IPM dengan metode perhitungan baru, angka IPM Kepri pada tahun 2023 dengan tingkat IPM tertinggi ke-tiga Nasional sebesar 79,08 dan tumbuh sebesar 0,76 persen (yoy).

m. Per bulan Maret 2023, Angka Kemiskinan di Provinsi Kepri sebesar 142,50 ribu jiwa atau 5,69 persen dari total penduduk Kepri.

n. Gini Ratio Kepri per Maret 2023 sebesar 0,34, meningkat 0,015 persen dibandingkan September 2022 sebesar 0,325, artinya ketimpangan pengeluaran meningkat pada periode Maret 2023.

o. Capaian indikator ketenagakerjaan di Provinsi Kepri per Agustus 2023 yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 6,80 persen; angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 68,68 persen; Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) 93,20 persen; Tingkat Persentase Pekerja Penuh 80,99 persen; Tingkat Persentase Pekerja Paruh Waktu 14,21 persen; Tingkat Persentase Pekerja Separuh Penganggur 4,80 persen; Tingkat Persentase Usia Muda 15-24 Tahun yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja, atau Mengikuti Pelatihan (*Not in Education, Employment or Training* – NEET) 18,10 persen.

p. NTP Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Desember 2023 adalah sebesar 104,16 dan menunjukkan pertumbuhan sebesar 0,61 persen (*yoy*) tumbuh 0,64 persen (*mtm*).

q. NTN pada Desember 2023 sebesar 103,73 mengalami penurunan sebesar 6,65 persen (*yoy*) dan 0,42 persen (*mtm*).

Analisis Fiskal Regional

a. Pelaksanaan APBN Tingkat Provinsi

APBN Provinsi Kepri mengalami penurunan target Pendapatan dan peningkatan pagu Belanja yang menyebabkan peningkatan Defisit dibandingkan tahun sebelumnya. Kebijakan defisit anggaran ditempuh pemerintah agar perekonomian

tetap tumbuh dengan mempertahankan nominal Belanja Negara yang akan memberikan stimulus bagi perekonomian Kepri.

1) APBN Kepri s.d. triwulan IV 2023 Defisit sebesar Rp7.683,11 miliar disebabkan tingginya Belanja dibandingkan Pendapatan.

2) Pendapatan Negara dan Hibah Rp12.482,73 miliar (108,45 persen dari Target), tumbuh minus 2,59 persen (yoy). Penerimaan Pajak mencapai Rp9.833,16 miliar (106,77 persen dari Target) dan PNBP Rp2.649,57 miliar (115,16 persen dari Target).

3) Belanja Negara Rp18.384,64 miliar (95,79 persen terhadap Pagu), terekspansi 20,02 persen, Belanja Pemerintah Pusat Rp9.184,64 miliar (92,79 persen terhadap Pagu) dan Belanja TKD Rp9.200,00 miliar (98,98 persen terhadap Pagu).

b. BLU Pusat memberikan kontribusi positif bagi regional Kepri, sebagai berikut:

1) BP Batam sebagai pengelola Kawasan Batam memiliki peran sentral dalam pembangunan di Kota Batam yang menjadi pusat Provinsi Kepri, baik ekonomi, pendidikan, industri dll. Pengembangan industri pada Kawasan FTZ Kota Batam dapat menyerap tenaga kerja yang banyak.

2) BLU menyumbang PNBP dominan dalam PNBP lingkup Kepri.

3) BLU Poltek Batam sebagai lembaga pendidikan, mampu menciptakan output lulusan yang dapat langsung diserap oleh industri di Batam.

4) BLU rumah sakit, baik RSAL dan RSB mampu memberikan alternatif layanan kepada masyarakat selain RSUD di lingkup Kepri. Fasilitas dan tenaga medis yang disediakan, mampu memberikan layanan yang sangat baik bagi masyarakat.

c. Sepanjang tahun 2023, penyaluran KUR sebesar Rp1.747,16 miliar kepada 26.673 debitur. Kinerja penyaluran mengalami penurunan sebesar minus 24,77 persen (*yoy*) dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.322,39 miliar. Penurunan dari sisi debitur yaitu sebesar minus 24,60 persen *(yoy*) dari tahun sebelumnya sebesar 35.376 debitur. Penyaluran KUR per skema didominasi oleh skema Kecil sebesar Rp845,26 miliar (48,38 persen) kepada 3.194 debitur; skema Mikro sebesar Rp841,32 miliar (48,15 persen) kepada 16.890 debitur dan Super Mikro sebesar Rp60,58 miliar (3,47 persen) kepada 6.589 debitur. Penyaluran KUR berdampak atau telah menjadi pengungkit pada peningkatan usaha melalui peningkatan omzet dan profit dan peningkatan kesejahteraan UMKM melalui peningkatan rata-rata pengeluaran rumah tangga.

d. Pada tahun 2023, pembiayaan UMi di Provinsi Kepulauan Riau (Prov. Kepri) telah menjangkau 9.744 debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp47,63 miliar.

Penyaluran UMi meningkat sebesar 58,58 persen (*yoy*) dan jumlah debitur UMi meningkat sebesar 43,72 persen (*yoy*). Pembiayaan UMi memberikan dampak signifikan bagi nilai keekonomian debitur.

e. Isu Strategis Pelaksanaan APBN di Daerah

Evaluasi dan tantangan atas ketercapaian output program strategis pemerintah yang didanai oleh APBN di daerah.

1) Izin prasyarat penyiapan pelaksanaan proyek dan penyiapan kondisi pra pengadaan barang dan jasa lain.
2) Kondisi cuaca dan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang menyulitkan mobilisasi orang dan barang untuk proyek fisik yang berlokasi di pulau terluar.

Permasalahan dan tantangan dalam tata Kelola dan pencapaian belanja pemerintah yang berkualitas yang di danai APBN di daerah

1) Blokir pagu *Automatic Adjusment* (blokir AA) masih menjadi kendala terbesar dalam aspek penganggaran.
2) Proses revisi yang tumpeng tindih antara revisi terpusat/eselon I dan revisi tingkat satker.
3) Ketersediaan pagu belanja pegawai yang tidak selaras dengan jumlah pegawai
4) Tambahan pagu pada triwulan II
5) Rumitnya struktur COA pada POK BLU BP Batam yang menampung kegiatan dua puluh tiga unit kerja.
6) Barang/jasa spesifik tidak selalu tersedia pada e-catalog sebagaimana terbatasnya barang yang memenuhi unsur TKDN.
7) Kebijakan internal satker, seperti pemusatan pemilihan penyedia barang/jasa pada satker BP2JK untuk seluruh satker lingkup Kementerian PUPR
8) Panjangnya administrasi bansos pada satker lingkup Kementerian Agama
9) Permasalahan dan tantangan dalam upaya akselerasi belanja APBN di daerah
10) Kualitas SDM satker yang kurang memahami ketentuan terkait batas waktu penyelesaian tagihan dan pentingnya kontrak pra DIPA sebagai bagian dari upaya percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
11) Lemahnya koordinasi internal satker menyebabkan ketidakselarasan antara progres pekerjaan/capaian output dan rencana penarikan dana.
12) Keterlambatan penerbitan juknis kegiatan khususnya pada satker DK/TP.

f. Pelaksanaan APBD Tingkat Provinsi

APBD Provinsi Kepri mengalami Defisit yang lebih rendah dari yang yang dianggarkan disebabkan realisasi Pendapatan Daerah yang melebihi Target dan Belanja Daerah yang tidak mencapai Pagu.

1) APBD Provinsi Kepri s.d. triwulan IV 2023 defisit Rp86,58 miliar, terkontraksi 21,71 persen, seiring dengan peningkatan Pendapatan Daerah.

2) Pendapatan Daerah Rp13.909,60 miliar (101,12 peresen dari Pagu), tumbuh 13,42 persen (yoy). Masih didominasi oleh Pendapatan dari Dana Transfer sebesar Rp9.222,42 miliar (persen dari Target), Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp4.656,20 miliar (108,72 persen dari Target).

3) Belanja Daerah Rp13.996,19 miliar (96,98 persen dari Pagu), tumbuh 13,11 persen (yoy), ditopang oleh tumbuhnya seluruh komponen Belanja Daerah, yaitu Belanja Operasional yang tumbuh sebesar 7,84 persen dengan realisasi Rp10.500,19 miliar (98,14 persen dari Pagu), Belanja Modal sebesar 3,43 persen dengan realisasi Rp2.170,54 miliar (89,36 persen dari Pagu), dan Belanja Tidak Terduga sebesar 52,90 persen dengan realisasi Rp9,27 miliar (9,96 persen dari pagu), dan Transfer sebesar 146,77 persen dengan realisasi Rp1.316,19 miliar (108,63 persen dari Pagu).

4) Pada tahun 2023, pemda telah menganggarkan Pembiayaan sebesar Rp676,87miliar, dengan Penerimaan Pembiayaan Rp761,21 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Rp84,34 miliar. Realisasi Pembiayaan sebesar Rp894,27 miliar (132,12 persen dari Pagu), dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp963,16 miliar (126,53 persen dari Pagu) dan Pengeluaran Pembiayaan Rp68,90 miliar (81,69 persen dari Pagu).

g. Sampai dengan akhir tahun 2023, tercatat Provinsi Kepri memiliki 25 entitas yang telah ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Dari 26 BLUD yang ada, terdapat 17 BLUD yang bergerak di Bidang Kesehatan, 5 BLUD di Bidang Pendidikan, 1 BLUD Bidang Pengelola Dana, dan 3 BLUD di bidang Layanan Lainnya. Permasalahan yang dialami oleh BLUD lingkup Prov. Kepri adalah pengelola keuangan BLUD yang belum memahami pengelolaan keuangan BLUD dan aplikasi e-BLUD, pergantian pengelola keuangan, kekurangan SDM atau tenaga kerja serta terdapat BLUD yang belum menerapkan peraturan terkait Dewan Pengawas, pembayaran insentif berbasis kinerja, dan investasi jangka panjang.

h. Isu strategis pelaksanaan APBD

Evaluasi dan tantangan atas ketercapaian output program strategis pemda yg didanai APBD

1) OPD penanggungjawab kegiatan lambat dalam menyampaikan laporan realisasi dan mengajukan reviu kepada APIP.

2) Kurangnya koordinasi antara OPD dengan BPKAD dan Inspektorat Provinsi.

3) Terdapat status lahan yang belum clear sehingga DAK Fisik untuk bidang/subbidang Pendidikan tidak dapat terserap optimal.

4) Pergantian atau reshuffle pejabat yang diiringi dengan pergantian operator dan pelaksana kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat.

5) Letak geografis yang berbentuk kepulauan dengan jarak yang jauh dan membutuhkan waktu untuk ditempuh dengan perjalanan via kapal sehingga menyulitkan dalam mobilisasi orang dan barang terlebih untuk proyek fisik di pulau terluar

6) Cuaca ekstrem dan rentan bencana alam (longsor, angin kencang di musim penghujan dan ombak tinggi) sehingga dapat menghambat pengerjaan proyek fisik misalnya terkait proyek fisik pembangunan jalan dan transportasi perairan.

Permasalahan dan tantangan tata kelola dan pencapaian belanja daerah berkualitas yg didanai APBD

1) Sistem yang digunakan dalam proses menjalankan APBD belum sepenuhnya digital, berbeda dengan APBN.

2) Kurangnya jumlah SDM yang memahami tata kelola penganggaran, belanja, dan pertanggungjawaban APBD

Permasalahan dan tantangan dalam upaya akselerasi belanja APBD

1) Tahapan penyiapan APBD mulai dari evaluasi oleh Kemendagri, rapat pembahasan dengan DPRD, penetapan APBD, input ke SIPD, pembagian DPA, penyiapan SK dan dokumen administratif, hingga realisasi APBD memakan waktu yang cukup lama hingga bulan Maret tahun anggaran tersebut, salah satunya terkendala sistem yang belum sepenuhnya digital seperti APBN.

2) OPD masih lambat dalam menyampaikan dokumen realisasi penyerapan dana dan capaian output DAK Fisik periode sebelumnya sehingga DAK Fisik tahap selanjutnya tidak dapat segera disalurkan.

i. Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian

Pada tahun 2023 secara konsolidasi terdapat realisasi Pendapatan sebesar Rp17.141,67 miliar dengan *growth* 2,87 persen (yoy). Realisasi Belanja dan Transfer Konsolidasi sebesar Rp23.108,14 miliar dengan *growth* 19,93 persen (yoy). Atas realisasi pendapatan dan belanja ini terdapat Defisit sebesar Rp5.966,47 miliar. Terdapat realisasi Pembiayaan sebesar Rp894,27 miliar dengan *growth* 24,49 persen (yoy) yang terbagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sehingga pada akhirnya terdapat SiKPA sebesar minus Rp5.072,20 miliar.

Pengembangan Ekonomi Daerah: Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Tingkat Wilayah

a. Kendala yang dialami oleh satuan kerja pada aspek penganggaran yaitu DIPA yang baru terbit pada semester II, kegiatan yang baru dapat dilaksanakan di bulan November atau yang baru dapat diselesaikan tahun 2024, penyesuaian jadwal kegiatan, blokir anggaran, revisi anggaran, dan tidak tercapainya target.

b. Kendala yang dialami pada aspek eksekusi kegiatan yaitu lokasi pelaksanaan kegiatan di daerah terluar dan sulit mobilisasi orang dan barang, cuaca ekstrem, kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan membutuhkan waktu yang panjang, banyaknya stakeholder yang terlibat dalam kegiatan, penolakan dari target kegiatan, dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada kawasan tertentu.

c. Kendala yang dialami pada aspek SDM yaitu keterbatasan mentor dan fasilitator, waktu pelatihan yang panjang, pergantian pejabat keuangan, terbatasnya jumlah SDM.

d. Kendala dari aspek pengadaan barang dan jasa (PBJ) yaitu penyedia barang dan jasa yang terbatas, kontrak kegiatan baru ditandatangani bulan Oktober, permasalahan administratif dan kurang kooperatifnya jasa konsultan dalam proses pembayaran atas tagihan APBN.

e. Kendala dari aspek regulasi yaitu turunnya Inpres di tengah tahun, terdapatnya perubahan regulasi baru, yang mengharuskan terjadinya perubahan dalam eksekusi kegiatan, atau regulasi yang terlambat terbit.

f. Sinkronisasi dari pemda dan satker di bidang Jalan dilakukan melalui pembagian lokasi dan fokus pembangunan antara belanja K/L dan DAK Fisik di daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui dialog dan pertemuan rutin antara pemerintah daerah dan Kementerian PUPR.

g. Sinkronisasi juga dilakukan pada bidang Kesehatan melalui koordinasi rutin antara K/L dan pemda serta pembagian fokus peningkatan layanan antara belanja pemerintah pusat dan belanja DAK Fisik.

h. Upaya harmonisasi antara belanja Kementerian Pertaniaan dan DAK Fisik bidang pertanian di wilayah Kepri dilakukan melalui pembagiaan fokus pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kapasitas pertanian di wilayah Kepri. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan pertemuan dan diskusi bersama antara Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian di Wilayah Kepri.

Analisis Tematik: Sinergi Pusat-Daerah Dalam Upaya Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berdaya Saing

a. Di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat *gap* kesejahteraan yang cukup lebar antara satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Sebagai contoh, Kota Batam dengan nilai IPM tertinggi 81,67 dan Kab. Lingga dengan nilai IPM terendah 64,06.

b. Rata-rata harapan lama sekolah masyarakat Prov. Kepri di atas rata-rata nasional menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu di Prov. Kepri selama 13,10 tahun (setara Diploma 1). Rata-rata lama sekolah masyarakat Prov. Kepri 8,83 tahun atau lebih lama 0,4 tahun dari nasional menunjukkan rata-rata masyarakat Prov. Kepri tamat sekolah sampai dengan SD dan tidak sampai tamat SMP.

c. Rata-rata jumlah penduduk usia kerja periode 2018-2022 sebanyak 244.111 orang dengan kontribusi 0,12% dari rata-rata nasional. Kab. Kep. Anambas memiliki jumlah terkecil di tahun 2018 dan Kota Batam yang tertinggi di tahun 2022.

d. Rata-rata jumlah tenaga kerja yang menamatkan pendidikan tinggi di level Diploma dan Universitas berkontribusi sebesar 12 persen dari rata-rata jumlah tenaga kerja level nasional; yang menamatkan SMA dan SMK sebesar 12,6 persen dari jumlah tenaga kerja level nasional; dan di bawah tingkat SMA sebesar 9 persen dari rata-rata tenaga kerja level nasional.

e. Berdasarkan analisis *scatter plot*, Belanja DAK Fisik, Belanja DAK Non Fisik Pendidikan dan Belanja PP KRO SDM menunjukkan hubungan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS).

f. Berdasarkan analisis regresi korelasi (*panel data*) dengan *Random Effect Model* dan *Fixed Effect Model* diperoleh hasil sebagai berikut:

    1) Pengaruh Belanja DAK Fisik, Belanja DAK Non Fisik berupa BOS dan BOP, Belanja PP KRO SDM menunjukkan hasil positif dan signifikan secara statistik terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    2) Pengaruh Belanja DAK Fisik dan Belanja DAK Non Fisik menunjukkan hasil positif tapi tidak signifikan secara statistik terhadap rata-rata lama sekolah (RLS) sedangkan Belanja PP KRO SDM menunjukkan pengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap RLS.

    3) Pengaruh Belanja DAK Fisik dan belanja PP KRO SDM menunjukkan hasil positif dan signifikan secara statistik terhadap harapan lama sekolah (HLS) sedangkan Belanja DAK Non Fisik menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap HLS.

g. Berdasarkan analisis dengan menggunakan metode *Structural Equation Model*, diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Belanja Pemerintah pada sektor pendidikan, seperti DAK Non Fisik dan Belanja KRO Pendidikan pada K/L berdampak signifikan positif terhadap peningkatan kualitas SDM, yang ditunjukkan dengan peningkatan IPM dan RLS.

2) Indikator Kualitas SDM berdampak signifikan positif pada peningkatan TPT dan TPAK di wilayah Kepri. Setiap peningkatan kualitas SDM, berdampak pada peningkatan TPT dan TPAK, salah satunya dipengaruhi oleh karakteristik pengangguran di wilayah Batam yang didominasi oleh lulusan SMA, namun belum memiliki kualifikasi *skill* yang sesuai dengan kebutuhan industri (*skill mismatch*).

3) Investasi memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Indikator Pengangguran, maka peningkatan investasi berdampak pada penurunan Indikator Pengangguran di Kepri. Kondisi ini sesuai dengan teori bahwa peningkatan Investasi akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, yang berdampak pada penurunan TPT di wilayah Kepri.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kajian fiskal regional triwulan IV 2023 diberikan rekomendasi kepada pihak-pihak sebagai berikut:

Kepada Pemerintah Pusat

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran

   a. Pemerintah pusat, khususnya dalam hal ini Kementerian Keuangan agar melakukan sosialisasi dan edukasi KEM PPKF kepada seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah dalam rangka sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah.

   b. Pemerintah Pusat melakukan pemetaan, koordinasi dan dialog rutin untuk melakukan harmonisasi belanja dan RO satker sehingga tidak terjadi duplikasi antara belanja K/L dan pemda.

2. Aspek Pendapatan

   a. Selain pembinaan terhadap BLU baru, Kanwil DJPb juga dapat mengawal proses dan mendorong percepatan perubahan status satker PNBP yang berpotensi untuk menjadi BLU. Dengan perubahan status menjadi BLU dengan fleksibiltasnya, diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

   b. Pemerintah Pusat dapat mendorong promosi potensi investasi, termasuk paket kebijakan fasilitas fiskal yang dapat dinikmati oleh investor di Kepri, sehingga mendorong

investor-investor baru. Setiap investasi yang masuk ke wilayah Kepri dapat digunakan untuk memperkecil *Human Capital Gap* dan *Infrastructure Gap* yang ada di pada Kota Batam dengan wilayah lain yang terdapat di Kepri. Dampak dari investasi ini akan menjadi katalisator transformasi ekonomi khususnya di Kepri.

3. Aspek Belanja Negara

   a. Seluruh K/L terkait agar lebih matang dalam menyusun rencana penyerapan Belanja Modal termasuk menyusun strategi agar dapat mengantisipasi gagal kontrak dan keterlambatan penyelesaian pembangunan yang berdampak pada rendahnya realisasi Belanja Modal di tahun anggaran yang akan datang;

   b. Terhadap RO harmonis, dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

      1) Terkait dengan kendala di aspek penganggaran, satker perlu memperbaiki proses penganggaran, serta membangun koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dan bagian perencanaan, sehingga meminimalisir penyesuaian dan revisi anggaran. Satker agar melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan anggaran, mengingat kondisi geografis Kepri merupakan wilayah kepulauan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan pada daerah terluar menjadi sulit dilaksanakan. Satker perlu melakukan penyesuaian terhadap jadwal kegiatan apabila diperlukan. Satker agar melakukan koordinasi dengan K/L pusat dan KPPN terkait dengan pemberian anggaran yang dilaksanakan pada akhir tahun dengan kondisi-kondisi tersebut.

      2) Terkait dengan kendala pada aspek eksekusi kegiatan, satker agar melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan timeline pekerjaan. Satker juga perlu mempersiapkan mitigasi permasalahan dengan memperhitungkan musim di wilayah kepulauan, melalui koordinasi bersama pihak Stasiun Meteorologi terdekat. Terkait dengan banyaknya pihak yang terlibat dan penolakan, satker dapat bekerjasama dengan pemda dan pihak-pihak terkait lainnya untuk membantu menjalin komunikasi dan koordinasi.

      3) Terkait dengan kendala pada aspek SDM, satker perlu mengoptimalkan SDM yang tersedia dengan meningkatkan kapasitas, melalui pelatihan pemanfaatan teknologi atau alat yang lebih efisien, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efektif. Perlu dilakukan internalisasi pengetahuan di satker agar pergantian pejabat tidak menjadi kendala. Peningkatan kapasitas SDM juga dapat menjadi solusi, dengan memberikan pelatihan terkait proses penganggaran yang tepat dan optimal. Pelatihan lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat diterapkan, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan lebih cepat dan efisien dan mengatasi masalah ketersediaan SDM.

      4) Terkait dengan kendala aspek pengadaan barang dan jasa, penyediaan barang dan jasa dapat dilakukan melalui e-catalog dan dicari konsultan lain yang lebih kooperatif. Untuk menekan biaya logistik, Pemerintah Pusat dan Daerah dapat bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan/atau perusahaan penyedia jasa pengiriman laut/*shipping* yang memiliki armada kapal berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar untuk mempermudah pergerakan barang-barang logistik oleh

pelaku usaha dan meningkatkan konektivitas antar pulau. Selain itu, hal ini akan sangat membantu proses pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh satuan kerja pemerintah pusat yang berada di Kepri.

5) Terkait dengan kendala regulasi, satker agar melakukan koordinasi dengan K/L pusat dan pihak terkait lainnya.

c. Beberapa anggaran belum dapat direalisasikan karena terdapat 1) blokir anggaran dan 2) belum terdapat petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan. Satker perlu mempercepat penyelesaian blokir anggaran dengan proaktif berkoordinasi ke tingkat wilayah hingga Eselon I, dan KPPN. Terkait kegiatan yang menunggu petunjuk teknis, satker dapat melakukan persiapan pada aspek-aspek tertentu yang dapat dilakukan tanpa petunjuk teknis.

d. Pemerintah pusat perlu memerhatikan akurasi pemberian dana transfer pada tiap-tiap daerah, melalui analisis kebutuhan daerah. Sebab, terdapat daerah yang membutuhkan dana transfer pada program tertentu namun tidak mendapatkan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.

4. Aspek Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah

a. Pemerintah Pusat dapat berkoordinasi dengan PT SMI dan pihak lainnya untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pemda terkait alternatif skema *creative financing* dengan memperhatikan kapasitas fiskal dan karakteristik daerah.

b. Pemerintah Pusat (dalam hal ini salah satunya adalah Kemnterian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan) dapat menjadi fasilitator bagi pemda untuk dapat menerapkan pola pembiayaan KPBU sebagai alternatif *creative financing* untuk mendanai proyek infrastruktur dengan PT SMI dengan pemda terlebih dahulu melakukan *benchmarking* ke provinsi yang telah berhasil melakukannya seperti Provinsi Jawa Barat.

Kepada Pemerintah Daerah

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran

a. Pemerintah Daerah melakukan pemetaan, koordinasi dan dialog rutin untuk melakukan harmonisasi belanja dan RO satker sehingga tidak terjadi duplikasi antara belanja K/L dan pemda.

b. Dalam rangka menyelaraskan RPJMN dan RPJMD serta meningkatkan kualitas *mandatory spending* pendidikan dan kesehatan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas SDM daerah, pemda perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Melakukan *updating budget tagging* dan *budget tracking* untuk mengidentifikasi subkegiatan yang berdampak kepada kualitas belanja wajib pendidikan dan kesehatan.

2) Mengidentifikasi program, kegiatan dan output yang menjadi Prioritas Nasional.

3) Mememetakan dan memastikan program, kegiatan dan output dalam RPJMD dan RKPD telah sesuai dengan RPJMN dan RKP.

4) Menyampaikan dalam narasi dan matriks RKPD terkait dukungan terhadap Prioritas Nasional.

2. Aspek Makro Ekonomi
   a. Pemda melakukan pemetaan dengan pelaku usaha/industri terkait dengan kebutuhan *skill* tenaga kerja sehingga diperoleh data dan informasi *skill* yang dibutuhkan sehingga tidak lagi terjadi *skill mismatch*.
   b. Dalam menurunkan TPT di Kepri, Pemda perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk membangun SMK dan Politeknik dengan jurusan/bidang yang sesuai dengan kebutuhan dan industri di Kepri, karena saat ini belum ada sekolah/politeknik yang dapat memenuhi kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh industri di Kepri. Pemda juga dapat memetakan kebutuhan SDM pada industri unggulan Kepri dan bekerja sama dengan melaksanakan Balai Latihan Kerja (BLK), serta berkoordinasi dengan universitas/politeknik di daerah untuk menyediakan kurikulum dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan SDM di lingkup Kepri.
   c. Pemda dapat bekerjasama dengan pelaku usaha/industri untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga dihasilkan tenaga kerja yang sesuai dan dapat langsung dipekerjakan maka peningkatan investasi dapat meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
3. Aspek Pendapatan Daerah
   a. Penurunan Harga CPO di pasar global menurunkan penerimaan Bea Keluar. Pemerintah perlu mendorong komoditas lain yang dapat meningkatkan ekspor yang akhirnya meningkatkan bea keluar. Misalnya dengan terus mendukung dan memfasilitasi agar pengusaha ayam yang melakukan ekspor perdana di Bulan Mei 2023 dapat melakukan ekspor secara rutin bulanan. Selain itu, pemerintah dapat mengembangkan potensi komoditas ekspor lainnya, seperti hasil budidaya perikanan (ikan bawal bintang) karena karakteristik Kepri sebagai daerah kepulauan.
   b. Kebijakan untuk menyesuaikan tarif pajak reklame terbukti efektif untuk meningkatkan PAD dari pajak reklame. Pemerintah daerah agar mengevaluasi tarif pajak reklame daerah masing-masing. Pemda dapat melakukan penyesuaian terhadap ketentuan tarif pajak yang dinilai tidak sesuai dengan keadaan terkini. Kebijakan untuk mengevaluasi tarif pajak reklame tersebut dapat juga diterapkan pada pajak lain yang perlu penyesuaian tarif.
   c. Kebijakan untuk menertibkan reklame ilegal yang dilakukan oleh Pemko Tanjungpinang juga dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Penertiban tersebut juga dapat dilakukan terhadap sumber PAD lainnya, tidak terbatas pada penertiban reklame ilegal. Misalnya penertiban izin Perizinan Bangunan Gedung.
   d. Pemda perlu melakukan upaya peningkatan PAD dengan cara:
      1) Meningkatkan basis data perpajakan daerah
      2) Melakukan ekstensifikasi pajak
      3) Mengembangkan aplikasi dan sistem yang mendukung kemudahan administrasi dan pembayaran pajak bagi wajib pajak dan pemda dengan tujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah

4) Meningkatkan pemungutan pajak daerah melalui kerja sama pemungutan pajak dan sinergi pemungutan pajak daerah provinsi dan kabupaten/kota serta mengotimalkan data dari pemerintah pusat, pemda lain, serta pihak ketiga.
5) Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan perda yang telah ditetapkan yang mengacu kepada UU HKPD.
6) Pemda dapat melakukan *mapping* potensi investasi dan pengembangan sektor perekonomian potensial daerah serta membentuk tim *taskforce* peningkatan PAD lintas sektor untuk dapat meningkatkan PAD.
7) Pemda dapat memberikan insentif pajak daerah dan retribusi daerah kepada pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagai wujud dukungan kemudahan usaha dan investasi serta untuk mendukung pencapaian program prioritas daerah dan nasional. Efek dari pemberian insentif yaitu akan mendorong *competitive advantage* pertumbuhan ekonomi daerah yang akan meningkatkan PAD.

e. Pemda perlu melakukan upaya peningkatan PDRB per kapita, yaitu Pemda melakukan analisis sektor ekonomi dan investasi potensial untuk pengembangan daerah dan peningkatan lapangan pekerjaan.
f. Pemda dapat mendorong promosi potensi investasi, termasuk paket kebijakan fasilitas fiskal yang dapat dinikmati oleh investor di Kepri, sehingga mendorong investor-investor baru. Setiap investasi yang masuk ke wilayah Kepri dapat digunakan untuk memperkecil *Human Capital Gap* dan *Infrastructure Gap* yang ada di pada Kota Batam dengan wilayah lain yang terdapat di Kepri. Dampak dari investasi ini akan menjadi katalisator transformasi ekonomi khususnya di Kepri.
g. Pemda perlu mengidentifikasi sektor-sektor potensial daerah dan wilayah yang dapat dikembangkan. Contohnya, di Kabupaten Kepulauan Anambas, Lingga dan Natuna terdapat potensi pariwisata, maka pemerintah daerah dapat mengembangkan *master plan* untuk pembiayaan infrastruktur di sekitar wilayah potensi pariwisata untuk dapat dibiayai dengan sinergi beberapa alternatif pendanaan, misalnya pembiayaan proyek tersebut dibagi pembiayaannya oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Belanja Kementerian/Lembaga serta kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha/Swasta. Pemda dapat berupaya juga untuk meningkatkan potensi investasi di daerah.
h. Dalam mendukung sektor Industri Pengolahan dan Konstruksi, Pemerintah telah menyediakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan daerah *Free Trade Zone* (FTZ) dengan berbagai kemudahan dan insentif fiskal yang diberikan. Saat ini hanya kota Batam yang merupakan wilayah FTZ secara menyeluruh, sehingga dalam upaya mengoptimalisasikan dukungan fiskal dan kemudahan berusaha untuk sektor unggulan, diharapkan pemerintah dapat memperluas FTZ di keseluruhan wilayah Kabupaten Karimun, Bintan, dan Tanjungpinang agar dapat meningkatkan realisasi investasi dan mendorong pemerataan perekonomian di Kepri.

3. Aspek Belanja Daerah

a. Dalam rangka meningkatkan IPM daerah, pemda dapat mengoptimalkan belanja daerah fungsi Kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan layanan fasilitas kesehatan, menurunkan tingkat kematian ibu dan bayi, dan menurunkan jumlah balita kekurangan gizi.

b. Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, pemda dapat mengoptimalkan belanja modal infrastruktur dan konektivitas dalam rangka penyediaan infrastruktur dan konektivitas transportasi untuk menarik investor ke daerah.

c. Untuk menekan biaya logistik, Pemerintah Pusat dan Daerah dapat bekerjasama dengan maskapai penerbangan dan/atau perusahaan penyedia jasa pengiriman laut/*shipping* yang memiliki armada kapal berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar untuk mempermudah pergerakan barang-barang logistik oleh pelaku usaha dan meningkatkan konektivitas antar pulau. Selain itu, hal ini akan sangat membantu proses pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh satuan kerja pemerintah pemerintah daerah yang berada di Kepri.

4. Aspek Surplus/Defisit dan Pembiayaan Daerah

a. Pemda dapat mulai melakukan opsi pembiayaan seperti pinjaman daerah, serta penerbitan sukuk dan obligasi daerah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kesinambungan fiskal serta memastikan kemampuan daerah untuk membayar pokok pinjaman beserta bunga dan kemampuan untuk membayar investor bagi sukuk dan obligasi daerah.

b. Pemda dapat melakukan kolaborasi dengan perusahaan yang beroperasi di kabupaten/kota untuk melakukan *creative financing*, dengan memanfaatkan program *Corporate Social Responsibility* sebagai dukungan peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi di daerah.

c. Pemerintah Daerah juga dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak bantuan untuk dapat difasilitasi untuk dapat menerapkan pola pembiayaan KPBU sebagai alternatif *creative financing* untuk mendanai proyek infrastruktur dengan PT SMI dengan pemda terlebih dahulu melakukan *benchmarking* ke provinsi yang telah melakukannya seperti Provinsi Jawa Barat.

Kepada Kanwil DJPb Prov Kepri

1. Aspek Perencanaan dan Penganggaran
   a. KPPN Tanjungpinang dan Batam perlu melakukan pengawalan anggaran mulai dari proses perencanaan DIPA, terbitnya DIPA dan pelaksanaan kegiatan pada satuan kerja terkait. Kemudian memastikan satuan kerja dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan timeline kegiatan.
   b. Kanwil DJPb Prov. Kepri agar melakukan koordinasi dengan pemda untuk dapat memperoleh dokumen risalah rapat penyusunan KUA-PPAS.
2. Aspek Pendapatan Negara
   a. Pada tahun 2023, terdapat tiga BLU baru di Kepri. Kanwil DJPb sebagai Pembina BLU di daerah agar dapat segera melakukan pembinaan untuk melakukan percepatan peningkatan penerimaan BLU dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan BLU.
   b. Selain pembinaan terhadap BLU baru, Kanwil DJPb juga dapat mengawal proses dan mendorong percepatan perubahan status satker PNBP yang berpotensi untuk menjadi

BLU. Dengan perubahan status menjadi BLU dengan fleksibiltasnya, diharapkan dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

c. Kanwil DJPb Prov. Kepri dapat menyelenggarakan FGD untuk membantu pemda mengidentifikasi potensi investasi dan meningkatkan PAD pemda.

3. Aspek Belanja Negara

a. Kantor Wilayah DJPb Kepri hendaknya tetap melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres penyaluran Dana Transfer ke Daerah, progres kontrak atau proyek yang dibiayai dengan Dana Transfer, capaian output atas penggunaan Dana Transfer serta mempercepat penyerapan Dana Transfer ke Daerah.

b. KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam juga perlu senantiasa mengingatkan satuan kerja terkait agar segera menyelesaikan blokir dan revisi anggaran, dengan mendorong satuan kerja untuk bersikap proaktif berkoordinasi hingga ke unit eselon I.

c. KPPN Tanjungpinang dan KPPN Batam juga perlu memberikan arahan kepada satuan kerja terkait agar dapat menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran dengan memprioritaskan kegiatan yang memberikan *output* dan *outcome* yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak tercapainya target.

Daftar Pustaka

Peraturan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2014.Surat Edaran Nomor SE-43/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

----------. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.07/2015 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2016*. Berita Negara RI Tahun 2015, No. 1181. Jakarta:Kementerian Keuangan.

Kementerian Sekretariat Negara. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

----------. 2022. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

Laporan dan Buku

Badan Pusat Statistik . 2022. Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka 2022. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2023. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2022. Laporan Inflasi IHK Bulan Desember 2023. Batam: *Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.*

----------. 2023. *PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2023. *Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Riau Triwulan IV 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Perkembangan Nilai Tukar Petani Kepulauan Riau Desember 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Perkembangan Nilai Tukar Petani dan Harga Produsen Gabah September 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2023. *Profil Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau Maret 2023*. Tanjungpinang: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

Daftar Pustaka

----------. 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

----------. 2023. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023*. Tanjungpinang: BadanPusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2023. *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Provinsi Kepulauan Riau. 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2021. *Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

----------. 2021. *Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan*. Tanjungpinang: Provinsi Kepulauan Riau.

Jurnal

Haryono, S., & P. Wardoyo. 2012. Struktural Equation Modelling Untuk Penelitian Manajemen Menggunakan Amos 18.00. Bekasi: PT. Intermedia Personalia Utama.

Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford Publications.

Cahyo, R. D. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, 95 Dan Rata-Rata Lama Prndidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2009-2014. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, 4(2).

Ramiayu, D.D. (2016). Analisis Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Jawa Timur. Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 4 (2), 1-16.

Berita

Ogen, 2023. *Pemprov Kepri bangun lima Pelabuhan senilai Rp38 miliar di 2023*. Antaranews.com. Diakses pada 26 Februari 2024 pada tautan https://kepri.antaranews.com/berita/173850/kepri-bangun-lima-pelabuhan-senilai-rp38-miliar-di-2023

Pemprov Kepri. 2024. *Dalam Waktu Singkat Pembangunan di Kepri Serba Meningkat.* Berita Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Diaskes pada 26 Februari 2024. Pada tautan https://kepriprov.go.id/berita/gubernur/dalam-waktu-singkat-pembangunan-di-kepri-serba-meningkat

Daftar Istilah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah. APBD berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBD,perubahan APBD (APBD-P), dan pertanggungjawaban APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN (APBN-P), dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Badan Layanan Umum (BLU) instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa keleluasaan untuk menggunakan langsung pendapatannya (tanpa harus menyetor ke Rekening Kas Umum Negara/RKUN) dan menetapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Contoh: BLU Perguruan Tinggi Negeri, BLU Rumah Sakit Pemerintah, dan BLUD Pengelola Dana Bergulir).

Bea Masuk (BM)/Impor Duty adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang memasuki daerah pabean. Pengenaan bea masuk biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, memberikan proteksi terhadap produksi local, dan/atau untuk menghukum negaratertentu dengan mengenakan tarif yang sangat tinggi untuk negara tersebut.

Bea Keluar (BK)/Export Duty adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang yang keluar dari daerah pabean. Saat ini, pengenaanbea keluar sudah jarang diterapkan karena tidak sejalan dengan kebijakan berorientasi ekspor yang membutuhkan harga kompetitif di pasar internasional.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan (Contoh: minuman beralkohol dan tembakau).

Cumulative to Cumulative (C to C) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis kumulatif waktu. (Contoh: penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.d Triwulan IV 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada Triwulan I s.dTriwulan IV 2021)

Daftar Istilah

Dana Abadi Daerah adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dana pada ABPN yang dialokasikan untuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pembangunan fisik. (Contoh penggunaan: gedung sekolah, infrastruktur irigasi, energy skala kecil, prasarana pemerintah daerah, infrastruktur jalan, transportasi perdesaan sarpras pasar,dan lain sebagainya).

Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dana pada ABPN yang dialokasikanuntuk ditransfer kepada pemerintah daerah dengan penggunaan yang sudah ditentukansebelumnya dan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan non fisik. (Contoh penggunaan: bantuan operasional sekolah (BOS), tunjangan profesi guru PNSD, bantuan operasional kesehatan, dan lain sebagainya).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana transfer yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadisalah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dariDBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. kenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM,

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu

Defisit/Surplus Anggaran adalah kebijakan atau realisasi pengeluaran dan penerimaan negara. Pengeluaran lebih besar dari penerimaan disebut sebagai defisit anggaran, sedangkan pengeluaran lebih kecil dari penerimaan disebut sebagai surplusanggaran.

Daftar Istilah

Free Trade Zone (FTZ)/Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) merupakan kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai.

Fixed Effect Model **(FEM)** merupakan pendekatan bahwa suatu objek memiliki konstanta yang tetap besarannya untuk berbagai periode waktu

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (HPKD) merupakanpendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta atau kelompok usaha masyarakat.

High Base-effect **a**dalah kecenderungan pertumbuhan dari nilai yang kondisi awalnya tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Indeks Williamson merupakan instrumen pengukuran dalam pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi untuk mengukur kesenjangan yang ada pada pembangunan pada suatu wilayah.

Indeks Entropi Theil merupakan instrumen pengukuran untuk menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan memberikan gambaran lebih rinci mengenai ketimpangan sosial.

Industri Kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memilikinilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Industri Menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus- menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Inflasi Tahun Kalender adalah perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari tahun ini sampai dengan bulan ini tahun ini). Ini dihitung dari persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.

Daftar Istilah

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)/Special Economic Zone (SEZ) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Nega Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu..

Ketimpangan Fiskal Vertikal adalah perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara pemerintah pusat dengan tingkat pemerintahan yang lebih rendah.

Ketimpangan Fiskal Horizontal adalah perbedaan kapasitas/potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (LLPAD) merupakan pos penganggaran penerimaan asli daerah yang tidak termasuk ke dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan HPKD. LLPAD meliputi jasa giro, bunga, tuntutan ganti rugi, denda pajak, denda retribusi, pendapatan BLUD, dan lain sebagainya.

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah (LLPD) merupakan pos penerimaan Pemdauntuk menampung penerimaan selain PAD dan Dana Perimbangan. Pos LLPD meliputihibah, dana darurat, DBH dari provinsi, bantuan keuangan, dan lain sebagainya.

Month to Month (mtm) adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis bulanan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada bulan September 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada bulan Agustus 2022.

Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

P-value adalah ukuran yang digunakan dalam statistik untuk menentukan seberapa signifikan hasil suatu uji statistik.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)/Property Tax adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Pajak Daerah/Local Tax adalah pajak yang kewenangan pemungutannya berada di tangan Pemerintah Daerah. Pajak daerah meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir dan sebagainya.

Pajak Penghasilan (PPh)/Income Tax adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Pajak Perdagangan Internasional (PPI) adalah semua penerimaan negara yangberasal dari bea masuk dan bea keluar.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)/Value Added Tax (VAT)/Goods and Services Tax (GST) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam

peredarannya dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Path Coefficients merupakan ukuran statistik yang digunakan dalam analisis jalur (path analysis) dan model struktural untuk menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antara variabel-variabel dalam model.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kelompok pendapatan pemerintah daerahyang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan, dan LLPAD.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusatyang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

Pengeluaran Konsumsi - Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT.

Pengeluaran Konsumsi – Rumah Tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi.

Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai tambah dari semua barang dan jasa (output) yang diproduksi oleh suatu negara pada periode waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah dari semua barang danjasa (output) yang diproduksi oleh suatu wilayah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pada periode waktu tertentu

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) adalahPDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya berdasarkan harga berlaku.

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) adalahPDRB yang menghitung nilai barang dan jasanya dengan menggunakan harga tahun tertentu

sebagai dasar perhitungannya. Dengan kata lain, PDRB ADHK murni menghitung nilai tambah output tanpa memperhitungkan kenaikan/penurunan harga.

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita (PDRB/Kapita) merupakan nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. PDRB/Kapita digunakansebagai indikator standar hidup penduduk suatu wilayah.

Quarter to Quarter (qtq) mengacu pada perubahan atau pertumbuhan antara satu kuartal dengan kuartal sebelumnya. Contohnya adalah pada saat melihat pertumbuhan PDRB dari Triwulan II ke Triwulan III.

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi parkir, retribusi pelayanan pasar, retribusi terminaldan sebagainya.

Satuan Kerja (Satker) adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Dalam konteks akuntansi, kata Satker ini bisa dipersamakan dengan entitas.

Scatterplot adalah diagram matematika yang menggunakan koordinat Cartesian untuk menampilkan nilai dari dua variabel yang khas dalam satu kumpulan data.

Sinergi Pendanaan adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah.

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurangantara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.Selisih positif (sisa lebih) dapat digunakan untuk membiayai defisit anggaran di tahun anggaran berikutnya.

Skala Ekonomi/Economy of Scale merupakan fenomena turunnya biaya produksi perunit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi (output). Dalam konteks industrialisasi, skala ekonomi menciptakan efisiensi bagi suatu unit produksi sampai dengan titik tertentu.

Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Structural Equation Modeling (SEM) adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel yang kompleks dalam suatu model secara simultan.

Tax Ratio adalah rasio yang membandingkan antara realisasi pajak dengan PDB/PDRBpada periode yang sama. Rasio tersebut menjadi indikator keberhasilan penggalian potensi pajak.

Tingkat Kemiskinan/Persentase Penduduk Miskin/Head Count Index (HCI-Po) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Daftar Istilah

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. TPAK dihitung dengan cara membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahundan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguranterbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. TPT dihitung dengan cara membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa banyak peluang pekerjaan yang tersedia dalam suatu wilayah atau industri pada suatu waktu tertentu.

Tugas Pembantuan (TP) adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Untuk pelaksanaanya, diberikan dana tugas pembantuan dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran.

Vokasional dalam konteks pendidikan/pelatihan merupakan pendidikan/pelatihan yanglebih terfokus pada sisi keahlian atau kemahiran praktis dalam berkerja dibandingkan sisi akademik. Di era cepatnya perubahan teknologi seperti saat ini, kebutuhan akan keahlian seorang pekerja seringkali berubah-ubah sehingga permintaan akan pendidikan/pelatihan vokasional terus meningkat.

Volatilitas/Volatility dalam konteks ekonomi merupakan kecenderungan suatu variabeluntuk berubah-ubah. Semakin tinggi volatilitas, semakin sering suatu variabel berubah-ubah.

***Year on Year* (yoy)** adalah metode perbandingan dua peristiwa yang diukur dengan basis tahunan. (Contoh: penerimaan pemerintah pada triwulan III 2022 dibandingkan dengan penerimaan pemerintah pada triwulan III 2021).

***Random Effect Model* (REM)** merupakan pendekatan untuk mengestimasi data panel yang residual memiliki kemungkinan saling berhubungan antar waktu dan individu.

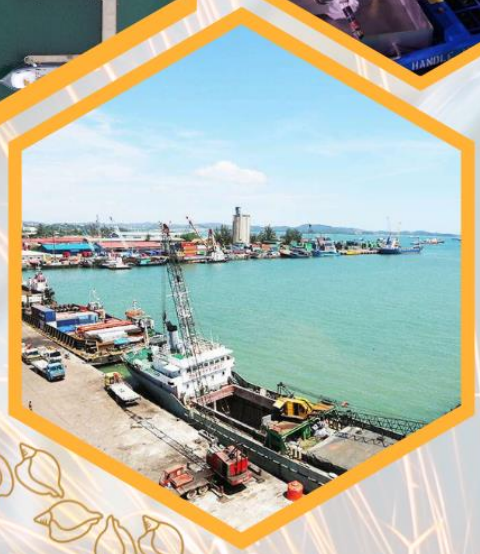

Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau
Jalan Sultan Muhammad Syah Dompak
Kota Tanjungpinang, Prov. Kep. Riau, 29124
djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/kepri/
djpbkepri
djpbkepri
Kanwil DJPb Kepulauan Riau

Konten Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahunan 2023 dilindungi oleh Undang-Undang, hak cipta melekat pada Kanwil DJPb Kepri. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin dari Kanwil DJPb Kepri.